

KABUPATEN PADANG LAWAS

KEBIJAKAN UMUM APBD



TAHUN ANGGARAN 2026



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peluang usaha, kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada prioritas pembangunan berbasis inspirasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pembangunan di segala bidang dengan tujuan agar masyarakat merasa lebih aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupannya serta dapat berkarya nyata dalam membangun daerahnya.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perencanaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti dalam operasionalisasi anggaran daerah lebih ditekankan pada alokasi sumber daya dan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Penyusunan Kebijakan Umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran yang memuat target dari pencapaian dari kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah melalui program-program yang akan dilaksanakan dan disertai dengan kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya untuk masa satu tahun anggaran.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026 yang dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan memiliki kedudukan yang strategis, maka dalam penetapan kebijakan-kebijakan yang tertuang didalamnya disepakati bersama secara oleh Dewan legislatif dan eksekutif, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan



Daerah.

Substansi dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat kesepakatan yang merupakan petunjuk dan ketentuan umum sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R- APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya dijabarkan dan dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026, yang akan dijabarkan lebih lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas bertujuan untuk :

1. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2026;
2. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan DPRD Kabupaten Padang Lawas dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel;

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



19. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor



- 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 Nomor 01).
33. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 nomor 30).



BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan fondasi utama dalam memahami karakteristik wilayah serta potensi dan tantangan pembangunan sebuah daerah atau negara. Keduanya saling terkait erat dan mempengaruhi arah serta strategi pembangunan secara menyeluruh.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Lahirnya Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007. Dimulai dengan 9 kecamatan, wilayah ini kemudian berkembang pesat hingga mencakup 17 kecamatan. Jantung pemerintahan Kabupaten Padang Lawas berdenyut di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon. Membentang seluas 3.912,18 km², batas-batas wilayah Padang Lawas bersentuhan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara di utara, Kabupaten Rokan Hulu di timur, Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat) dan Kecamatan Siabu (Mandailing Natal) di selatan, serta Kecamatan Gunung Malintang, Sayur Matinggi, dan Batang Angkola (Tapanuli Selatan) di barat. Peta wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada gambar berikut ini. Wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 304 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Hutaraja Tinggi adalah wilayah yang paling luas di Kabupaten Padang Lawas yaitu sebesar 663,24 km², sementara Kecamatan Barumon Baru adalah kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya yaitu sebesar 13,73 km². Informasi mengenai peta administrasi dan luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Padang Lawas tersaji dalam gambar dan tabel berikut:



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Padang Lawas

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Distribusi Luas (%)
1	Sosopan	22	-	435,18	11,12
2	Ulu Barumun	15	-	207,43	5,30
3	Barumun	17	1	126,10	3,22
4	Barumun Baru	13	-	13,73	0,35
5	Barumun Selatan	11	-	109,87	2,81
6	Lubuk Barumun	24	-	289,58	7,40
7	Sosa	16	-	283,52	7,25
8	Sosa Julu	12	-	155,95	3,99
9	Ulu Sosa	11	-	211,67	5,41
10	Sosa Timur	13	-	159,55	4,08
11	Batang Lubu Sutam	20	-	184,75	4,72
12	Hutaraja Tinggi	26	-	663,24	16,95
13	Huristak	27	-	523,59	13,38
14	Barumun Tengah	29	-	119,40	3,05
15	Aek Nabara Barumun	25	-	329,36	8,42
16	Sihapas Barumun	13	-	48,25	1,23
17	Barumun Barat	10	-	51,01	1,30
	Kabupaten Padang Lawas	304	1	3.912,18	100

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

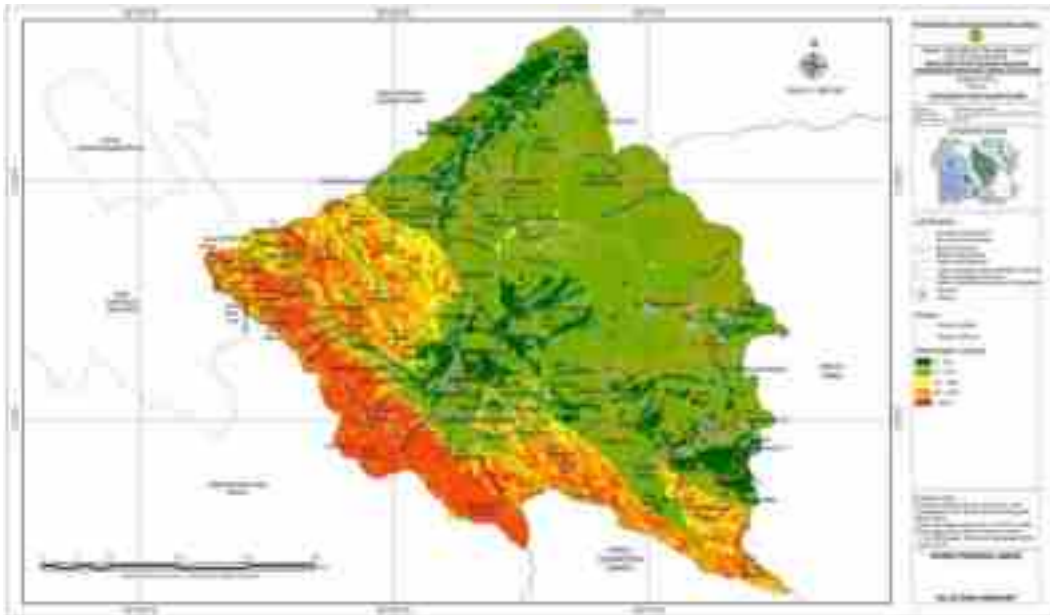
Letak geografis Kabupaten Padang Lawas adalah antara 0°45' LU - 1°33' LU dan 99°24' BT - 100°11' BT. Kabupaten Padang Lawas, dengan karakteristik geografisnya, memberikan kontribusi signifikan bagi wilayah sekitarnya dan Provinsi Sumatera Utara. Di bidang ekonomi, potensi pertanian dan perkebunan kelapa sawit serta karet menjadi motor penggerak utama, menyumbang pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung ketahanan pangan provinsi. Dari sisi infrastruktur, keberadaan jaringan transportasi strategis memfasilitasi konektivitas dan distribusi, mendorong pertumbuhan regional. Upaya konservasi sumber daya alam mencerminkan kontribusi lingkungan hidup kabupaten. Selain itu, potensi pariwisata alam dan budaya menjanjikan dampak ekonomi dan promosi daerah. Secara keseluruhan, Padang Lawas aktif berperan dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara di berbagai sektor.

D. Topografi dan Ketinggian Lahan

Secara geografis, Kabupaten Padang Lawas terbagi menjadi dua karakteristik utama. Wilayah timur, dengan topografi datar hingga landai (17,87% dari luas wilayah), memiliki tanah subur dan beriklim basah, namun menghadapi tantangan banjir dan kekeringan akibat kerusakan lingkungan. Sementara itu, wilayah barat didominasi pegunungan (66,13%

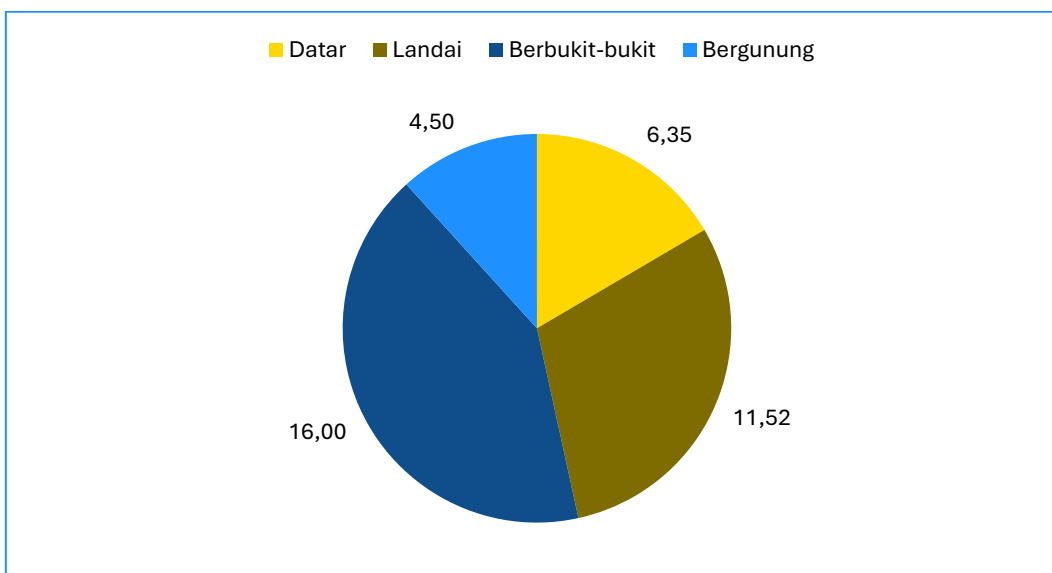


bergunung dan 16% berbukit) yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Area ini memiliki variasi kondisi tanah dan iklim, menyimpan potensi hidrologi, dan sebagian berfungsi sebagai zona konservasi DAS Barumun. Informasi mengenai kondisi dan persentase kemiringan lahan Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2. Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Padang Lawas

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038



Gambar 2.3. Persentase Kemiringan Lahan di Kabupaten Padang Lawas

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Ketinggian lahan di Kabupaten Padang Lawas berkisar antara 0 hingga 1.915 meter di atas permukaan laut (mdpl), menghasilkan variasi iklim yang signifikan. Wilayah dataran rendah memiliki ketinggian beberapa meter di atas permukaan laut dengan iklim cukup panas (hingga 34,4 °C). Sementara itu, daerah berbukit memiliki kemiringan landai dan beriklim sedang, dan wilayah dataran tinggi memiliki suhu minimal yang lebih rendah (hingga 17,7°C).



E. Geologi

Kabupaten Padang Lawas memiliki struktur geologi yang kompleks, didominasi oleh tiga formasi utama. Formasi pra-Tertier, batuan Permokarbon yang membentuk inti Pegunungan Bukit Barisan, merupakan lapisan tertua dan sebagian tertutup endapan dari zaman Tertier (sedimen) dan Kuarter (material vulkanis atau alluvium). Formasi ini dapat dijumpai di bagian selatan Kecamatan Sosa, Barumun, Ulu Barumun, dan Sosopan. Di atasnya, formasi Tertier terbagi menjadi Paleogen (Tertier tua) yang mengalami pelipatan okling dan tersebar di wilayah tengah hingga barat, serta Neogen (Tertier muda) yang ditemukan di beberapa kecamatan lainnya. Lapisan termuda adalah formasi Kuarter, yang tersusun atas batuan granit dan liparit, dan terdeteksi di wilayah perbatasan selatan Kecamatan Sosa, Barumun, dan Ulu Barumun. Struktur geologi Kabupaten Padang Lawas yang kompleks dan didominasi bentang alam perbukitan berpotensi menimbulkan tanah longsor, dengan sebagian besar Kecamatan Sosopan sebagai area rawan. Di sisi lain, kompleksitas geologi ini juga menyimpan potensi sumber daya mineral dan energi yang dapat dikembangkan, seperti timah, batu bara, dan bahan bakar fosil.

Kabupaten Padang Lawas menunjukkan keberagaman potensi sumber daya alam di sektor energi dan mineral. Potensi panas bumi sebagai energi alternatif sejajar dengan beberapa wilayah lain di Sumatera Utara. Cadangan minyak bumi sebesar 2000 MSTB telah terbukti dan diproduksi di Barumun Tengah. Batu bara ditemukan di lima belas titik wilayah, termasuk Sosopan, Ulu Barumun, dan Batang Lubu Sutam. Timah putih juga menjadi potensi bahan galian untuk industri dan konstruksi. Potensi kekayaan mineral dan energi Kabupaten Padang Lawas sangat beragam, mulai dari logam (emas, timah), non-logam (dolomit, bentonit, marmar, pasir kwarsa, kapur tohor), hingga sumber energi (batu bara, panas bumi, minyak dan gas bumi). Guna merealisasikan potensi ekonomi ini, diperlukan eksplorasi lanjutan untuk mengidentifikasi cadangan yang terukur dan layak untuk dikembangkan. Informasi lebih lanjut mengenai potensi pertambangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Potensi Pertambangan di Kabupaten Padang Lawas

No	Kecamatan	Potensi Pertambangan
1	Sosa	Batu Bara
2	Batang Lubu Sutam	Batu Bara, Timah, Emas
3	Hutaraja Tinggi	-
4	Lubuk Barumun	-
5	Ulu Barumun	Batu Bara, Batu Pasir, Timah, Emas
6	Sosopan	Batu Bara, Marmer, Kapur Tohor, Emas, Bentonite
7	Barumun Tengah	Minyak Bumi, Pasir Kuarsa, Laterit
8	Huristak	Laterit, Pasir Kuarsa

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018- 2038



C. Hidrologi

Kabupaten Padang Lawas memiliki potensi sumber air yang signifikan dari air permukaan (sungai, danau) dan air bawah tanah, yang terkelompok dalam DAS lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota, terutama DAS Barumon-Kualu (meliputi Barumon dan Aek Sosa). Data menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Padang Lawas tidak kritis (102.521,64 ha), dengan lahan sangat kritis terkecil (2.515,11 ha). Sungai-sungai besar seperti Barumon dan Sosa berpotensi sebagai sumber air untuk berbagai keperluan, namun degradasi lahan di hulu mengancam dengan risiko banjir saat musim hujan. Informasi lahan kritis berdasarkan DAS tersaji dalam tabel berikut:

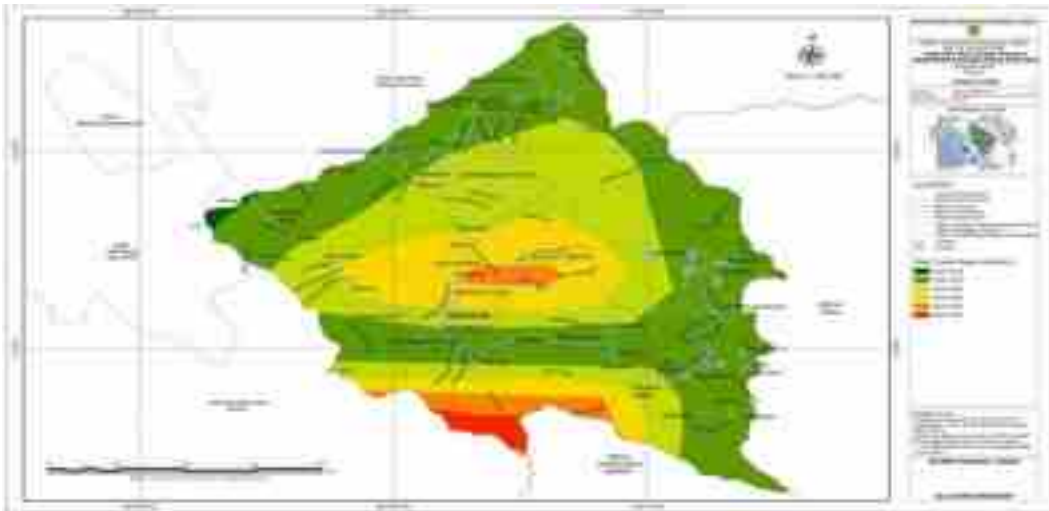
Tabel 2.3. Kondisi DAS terhadap Lahan Kritis di SWP Asahan Barumon Berdasarkan Daerah Administrasi Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara

Kategori Lahan	Padang Lawas	Sumatera Utara
Tidak Kritis	102.521,64	1.605.118,20
Potensial Kritis	82.679,32	1.023.269,34
Agak Kritis	26.026,61	1.015.544,40
Kritis	18.755,46	538.930,28
Sangat Kritis	2.515,11	235.628,02
Tubuh Air	1.016,07	141.910,42

Sumber: BPDAS Asahan Barumon (Review Lahan Kritis di SWP DAS Asahan Barumon) Tahun 2021

D. Klimatologi

Kabupaten Padang Lawas memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin pasat dan muson. Seperti wilayah lain di Indonesia, daerah ini mengalami dua musim utama, yaitu kemarau dan penghujan, dengan musim hujan berlangsung dari November hingga Februari. Pada tahun 2023, curah hujan di kabupaten ini meningkat menjadi 2.304,7 mm, dengan puncaknya di Desember (529,7 mm) dan terendah di Juni (32,9 mm). Jumlah hari hujan juga bertambah menjadi 219 hari, dengan Desember mencatat hari hujan terbanyak (29 hari) dan April paling sedikit (17 hari). Selain itu, penyinaran matahari tahun 2023 juga meningkat menjadi 63,7 jam, dengan durasi terpanjang di Juni (7,2 jam) dan terpendek di Januari (4,2 jam). Kondisi curah hujan di Kabupaten Padang Lawas tersaji pada gambar berikut:



Gambar 2.4. Peta Curah Hujan Kabupaten Padang Lawas

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Suhu dan kelembaban udara di wilayah ini terus menunjukkan tren kenaikan. Rata-rata suhu pada 2023 mencapai 26,1°C dengan kelembaban 80,03%. Suhu tertinggi terjadi pada Mei dan Juni (27,1°C), sedangkan terendah di Januari (25,2°C). Sementara itu, kelembaban udara paling tinggi terjadi di Desember (86,4%) dan terendah di Juni (73,6%).

E. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, maka luas kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas adalah sebesar 43.791 ha. Wilayah Kabupaten Padang Lawas yang termasuk dalam kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Peta potensi kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.5. Peta Potensi Kawasan Hutan Kabupaten Padang Lawas

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

1. Hutan lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Padang Lawas adalah seluas 43.791 ha. Kawasan hutan lindung ini terdapat di:

- a. Kecamatan Barumon dengan luas ± 2.692 ha;
- b. Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan luas ± 17.047 ha;
- c. Kecamatan Sosa dengan luas ± 21.422 ha;
- d. Kecamatan Sosopan dengan luas ± 2.025 ha;
- e. Kecamatan Ulu Barumon dengan luas ± 605 ha.

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Padang Lawas adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air ini umumnya terdapat di bagian hulu DAS Kualuh Barumon dan sistem DAS Rokan, yang terdapat di Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Lubuk Barumon, Kecamatan Ulu Barumon, Kecamatan Barumon, Kecamatan Sosa, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kecamatan Barumon Selatan, Kecamatan Batang Lubu Sutam dan Kecamatan Aek Nabara Barumon.

3. Kawasan perlindungan setempat

Kabupaten Padang Lawas terdapat 2 DAS yaitu DAS Kualuh Barumon dan DAS Rokan. Sungai ini memberi kemakmuran bagi masyarakat di sekitarnya untuk bercocok tanam dan sebagai sumber air minum atau air baku. Kawasan perlindungan setempat yaitu:

- a. Kawasan sempadan sungai, kawasan ini meliputi sungai-sungai yang berada di kabupaten, dengan ketentuan:



- 1) Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - 2) Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - 3) Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- b. Kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar mata air juga meliputi ketentuan yang sama dengan kawasan sempadan sungai yang berada di kawasan hutan lindung.
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas:
- a. Kawasan suaka margasatwa
Kawasan suaka alam di wilayah Kabupaten Padang Lawas mempunyai luas sebesar ±31.658 ha. Kawasan suaka alam ini terdapat di Kecamatan Barumon, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Ulu Barumon dan Kecamatan Barumon Selatan. Sedangkan kawasan suaka margasatwa yaitu Suaka Marga Satwa Barumon.
 - b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :
 - 1) Candi, meliputi Candi Simaputung di Kecamatan Barumon Tengah, Candi Tandihat (Jorang Balanga I, II, III) di Kecamatan Barumon Tengah, Candi Sisangkilon di Kecamatan Lubuk Barumon dan Candi Muara Gambaran di Kecamatan Batang Lubu Sutam;
 - 2) Rumah adat meliputi Bagas Godang Hasahatan Julu di Kecamatan Barumon, Bagas Godang Janjilobi di Kecamatan Barumon, Bagas Godang Unte Rudang di Kecamatan Barumon Tengah dan Bagas Godang Huta Nopan di Kecamatan Lubuk Barumon;
 - 3) Kearifan lokal meliputi Makam Parmata Sapihak di Kecamatan Barumon, Makam Bujing Sambilan Jogi di Kecamatan Lubuk Barumon, Makam Jired I, II, III di Kecamatan Sosopan.
5. Kawasan rawan bencana
Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Padang Lawas terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan kebakaran lahan dan kawasan rawan bencana angin puting beliung tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Lawas.
6. Kawasan lindung geologi
Kawasan lindung geologi meliputi kawasan yang memberikan



perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuan cekungan air tanah (CAT) Pekanbaru dan CAT Pasar Sibuhuan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038, kawasan budidaya terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas Kabupaten Padang Lawas seluas ± 39.249 ha, tersebar di Kecamatan Sihapas Barumon, Kecamatan Lubuk Barumon, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kecamatan Sosopan dan Kecamatan Ulu Barumon;
 - b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luas ± 99.511 ha, tersebar di Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Huristak, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kecamatan Lubuk Barumon dan Kecamatan Sosa.
2. Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah seluas $+8.782$ ha, tersebar di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Barumon Selatan, Kecamatan Barumon, Kecamatan Ulu Barumon, Kecamatan Sosa, Kecamatan Sihapas Barumon, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Aek Nabara Barumon dan Kecamatan Lubuk Barumon;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas ± 17.502 ha, tersebar di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Barumon Selatan, Kecamatan Barumon, Kecamatan Ulu Barumon, Kecamatan Sosa, Kecamatan Sihapas Barumon, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kecamatan Hutaraja Tinggi dan Kecamatan Lubuk Barumon;
 - c. Kawasan pertanian bagi komoditas tanaman pangan serta didukung prasarana irigasi teknis diarahkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang terdiri dari lahan basah, termasuk rawa dan pertanian lahan kering;
 - d. Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kawasan peruntukan perkebunan seluas $+119.848$ ha, tersebar di seluruh kecamatan.
4. Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Padang Lawas tersebar di seluruh kecamatan.
5. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

dikembangkan di seluruh kecamatan dan kawasan peruntukan budidaya perikanan dikembangkan di seluruh kecamatan.

6. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral dan kawasan pertambangan minyak bumi tersebar di seluruh kecamatan sedangkan untuk kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Padang Lawas berada di Kecamatan Sosa, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Ulu Barumun dan Kecamatan Sosopan.
7. Kawasan peruntukan industri terdiri dari industri besar, industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan.
8. Kawasan pariwisata di Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari 20 objek/kawasan seperti tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Objek/Kawasan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

No	Nama Desa	Kecamatan	Tempat Wisata	Jenis Wisata
1	Sayur Matua	Aek Nabara Barumun	Pertanian Berbasis Teknologi (Dewi Tani)	Wisata Agro
2	Aliaga	Hutaraja Tinggi	Danau Buatan	Wisata Buatan
3	Tamiang	Batang Lubu Sutam	Air Terjun Sampuran	Wisata Alam, Wisata Tirta.
4	Siparau	Barumun Tengah	Candi Sipamutung	Wisata Sejarah, Wisata Spritual, Wisata Budaya.
5	Paringgonan	Ulu Barumun	Aek Milas	Wisata Alam
6	Siraisan	Ulu Barumun	Aek Siraisan	Wisata Alam
7	Botung	Batang Lubu Sutam	Air Terjun Sipatabung	Wisata Alam, Wisata Tirta
8	Sihiuk	Lubuk Barumun	Air Terjun Sihiuk	Wisata Alam, Wisata Tirta
9	Hapung	Ulu Sosa	Aek Hapung	Wisata Alam
10	Parapat	Ulu Sosa	Goa Liang Namuap	Wisata Alam
11	Ujung Batu	Sosa	Danau Gayambang	Wisata Alam
12	Siborna	Sosa Julu	Aek Lakkut	Wisata Alam
13	Sangkilon	Lubuk Barumun	Candi Sangkilon	Wisata Sejarah, Wisata Spritual, Wisata Budaya
14	Sayur Mahincat	Barumun Selatan	Tor Sinaongan	Wisata Alam
15	Binabo Jae	Barumun Baru	Makam Ompung Parmata Sapihak	Wisata Sejarah
16	Hasahatan	Barumun Baru	Bagas Godang	Wisata Sejarah, Wisata Budaya.
17	Hutabaru Siundol	Sosopan	Sungai Oruon	Wisata Alam, Wisata Tirta
18	Padang Garugur	Barumun Tengah	Candi si Djoreng Belangah, Danau si Djoreng Belangah, Lubang Jepang dan Hulu Balang	Wisata Alam, Wisata Tirta, Wisata Sejarah
19	Binanga Tolu	Sosopan	Air Mancur dan Budidaya Ikan Air Tawar	Wisata Alam, Wisata Tirta
20	Ujung Batu III	Hutaraja Tinggi	Agro dan Kebudayaan	Wisata Agro

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

9. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas permukiman perkotaan seluas ±9.262 ha dan permukiman perdesaan seluas ±17.994 ha, tersebar di seluruh kecamatan.



2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Wilayah Kabupaten Padang Lawas berpotensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik geografis dan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah. Pengembangan potensi kewilayahan tersebut dilakukan berbasiskan kawasan sesuai dengan regulasi perencanaan, yaitu melalui penetapan kawasan-kawasan strategis kabupaten serta mendorong perwujudan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Koridor pembangunan kewilayahan dikembangkan dengan mengacu pada sistem wilayah atau sistem kota-kota di Kabupaten Padang Lawas yang diwujudkan dalam penetapan pusat-pusat kegiatan lokal dan mendorong terwujudnya pusat-pusat kegiatan nasional dan pusat-pusat kegiatan wilayah saling terkoneksi.

Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Padang Lawas ditetapkan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional sistem perkotaan di Kabupaten Padang Lawas adalah:

1. Tidak terdapat PKN di Kabupaten Padang Lawas;
2. Tidak terdapat PKW di Kabupaten Padang Lawas;
3. Kota Sibuhuan sebagai PKL.

Di samping itu untuk mengefektifkan pengembangan Kabupaten Padang Lawas, maka hierarki sistem kota atau pusat-pusat pelayanan tersebut dikelompokkan menjadi wilayah pengembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perwilayahan pengembangan tersebut, antara lain yaitu:

- Kedudukan dan peran wilayah yang dicerminkan oleh keterkaitan masing-masing bagian wilayah;
- Sistem jaringan transportasi yang memungkinkan terbentuknya aksesibilitas antar bagian-bagian wilayah;
- Daya tarik-menarik kota yang diperlihatkan oleh fungsi dan peranan kota terhadap kota-kota lainnya;
- Homogenitas (kesamaan) potensi sumber daya yang dapat didayagunakan;
- Kondisi fisik dan faktor administrasi dan pendeliniasian batas wilayahnya;
- Pertimbangan rencana struktur perwilayahan yang sudah ada

Dengan demikian rencana sistem perkotaan dan wilayah pengembangan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Padang Lawas

No	Ibukota Kecamatan/ Kabupaten	Hirarki /Peran	Jenis Pusat Kegiatan	Fungsi Utama
1	Kota Sibuhuan (Kecamatan Barumun)	PKL	Sistem perkotaan	<ul style="list-style-type: none">o Sebagai pusat pemerintahano Pusat koleksi dan distribusi
2	Kota Binanga (Kecamatan Barumun Tengah)	PPK	Sistem perkotaan	<ul style="list-style-type: none">o Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desao Kota Binanga sebagai simpul transportasi udarao Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
3	Pasar Ujung Batu (Kecamatan Sosa)	PPK	Sistem perkotaan	<ul style="list-style-type: none">o Pasar Ujung Batu sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa
4	Kota Sosopan (Kecamatan Sosopan)	PPL	Sistem pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
5	Pasar Paringgonan (Kecamatan Ulu Barumun)	PPL	Sistem pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
6	Pasar Latong (Kecamatan Lubuk Barumun)	PPL	Sistem pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
7	Kota Huristak (Kecamatan Huristak)	PPL	Sistem pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
8	Kota Hutaraja Tinggi (Kecamatan Huta Raja Tinggi)	PPL	Sistem pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
9	Kota Pinarik (Kecamatan Batang Lubu Sutam)	PPL	Sistem pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Padang Lawas Tahun 2018-2038

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Daya dukung lingkungan mencerminkan kemampuan ekosistem untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia maupun makhluk hidup lain, seperti air bersih, udara segar, dan bahan pangan. Ketika suatu wilayah melebihi kapasitas daya dukungnya, maka sumber daya alam cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitas akibat pemanfaatan yang tidak seimbang. Di sisi lain, daya tampung lingkungan menggambarkan kemampuan lingkungan untuk menahan dampak dari aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan yang permanen. Hal ini termasuk kemampuan lingkungan menyerap limbah dan polutan dalam kadar tertentu. Menjaga keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung menjadi kunci utama agar pembangunan dan aktivitas manusia tidak merusak lingkungan sehingga keberlanjutan ekosistem tetap terjaga untuk generasi mendatang.

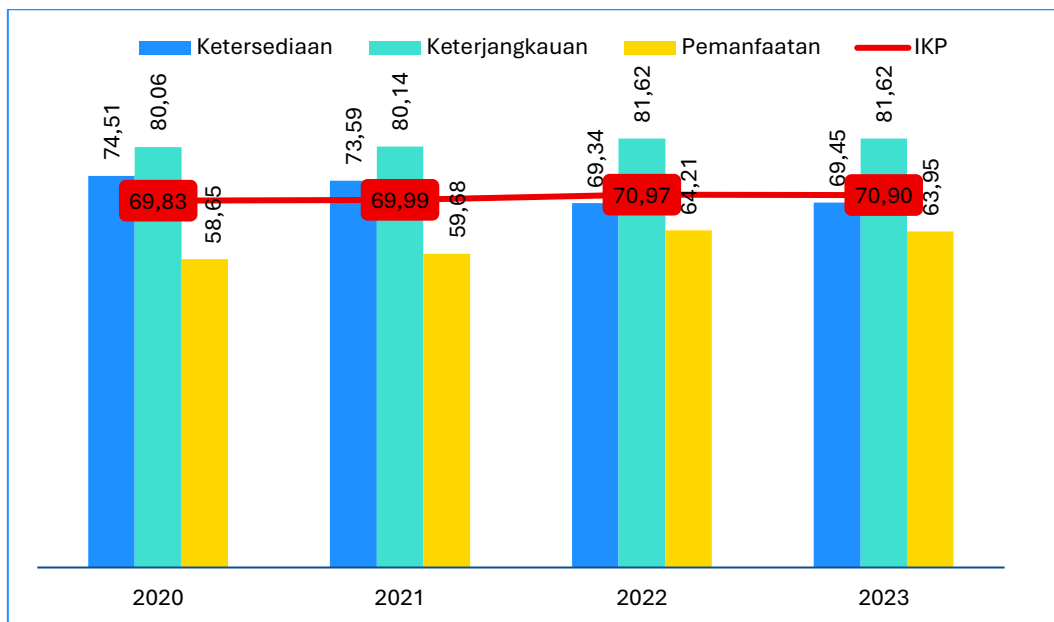


2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan adalah fondasi penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Ketahanan energi mengacu pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber energi secara efisien dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan mengembangkan energi terbarukan seperti surya, angin, dan biomassa. Sementara itu, ketahanan air menuntut pengelolaan sumber daya air yang optimal, menjamin ketersediaan air bersih untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim.

A. Pangan

Kemandirian pangan menjadi aspek penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan meningkatkan produksi pangan lokal dan diversifikasi sumber pangan, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi pasar global. Strategi ketahanan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas lingkungan hidup.



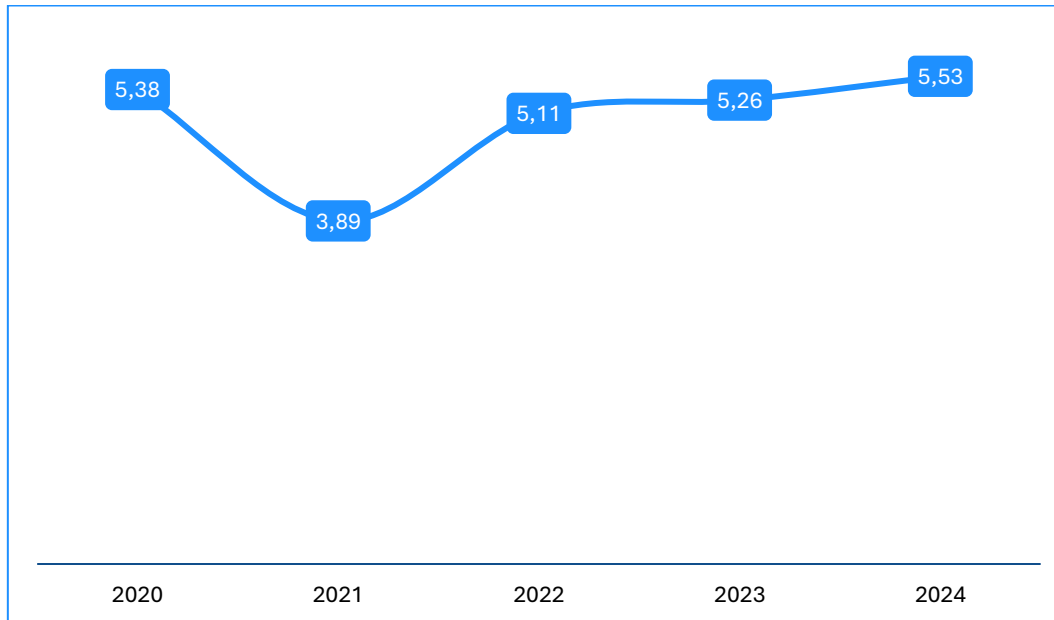
Gambar 2.6. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas (Poin)

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional

Berdasarkan data pada gambar tersebut, terlihat bahwa Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 69,83 poin pada tahun 2020 menjadi 70,90 poin pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa tidak adanya peningkatan yang signifikan dari ketahanan pangan Kabupaten Padang Lawas. Apabila dilihat berdasarkan komponen penyusunnya, Aspek Ketersediaan mengalami penurunan dari 74,51 poin pada tahun 2020 menjadi 69,45 poin pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh semakin kurangnya produksi pangan daerah Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah sebaiknya mengidentifikasi



permasalahan dari produktivitas pangan daerah sehingga ketersediaan pangan dapat terjaga.



Gambar 2.7. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)

Sumber: BPS

Berdasarkan data pada gambar tersebut, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan meningkat sejak tahun 2021 sebesar 3,89 persen menjadi 5,53 persen pada tahun 2024, di mana secara kuantitas hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 15.526 orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pangan hariannya pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memastikan distribusi pangan dan stabilitas harga agar seluruh masyarakat dapat mengonsumsi pangan yang cukup tanpa terkecuali.

B. Energi

Berketahanan energi merupakan kemampuan suatu daerah untuk memastikan pasokan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, krisis geopolitik, atau gangguan infrastruktur. Hal ini mencakup diversifikasi sumber energi, seperti memanfaatkan energi terbarukan (matahari, angin, hidro) dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Tabel 2.6. Indikator Ketahanan Energi

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/kapita)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Porsi EBT dalam bauran energi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu menjamin ketersediaan pasokan energi listrik yang mencukupi kebutuhan domestik dan non domestik. Untuk mendukung penggunaan energi yang ramah lingkungan, Kabupaten Padang Lawas juga memiliki potensi EBT, seperti tenaga surya, biomassa, sungai, dan angin.



C. Air

Berketahanan air merupakan kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan di tengah tekanan, seperti kekeringan, banjir, polusi, atau pertumbuhan populasi. Konsep ini mencakup pengelolaan air yang terintegrasi, mulai dari penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, hingga perlindungan ekosistem air seperti sungai dan danau.

Tabel 2.7. Indikator Ketahanan Air

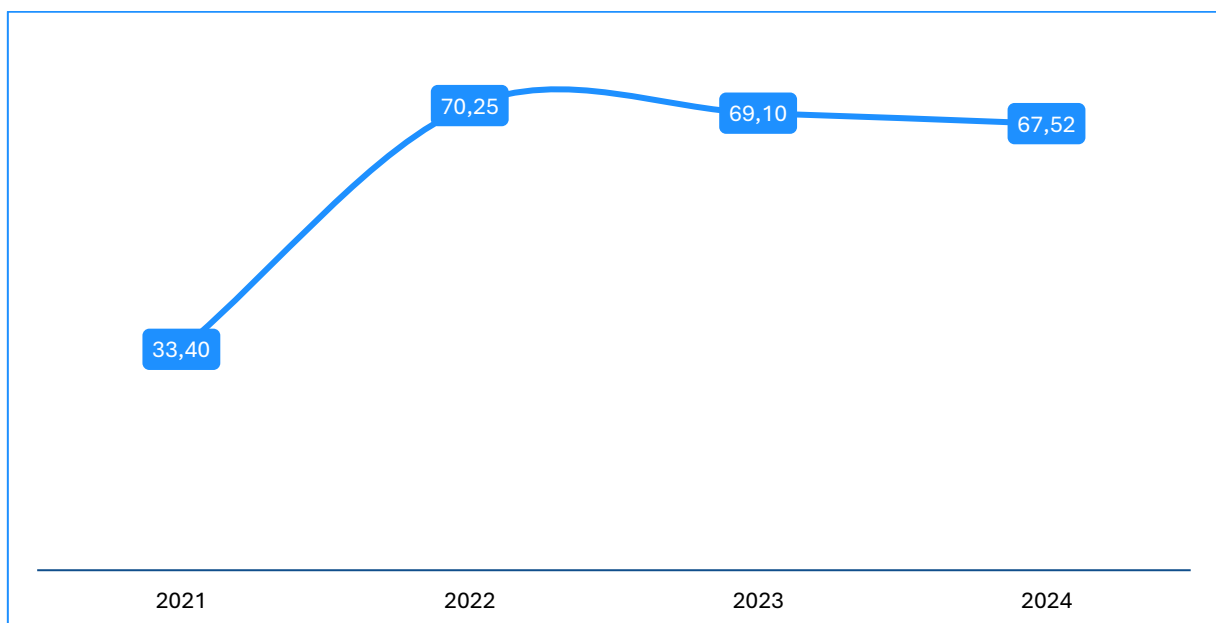
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Aman (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan infrastruktur seperti bendungan, sistem irigasi, dan teknologi daur ulang air, suatu wilayah dapat mengurangi risiko krisis air. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi untuk menggunakan air secara bijak guna mendukung keberlanjutan sumber daya air.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas adalah kondisi di mana udara, air, tanah, dan ekosistem dapat menopang kehidupan sehat masyarakat dan keberlangsungan kehidupan flora dan fauna. Kualitas lingkungan yang baik mencakup pengendalian pencemaran dengan penerapan standar lingkungan yang ketat untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas industri, pertanian, dan permukiman.



Gambar 2.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil evaluasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2021 sebesar 33,40 poin meningkat hingga tahun 2024 mencapai 67,52 poin.



Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui program-program pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian keanekaragaman hayati dan pemulihan kawasan hijau berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, pengelolaan limbah yang efektif sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pengurangan limbah melalui konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta pengelolaan limbah berbahaya dan domestik secara terintegrasi dapat mencegah kerusakan lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak terkelola juga menjadi isu yang perlu diperhatikan di Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.8. Indikator Pengelolaan Persampahan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (%)	N/A	N/A	19,78	N/A	N/A
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	15,68	15,73	15,78	15,85	15,90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan pengelolaan sampah hingga tahun 2024 hanya sebesar 15,90 persen. Hal ini berarti bahwa masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berupaya untuk meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, armada pengangkutan sampah, serta menyediakan tempat pengelolaan sampah untuk diolah. Dalam memastikan lingkungan hidup yang berkualitas, maka masyarakat harus memiliki akses terhadap sanitasi yang aman.

Tabel 2.9. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas

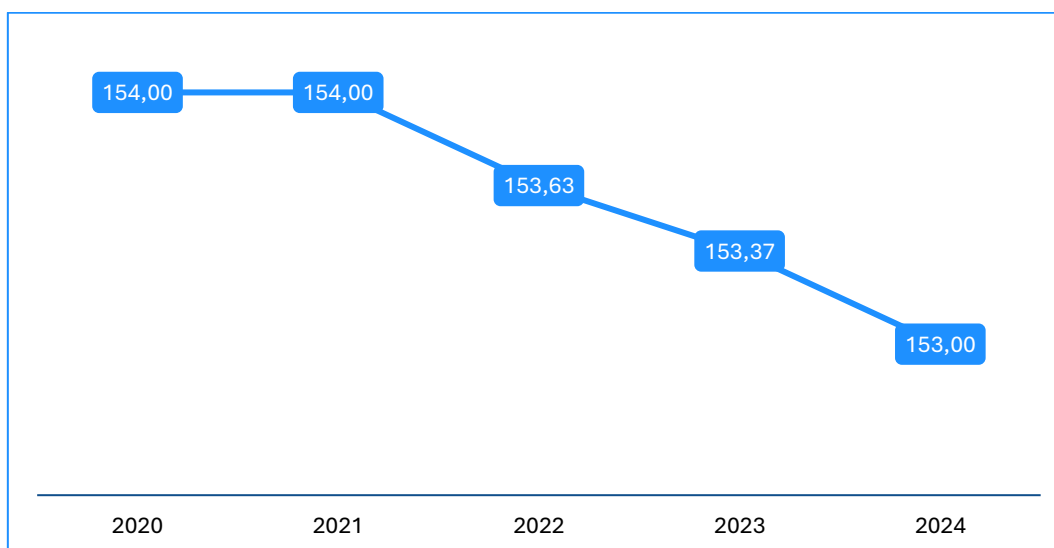
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus memastikan agar setiap warganya memperoleh akses terhadap sanitasi aman. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu membangun infrastruktur sanitasi yang aman pada seluruh wilayah permukiman agar setiap masyarakat dapat merasakan lingkungan hidup yang berkualitas

2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah kemampuan masyarakat dan ekosistem dalam menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari dampak bencana alam serta perubahan iklim yang semakin sering terjadi. Bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, dan gelombang panas dapat menimbulkan kerusakan besar, baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas mitigasi dan adaptasi, termasuk sistem



peringatan dini dan pendidikan kesiapsiagaan, sangat penting untuk memperkecil risiko dan dampaknya. Selain itu, perubahan iklim menuntut penyesuaian kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan ketahanan lingkungan dan masyarakat. Pengelolaan lahan yang berkelanjutan, konservasi sumber daya alam, serta diversifikasi mata pencaharian merupakan beberapa langkah untuk meningkatkan daya tahan komunitas terhadap perubahan lingkungan. Resilensi ini mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan yang tangguh menghadapi berbagai tantangan iklim dan bencana di masa depan.



Gambar 2.9. Indeks Risiko Bencana (Poin)

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Nasional

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Padang Lawas menurun dari 154,00 poin pada tahun 2020 menjadi 153,00 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa adanya peningkatan dalam upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Padang Lawas. Namun, penurunan ini tidak terlalu signifikan selama periode tersebut. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebaiknya membangun infrastruktur daerah yang tangguh terhadap bencana serta menyediakan sistem peringatan dini agar masyarakat dapat memitigasi risiko bencana yang dihadapi. Selain itu, masyarakat perlu ditingkatkan kesadaran dan pengetahuannya terkait kebencanaan.

Adapun wilayah rawan bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Wilayah Rawan Bencana yang Pernah Terkena Bencana Alam di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Bencana Yang Pernah Terjadi
1	Sosopan	Kebakaran hutan dan lahan, kebakaran rumah, banjir
2	Ulu Barumun	Kebakaran hutan dan lahan, kebakaran Rumah
3	Barumun Baru	Kebakaran rumah, banjir
4	Barumun	Kebakaran rumah, kebakaran hutan dan lahan, banjir
5	Lubuk Barumun	Kebakaran hutan dan lahan, kebakaran rumah
6	Aek Nabara Barumun	Kebakaran hutan dan lahan, banjir
7	Barumun Tengah	Kebakaran rumah, kebakaran hutan dan lahan



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Kecamatan	Jenis Bencana Yang Pernah Terjadi
8	Barumun Selatan	Banjir
9	Huristak	Kebakaran rumah, kebakaran hutan dan lahan, orang hanyut, banjir
10	Ulu Sosa	Kebakaran rumah
11	Sihapas Barumun	Kebakaran Rumah
12	Batang Lubu Sutam	Banjir
13	Sosa	Banjir, kebakaran rumah, kebakaran hutan dan lahan
14	Sosa Julu	Banjir, kebakaran hutan dan lahan
15	Sosa Timur	Banjir

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas

2.1.7 Demografi

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari struktur, distribusi, dan dinamika penduduk dalam suatu wilayah. Aspek demografi meliputi jumlah penduduk, struktur usia, jenis kelamin, tingkat kelahiran, kematian, migrasi, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Informasi demografis sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, baik untuk sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun pelayanan publik lainnya. Data penduduk menurut kelompok usia sebagai berikut:

Tabel 2.11. Penduduk Kabupaten Padang Lawas Menurut Kelompok Usia (Jiwa)

Kelompok Usia	2020	2021	2022	2023	2024
0–4	26.799	26.820	26.934	30.650	32.119
5–9	29.030	29.118	29.284	27.948	27.381
10–14	27.590	27.781	27.907	28.193	28.310
15–19	26.300	26.282	26.397	25.349	25.370
20–24	25.674	25.514	25.415	24.701	24.210
25–29	23.064	23.179	23.346	24.848	25.250
30–34	21.801	22.028	22.311	22.578	22.890
35–39	17.541	17.782	18.083	20.191	21.068
40–44	15.646	15.916	16.218	16.637	17.100
45–49	13.358	13.684	14.058	14.739	15.200
50–54	10.819	11.121	11.461	12.075	12.539
55–59	8.576	8.875	9.204	9.829	10.229
60–64	6.258	6.524	6.814	7.519	7.990
65–69	4.308	4.566	4.824	5.162	5.480
70–74	2.533	2.777	3.050	3.026	3.270
75+	1.714	1.832	1.969	2.203	2.358
Total	261.011	263.799	267.275	275.648	280.764

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 261.011 jiwa pada tahun 2020 menjadi 280.76 jiwa pada tahun 2024 atau bertambah sebanyak 19.753 jiwa dalam 5 tahun. Pada tahun 2024, penduduk usia produktif



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

(15-64 tahun) sebanyak 181.846 jiwa, sementara penduduk usia tidak produktif sebanyak 98.918 jiwa. Dengan mengacu pada karakteristik demografi yang disajikan, pemerintah daerah harus bisa memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat pada setiap kelompok usia terpenuhi. Data penduduk menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12. Penduduk Kabupaten Padang Lawas Menurut Kecamatan (Jiwa)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Distribusi (%)
Sosopan	10.389	10.463	10.570	10.877	11.047	3,93
Ulu Barumun	16.700	16.903	17.161	17.749	18.115	6,45
Barumun	53.200	41.490	42.180	43.681	44.640	15,90
Barumun Selatan	7.954	8.039	8.150	8.417	8.578	3,06
Barumun Baru	...	12.434	12.642	13.095	13.385	4,77
Lubuk Barumun	20.024	20.341	20.726	21.513	22.036	7,85
Sosa	38.858	19.838	20.257	21.072	21.631	7,70
Ulu Sosa	...	9.130	9.213	9.470	9.607	3,42
Sosa Juli	...	10.470	10.681	11.100	11.384	4,05
Batang Lubu Sutam	12.383	8.129	8.170	8.364	8.451	3,01
Hutaraja Tinggi	43.605	39.476	39.823	40.923	41.501	14,78
Sosa Timur	...	8.640	8.684	8.796	8.856	3,15
Huristak	18.652	18.690	18.784	19.027	19.156	6,82
Barumun Tengah	20.454	16.364	16.471	16.888	17.089	6,09
Aek Nabara Barumun	13.107	13.300	13.537	14.035	14.361	5,11
Sihapas Barumun	5.685	5.778	5.890	6.117	6.269	2,23
Barumun Barat	...	4.234	4.336	4.524	4.658	1,66
Padang Lawas	261.011	263.719	267.275	275.648	280.764	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 penduduk Kabupaten Padang Lawas terbanyak berada pada Kecamatan Barumun sebanyak 44.640 jiwa atau sebesar 15,90 persen total penduduk dan Kecamatan Hutaraja Tinggi sebanyak 41.501 jiwa atau sebesar 14,78 persen dari total penduduk, sementara penduduk yang paling sedikit berada pada Kecamatan Barumun Barat sebanyak 4.658 jiwa atau sebesar 1,66 persen. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Pemerintah perlu memetakan kebutuhan pelayanan dasar sesuai dengan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Kepadatan Penduduk pada Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.13. Kepadatan Penduduk Kabupaten Padang Lawas Menurut Kecamatan (Jiwa/Km²)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Sosopan	23,87	24,04	24,29	24,99	25,38
Ulu Barumun	80,51	81,49	82,73	85,57	87,33
Barumun	421,89	329,02	334,50	346,40	354,00
Barumun Selatan	72,39	73,17	74,18	76,61	78,07
Barumun Baru	-	905,61	920,76	953,75	974,87
Lubuk Barumun	69,15	70,24	71,57	74,29	76,10
Sosa	137,06	69,97	71,45	74,32	76,29
Ulu Sosa	-	43,13	43,53	44,74	45,39
Sosa Juli	-	67,14	68,49	71,18	73,00
Batang Lubu Sutam	67,03	44,00	44,22	45,27	45,74
Hutaraja Tinggi	65,75	59,52	60,04	61,70	62,57
Sosa Timur	-	54,15	54,43	55,13	55,51
Huristak	35,62	35,70	35,88	36,34	36,59
Barumun Tengah	171,31	137,05	137,95	141,44	143,12
Aek Nabara Barumun	39,80	40,38	41,10	42,61	43,60
Sihapas Barumun	117,82	119,75	122,07	126,78	129,93
Barumun Barat	-	83,00	85,00	88,69	91,32
Padang Lawas	66,72	67,41	68,32	70,46	71,77

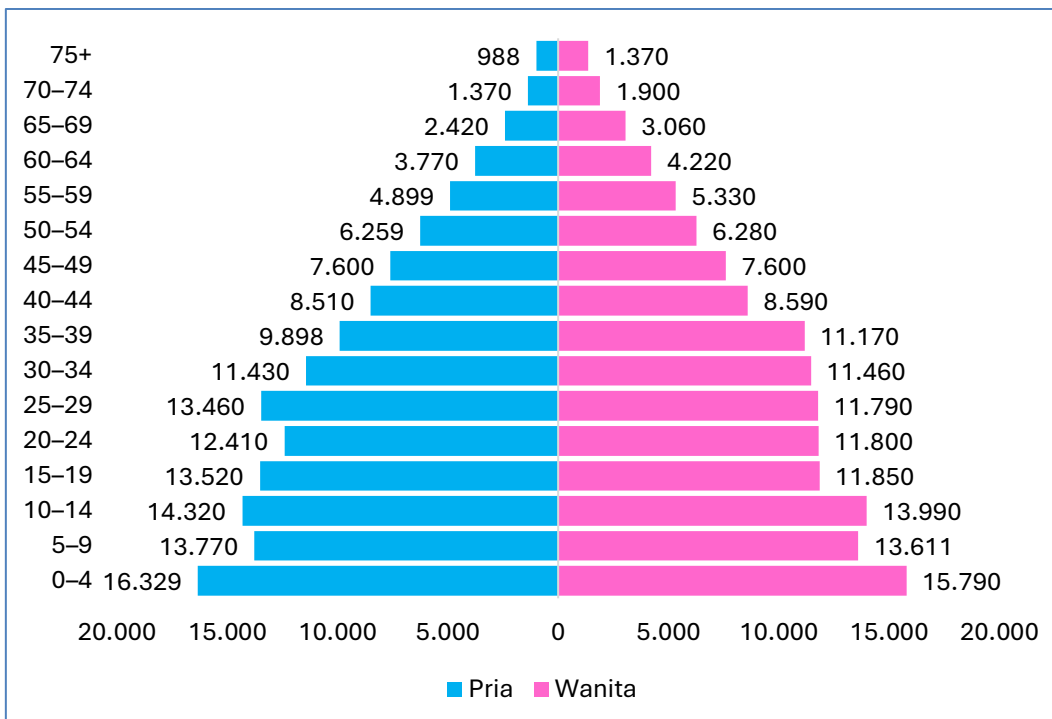
Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Kepadatan penduduk Kabupaten Padang Lawas terus meningkat dari 66,72 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 71,77 jiwa/km² pada tahun 2024. Penduduk paling padat berasal dari Kecamatan Barumun Baru yang mencapai 974,89 jiwa/km² dan Kecamatan Barumun sebanyak 354 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk, terutama pada beberapa kecamatan tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Pemerintah harus memastikan ketersediaan ruang yang cukup untuk tempat tinggal pada wilayah yang padat penduduk.

Distribusi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar piramida penduduk berikut:



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**



Gambar 2.10. Piramida Penduduk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2025)

Piramida penduduk Kabupaten Padang Lawas berbentuk ekspansif, di mana hal ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk usia muda lebih besar dibandingkan penduduk lansia. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta lapangan pekerjaan untuk kelompok usia muda.

A. Proyeksi Penduduk

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas meemproyeksikan jumlah penduduk pada periode pembangunan jangka menengah, di mana hal ini dilakukan untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2030 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.14. Proyeksi Penduduk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2030

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	291,13	296,51	301,85	307,13	312,36	317,51
Pria (Ribuan Jiwa)	146,05	148,63	151,19	153,71	156,21	158,66
Wanita (Ribuan Jiwa)	145,08	147,88	150,66	153,42	156,15	158,85
Sex Ratio (Per 100 Wanita)	100,67	100,51	100,35	100,19	100,04	99,88
0-14	88,64	89,16	89,69	90,22	90,75	91,27
15-64	185,18	188,1	191,07	194,08	197,14	200,23
65+	17,31	19,25	21,09	22,83	24,47	26,01
Dependency Ratio (Per 100 orang)	54,28	57,64	57,98	58,25	58,44	53,79

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2025)

Jumlah penduduk di Kabupaten Padang Lawas diproyeksikan meningkat dari 291,13



ribu jiwa pada tahun 2025 mencapai 317,51 ribu jiwa pada tahun 2030. Sementara itu, *sex ratio* diproyeksikan menurun dari 100,67 per 100 wanita pada tahun 2025 menjadi 99,88 per 100 wanita pada tahun 2030. Hal ini menandakan bahwa akan semakin banyak penduduk wanita dibandingkan penduduk laki-laki hingga tahun 2030. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus memastikan agar pembangunan yang dilaksanakan berwawasan gender. Selanjutnya, *dependency ratio* diproyeksikan menurun dari 54,28 per 100 orang pada tahun 2025 menjadi 53,79 per 100 orang pada tahun 2030. Hal ini menandakan bahwa hingga tahun 2030 semakin banyak penduduk usia produktif di Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memanfaatkan potensi ketersediaan penduduk usia produktif ini untuk mendorong pembangunan daerah, seperti peningkatan lapangan kerja untuk masyarakat dan peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk angkatan kerja.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

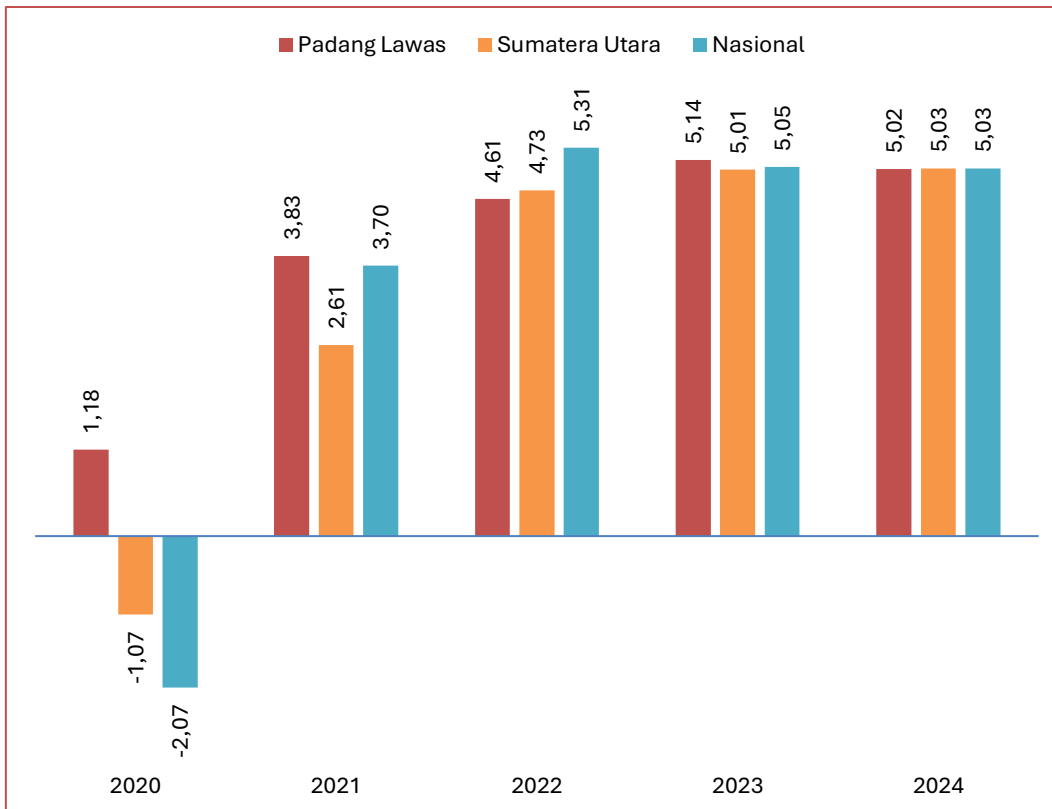
Aspek Kesejahteraan Masyarakat mencakup berbagai dimensi yang berkaitan dengan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu daerah. Fokusnya adalah memastikan masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap kebutuhan dasar, daya beli yang memadai, pelayanan sosial, dan kesempatan untuk berkembang secara sosial dan ekonomi.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan Ekonomi merupakan kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, termasuk akses terhadap pekerjaan, pendapatan, dan kesempatan ekonomi yang adil.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu. Indikator pertumbuhan PDRB menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menjadikan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat atau bertambah dan berimbang pada meningkatnya kemakmuran masyarakat, dimana meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.



Gambar 2.11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (%)

Sumber: BPS

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas terus mengalami fluktuasi yang signifikan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas pasca pandemi terus mengalami kenaikan, angka tertinggi terjadi pada 2023 sebesar 5,14 persen, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 5,02 persen. Hal serupa terjadi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, dimana pertumbuhan ekonomi yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -1,07 persen meningkat hingga tahun 2024 mencapai 5,03 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional meningkat hingga tahun 2023 mencapai 5,05 persen, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara, serta nasional hampir setara. Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

Tabel 2.15. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Padang Lawas (%)

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,45	5,39	5,12	5,26	4,94
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,59	3,78	8,28	3,91	3,06
C	Industri Pengolahan	1,05	2,47	3,74	3,41	4,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,82	3,67	4,34	5,65	8,55



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	3,02	-3,20	7,91
F	Konstruksi	-5,18	1,77	4,12	6,55	4,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,35	2,86	4,35	4,76	6,41
H	Transportasi dan Pergudangan	-8,53	3,33	5,04	9,44	5,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,70	1,10	4,11	8,53	7,37
J	Informasi dan Komunikasi	9,19	5,70	5,35	7,63	6,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,75	5,98	5,03	5,41	5,72
L	Real Estate	3,71	0,12	3,30	5,26	6,38
M,N	Jasa Perusahaan	-1,55	-1,03	2,50	7,78	5,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,51	-0,18	3,02	1,05	4,93
P	Jasa Pendidikan	2,10	3,13	3,10	6,39	6,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,96	-1,52	5,50	6,27	7,83
R,S,T, U	Jasa lainnya	-0,62	5,83	4,30	6,60	7,55
	Laju Pertumbuhan	1,18	3,83	4,61	5,14	5,02

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,55 persen, kemudian Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,91 persen, dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,83 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi yang terendah berasal Sektor Pertambangan dan Penggalan bertumbuh sebesar 3,06 persen, kemudian Sektor Konstruksi sebesar 4,30 persen, dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 4,73 persen.

Kontribusi setiap lapangan usaha terhadap perekonomian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16. Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,62	49,49	50,31	51,41	53,01
B	Pertambangan dan Penggalan	0,51	0,49	0,49	0,48	0,44
C	Industri Pengolahan	17,51	17,48	17,32	16,52	16,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,19	0,18	0,18	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	15,96	15,08	15,03	15,11	14,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,04	6,77	6,51	6,34	6,22
H	Transportasi dan Pergudangan	1,16	1,13	1,13	1,25	1,26



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,03	0,96	0,91	0,92	0,90
J	Informasi dan Komunikasi	0,62	0,61	0,59	0,58	0,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,78	0,79	0,77	0,74	0,70
L	Real Estate	3,73	3,50	3,45	3,33	3,18
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,86	2,61	2,43	2,29	2,24
P	Jasa Pendidikan	0,38	0,36	0,34	0,33	0,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,49	0,45	0,45	0,46	0,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
	Kontribusi PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		0	0	0	0	0

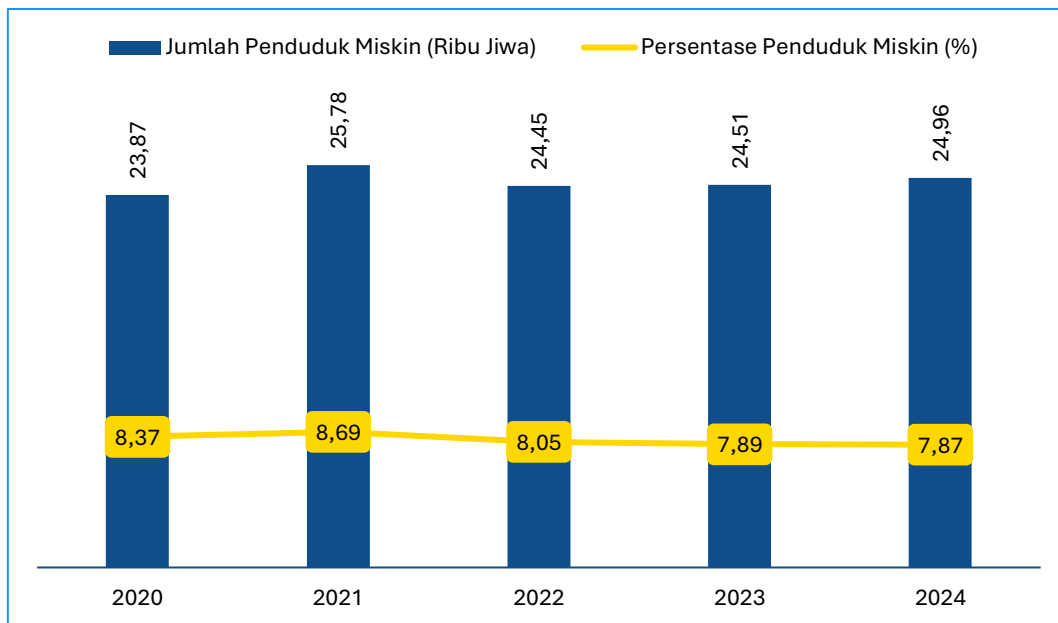
Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Kontribusi PDRB terbesar berasal dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selama 5 tahun terakhir, di mana kontribusinya terus bertumbuh dari 47,62 persen pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai 53,01 persen, kemudian Sektor Industri Pengolahan yang mengalami penurunan dari 17,51 persen pada tahun 2020 menjadi 16,32 persen pada tahun 2024, dan Sektor Konstruksi yang menurun dari 15,96 persen pada tahun 2020 menjadi 14,17 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian daerah masih didominasi oleh Sektor Primer. Untuk mempercepat perkembangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu mendorong hilirisasi agar produk-produk yang dihasilkan bukan produk mentah saja, namun juga menghasilkan nilai tambah sehingga lebih bernilai ekonomis.

B. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi standar hidup dan kebutuhan dasar tertentu, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan yang diukur secara ekonomi dalam bentuk pendapatan dan pengeluaran. Kemiskinan berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga indikator ini selalu menjadi fokus pada intervensi pembangunan. Pengukuran jumlah penduduk miskin dilakukan dengan menggunakan garis kemiskinan, yaitu nilai minimal pengeluaran per kapita per bulan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:



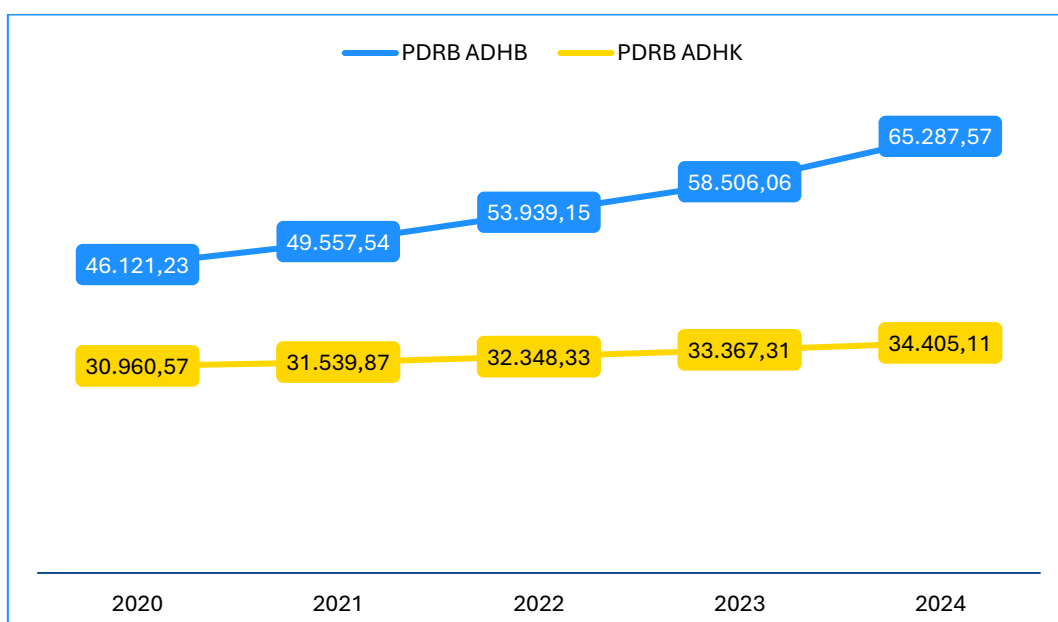
Gambar 2.12. Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan dari 8,37 persen pada tahun 2020 menjadi 7,87 persen pada tahun 2024, sementara itu jika kita lihat dari jumlah penduduk miskin relatif sama dari 23,87 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 24,96 ribu jiwa pada tahun 2024. Penurunan kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas perlu dioptimalkan guna meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut dalam periode waktu tertentu. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2.13. PDRB ADHB dan PDRB ADHK Per Kapita Kabupaten Padang Lawas (Rp Ribu)

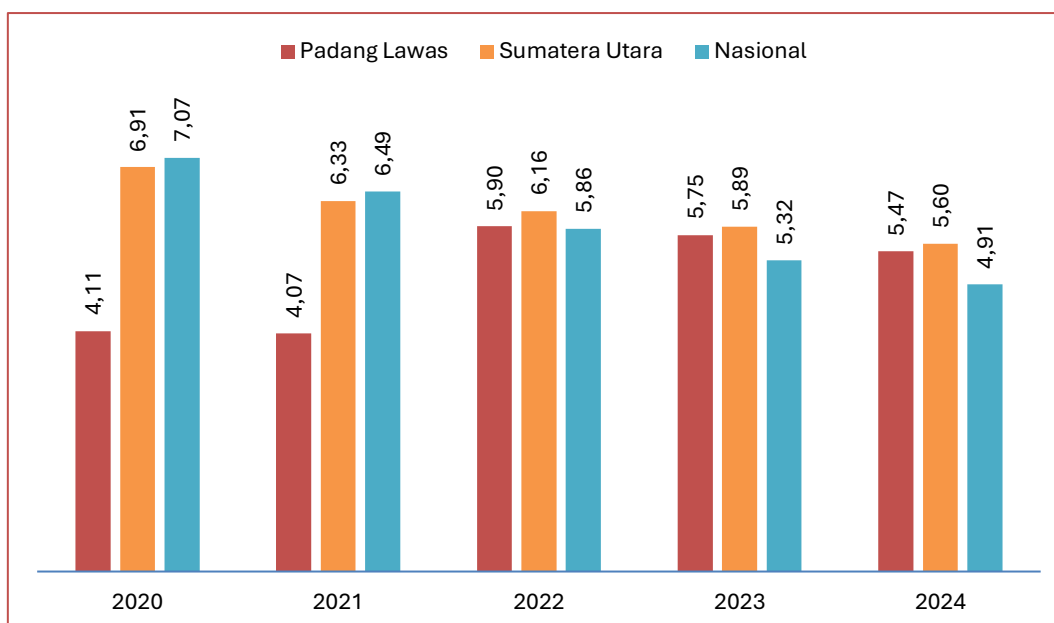


Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data dari BPS, PDRB ADHB meningkat dari Rp 46.121,23 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp 65.287,57 ribu pada tahun 2024, sementara PDRB ADHK mengalami peningkatan dari Rp 30.960,57 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp 34.405,11 ribu pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pendapatan penduduk mengalami peningkatan selama periode terkait. Namun, perlu diperhatikan bahwa PDRB Per Kapita juga termasuk penduduk usia tidak produktif sehingga perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Dalam meningkatkan capaian ini, maka perlu meningkatkan produksi pada setiap sektor lapangan usaha, terutama sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi perekonomian Kabupaten Padang Lawas

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka menggambarkan kondisi pengangguran pada suatu daerah yang diukur dari jumlah penduduk menganggur dari seluruh angkatan kerja yang tersedia pada satu waktu tertentu. Tingkat pengangguran yang semakin tinggi dapat berdampak bagi penurunan produktivitas pada suatu daerah. Selain itu, pengangguran yang tinggi juga dapat berdampak bagi perekonomian daerah secara keseluruhan karena lemahnya daya beli masyarakat akibat kurangnya pendapatan. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Agustus) (%)

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

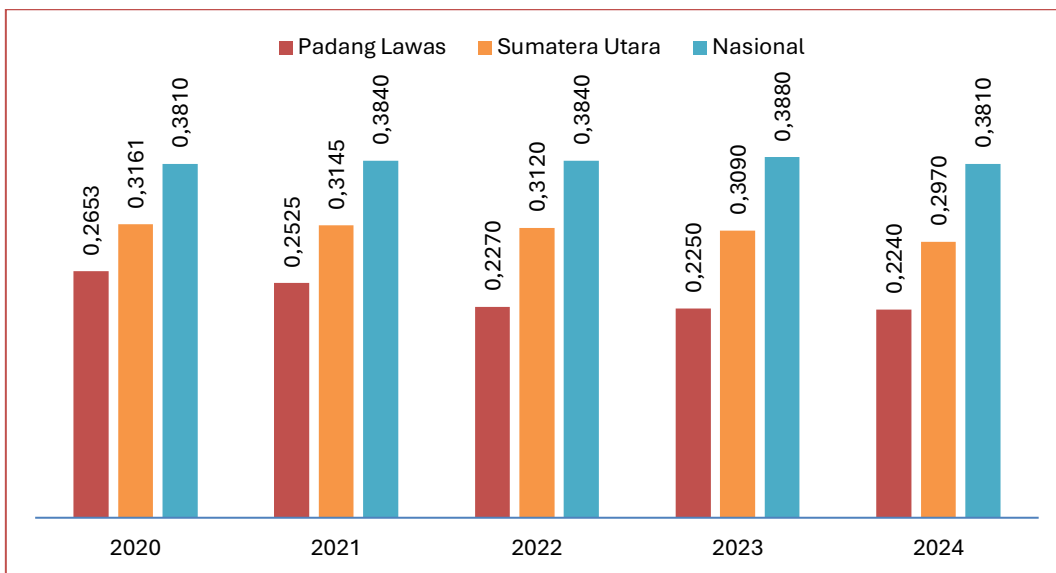
Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 4,11 persen pada tahun 2020 menjadi 5,90 persen pada tahun 2022, namun menurun hingga tahun 2024 mencapai 5,47 persen. Apabila dibandingkan



dengan capaian provinsi dan nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Lawas masih lebih rendah. Namun peningkatan yang cukup pesat hingga di atas 5 persen sejak tahun 2022 mengindikasikan bahwa semakin rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah daerah harus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh angkatan kerja, serta memastikan ketersediaan lapangan kerja di daerahnya.

E. Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan untuk menganalisis tingkat kesenjangan di suatu daerah adalah Gini Ratio, nilainya berkisar antara 0 sampai 1.



Gambar 2.15. Gini Ratio Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret) (%)

Sumber: BPS

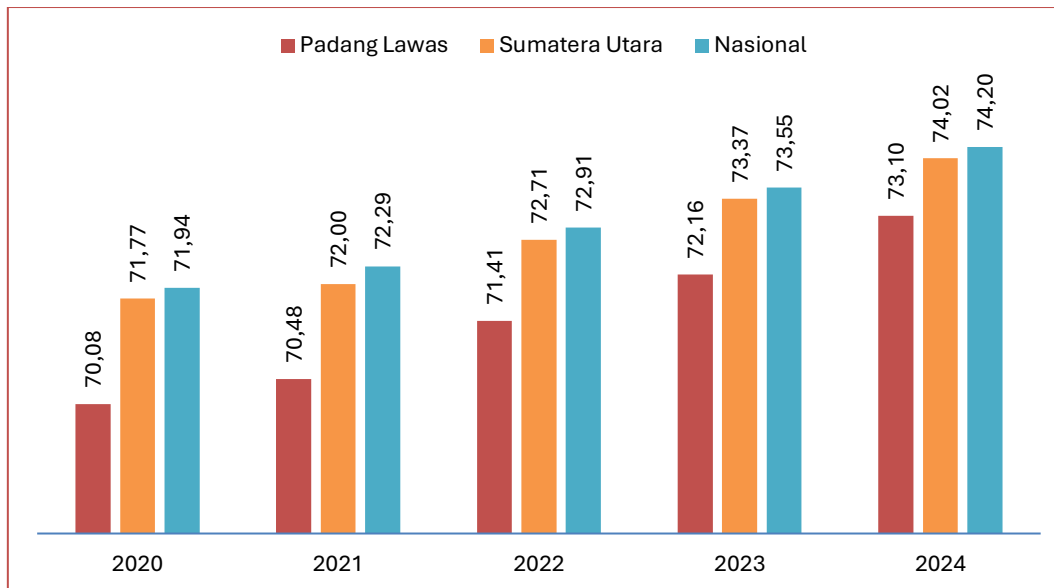
Gini Ratio Kabupaten Padang Lawas terus mengalami penurunan dari 0,2653 poin pada tahun 2020 menjadi 0,2240 poin pada tahun 2024. Indeks gini Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai indeks gini < 0,3. Ketimpangan pendapatan Kabupaten Padang Lawas juga lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas diimbangi dengan terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Meskipun demikian, perlu dicermati apakah semakin banyaknya masyarakat yang miskin sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin rendah.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan suatu wilayah dari sisi manusia. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin tinggi menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang lebih baik yang berarti masyarakat memiliki kesehatan yang baik, akses pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. IPM digunakan sebagai alat untuk memetakan kemajuan pembangunan



suatu daerah dan membuat kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.



Gambar 2.16. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Poin)

Sumber: BPS

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 70,08 poin pada tahun 2020 menjadi 73,10 poin pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa semakin baiknya pembangunan manusia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Meskipun demikian, capaian IPM Kabupaten Padang Lawas masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga diharapkan akan mempercepat peningkatan pembangunan manusia secara inklusif.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk semua merupakan prinsip fundamental yang menekankan pentingnya akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini berarti bahwa kesehatan bukan hanya hak individu, tetapi tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, mulai dari pencegahan, pengobatan, hingga rehabilitasi. Penerapan kebijakan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan diharapkan kesenjangan dalam akses layanan kesehatan dapat diminimalisir sehingga kualitas hidup masyarakat secara umum meningkat dan tujuan pembangunan kesehatan nasional dapat tercapai.

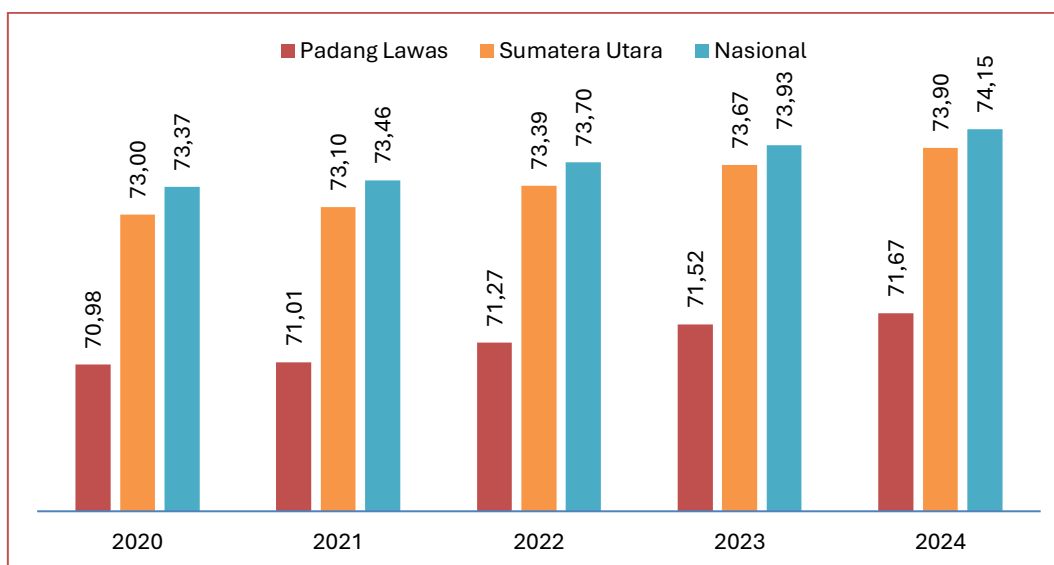
Pemenuhan kesehatan untuk semua juga mencakup upaya pencegahan berbagai penyakit dan penanganan masalah kesehatan secara holistik dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Pemerintah bersama pemangku kepentingan



perlu mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan infrastruktur kesehatan, serta memberdayakan masyarakat agar lebih aktif dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.

A. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah perkiraan jumlah rata-rata tahun yang akan dijalani seseorang sejak lahir, dengan asumsi kondisi kesehatan dan lingkungan tetap stabil. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas sistem kesehatan suatu negara. Semakin tinggi usia harapan hidup, semakin baik pula gambaran kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:



Gambar 2.17. Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun)

Sumber: BPS

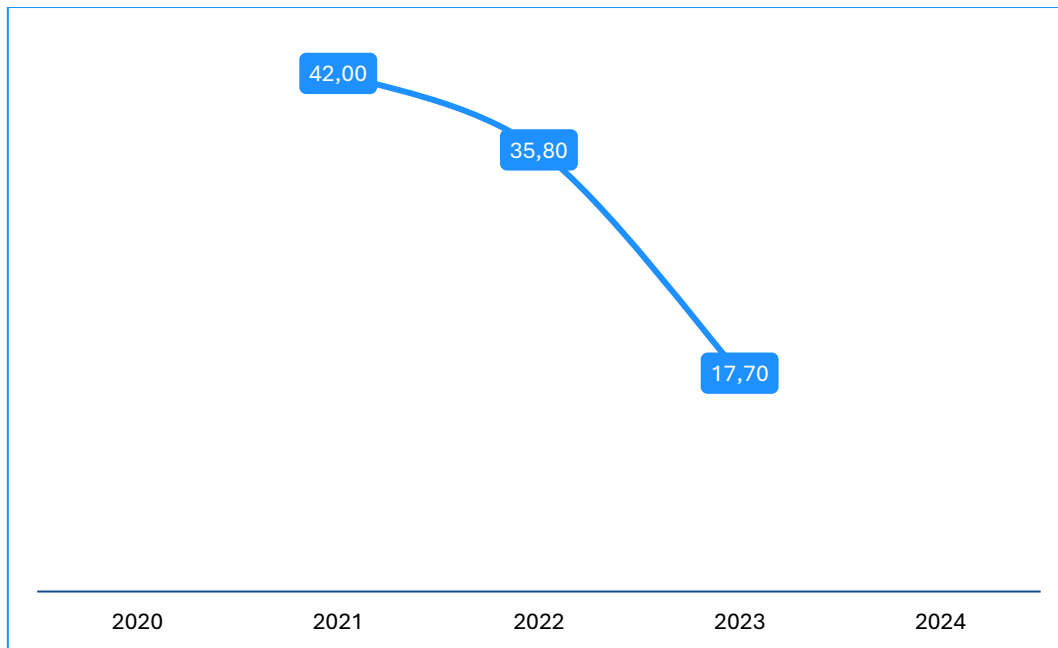
Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 70,98 tahun pada tahun 2020 menjadi 71,67 tahun pada tahun 2024. Capaian ini lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin baiknya akses kesehatan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas, namun masih perlu ditingkatkan agar mengimbangi capaian Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa wilayah yang mungkin belum memperoleh akses kesehatan, melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pemerataan dokter dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah.

B. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah persentase anak-anak usia di bawah lima tahun yang mengalami kondisi tubuh lebih pendek dari standar pertumbuhan normal akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu lama. Stunting tidak hanya menunjukkan masalah pertumbuhan fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif dan kesehatan jangka panjang anak.



Tingginya angka prevalensi stunting menjadi salah satu indikator penting dalam menilai status gizi dan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di negara berkembang.



Gambar 2.18. Prevalensi Stunting (%)

Sumber: Dinas Kesehatan

Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Lawas menurun dari 42,00 persen pada tahun 2012 menjadi 17,70 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya hasil dari program peningkatan gizi dan kesehatan anak. Meskipun demikian, ke depannya pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus konsisten dan lebih inovatif dalam menurunkan prevalensi stunting. Pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi gizi yang cukup dan seimbang, serta meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap makanan yang sehat.

C. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. Penyakit TBC terutama menyerang paru-paru dan dapat memengaruhi organ lain dalam tubuh. TBC menyebar melalui udara ketika seseorang yang mengidap TBC paru batuk, bersin, atau berbicara sehingga membahayakan orang di sekitarnya yang menghirup bakteri tersebut. Penyakit ini menjadi fokus perhatian karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.17. Indikator Tuberkulosis

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	29,01	43,78	42,77	60,77	65,94
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	88,59	90,09	91,20	91,35	84,12

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas



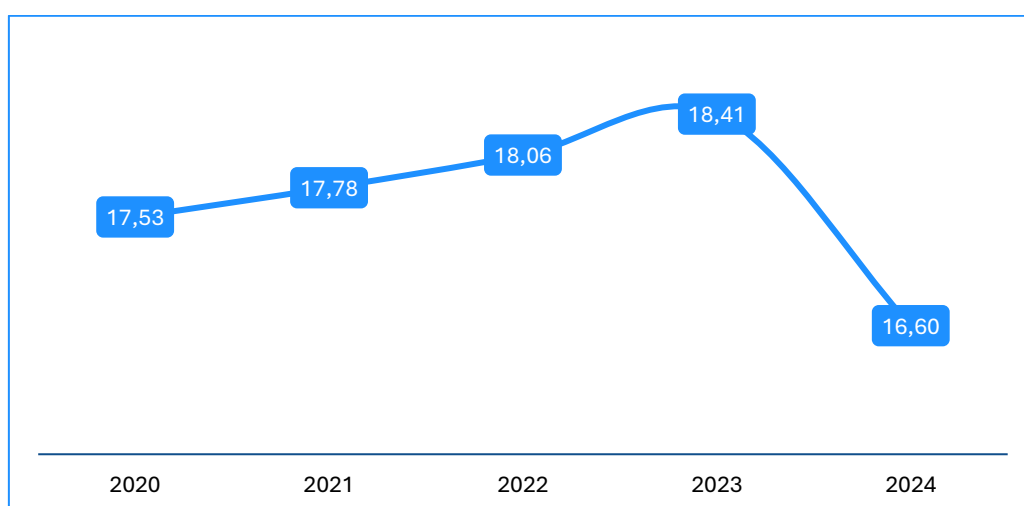
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berupaya untuk mencegah penyebaran penyakit TBC melalui peningkatan kesadaran masyarakat terkait gejala TBC, peningkatan imunisasi TBC untuk mencegah keterpaparan masyarakat dan penularan dari TBC, serta metode pengobatan dan teknologi kesehatan dalam menangani atau mengobati penyakit TBC.

2.2.3 Pendidikan yang Berkualitas dan Merata

Pendidikan yang berkualitas dan merata merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan mampu bersaing di era globalisasi. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter serta nilai-nilai moral yang kuat. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, menyediakan fasilitas yang memadai, tenaga pendidik yang profesional, serta kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pemerataan pendidikan memastikan setiap orang, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, memiliki akses yang sama terhadap pembelajaran berkualitas. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membuka peluang yang adil bagi semua anak bangsa. Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur pendidikan, memberikan pelatihan bagi guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan pendidikan yang berkualitas dan merata, diharapkan tercipta masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi.

A. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah indeks yang digunakan untuk mengukur pembangunan pendidikan yang mengukur akses siswa terhadap pendidikan, kualitas tenaga pendidik, dan sarana-prasarana sekolah di suatu daerah.



Gambar 2.19. Indeks Pendidikan (Poin)

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

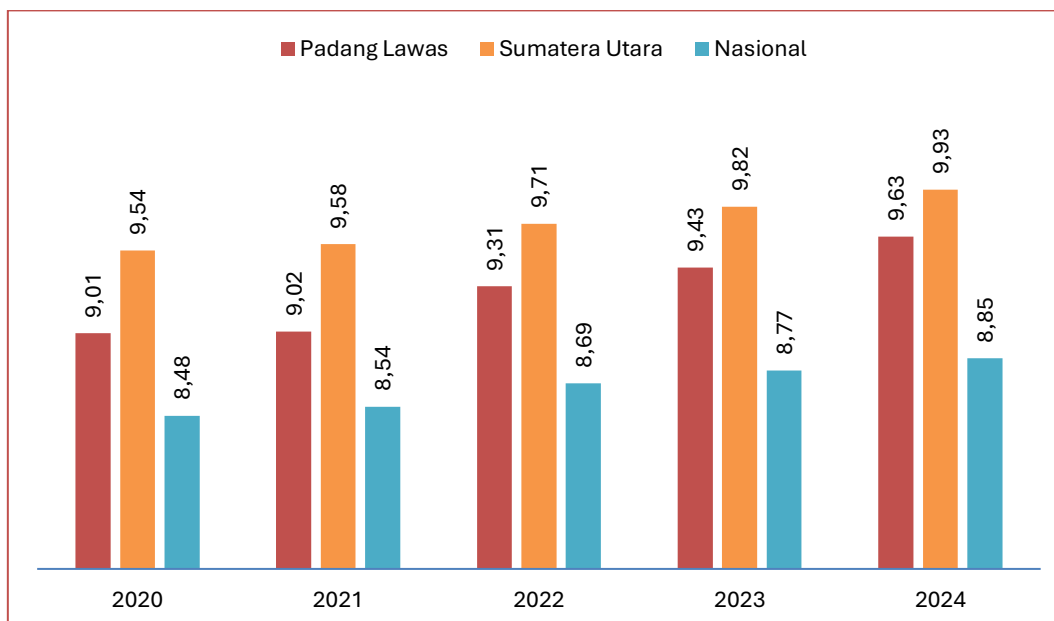
Indeks Pendidikan meningkat dari 17,53 poin pada tahun 2020 menjadi 18,41 poin pada tahun 2023, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 16,60 poin. Hal ini menandakan bahwa



terjadi degradasi kualitas pendidikan di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin rendahnya akses pendidikan oleh masyarakat, kurang meratanya distribusi guru, dan penurunan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, meningkatkan kualitas dan distribusi guru secara merata, serta meningkatkan fasilitas sekolah.

B. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia tertentu, biasanya usia 15 tahun ke atas. Angka ini mencerminkan pencapaian pendidikan secara aktual dalam suatu populasi. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka tingkat pendidikan masyarakat cenderung lebih baik, yang berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional.



Gambar 2.20. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun)

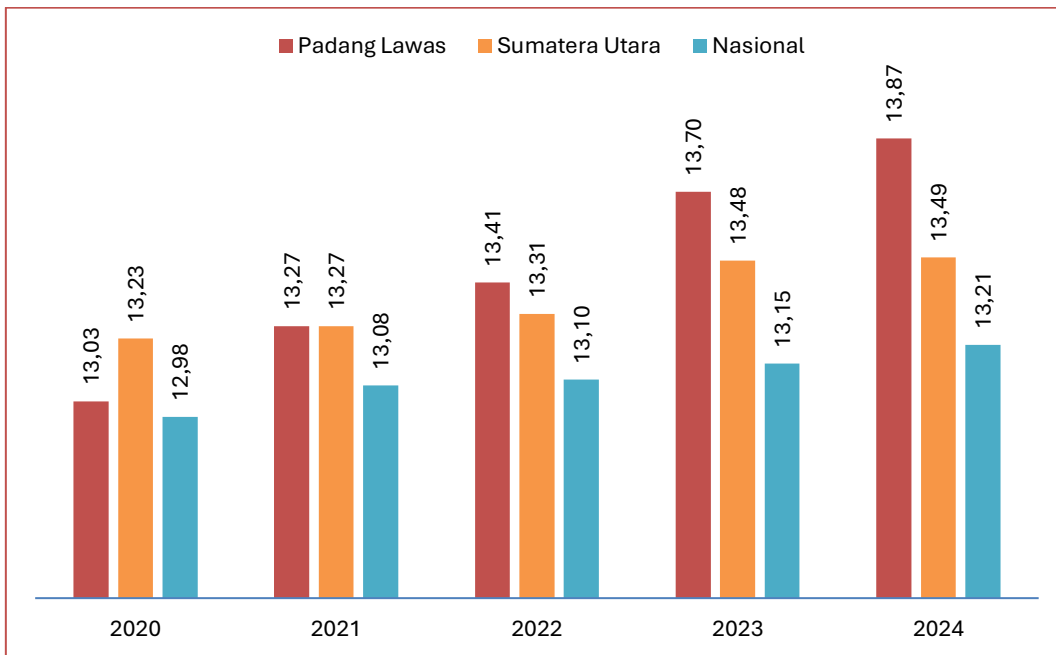
Sumber: BPS

Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Lawas meningkat dari 9,01 tahun pada tahun 2020 mencapai 9,63 tahun pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya lama pendidikan yang ditempuh masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Meskipun demikian, hal ini menandakan bahwa pendidikan tertinggi yang ditempuh masyarakat Kabupaten Padang Lawas hanya sampai pada jenjang pendidikan SMP kelas 3. Capaian ini juga masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, namun lebih tinggi dibandingkan nasional.

Sementara itu, harapan lama sekolah adalah perkiraan jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak ketika memulai pendidikan dasar, dengan



asumsi tingkat partisipasi dan kelulusan saat ini tetap konstan. Harapan lama sekolah menggambarkan potensi pencapaian pendidikan di masa depan dan menjadi salah satu indikator penting dalam perencanaan kebijakan pendidikan. Dengan meningkatnya harapan lama sekolah, diharapkan generasi mendatang akan mendapatkan pendidikan yang lebih panjang dan berkualitas, mendukung kemajuan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.



Gambar 2.21. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun)

Sumber: BPS

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 13,03 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,87 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini juga berhasil melampaui Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2022 dan terus berlanjut hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan masyarakat Kabupaten Padang Lawas untuk menempuh pendidikan semakin tinggi hingga jenjang pendidikan Diploma I.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah, dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga masyarakat secara inklusif dapat memperoleh hak yang sama dalam menempuh pendidikan.

C. Literasi dan Numerasi

Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi tertulis, yang memungkinkan individu untuk mengakses pengetahuan, berkomunikasi dengan efektif, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan profesional. Sementara itu, numerasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka serta konsep matematika dasar guna menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.



Tabel 2.18. Literasi dan Numerasi

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi SD (Poin)	43,84	45,19	46,54	55,47	56,82
Literasi SMP (Poin)	25,54	28,75	31,96	46,14	49,35
Numerasi SD (Poin)	21,03	26,91	32,79	47,54	53,42
Numerasi SMP (Poin)	13,10	19,14	25,18	31,22	49,60

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Literasi dan Numerasi pada SD dan SMP mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data literasi dan numerasi SD serta SMP dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan dengan kenaikan paling signifikan terjadi antara 2022-2023 dan berlanjut hingga 2024, terutama pada Numerasi SMP yang meningkat dari 31,22 poin menjadi 49,60 poin. Literasi SD secara konsisten memiliki poin tertinggi sebesar 56,82 poin pada tahun 2024, diikuti Numerasi SD sebesar 53,42 poin, sementara Literasi dan Numerasi SMP menunjukkan laju kenaikan lebih cepat. Lonjakan ini mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam sistem pendidikan atau metode pengajaran yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mempertahankan tren positif ini.

D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan literasi telah berkembang di suatu daerah melalui pengembangan perpustakaan sebagai wahana belajar bagi masyarakat. Indeks ini mencerminkan kualitas dan efektivitas sistem pendidikan serta akses masyarakat terhadap sumber belajar. Tingginya indeks literasi menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai, yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup.

Tabel 2.19. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

UPLM	Keterangan	2022	2023	2024
UPLM 1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0010	0,1212	N/A
UPLM 2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	0,4493	0,0714	N/A
UPLM 3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	0,0000	0,0561	N/A
UPLM 4	Tingkat Kunjungan Pustaka	0,3151	0,0268	N/A
UPLM 5	Perpustakaan Ber-SNP	1,5348	1,0000	N/A
UPLM 6	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	0,2238	1,0000	N/A
UPLM 7	Jumlah Pemustaka	0,4216	1,0000	N/A
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		42,08	46,79	22,53

Sumber: Buku Indeks Literasi Masyarakat (2022 dan 2023)

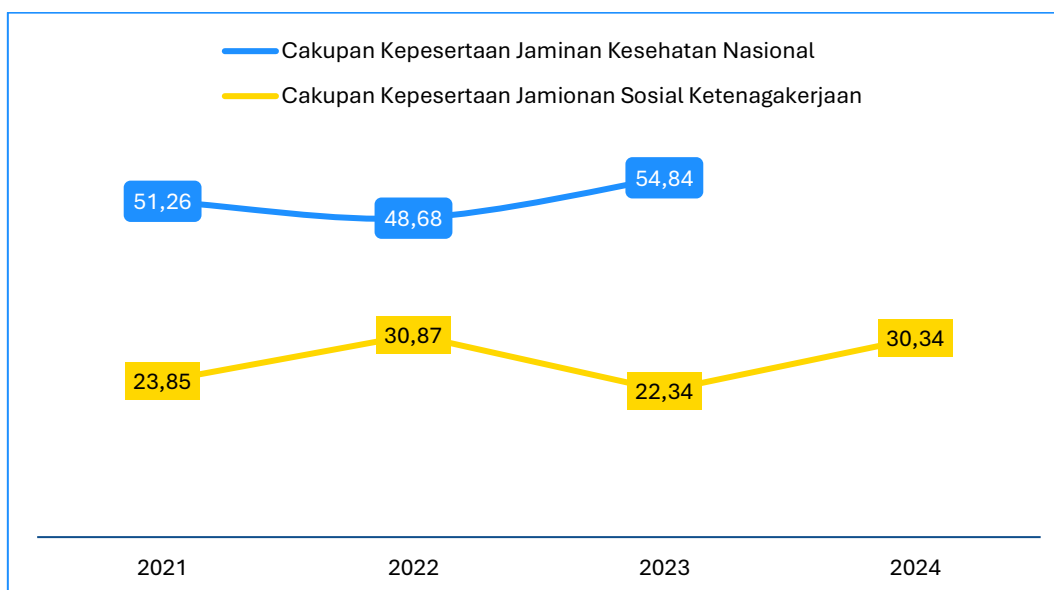
IPLM Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 42,08 poin pada tahun 2022 menjadi 46,79 poin pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber pembelajaran masyarakat semakin membaik dalam meningkatkan literasi



masyarakat. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya komponen penyusun indeks tersebut, yaitu UPLM 6 dan UPLM 7. Peningkatan pada indeks ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang menyuarakan atau menghimbau masyarakat lainnya untuk meningkatkan literasinya melalui membaca buku di perpustakaan, serta semakin lengkapnya pemustaka yang tersedia pada masing-masing perpustakaan sesuai dengan standar yang berlaku. Sementara itu, yang menjadi perhatian adalah menurunnya UPLM 2 dan UPLM 4, di mana hal ini menandakan bahwa semakin kurangnya buku yang tersedia di perpustakaan dan rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh semakin banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan teknologi digital untuk mengakses buku sehingga mengurangi tingkat kunjungan ke perpustakaan.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif adalah sistem perlindungan yang dirancang untuk mampu merespons perubahan kondisi sosial dan ekonomi secara cepat dan fleksibel. Model perlindungan ini bertujuan memberikan jaminan sosial yang tepat sasaran dan efektif kepada kelompok rentan, khususnya saat menghadapi krisis seperti pandemi, bencana alam, atau perubahan ekonomi yang mendadak. Sistem perlindungan sosial yang adaptif mengintegrasikan berbagai skema, seperti bantuan tunai, jaminan kesehatan, perlindungan ketenagakerjaan, dan program pemberdayaan masyarakat.



Gambar 2.22. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Padang Lawas (%)

Sumber: Siperindu.online

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 51,26 persen pada tahun 2021 menjadi 54,84 persen pada tahun 2023. Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengalami peningkatan dari 23,85 persen pada tahun 2021 menjadi 30,34 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak masyarakat yang



berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan pemerintah. Namun, capaian ini juga menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan tersebut. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program terkait melalui edukasi dan sosialisasi sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan akses kesehatan yang setara.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

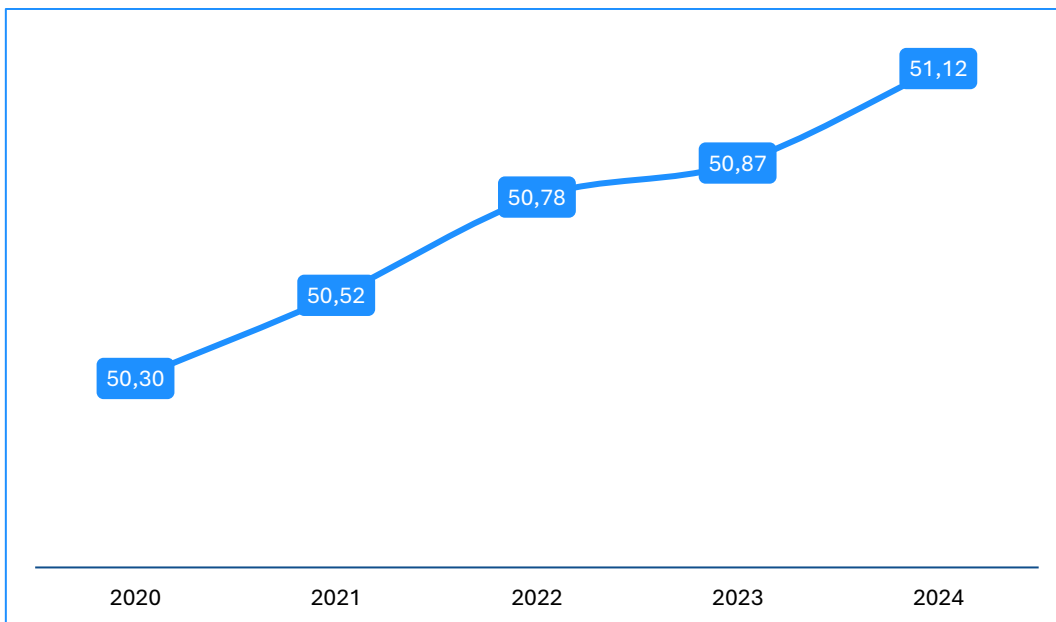
Beragama maslahat dan berkebudayaan maju menekankan pentingnya pemahaman agama yang moderat dan berorientasi pada kebaikan bersama serta perkembangan budaya yang dinamis dan inklusif. Pendekatan beragama yang maslahat mengedepankan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan persatuan sehingga dapat memperkuat harmoni sosial dan memperkukuh keberagaman bangsa.

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama mengukur tingkat keharmonisan dan toleransi antar umat beragama dalam suatu masyarakat atau negara. Indeks ini menilai seberapa baik berbagai kelompok agama dapat hidup berdampingan secara damai, menghormati perbedaan, dan menjalin kerja sama sosial. Tingginya indeks kerukunan berkontribusi pada stabilitas sosial, mencegah konflik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan nasional.

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah alat ukur yang menilai perkembangan dan pelestarian budaya dalam sebuah negara atau komunitas. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti pelestarian warisan budaya, partisipasi masyarakat dalam aktivitas budaya, serta inovasi dan kreativitas dalam seni dan kebudayaan. Pembangunan kebudayaan yang baik menjadi fondasi penting dalam menjaga identitas nasional sekaligus memperkuat daya saing bangsa.



Gambar 2.23. Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan meningkat dari 50,30 poin pada tahun 2020 menjadi 51,12 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kebudayaan daerah berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus berupaya untuk menanamkan nilai-nilai budaya pada masyarakatnya melalui keluarga, pendidikan melalui muatan lokal, dan pelestarian cagar budaya yang ada, serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kebudayaan.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas merupakan pondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat, harmonis, dan produktif. Kualitas keluarga dipengaruhi oleh aspek psikologis, fisik, serta sosial yang mendukung tumbuh kembang anggota keluarga secara optimal. Keluarga yang berkualitas dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang baik, menanamkan nilai-nilai moral, dan membentuk karakter generasi penerus bangsa. Kesetaraan gender adalah prinsip penting yang menjamin kesempatan, hak, dan peran yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Mewujudkan kesetaraan gender akan meningkatkan partisipasi perempuan, memajukan pembangunan ekonomi, serta memperkuat keadilan sosial.

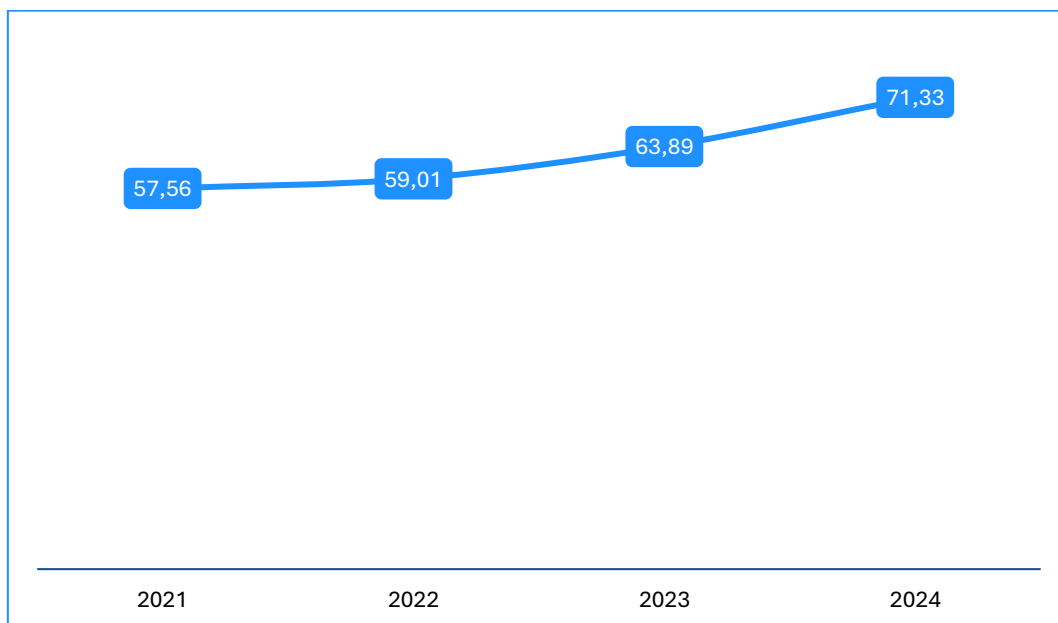
Sementara itu, masyarakat inklusif berkomitmen untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi seluruh individu tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal lainnya. Masyarakat seperti ini memastikan akses yang sama terhadap layanan sosial, pendidikan, dan kesempatan ekonomi bagi semua pihak.

A. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak mengukur efektivitas dan cakupan upaya dalam melindungi



hak-hak anak serta menjamin kesejahteraan mereka. Indeks ini menilai berbagai aspek seperti akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi, dan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal. Indeks yang tinggi menunjukkan bahwa negara atau komunitas berhasil menciptakan kondisi yang aman dan ramah anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.



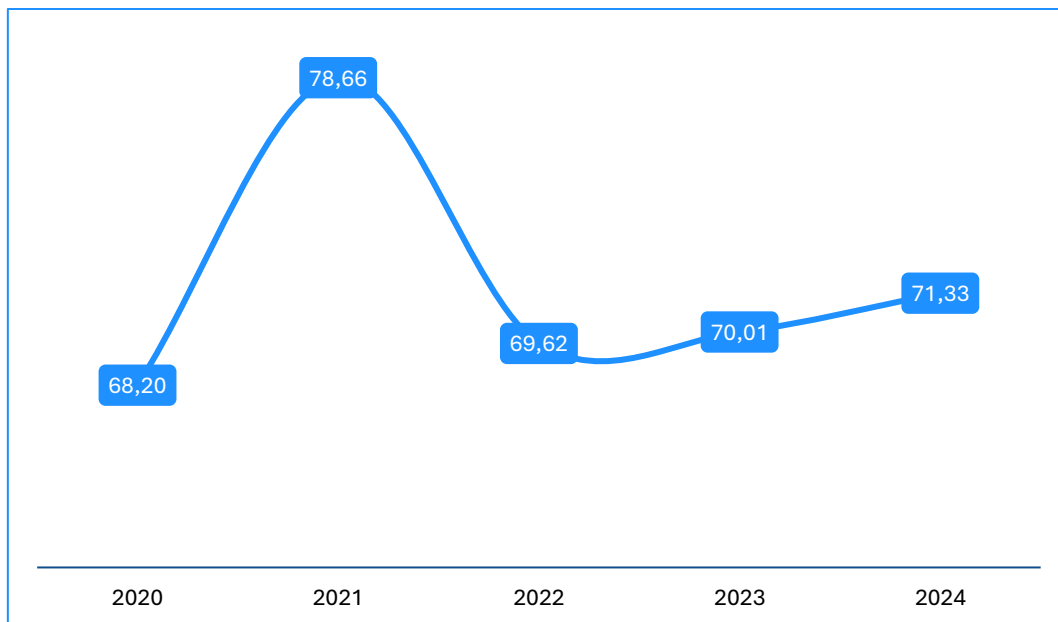
Gambar 2.24. Indeks Perlindungan Anak (Poin)

Sumber: *Siperindu.online*

Indeks Perlindungan Anak meningkat dari 57,56 poin pada tahun 2021 menjadi 71,33 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya perlindungan terhadap anak di Kabupaten Padang Lawas. Dalam rangka meningkatkan indeks ini, maka Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu menyusun regulasi dan kebijakan yang melindungi hak-hak anak, serta perlindungan terhadap berbagai tindakan negatif, serta menegakkannya secara adil sehingga setiap anak merasa aman dan nyaman.

B. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana perlindungan khusus diberikan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan atau menghadapi situasi khusus, seperti anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, anak jalanan, anak dengan disabilitas, atau anak yang berhadapan dengan hukum.



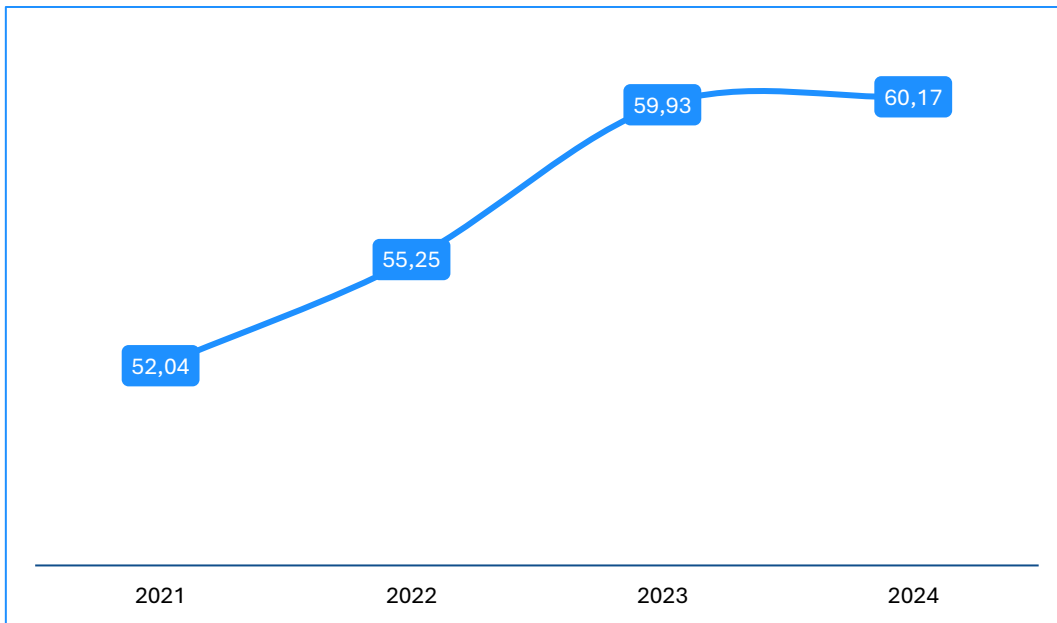
Gambar 2.25. Indeks Perlindungan Khusus Anak (Poin)

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan khusus Anak meningkat dari 68,20 poin pada tahun 2020 menjadi 78,66 poin pada tahun 2021, namun menurun pada tahun 2022 menjadi 69,62 poin dan berangsur meningkat hingga tahun 2024 menjadi 71,33 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak korban kekerasan, eksploitasi, anak jalanan, atau anak dengan kebutuhan khusus telah membaik. Layanan, kebijakan, dan mekanisme perlindungan khusus semakin efektif dalam memenuhi kebutuhan dan hak anak-anak tersebut. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan capaian tersebut, melalui penambahan fasilitas dan program rehabilitasi fisik, psikososial, dan hukum untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, peningkatan pelayanan terhadap anak-anak rentan, serta mengembangkan sistem pelaporan yang aman dan tepercaya.

C. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga adalah ukuran yang menilai kualitas dan kesejahteraan keluarga dalam hal aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Indeks ini mencakup faktor-faktor seperti tingkat pendidikan orang tua, kondisi kesehatan keluarga, kepastian ekonomi, dan keharmonisan rumah tangga. Keluarga yang berkualitas menjadi pondasi penting bagi pembangunan masyarakat yang sehat dan produktif.



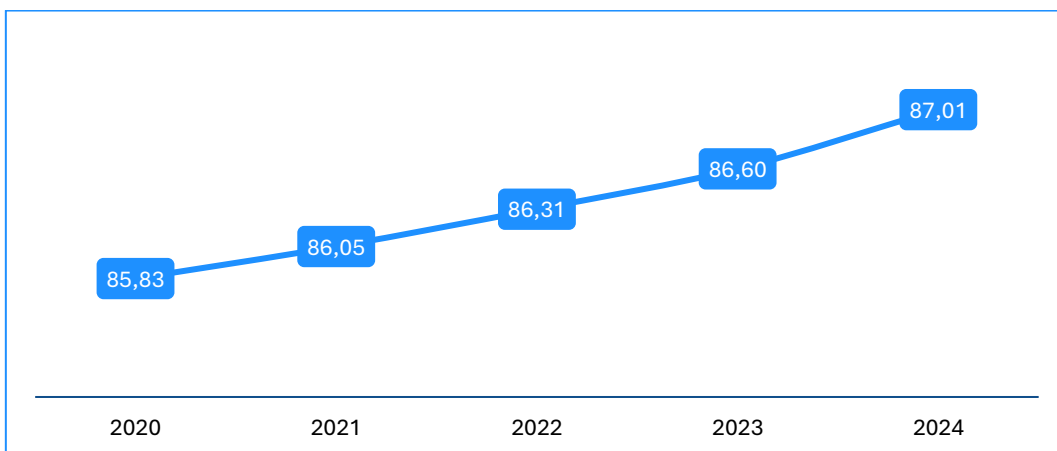
Gambar 2.26. Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)

Sumber: Siperindu.online

Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 52,04 poin pada tahun 2021 menjadi 60,17 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya pembangunan keluarga di Kabupaten Padang Lawas. Indeks ini dapat ditingkatkan melalui program-program pembinaan terhadap keluarga, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang setara pada setiap keluarga, dan penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

D. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merepresentasikan rasio perbandingan antara akses pembangunan pada penduduk wanita dan penduduk pria. Dengan kata lain, IPG membandingkan antara IPM wanita dan IPM pria. Angka IPG sebesar 1 mengindikasikan kesetaraan akses pendidikan dan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk wanita dan pria.



Gambar 2.27. Indeks Pembangunan Gender (Poin)

Sumber: BPS

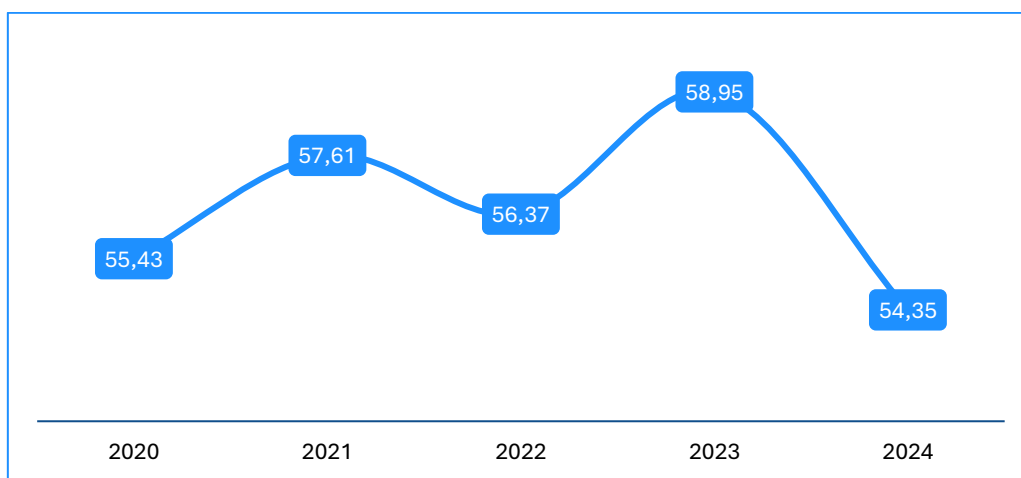
Indeks Pembangunan Gender terus meningkat setiap tahunnya dari 85,83 poin pada tahun 2020 menjadi 87,01 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa akses



pembangunan yang dirasakan oleh penduduk perempuan semakin setara dengan yang dirasakan oleh penduduk pria. Peningkatan ini perlu terus dijaga melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, terutama pada penduduk perempuan sehingga pada akhirnya mencapai kesetaraan dengan penduduk pria.

E. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan peran dari penduduk perempuan dalam pembangunan ekonomi dan daerah. Dengan meningkatnya IDG, maka mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk perempuan yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah.



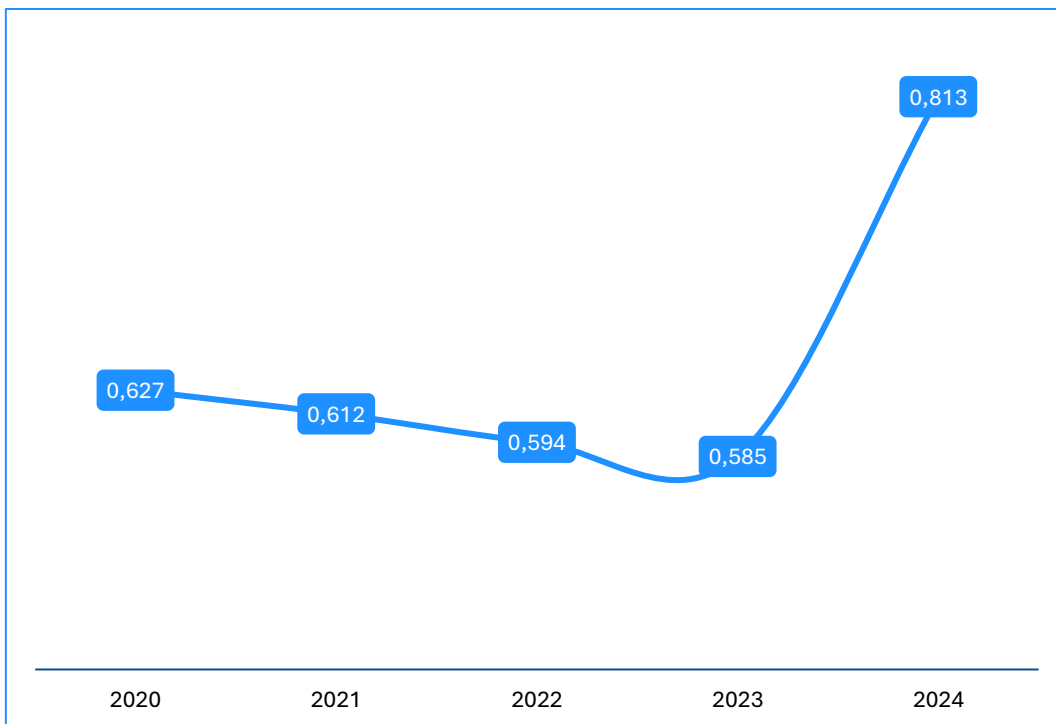
Gambar 2.28. Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)

Sumber: BPS

Indeks Pemberdayaan Gender selama tahun 2020-2024 berfluktuasi di mana pada tahun 2020 sebesar 55,43 poin menurun pada tahun 2024 menjadi 54,35 poin. Hal ini menandakan bahwa semakin berkurangnya peran penduduk perempuan dalam pembangunan daerah. Penurunan ini dapat disebabkan oleh semakin berkurangnya angkatan kerja wanita atau banyaknya wanita yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau melanjutkan pendidikan. Pemerintah dapat menyikapi hal tersebut dengan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi penduduk wanita, serta memberikan pelatihan dan pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja wanita yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

F. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan ketimpangan penduduk perempuan terhadap penduduk pria dari segi akses pembangunan (kesehatan dan pendidikan) serta pemberdayaan (angkatan kerja dan partisipasi politik). IKG yang tinggi menunjukkan bahwa perempuan mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, atau layanan kesehatan dibandingkan dengan laki-laki. IKG yang rendah menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan.



Gambar 2.29. Indeks Ketimpangan Gender (Poin)

Sumber: BPS

Indeks Ketimpangan Gender meningkat cukup tinggi dari 0,627 poin pada tahun 2020 menjadi 0,813 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin timpangnya kesetaraan gender antara penduduk wanita dan pria. Tingginya ketimpangan ini mengindikasikan adanya ketidaksetaraan bagi penduduk perempuan, mulai dari akses kesehatan, partisipasi terhadap pembangunan daerah. Pemerintah perlu meningkatkan perlindungan terhadap penduduk perempuan dalam memperoleh hak, serta pemberdayaan terhadap penduduk perempuan agar terlibat dalam pembangunan ekonomi daerah.

G. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indikator yang mengukur kemajuan pemuda di suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 5 aspek, meliputi: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan dan Kesejahteraan; 3) Lapangan dan Kesempatan Kerja; 4) Partisipasi dan Kepemimpinan; dan 5) Gender dan Diskriminasi.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

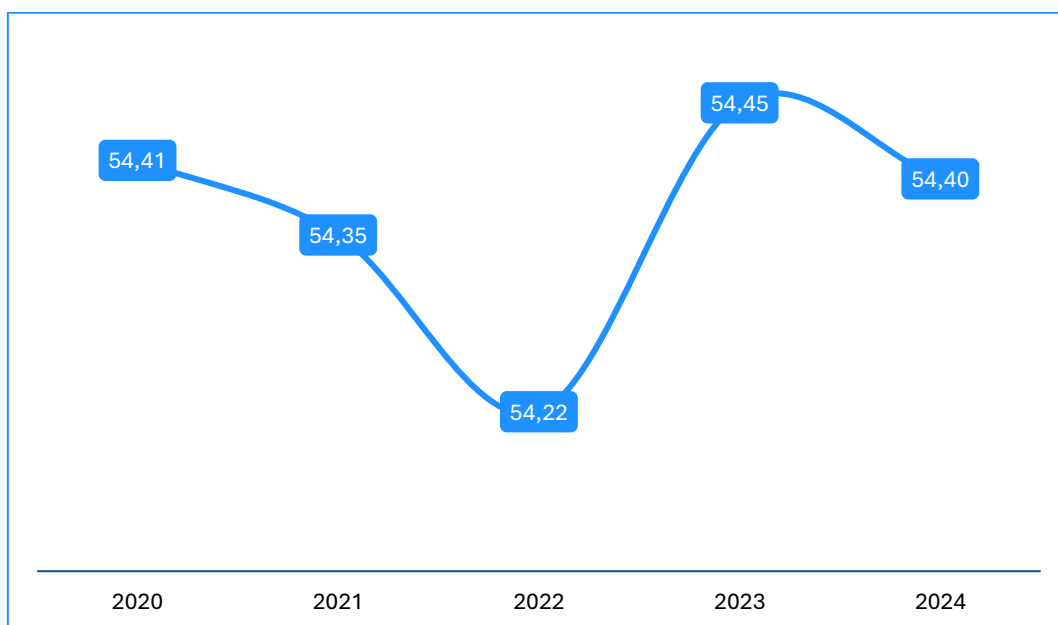
Aspek daya saing daerah mengacu pada kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Daya saing daerah ditentukan oleh berbagai faktor seperti infrastruktur yang memadai, kualitas sumber daya manusia, iklim usaha, inovasi teknologi, serta kebijakan pemerintah.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama yang



menentukan kemampuan suatu daerah dalam menghadapi persaingan global dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. SDM yang berkualitas tidak hanya ditandai oleh tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi juga keterampilan, kreativitas, kesehatan, dan adaptabilitas terhadap perubahan teknologi dan pasar kerja. Ketersediaan tenaga kerja atau penduduk produktif dapat dilihat dari angka ketergantungan, di mana indikator ini menggambarkan jumlah penduduk usia non-produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif



Gambar 2.30. Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk)

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Angka Ketergantungan selama 5 tahun cenderung berfluktuasi, di mana pada tahun 2024 mencapai sebesar 54,40 per 100 orang penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa sebanyak 100 orang penduduk usia produktif menanggung kurang lebih 55 orang penduduk usia tidak produktif. Capaian ini menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia non-produktif dibandingkan penduduk usia produktif pada Kabupaten Padang Lawas

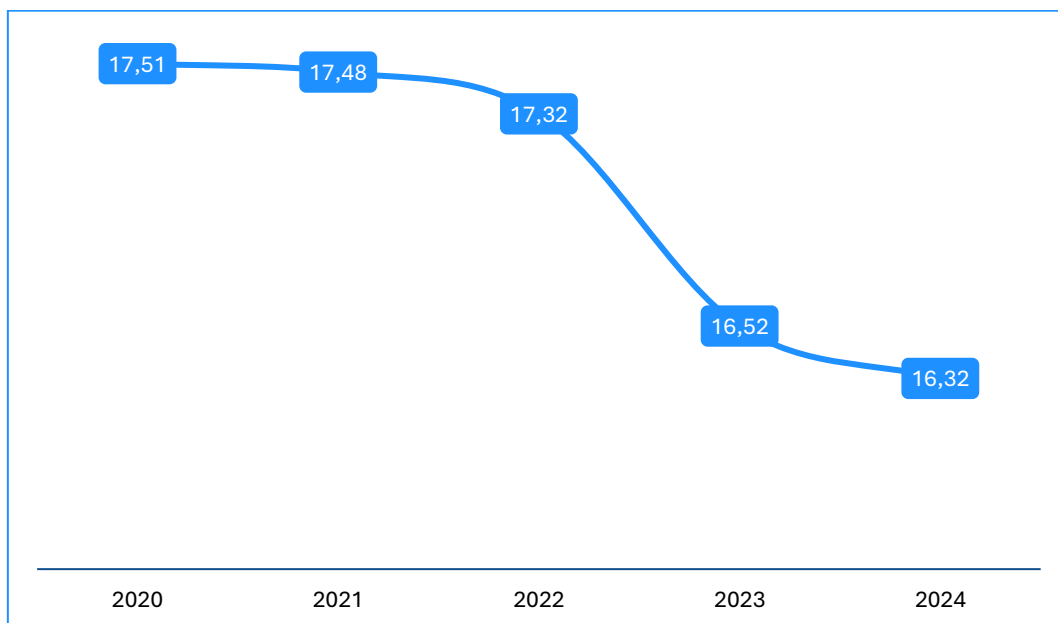
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta inovasi merupakan pendorong utama peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah. Kemajuan Iptek memungkinkan penggunaan sumber daya secara lebih efisien, penciptaan produk dan jasa baru, serta peningkatan kualitas produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun global. Inovasi, baik dalam proses maupun produk, menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha lokal, mendorong tumbuhnya industri kreatif, serta memperluas lapangan kerja. Sinergi antara teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia yang kompeten mempercepat transformasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tinggi dan berorientasi ekspor.



A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan merupakan kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB daerah. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah. Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan dapat dilihat pada gambar berikut:



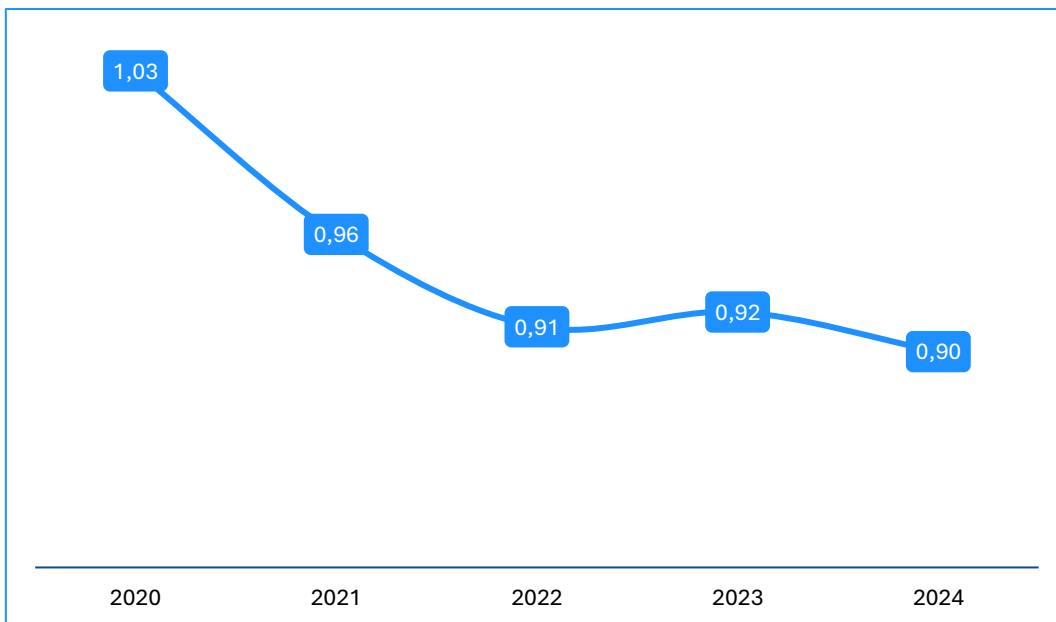
Gambar 2.31. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data BPS, Rasio PDRB Industri Pengolahan menurun dari 17,51 persen pada tahun 2020 menjadi 16,32 persen pada tahun 2024. Hal ini berarti bahwa semakin rendahnya produksi Sektor Industri Pengolahan pada Kabupaten Padang Lawas. Penurunan ini dapat disebabkan oleh semakin rendahnya produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan produk hilirisasi. Maka dari itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas sektor industri melalui riset dan inovasi. Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan investasi pada teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk-produk hilirisasi.

B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum merupakan rasio yang mengukur kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap perekonomian daerah. Sektor ini menjadi representasi dari Sektor Pariwisata karena sektor ini berkontribusi bagi akomodasi (hotel, penginapan, dll.) Makan dan Minum (restoran, café, dll.).



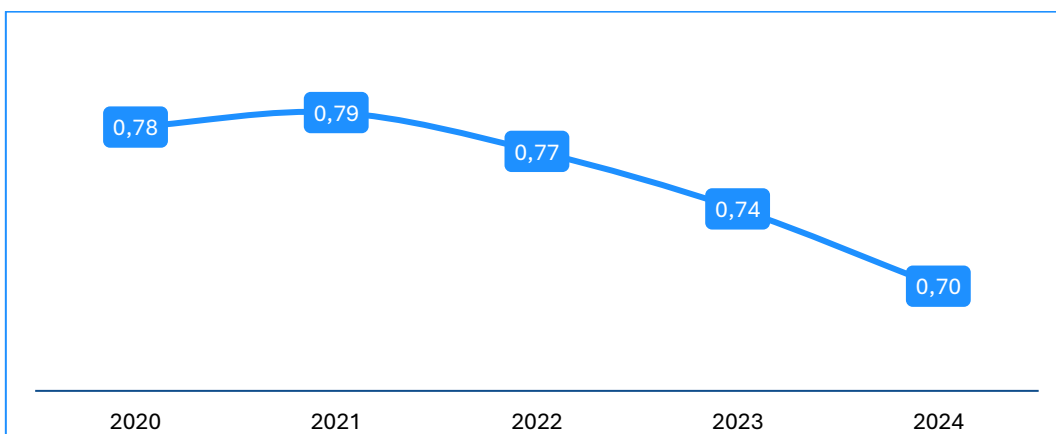
Gambar 2.32. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%)

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum menurun dari 1,03 persen pada tahun 2020 menjadi 0,90 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin rendahnya kontribusi sektor terkait dalam perekonomian Kabupaten Padang Lawas. Penurunan ini dapat disebabkan oleh menurunnya daya tarik daerah dalam menarik turis atau wisatawan domestik dan asing yang berkunjung ke daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan daya saing destinasi wisata sehingga diharapkan tingkat kunjungan wisatawan semakin meningkat dan berkontribusi bagi usaha sekitar.

C. Sektor Jasa Keuangan

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan menggambarkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian daerah. Sektor ini juga berperan penting bagi perekonomian daerah karena berperan sebagai sumber pendanaan dari aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Perkembangan rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.33. Rasio PDRB Jasa Keuangan (%)

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas



Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Padang Lawas, terjadi penurunan kontribusi dari 0,78 persen pada tahun 2020 menjadi 0,70 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin rendahnya nilai produksi yang dihasilkan dari Sektor Jasa Keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya kuantitas penyedia jasa keuangan di Kabupaten Padang Lawas, serta rendahnya literasi masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk keuangan.

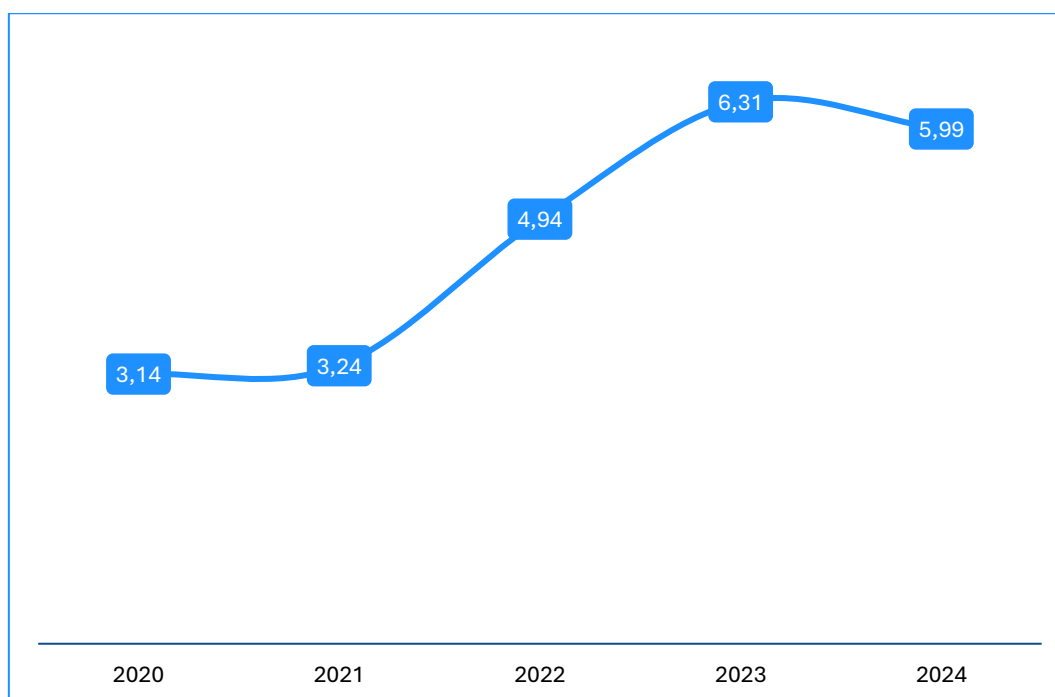
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (ADHB) (%)	0,016	0,018	0,018	0,018	0,015
Total Kredit/PDRB ADHB (%)	0,094	0,095	0,081	0,067	0,065

Sumber: BPS, BI (diolah, 2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kontribusi dari penyaluran kredit dan simpanan masyarakat dalam mendorong perekonomian daerah. Masyarakat perlu didukasi terkait produk-produk keuangan dan manfaatnya sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai PDRB dari Sektor Jasa Keuangan di Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah dan pelaku usaha juga perlu mendorong inovasi dan diversifikasi dari produk-produk keuangan.

D. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah ukuran yang menunjukkan persentase jumlah wirausahawan aktif dalam suatu populasi atau angkatan kerja tertentu. Rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan bisnis dan usaha mandiri yang menjadi indikator penting dalam menilai dinamika ekonomi serta potensi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.



Gambar 2.34. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

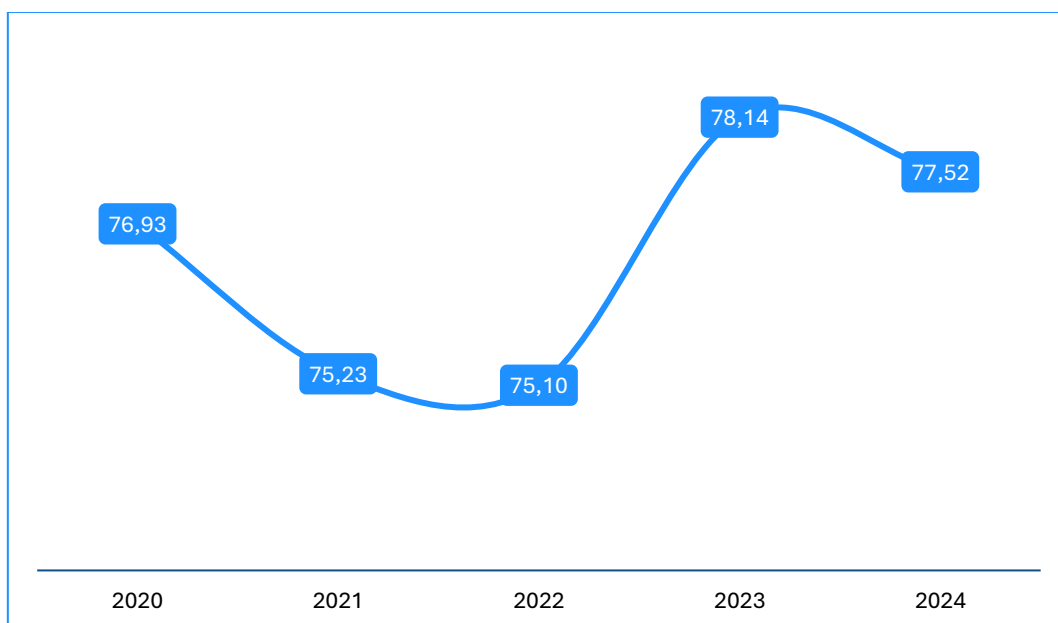
Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas



Rasio Kewirausahaan daerah meningkat dari 3,14 persen pada tahun 2020 menjadi 5,99 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya masyarakat yang membuka usaha sendiri sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Peningkatan ini merupakan hal yang positif yang berarti pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk berwirausaha melalui kemudahan akses permodalan kepada pelaku usaha, keringanan pajak, atau pun peningkatan kapasitas pelaku usaha sehingga ke depannya semakin banyak masyarakat yang berwirausaha dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan ketersediaan tenaga kerja pada suatu daerah, baik yang sedang bekerja atau pun yang sedang mencari kerja. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.35. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

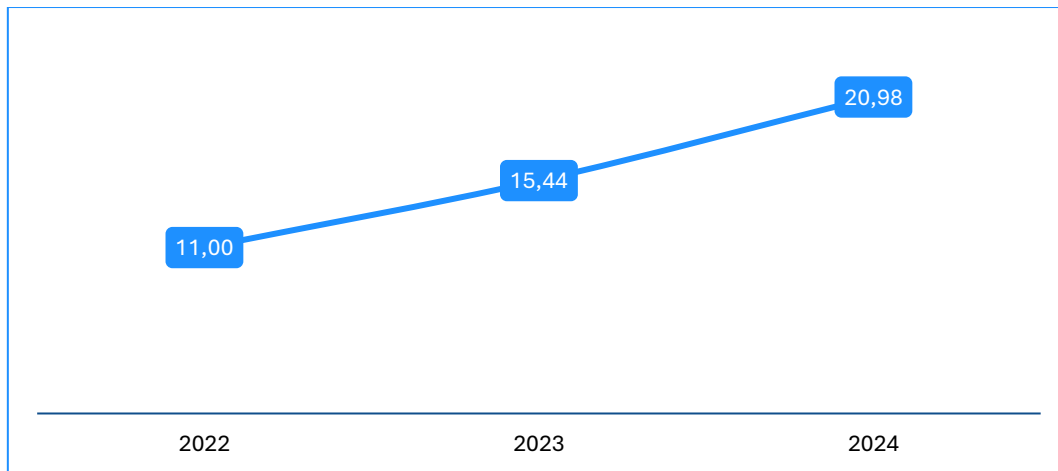
TPAK Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 76,93 persen pada tahun 2020 mencapai 77,52 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya supply tenaga kerja yang tersedia di daerah. Hal ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja yang tersedia melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan sehingga mampu bersaing sesuai dengan tuntutan industri saat ini dan di masa mendatang.

F. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah alat ukur yang menilai kemampuan suatu daerah dalam menciptakan, mengadopsi, dan menyebarkan inovasi untuk mendukung pembangunan dan



peningkatan daya saing daerah. Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.36. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Padang Lawas (Poin)

Sumber: Kepmendagri

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan dari 11,00 poin menjadi 20,98 poin dari tahun 2022-2024. Hal ini menandakan bahwa Inovasi Daerah Kabupaten Padang Lawas masih berada pada kategori "Kurang Inovatif". Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus berupaya untuk mendorong setiap perangkat daerah dalam melakukan inovasi sesuai dengan bidangnya agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dapat meningkatkan inovasi daerah melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta pemberian insentif bagi inovasi-inovasi yang dihasilkan. Selain itu, pemerintah juga dapat menjalin kemitraan dengan akademisi dan lembaga riset, serta sektor swasta untuk mendukung pengembangan inovasi yang relevan.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru menjadi aspek penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ekonomi hijau fokus pada pengembangan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya alam, serta mampu mengurangi emisi karbon dan limbah. Prinsip ini mendukung pelestarian ekosistem darat dan keberlangsungan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Sementara itu, ekonomi biru menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, seperti perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan dari laut, dan pelestarian ekosistem laut. Penerapan ekonomi biru bertujuan menjaga kesehatan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek kehidupan dan kegiatan ekonomi suatu daerah, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan layanan publik. Penerapan transformasi digital meliputi penggunaan



teknologi informasi dan komunikasi (TIK), otomasi, *big data*, kecerdasan buatan, serta *platform* digital dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan industri.

Transformasi digital memperkuat daya saing daerah dengan membuka akses pasar yang lebih luas, mempercepat inovasi, dan menciptakan model bisnis baru yang adaptif terhadap perubahan global. Selain itu, transformasi ini juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

A. Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital merupakan indikator yang mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Indeks ini mencerminkan seberapa jauh masyarakat telah mengadopsi teknologi digital dan kemampuan mereka dalam mengakses serta menggunakan informasi secara efektif. Peningkatan indeks masyarakat digital sangat penting dalam mendorong inklusi digital dan mempercepat transformasi teknologi di era modern.

Tabel 2.20. Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Padang Lawas

Pilar	2023	2024	Sub Pilar	2023	2024
Infrastruktur dan Ekosistem	57,98	46,87	Akses dan Adopsi Teknologi	59,48	62,58
			Ekosistem Pembelajaran	50,42	35,51
			Digitalisasi Pemerintah	70,30	44,89
Keterampilan Digital	64,39	57,49	Komplementaritas	62,81	56,48
			Pengenalan	65,25	57,31
			Keamanan TIK	65,06	58,65
Pemberdayaan	28,91	22,85	Konsumen/Pengguna	31,72	27,40
			Penjual/Penyedia	26,10	18,30
Pekerjaan	37,06	34,18	Permintaan	53,65	56,66
			Penawaran	20,48	11,70
Indeks Masyarakat Digital				47,20	40,18

Sumber: *imdi.sdmdigital.id*

Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan dari 47,20 poin pada tahun 2023 menjadi 40,18 poin pada tahun 2024. Pada Pilar Infrastruktur dan Ekosistem mengalami penurunan dari 57,98 poin pada tahun 2023 menjadi 46,87 poin pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan bahwa semakin rendahnya ketersediaan dan adopsi teknologi di Kabupaten Padang Lawas. Dilihat dari sub-pilarnya, Ekosistem Pembelajaran dan Digitalisasi Pemerintah mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa semakin rendahnya penerapan teknologi digital dalam proses pembelajaran di sekolah, di mana hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas pembelajaran menggunakan teknologi. Di sisi pemerintah, semakin rendahnya capaian ini menandakan



bahwa kurangnya penerapan teknologi dalam pelayanan publik. Masih banyaknya situs dan aplikasi yang rusak menjadi salah satu penyebab menurunnya sub-pilar digitalisasi pemerintah. Di samping itu, perlu peningkatan kualitas dan keterampilan ASN dalam mengoperasikan teknologi digital untuk pelayanan publik.

Pilar Keterampilan Digital mengalami penurunan dari 64,39 poin pada tahun 2023 menjadi 57,49 poin pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan dari seluruh komponen penyusun Pilar Keterampilan Digital. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendahnya keterampilan masyarakat dalam memahami penggunaan berbagai jenis teknologi dan alat komunikasi digital. Untuk menyikapi hal tersebut, maka sebaiknya pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi, terutama pendidikan pada sekolah atau sosialisasi melalui media digital.

Pilar Pemberdayaan mengalami penurunan dari 28,91 poin pada tahun 2023 menjadi 22,85 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendahnya pemanfaatan teknologi digital, baik dalam hal produktif, maupun konsumtif. Penurunan ini menjadi perhatian karena hal ini menandakan semakin rendahnya masyarakat yang menggunakan teknologi digital dalam aktivitasnya.

Pilar Pekerjaan mengalami penurunan dari 37,06 poin pada tahun 2023 menjadi 34,18 poin pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital, sementara permintaannya semakin meningkat. Untuk menyikapi hal tersebut, maka sebaiknya keterampilan tenaga kerja ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan digital sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan upaya menghubungkan pasar, produksi, dan sumber daya antar wilayah di dalam negeri dengan pasar serta jaringan ekonomi internasional. Dengan integrasi yang kuat, daerah dapat memanfaatkan keunggulan komparatif, memperluas akses pasar bagi produk lokal, serta menarik investasi asing dan teknologi baru. Hal ini memperkuat daya saing regional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.21. Capaian Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
PMTB terhadap PDRB (%)	23,96	24,01	23,86	24,14	23,96
Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	44,42	46,11	47,38	47,46	47,66

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas (Diolah, 2025)



PMTB terhadap PDRB relatif stabil berada pada kisaran 23-24 persen selama tahun 2020-2024, di mana pada tahun 2024 mencapai 23,96 persen kembali. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran untuk barang fisik dan non-fisik relatif tidak meningkat atau pun menurun selama periode tersebut. Sementara itu, Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 44,42 persen pada tahun 2020 menjadi 47,66 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak barang dan jasa yang diekspor dari Kabupaten Padang Lawas di pasar domestik dan internasional. Meskipun demikian, ekspor barang dan jasa yang berasal dari Kabupaten Padang Lawas harus dicermati apakah ekspor dari barang mentah yang lebih banyak atau ekspor barang bernilai tambah. Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan ekspor pada produk hilirisasi atau produk yang bernilai tambah untuk mempercepat pembangunan daerah.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang saling melengkapi. Kawasan perkotaan biasanya menjadi pusat kegiatan industri, jasa, inovasi, dan konsentrasi modal, sedangkan kawasan perdesaan merupakan basis utama sektor pertanian, agroindustri, dan sumber daya alam.

Pengembangan yang seimbang dan sinergis antara perkotaan dan perdesaan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan, menekan urbanisasi yang tak terkendali, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Pendekatan pembangunan wilayah yang terintegrasi harus mendukung peningkatan infrastruktur, akses pasar, kapasitas sumber daya manusia, dan teknologi di kedua wilayah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Tabel 2.22. Capaian Indikator Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (%)	44,42	46,11	47,38	47,46	47,66
Indeks Desa Membangun (Poin)	0,5792	0,5807	0,5902	0,6159	0,6217
Persentase Desa Mandiri (%)	N/A	N/A	N/A	0,33	0,33

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Lawas, Kemendes

Rumah tangga yang memiliki akses hunian layak dan terjangkau meningkat dari 44,42 persen pada tahun 2020 menjadi 47,66 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan



keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menyediakan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketersediaan rumah yang layak untuk masyarakat melalui pembangunan dan rehabilitasi. Indeks Desa Membangun Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 0,5792 poin pada tahun 2020 menjadi 0,6217 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya desa yang meningkat statusnya di Kabupaten Padang Lawas. Pembangunan desa yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas sudah cukup baik. Persentase Desa Mandiri pada tahun 2023-2024 hanya sebesar 0,33 persen atau sebanyak 1 desa dari 303 desa. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan desa dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ini mencakup pengendalian inflasi, kestabilan nilai tukar, kesehatan fiskal daerah, serta tingkat pengangguran yang terkendali. Pemerintah Daerah perlu menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, mengelola anggaran dengan hati-hati, serta memastikan likuiditas dan ketersediaan kredit untuk sektor produktif. Stabilitas ekonomi makro juga berperan dalam menjaga kepercayaan pelaku ekonomi, mencegah volatilitas pasar, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Tabel 2.23. Capaian Indikator Stabilitas Ekonomi Makro

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,107	0,101	0,147	0,125	0,019
Tingkat Inflasi (Kota Padangsidempuan) (%)	3,27	1,49	6,40	2,95	2,46

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas (Diolah, 2025)

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB menggambarkan kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan data historis, rasio ini meningkat dari 0,107 persen pada tahun 2020 menjadi 0,019 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih kecilnya kontribusi pajak daerah bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Padang Lawas. Sementara itu, tingkat inflasi Kabupaten Padang Lawas mengacu pada inflasi Kota Padang Sidempuan, di mana inflasi mengalami peningkatan dari 3,27 persen pada tahun 2020 menjadi 6,40 persen pada tahun 2022, lalu menurun hingga tahun 2024 mencapai 2,46 persen. Penurunan ini menandakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait



dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa semakin membaik setelah puncaknya pada tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan kerjasama dengan beberapa daerah sekitarnya agar menjaga ketersediaan dan distribusi barang dan jasa kepada masyarakat.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum mencakup seluruh upaya dan kegiatan pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Pelayanan ini meliputi sektor pendidikan, kesehatan, perizinan, keamanan, administrasi kependudukan, serta infrastruktur publik seperti air bersih, listrik, dan transportasi. Pelayanan umum sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat rasa keadilan sosial, serta mendukung pembangunan yang inklusif. Peningkatan pelayanan dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Regulasi yang baik harus mampu menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan publik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.24. Capaian Indikator Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	97,14
Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	40,68	40,05	46,78	46,31	58,54
Indeks SPBE (Poin)	N/A	N/A	N/A	2,02	2,17
Indeks Pelayanan Publik (Poin)	N/A	2,30	3,07	N/A	4,10
Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	N/A	N/A	N/A	93,71	N/A
Indeks Integritas Nasional (Poin)	N/A	72,72	71,45	73,52	76,14

Sumber: Kemendagri, jaga.id

Pada tahun 2024 Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Padang Lawas sebesar 97,14 poin. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan reformasi hukum semakin baik di Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus berupaya untuk memperkuat regulasi dan menegakkan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat. Pada tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Padang Lawas ini berada pada angka 40,68 dengan



predikat C (kurang) dan meningkat menjadi 58,54 pada tahun 2024. Pencapaian ini sudah berada pada predikat CC (Cukup). Data ini mengindikasikan perlunya upaya yang serius dan konsisten dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam melakukan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah di masa mendatang.

Pada tahun 2021 Indeks SPBE mencapai nilai 1,37 poin meningkat hingga tahun 2024 menjadi 2,17 poin, di mana capaian ini masih berada dalam predikat Kurang. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja tata kelola SPBE dan manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2021 sebesar 2,30 poin meningkat hingga tahun 2024 mencapai 4,10 poin dengan kategori B. Hal ini berarti bahwa unit pelayanan di Kabupaten Padang Lawas sudah menerapkan kebijakan pelayanan, namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah memiliki sarana prasarana yang cukup dan memiliki beberapa media sebagai informasi pelayanan publik serta media konsultasi dan pengaduan, dan sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.

Indeks Integritas Nasional adalah pengukuran tingkat risiko korupsi di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Indeks Integritas Nasional di Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 72,72 poin pada tahun 2021 dengan kategori "Rentan" menjadi 76,14 poin pada tahun 2024 yang berada pada kategori "Waspada". Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan yang bersih dan transparan kepada masyarakat.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum Berkeadilan adalah prinsip hukum yang menjamin perlakuan sama, transparansi, dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Hukum yang berkeadilan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan menjamin hak-hak dasar setiap individu, sekaligus mendukung penegakan tata kelola pemerintahan yang baik. Keamanan Nasional yang Tangguh mencakup kemampuan suatu negara dalam menjaga kedaulatan, melindungi warga dan sumber daya dari ancaman baik internal maupun eksternal. Keamanan



yang tangguh menjadi prasyarat stabilitas sosial dan politik yang memungkinkan pembangunan ekonomi dan sosial berjalan lancar. Demokrasi Substansial mengacu pada penerapan demokrasi yang tidak sekadar prosedural, tetapi juga mencakup pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Demokrasi substansial memastikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk kesejahteraan rakyat secara nyata

Tabel 2.25. Capaian Indikator Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

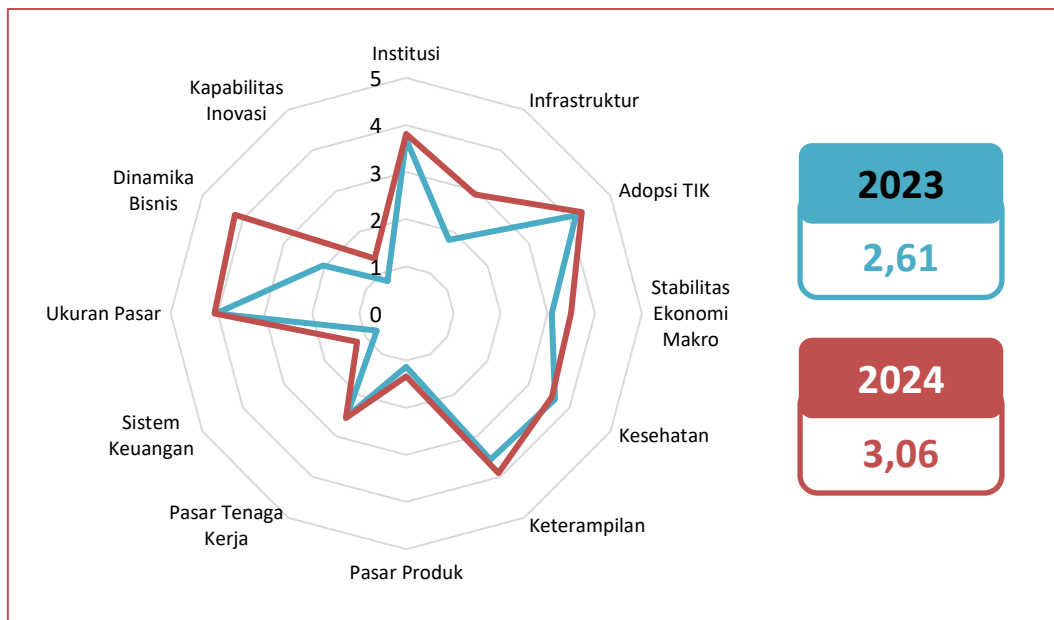
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda (%)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP

Penegakan Perda merupakan seberapa efektif suatu daerah dalam menegakkan Peraturan Daerahnya. Capaian 95,00 persen hingga tahun 2024 menandakan bahwa masih adanya Perda yang belum ditegakkan secara efektif oleh Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Satpol PP dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. Ketangguhan diplomasi mengedepankan kemampuan negosiasi, diplomasi multilateral, serta pembangunan kemitraan strategis dengan negara-negara tetangga untuk menciptakan perdamaian dan kerja sama yang berkelanjutan. Di sisi lain, pertahanan berdaya gentar kawasan mengacu pada strategi pertahanan yang efektif dan kuat, yang tidak hanya mampu menghadirkan kekuatan militer yang handal, tetapi juga mengoptimalkan sinergi antara unsur militer, ekonomi, teknologi, dan intelijen. Hal ini bertujuan untuk mencegah agresi dan menjaga kedaulatan serta integritas wilayah dari berbagai ancaman.



Gambar 2.37. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Padang Lawas

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Indeks Daya Saing Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menciptakan kondisi yang mendukung aktivitas ekonomi, menarik investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. IDSD mencerminkan kekuatan kompetitif suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam aspek-aspek seperti Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi. IDSD Kabupaten Padang Lawas meningkat dari 2,61 poin pada tahun 2023 menjadi 3,06 poin pada tahun 2024. Komponen IDSD paling tinggi adalah adopsi TIK yang pada tahun 2024 telah mencapai nilai 4,30 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur digital di Kabupaten Padang Lawas semakin membaik sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses dan inovasi produk yang berujung pada peningkatan ekonomi yang produktif.

Namun, komponen yang masih lemah pada daya saing daerah Kabupaten Padang Lawas adalah Sistem Keuangan, di mana pada tahun 2024 memiliki nilai 1,20 poin. Hal ini menandakan bahwa kurangnya ketersediaan lembaga keuangan yang memadai di Kabupaten Padang Lawas. Selain itu, yang menjadi penyebab adalah kurangnya literasi masyarakat dalam memahami produk perbankan. Kedua adalah Pasar Produk, yaitu kondisi persaingan usaha di daerah. Capaian komponen ini untuk Kabupaten Padang Lawas sebesar 1,34 poin, hal ini mengindikasikan bahwa persaingan bisnis di Kabupaten Padang Lawas dinilai kurang sehat. Masih adanya praktik monopoli pada beberapa bidang usaha dapat menjadi salah satu penyebab dari persaingan yang kurang sehat tersebut. Ketiga adalah Kapabilitas Inovasi, di mana pada tahun 2024 mencapai nilai sebesar 1,35 poin. Hal ini menandakan bahwa masih lemahnya kemampuan Kabupaten Padang Lawas dalam menciptakan produk yang inovatif.



Kurangnya kesadaran dan kapasitas inovasi masyarakat dapat menjadi penyebab dari lemahnya nilai ini.

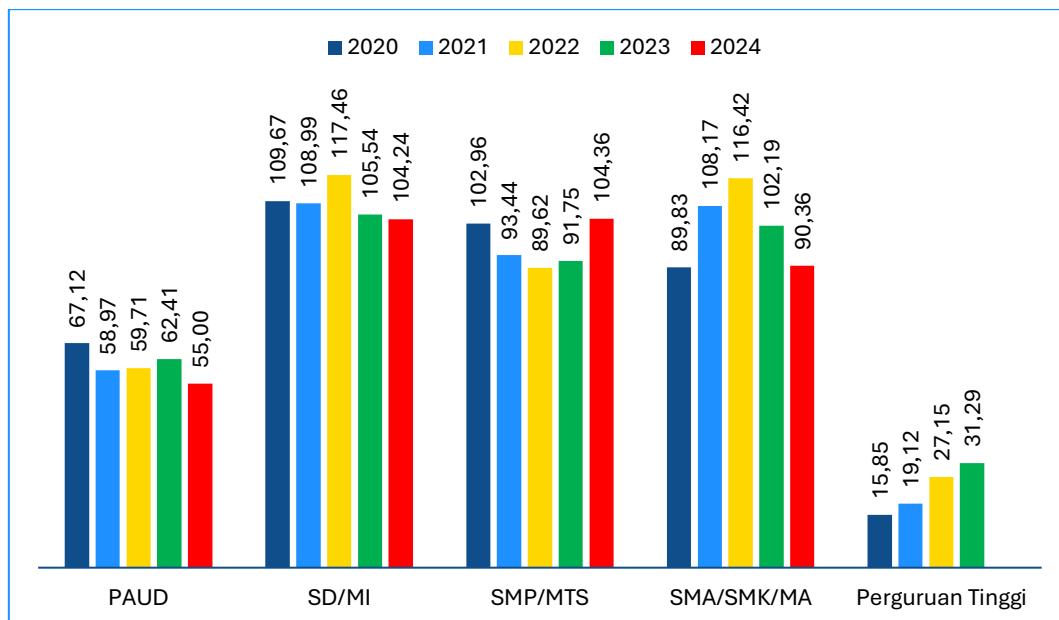
2.4.4 Urusan Pemerintah Wajib Layanan Dasar

Layanan Pemerintah Wajib Dasar adalah serangkaian pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Layanan ini mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan primer, penyediaan air bersih, sanitasi, kesejahteraan sosial, dan keamanan masyarakat.

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu layanan pemerintah wajib dasar yang berperan krusial dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan akses pendidikan dasar yang inklusif, berkualitas, dan merata bagi seluruh anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis. Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK merupakan indikator yang mengukur persentase jumlah murid yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan dibandingkan dengan total populasi usia yang seharusnya mengikuti jenjang pendidikan tersebut, tanpa memperhitungkan apakah murid tersebut berusia standar atau tidak. APK dapat lebih dari 100% karena termasuk peserta didik yang tidak sesuai usia.



Gambar 2.38. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Padang Lawas (%)

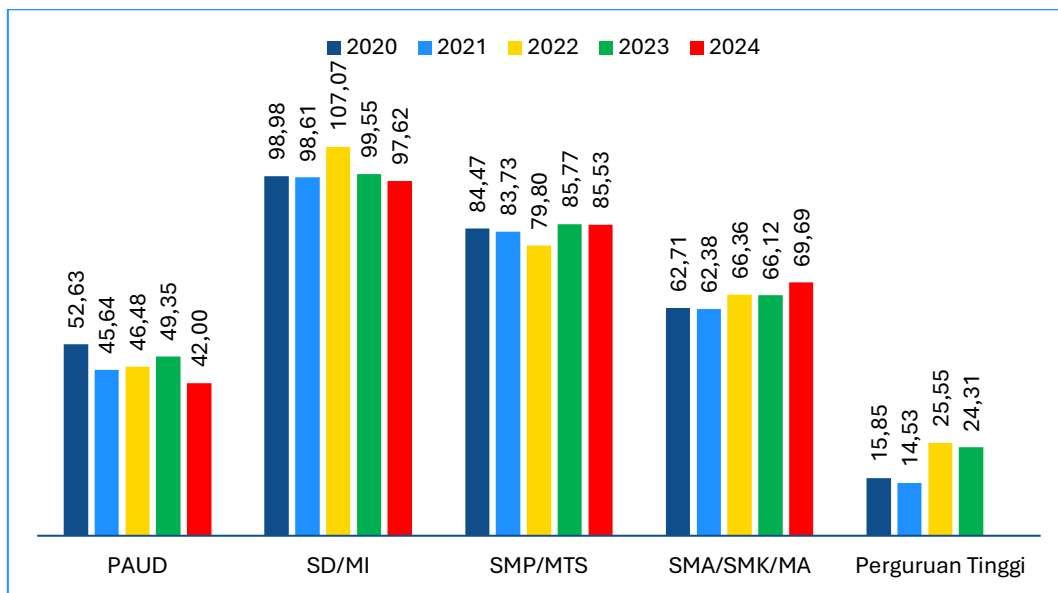
Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Padang Lawas pada jenjang pendidikan PAUD cenderung menurun dari 67,12 persen pada tahun 2020 menjadi 55,00 persen pada tahun 2024, kemudian SD/MI cenderung menurun dari 109,67 persen pada tahun 2020 menjadi



104,24 persen pada tahun 2024. Sementara, untuk jenjang pendidikan SMP/MTS relatif meningkat, sementara untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA meningkat pada tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2024. Pada jenjang perguruan tinggi, APK terus mengalami peningkatan yang signifikan dari 15,85 persen pada tahun 2020 menjadi 31,29 persen pada tahun 2024.

APM adalah persentase jumlah murid yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu yang benar-benar terdaftar pada jenjang tersebut dibandingkan dengan total populasi usia standar jenjang pendidikan itu.



Gambar 2.39. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Padang Lawas (%)

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan PAUD cenderung menurun dari 5263 persen pada tahun 2020 menjadi 42,00 persen pada tahun 2024. Kemudian, jenjang pendidikan SD/MI pun relatif menurun dari 98,98 persen pada tahun 2020 menjadi 97,62 persen pada tahun 2024. Sementara, untuk SMP/MTS dan SMA/SMK/MA relatif meningkat selama tahun 2020-2024. Pada jenjang Perguruan Tinggi pun cenderung meningkat dari 15,85 persen pada tahun 2020 menjadi 25,55 persen pada tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2024 menjadi 24,31 persen.

Jika dilihat berdasarkan perkembangannya, hal ini menandakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum memperoleh akses pendidikan yang sama. Capaian kinerja pendidikan Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

Tabel 2.26. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	10,33	11,32	11,78	11,20	11,28



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,98	98,61	91,35	99,55	97,62
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	77,55	85,73	88,19	86,50	85,53
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A	11,64	95,30	91,34	97,20	89,40
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs/ Paket B	84,80	84,30	88,18	92,30	86,13
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	98,83	102,00	100,00	100,00	100,00
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	97,07	87,00	98,00	99,00	99,00
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	86,32	95,12	94,32	99,00	78,01
Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,10	0,30	2,00	0,10	0,25
Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,20	0,70	2,00	0,30	0,29
Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	91,78	91,86	92,54	92,67	93,00
Ruang kelas SD/MI kondisi baik (%)	75,15	78,22	79,65	80,20	80,70
Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik (%)	60,52	62,22	63,75	64,33	65,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas, BPS Kabupaten Padang Lawas

Penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi meningkat dari 10,33 persen pada tahun 2020 menjadi 11,28 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Hal ini harus didorong oleh pemerintah daerah agar semakin banyak masyarakat yang memiliki kualifikasi sehingga mampu berdaya saing dalam dunia usaha dan industri ke depannya. Data ketersediaan ruang kelas dalam kondisi baik pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs masih belum maksimal, dapat dilihat masih adanya sebesar 19,30 persen kelas yang tidak dalam kondisi baik pada jenjang SD/MI dan sebanyak 35,00 persen kelas yang tidak dalam kondisi baik pada jenjang SMP/MTs. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk melakukan renovasi pada sekolah-sekolah dan menyediakan, serta memperbaiki fasilitas sekolah.

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan layanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas. Fokus utama adalah pelayanan kesehatan primer, pencegahan



penyakit, serta promosi hidup sehat yang menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

Tabel 2.27. Fasilitas Kesehatan

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit	2	1	1	2	2
Puskesmas Rawat Inap	4	4	4	4	4
Puskesmas Non Rawat Inap	12	12	12	12	13
Klinik Pratama	2	2	2	2	6
Posyandu	343	304	340	340	232
Rasio Rumah Sakit (1 : 100.000)	1 : 130.506	1 : 263.719	1 : 267.275	1 : 137.824	1 : 140.382

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas (Diolah, 2025)

Data pada tabel tersebut menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah. Namun, untuk rasio rumah sakit terhadap total penduduk menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Lawas hingga saat ini justru belum mampu memenuhi standar 1 : 100.000. Dalam menyikapi hal ini, maka sebaiknya Pemerintah mempertimbangkan penambahan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya sehingga setiap masyarakat dapat memperoleh hak yang sama. Data terkait tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28. Tenaga Kesehatan Kabupaten Padang Lawas

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter	108	56	43	66	124
Dokter Gigi	11		12	16	21
Perawat	217	247	133	146	354
Bidan	693	717	587	536	959
Tenaga Kefarmasian	33	30	32	262	100
Tenaga Kesehatan Masyarakat	60	-	35	63	124
Tenaga Kesehatan Lingkungan	14	-	13	15	25
Tenaga Gizi	17	15	22	43	60
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	14	-	33	40	60
Rasio Dokter (1 : 1.000)	1 : 2.417	1 : 4.709	1 : 6.216	1 : 4.176	1 : 2.264

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Padang Lawas. Hal ini menandakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan akses dan layanan kesehatan kepada masyarakatnya.



Namun, rasio dokter masih belum memenuhi standar 1 : 1.000 hingga tahun 2024. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan ketersediaan dokter di daerahnya sekaligus melakukan pemerataan distribusi dokter ke seluruh wilayah administrasinya.

Tabel 2.29. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Neonatal (Per 1.000 KH)	4,57	3,81	1,88	7,65	8,27
Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)	3,55	7,62	1,88	8,44	9,17
Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH)	0,76	1,27	0,13	8,83	9,62
Angka Kematian Ibu (Per 1.000 KH)	152,25	101,60	80,87	137,39	156,53
Balita Gizi Kurang (%)	3,73	3,73	3,76	3,90	2,30
Balita Gizi Buruk (%)	0,05	0,02	0,73	0,45	0,60

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKN di Kabupaten Padang Lawas menunjukkan penurunan signifikan dari 4,57 pada tahun 2020 menjadi 1,88 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022, di antara 1.000 kelahiran hidup ada 1-2 bayi yang meninggal sebelum usia satu bulan. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum berusia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 AKB di Kabupaten Padang Lawas mengalami fluktuasi. AKB tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 7,62 dan yang paling terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 1,88. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022, di antara 1.000 kelahiran hidup ada 1-2 bayi yang meninggal sebelum usia satu tahun. Angka Kematian Balita (AKBa) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal sebelum mencapai umur lima tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKBa di Kabupaten Padang Lawas terus mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2022, AKBa Kabupaten Padang Lawas sebesar 0,13, yang berarti pada 1.000 kelahiran hidup terdapat 0-1 balita meninggal sebelum mencapai umur lima tahun. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan selama kehamilan atau 42 hari setelah melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, di mana AKI Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2020 sebesar 152,25 menurun menjadi 80,87 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 80-81 kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup. Terkait dengan status gizi anak, persentase balita kurang mengalami



peningkatan dari 3,73 persen pada tahun 2020 menjadi 3,76 persen pada tahun 2022. Sementara itu, untuk persentase gizi buruk pada balita terjadi peningkatan dari tahun 2020 hanya sebesar 0,05 persen menjadi 0,73 persen pada tahun 2022. Terkait hal ini perlu dilakukan intervensi pemberian makanan bergizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan fungsi penting pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah. Layanan ini meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, serta pengelolaan tata ruang wilayah yang terencana. Pekerjaan Umum bertugas memastikan infrastruktur yang kokoh, aman, dan berkelanjutan sehingga mendukung mobilitas dan konektivitas antarwilayah, mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan produktivitas ekonomi. Penataan Ruang berfokus pada pengaturan penggunaan lahan dan tata letak wilayah agar pembangunan berjalan terkoordinasi, harmonis, dan ramah lingkungan. Dengan pengelolaan ruang yang baik, konflik pemanfaatan lahan dapat diminimalkan dan kualitas hidup masyarakat meningkat.

Tabel 2.30. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (%)	17,74	18,92	17,68	18,39	17,73
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik (%)	46,22	51,22	67,96	66,67	59,00
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	28,13	37,81	34,41	37,17	47,00
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%)	25,00	27,00	32,00	38,00	43,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada kondisi jalan masih terdapat banyak permasalahan, di mana pada tahun 2024 hanya sebesar 17,73 persen jalan dalam kondisi baik. Sementara itu, pada tahun 2024 jembatan dalam kondisi baik sebanyak 59,00 persen dari jumlah jembatan yang ada, jaringan irigasi sebanyak 47,00 persen dari panjang jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Padang Lawas, dan drainase dalam kondisi baik sebesar 43,00 persen. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebaiknya meningkatkan alokasi anggaran untuk perbaikan dan perawatan infrastruktur daerahnya agar aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan bagian penting dari layanan pemerintah wajib dasar yang bertujuan menyediakan hunian yang layak, terjangkau,



dan lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat. Pemerintah berperan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perumahan serta kawasan permukiman yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan.

Tabel 2.31. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Layak Huni (%)	60,90	62,00	64,20	66,00	67,00
Luasan Kawasan Kumuh (%)	35,33	34,66	33,63	31,00	30,33

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas

Persentase rumah layak huni meningkat dari 60,90 persen pada tahun 2020 menjadi 67,00 persen pada tahun 2024. Sementara, persentase luasan kawasan kumuh masih berada di atas 30 persen hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak rumah yang tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memfokuskan anggaran untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat dan menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Pemerintah wajib menjamin perlindungan warga dari berbagai ancaman, baik berupa tindak kriminal, gangguan ketertiban, bencana, maupun konflik sosial. Pelayanan ini meliputi pengelolaan sistem keamanan publik, penegakan hukum, pengaturan ketertiban lalu lintas, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, serta pemberdayaan masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan dan kegiatan sosial.

Tabel 2.32. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	100	100
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Kebakaran (%)	78	80	80	80	80
Tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran (menit)	> 15	> 15	> 15	> 15	> 15

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data tersebut ketersediaan perlindungan Linmas sudah memenuhi standar kebutuhan pada 1 wilayah kerja, kemudian tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) selalu terselesaikan. Namun, cakupan pelayanan kebakaran masih sebesar 80 persen pada tahun 2024. Begitu pula dengan tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran yang masih membutuhkan waktu lebih dari 15 menit. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan cakupan wilayah pemadam



kebakaran dengan membangun Posko Pemadam Kebakaran pada wilayah yang sulit terjangkau atau jauh dari Posko Pemadam Kebakaran lainnya.

F. Sosial

Urusan Sosial merupakan bagian dari layanan pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan dan pelayanan sosial kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Pemerintah harus menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar sosial melalui berbagai program perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial. Urusan ini meliputi penanganan masalah kemiskinan, pemenuhan hak-hak sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta pengembangan jejaring sosial dan komunitas yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat pelayanan rehabilitasi korban bencana, penyalahgunaan narkoba, dan penanganan sosial lainnya.

Tabel 2.33. Capaian Kinerja Urusan Sosial

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,30	0,50	0,70	0,90	1,00
Persentase PPKS yang tertangani (%)	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas

Disabilitas yang bekerja di sektor formal meningkat setiap tahunnya dari 0,30 persen pada tahun 2020 menjadi 1,00 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat rentan/disabilitas yang diserap oleh perusahaan. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu menjaga dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja disabilitas melalui peningkatan keterampilan masyarakat disabilitas dan menyusun regulasi atau kebijakan agar perusahaan wajib menyerap tenaga kerja disabilitas. Persentase PPKS yang tertangani juga meningkat dari 40,00 persen pada tahun 2020 menjadi 60,00 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak PPKS yang terpenuhi kebutuhannya. Capaian ini harus ditingkatkan dengan pemetaan PPKS dan distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran.

2.4.5 Urusan Pemerintah Wajib Layanan Non Dasar

Urusan Pemerintah Wajib Layanan Non Dasar adalah urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang tidak termasuk dalam layanan dasar (seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dll) namun tetap penting untuk menunjang pembangunan dan pelayanan publik.

A. Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja adalah bidang yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia melalui penyediaan layanan ketenagakerjaan. Fokusnya meliputi peningkatan keterampilan, penempatan kerja,



perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan kewirausahaan.

Tabel 2.34. Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 (%)	7,27	8,16	10,75	10,00	9,91
Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan (%)	0,45	0,70	0,68	0,77	0,59

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas

Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 cenderung meningkat dari 7,27 persen pada tahun 2020 menjadi 9,91 persen pada tahun 2024. Secara umum, tren ini dapat menunjukkan bahwa terjadi kenaikan tingkat pendidikan lulusan yang didaftarkan atau diukur, namun pada dua tahun terakhir rasio tersebut mulai stabil atau sedikit menurun. Persentase pencari kerja yang terdaftar dan berhasil ditempatkan naik dan turun secara fluktuatif dari 0,45 persen menjadi 0,59 persen 2020 sampai 2024. Kenaikan penempatan tenaga kerja dari 2020 ke 2021 dan dari 2022 ke 2023, menandakan perbaikan dalam penempatan tenaga kerja. Penurunan yang terjadi pada 2024 dapat disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi penempatan kerja seperti perubahan pasar tenaga kerja, ekonomi, atau kebijakan. Rasio lulusan pendidikan tinggi mengalami peningkatan hingga 2022, kemudian mulai sedikit menurun atau stabil. Penempatan pencari kerja menunjukkan fluktuasi dengan puncak tertinggi tahun 2023, namun menurun di tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memberikan perhatian khusus untuk memahami faktor penyebab penurunan rasio lulusan dan penurunan penempatan kerja pada tahun terakhir agar dapat mengoptimalkan kebijakan terkait sumber daya manusia.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan ini fokus pada upaya pemerintah dalam meningkatkan peran serta perempuan dalam berbagai bidang kehidupan serta memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan aman.

Tabel 2.35. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK Perempuan (%)	65,84	65,14	65,89	67,08	65,86
Kasus KDRT (Kasus)	2	2	3	3	2
Status Kabupaten Layak Anak (Kategori)	N/A	N/A	Prata ma	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas, KemenPPA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan relatif stabil sejak tahun 2020-2024 pada angka 65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk wanita yang lebih



memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau melanjutkan pendidikan Kasus KDRT selama tahun 2020-2024 tercatat kurang dari 3 kasus pada setiap tahunnya. Hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak pada tahun 2022 berada pada status Pratama. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam menyiapkan tenaga kerja perempuan. Di samping itu, perlu penguatan regulasi dan kebijakan terkait perlindungan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus sehingga setiap anak berkebutuhan khusus/rentan dapat hidup dengan aman di Kabupaten Padang Lawas.

C. Pangan

Urusan Pangan meliputi pengelolaan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan pasokan pangan bagi masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan pangan terpenuhi secara mencukupi, aman, dan bergizi untuk menunjang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.36. Capaian Kinerja Urusan Pangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	75,20	75,60	85,30	86,00	88,60
Ketersediaan Pangan Utama (%)	23,11	18,19	15,24	16,25	60,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas, Badan Pangan Nasional

Skor Pola Pangan Harapan meningkat dari 75,20 poin pada tahun 2020 meningkat hingga tahun 2024 menjadi 88,60 poin. Ketersediaan pangan utama juga semakin meningkat dari 23,11 persen pada tahun 2020 menjadi 60,00 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat. Namun, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebaiknya memastikan ketersediaan dan distribusi pangan secara merata di seluruh wilayah. Selain itu, perlu sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya mengonsumsi pangan yang beragam.

D. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam serta kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan.

Tabel 2.37. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (Poin)	N/A	80,00	92,47	51,67	50,00
Indeks Kualitas Udara (Poin)	N/A	82,00	58,75	93,81	91,02
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)	N/A	N/A	52,28	53,39	54,12

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data tersebut, Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Padang Lawas sudah



sangat baik, di mana pada tahun 2024 mencapai nilai sebesar 91,02 poin walaupun menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, untuk kualitas air dan tutupan lahan masing-masing sebesar 50,00 poin dan 54,12 poin. Pemerintah perlu berupaya untuk memastikan air yang aman bagi masyarakat dengan melakukan perbaikan habitat sungai, dan pengendalian sedimentasi untuk menjaga kualitas air alami, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di industri, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber air bersih dan tidak membuang limbah sembarangan. Untuk upaya meningkatkan kualitas tutupan lahan, Pemerintah dapat mengatur pemanfaatan lahan dengan zonasi yang memperhatikan konservasi dan aktivitas ekonomi dan memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan, kawasan lindung, dan kawasan ekosistem penting lainnya.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan ini meliputi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mencakup pencatatan kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, serta pencatatan penduduk lainnya secara akurat dan terintegrasi. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan layanan yang cepat dan tepat untuk menghasilkan data kependudukan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.38. Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	88,04	90,41	92,09	95,14	98,83
Rasio bayi berakte kelahiran (%)	85,78	86,77	90,57	91,63	92,18
Rasio pasangan berakte nikah (%)	50,69	43,69	49,85	52,14	56,04

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data tersebut, masih banyak masyarakat yang belum mengurus keperluan administrasinya kepada pemerintah. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya capaian indikator-indikator pada tabel tersebut. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus keperluan administrasinya serta meningkatkan sistem pelayanan yang responsif dan terpadu agar masyarakat dapat dengan mudah dan cepat dalam mengurus dokumen administrasinya.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa agar dapat mandiri, produktif, dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran dalam membina, membimbing, dan mendukung desa serta komunitas agar mampu mengelola potensi lokal secara optimal.

Tabel 2.39. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Desa Mandiri	0	0	0	1	1
Desa Maju	2	2	3	9	10
Desa Berkembang	104	100	123	202	213
Desa Tertinggal	177	189	165	87	77
Desa Sangat Tertinggal	20	12	12	4	2

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kemendes

Pada tahun 2023 Kabupaten Padang Lawas berhasil memiliki 1 desa dengan status desa mandiri, sementara desa maju terus meningkat dari 2 desa pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menjadi 10 desa. Kabupaten Padang Lawas masih memiliki sebanyak 77 desa tertinggal dan 2 desa sangat tertinggal pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan status seluruh desa di Kabupaten Padang Lawas.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan ini berfokus pada pengelolaan dan pengendalian jumlah, kualitas, dan distribusi penduduk untuk mendukung pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bertugas melaksanakan program keluarga berencana (KB) serta kebijakan pengendalian penduduk lainnya demi tercapainya kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

Tabel 2.40. Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (Anak Per Wanita)	3,19	3,14	3,10	3,13	3,02
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Anak Per 1.000 Wanita)	33,78	33,55	33,15	30,50	28,50
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (%)	39,88	40,37	40,68	41,43	41,10
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	28,15	27,85	27,35	25,00	21,30
Rasio Akseptor KB (%)	70,00	74,00	80,90	81,10	82,00

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS

Total Fertility Rate menurun dari 3,19 pada tahun 2020 menjadi 3,02 pada tahun 2024. ASFR menurun dari 33,78 anak per wanita pada tahun 2020 menjadi 28,50 per wanita pada tahun 2024. Prevalensi kontrasepsi modern meningkat dari 39,88 persen pada tahun 2020 menjadi 41,10 persen pada tahun 2024. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menurun dari 28,15 persen pada tahun 2020 menjadi 21,30 persen pada tahun 2024. Rasio Akseptor KB meningkat dari 70,00 persen pada tahun 2020 menjadi 82,00 persen pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam



menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas masih perlu untuk mengedukasi pasangan yang belum melaksanakan program KB dalam mendukung penurunan laju pertumbuhan penduduk.

H. Perhubungan

Urusan Perhubungan mencakup penyelenggaraan sistem dan layanan transportasi yang mendukung kelancaran mobilitas barang dan orang di wilayah daerah. Tujuannya adalah meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan efisiensi transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.41. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas (%)	20,48	19,55	19,33	19,06	19,06
Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Rambu-Rambu terhadap Kondisi Ideal (%)	60,00	60,00	60,00	62,00	62,00

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas

Rasio konektivitas menurun dari 20,48 persen pada tahun 2020 menjadi 19,06 persen pada tahun 2024. Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas meningkat dari 60,00 persen pada tahun 2020 menjadi 62,00 persen pada tahun 2024. Penurunan rasio konektivitas menandakan bahwa semakin rendahnya akses antar daerah akibat kerusakan infrastruktur penghubung antar wilayah. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu meningkatkan konektivitas antar daerah melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan transportasi, serta pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada titik-titik yang seharusnya memiliki rambu-rambu lalu lintas.

I. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika berfokus pada pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyebaran informasi yang efektif untuk mendukung pelayanan publik, pemerintahan yang transparan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Tabel 2.42. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	52,00	62,00	72,00	82,00	92,00
Persentase rumah tangga dengan akses internet (%)	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Padang Lawas semakin baik. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas di masa mendatang perlu membangun infrastruktur telekomunikasi di beberapa wilayah yang masih belum memiliki akses telekomunikasi dan internet.

J. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah



Urusan ini fokus pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta usaha kecil dan menengah sebagai pilar ekonomi yang penting bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.43. Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	4,75	11,33	N/A	N/A	N/A
Persentase Koperasi Aktif (%)	5,00	6,00	7,00	8,00	26,50

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas

Koperasi aktif meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 26,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk mendorong pengembangan koperasi. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas ke depannya akan mendorong digitalisasi koperasi sehingga menjangkau lebih banyak anggota dan meningkatkan efisiensi operasional.

K. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal fokus pada pengelolaan dan peningkatan investasi di daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah berperan aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor, baik domestik maupun asing.

Tabel 2.44. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Realisasi Investasi (%)	0,86	12,39	1,08	1,50	1,47
Realisasi PMDN/PMA (Rp Miliar)	5.581,06	5.926,28	6.660,48	6.776,71	7.582,94
Jumlah Investor PMDN/PMA (Perusahaan)	10	19	20	23	25
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (%)	1,95	1,08	1,08	1,50	1,47

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas

Penanaman Modal di Kabupaten Padang Lawas cenderung meningkat setiap tahunnya, di mana dapat dilihat bahwa realisasi investasi yang meningkat dari Rp 5.581,06 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 7.582,94 miliar pada tahun 2024. Begitu juga dengan jumlah investor yang meningkat dari 10 perusahaan menjadi 25 perusahaan. Meskipun investasi meningkat, namun penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah di mana pada tahun 2024 hanya sebesar 1,47 persen. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu berupaya untuk memperkuat regulasi dan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja lokal pada investasi yang masuk.



L. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pemuda serta mendorong kegiatan olahraga sebagai bagian dari pembentukan karakter, kesehatan, dan prestasi bangsa. Pemerintah daerah berperan dalam menyediakan fasilitas, program, dan dukungan yang memadai untuk pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga.

Tabel 2.45. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Wirausaha Muda (%)	N/A	69,44	59,51	59,51	70,00
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	5,00	23,00	44,00	23,00	23,00
Jumlah atlet berprestasi (Orang)	5	35	43	2	25
Jumlah prestasi olahraga	N/A	4	0	2	12

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

Persentase wirausaha muda menunjukkan tren positif dengan kenaikan signifikan di tahun 2024 mencapai 70,00 persen, di mana hal ini menandakan perkembangan usaha muda yang menjanjikan. Pelatih yang bersertifikasi sempat membaik secara signifikan, namun konsistensi perlu ditingkatkan agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan terus dikembangkan. Jumlah atlet berprestasi dan prestasi olahraga berfluktuasi setiap tahunnya sehingga diperlukan strategi yang lebih baik untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi secara berkelanjutan. Secara umum, capaian pada urusan kepemudaan dan olahraga menunjukkan kemajuan yang positif namun masih memerlukan perhatian dan strategi untuk peningkatan yang berkelanjutan.

M. Statistik

Urusan Statistik berfokus pada penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik yang akurat dan terpercaya untuk mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 2.46. Capaian Kinerja Urusan Statistik

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	N/A	N/A	N/A	1,52	1,60
Buku Kabupaten dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas

N. Persandian

Urusan Persandian berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi atau informasi rahasia pemerintah daerah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data serta komunikasi resmi pemerintah.

O. Kebudayaan



Urusan Kebudayaan berfokus pada pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas dan kekayaan daerah yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah bertugas menjaga warisan budaya sekaligus mendorong kreativitas dan inovasi budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.47. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Kegiatan)	2	1	10	10	10
Benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan (Objek)	10	26	26	26	26
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Objek)	20	20	20	20	20
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Objek)	26	26	26	26	26

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 26 objek yang terdiri dari benda, situs, dan cagar budaya sudah terdata dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, serta menjaga kelestarian budaya benda dan tak benda.

P. Perpustakaan

Urusan Perpustakaan berfokus pada penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi, literasi, dan edukasi masyarakat. Pemerintah daerah berperan dalam menjamin akses luas masyarakat terhadap sumber ilmu pengetahuan dan budaya melalui layanan perpustakaan yang modern dan ramah pengguna.

Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Minat Baca (Poin)	2,58	3,05	7,00	43,00	50,26
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (Orang)	191	389	408	1.154	495
Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	N/A	N/A	4,00	5,00	10,20

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Indeks minat baca meningkat dari 2,58 poin pada tahun 2020 menjadi 50,26 poin pada tahun 2024, sementara tingkat kunjungan menurun pada tahun 2024 menjadi sebanyak 495 orang pengunjung. Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat meningkat dari 4,00 persen pada tahun 2022 menjadi 10,20 persen pada tahun 2024. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa keinginan masyarakat untuk membaca semakin tinggi. Penurunan



kunjungan masyarakat ke perpustakaan dapat disebabkan oleh semakin banyaknya buku-buku yang berbentuk digital sehingga tingkat kunjungan ke perpustakaan mengalami penurunan. Ketersediaan SDM perpustakaan yang memiliki sertifikat masih sangat kecil sehingga diperlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan SDM perpustakaan agar memberikan pelayanan yang optimal bagi pengunjung dan tata kelola perpustakaan.

Q. Kearsipan

Urusan Kearsipan berfokus pada pengelolaan dan pemeliharaan arsip atau dokumen pemerintah secara sistematis, agar informasi penting dapat tersimpan dengan aman, mudah ditemukan, dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan administratif, hukum, dan sejarah.

Tabel 2.49. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Poin)	42,54	N/A	15,64	15,85	15,00
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	15,00	18,60	9,30	9,30	45,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Padang Lawas

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah mengalami penurunan dari 42,54 poin pada tahun 2020 menjadi 15,00 poin pada tahun 2024. Sementara, perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat dari 15,00 persen pada tahun 2020 menjadi 45,00 persen pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan arsipnya melalui digitalisasi dokumen-dokumen pemerintah agar dokumen penting pemerintah dapat terjaga dengan baik.

2.4.6 Urusan Pilihan

Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk dipilih dan diselenggarakan sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan kemampuan daerah masing-masing. Urusan ini bersifat tidak wajib, tetapi dapat dijadikan prioritas daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan.

A. Pariwisata

Urusan Pariwisata berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan potensi wisata daerah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat ekonomi lokal, serta melestarikan nilai budaya dan lingkungan.

Tabel 2.50. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	680	1.375	1.450	1.500	2.250
Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas



Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dari 680 orang pada tahun 2020 menjadi 2.250 orang pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas ke depannya perlu meningkatkan daya tarik sektor pariwisatanya mengingat sektor ini merupakan sektor pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menjadi multiplier effect bagi kemajuan ekonomi daerah.

B. Pertanian

Urusan Pertanian meliputi pengelolaan sumber daya pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan produksi, dan kesejahteraan petani di daerah. Fokusnya adalah pada pengembangan sektor pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Tabel 2.51. Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	5,52	5,10	4,78	4,73	4,38
Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	34,34	37,03	38,47	39,64	41,61
Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%)	1,83	1,82	1,89	1,90	1,88
Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan (Rp Juta/kapita)	73,21	87,37	82,74	116,55	125,73

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas, BPS

Berdasarkan data dari BPS, penyumbang perekonomian terbesar dari Sektor Pertanian berasal dari Sub-Sektor Perkebunan, di mana kontribusinya terus meningkat dari 34,34 persen pada tahun 2020 mencapai 41,61 persen pada tahun 2024. Sementara itu, sektor Pertanian dan Peternakan mengalami penurunan dari tahun 2020-2024. Dari sisi produktivitas, Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan mengalami peningkatan dari Rp 73,21 juta per kapita menjadi Rp 125,73 juta per kapita. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya nilai yang dihasilkan oleh setiap orang tenaga kerja pada sektor tersebut.

C. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan meliputi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, menjaga kelestarian ekosistem laut, dan mendukung ketahanan pangan.

Tabel 2.52. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	0,27	0,25	0,24	0,24	0,23
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.010,52	3.937,66	4.223,69	4.092,94	4.142,88



Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas, BPS Kabupaten Padang Lawas

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB rendah dan menurun dari 0,27 persen pada tahun 2020 menjadi 0,23 persen pada tahun 2024. Kondisi geografis Kabupaten Padang Lawas tidak mendekati laut sehingga kontribusi sektor perikanan hanya berasal dari pembudidaya perikanan. Namun, Kabupaten Padang Lawas memiliki perikanan budidaya di wilayahnya yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya melalui hilirisasi produk perikanan budidaya sehingga memiliki nilai tambah.

D. Perdagangan

Urusan Perdagangan mencakup pengelolaan dan pengembangan aktivitas perdagangan di daerah untuk meningkatkan perekonomian, memperluas pasar, dan melindungi konsumen.

Tabel 2.53. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	6,95	6,69	6,42	6,25	6,13
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	33,33	44,44	55,56	55,56	66,67

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas, BPS Kabupaten Padang Lawas

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB mengalami penurunan dari 6,95 persen pada tahun 2020 menjadi 6,13 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa adanya pergeseran aktivitas ekonomi ke sektor lapangan usaha lainnya. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok meningkat dari 33,33 persen pada tahun 2020 menjadi 66,67 persen pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memperhatikan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana perdagangan agar para pedagang dapat berjualan di tempat yang layak dan masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman. Di samping itu, pemerintah juga perlu memastikan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok terdistribusi dengan lancar kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan transportasi.

E. Perindustrian

Urusan Perindustrian meliputi pengembangan dan pengelolaan sektor industri di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing produk lokal.

Tabel 2.54. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi jumlah IKM (%)	81,00	91,00	88,00	70,00	90,00

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas

Proporsi jumlah IKM meningkat dari 81,00 persen pada tahun 2020 menjadi 90,00



persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin bertumbuhnya Industri Kecil dan Menengah yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus menyikapi hal ini dengan memberikan dukungan berupa bantuan peralatan atau teknologi, serta inovasi pada produk-produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah di daerah.

2.4.7 Penunjang Urusan

Penunjang Urusan adalah kegiatan atau layanan yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan utama agar dapat berjalan efektif dan efisien. Meskipun bukan urusan inti, penunjang ini sangat penting untuk kelancaran operasional dan pelaksanaan program di berbagai sektor.

A. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan adalah proses penyusunan rencana yang sistematis untuk mengarahkan pembangunan daerah agar tercapai tujuan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi dasar pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan di berbagai sektor.

Tabel 2.55. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RKPD yang Ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RTRW yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Padang Lawas

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas dibidangi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Capaian kinerja selama tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang utama sudah tersusun dengan baik. Meskipun demikian, pemerintah wajib memperhatikan dokumen perencanaan yang telah tersusun agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

B. Keuangan

Urusan Keuangan merupakan fungsi penunjang yang mengelola seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi



penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan.

Tabel 2.56. Capaian Indikator Kinerja Keuangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK atas Pelaporan Keuangan (Level)	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	4,25	4,39	5,39	4,95	3,88
RoA BUMD (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

Berdasarkan data pada tabel tersebut, Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menurun pada tahun 2023 dan 2024 dari WTP menjadi WDP. Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan kemampuan dalam menghasilkan pendapatannya sendiri. Hal ini ditunjukkan dari penurunan rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah dari 4,25 persen pada tahun 2020 menjadi 3,88 persen pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan yang solutif dan adaptif sehingga daerah memiliki kemampuan dari segi finansial dalam pembiayaan pembangunan Kabupaten Padang Lawas.

C. Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan ini fokus pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah melalui manajemen kepegawaian dan program pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai.

Tabel 2.57. Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	N/A	N/A	N/A	73,00	70,00
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas

D. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berfungsi sebagai penunjang dalam menyediakan data, informasi, dan inovasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah secara efektif dan berbasis bukti.

Tabel 2.58. Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: *Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Padang Lawas*

E. Pengawasan

Urusan Pengawasan berperan sebagai fungsi penunjang untuk memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan, efektif, dan efisien, serta meminimalkan risiko penyimpangan.

Tabel 2.59. Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Persepsi Korupsi (Poin)	66,84	78,37	74,00	72,00	74,00
Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B (%)	70,00	70,00	80,00	95,00	95,00
Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	75,38	82,05	82,74	80,12	85,00
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level)	2	2	2	2	2
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Level)	N/A	1	1	2	2

Sumber: *Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas*

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, skor IPK adalah 66,84 poin, lalu naik tajam menjadi 78,37 poin di tahun 2021. Meskipun sempat turun sedikit menjadi 74,00 pada tahun 2022 dan 72,00 pada tahun 2023, indeks ini kembali pulih ke angka 74,00 poin pada tahun 2024. Indeks Persepsi Korupsi mengalami peningkatan, menandakan adanya upaya yang berkelanjutan dalam mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi.

Perubahan ini menunjukkan kesadaran dan upaya yang terus berlangsung dalam peningkatan transparansi dan penurunan praktik korupsi. Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B juga menunjukkan peningkatan yang konsisten. Dari 70,00 persen pada 2020 dan 2021, naik menjadi 80,00 persen di tahun 2022, dan kemudian mencapai 95 persen pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan kualitas manajemen dan tata kelola organisasi perangkat daerah secara signifikan. Temuan BPK atau Inspektorat yang berhasil ditindaklanjuti juga mengalami peningkatan dari 75,38 persen di 2020 menjadi 82,05 persen di 2021, lalu meningkat lagi menjadi 82,74 persen di 2022. Meskipun sedikit menurun pada 2023 menjadi 80,12 persen, angka ini kembali naik menjadi 85 persen pada tahun 2024. Ini menggambarkan komitmen yang meningkat dalam menindaklanjuti temuan audit dan pengawasan. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tetap stabil pada level 2



selama lima tahun terakhir, yang menandakan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan, namun masih dalam tahap pengembangan yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada pada level 1 di tahun 2021 dan 2022, kemudian naik menjadi level 2 di tahun 2023 dan 2024. Ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas aparat pengawas intern yang lebih baik dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berfokus memperbaiki sistem pengendalian intern dan kapasitas pengawas untuk mencapai tingkat maturitas yang lebih tinggi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

F. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah (Setda) merupakan unit penunjang utama yang mengkoordinasi dan mendukung kelancaran administrasi pemerintahan daerah serta pelaksanaan tugas kepala daerah dan perangkat daerah lainnya.

Tabel 2.60. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi SAKIP (Poin)	C	C	C	CC	CC

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data pada tabel, nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Padang Lawas meningkat dari C pada tahun 2020 menjadi CC pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas semakin baik dalam mencapai target dari kinerja yang diharapkan.

2.5. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan tahun berjalan dilakukan untuk mengukur sejauh mana capaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Evaluasi ini mencakup realisasi fisik dan keuangan program prioritas serta kinerja capaian indikator pembangunan.

2.5.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan ukuran agregat yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Capaian indikator makro ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan, serta menunjukkan arah keberhasilan pembangunan daerah dari waktu ke waktu.



Tabel 2.61. Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET RKPDP	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET RKPDP	SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,50	5,02	77,23077	Tinggi
2	PDRB per Kapita	Juta	28.703.070	65.287,57	227,4585	Sangat tinggi
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,50	7,87	104,9333	Sangat tinggi
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,05	5,47	108,3168	Sangat tinggi
5	Rasio Gini	Poin	0,1985	0,2240	112,8463	Sangat tinggi
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,05	73,10	107,421	Sangat tinggi
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	n/a	67,52	n/a	n/a

Sumber : Laporan Evaluasi RKPDP Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

Capaian terhadap indikator makro pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 kinerja indikator makro pembangunan menunjukkan arah perkembangan yang positif, terutama pada indikator-indikator yang menyangkut pembangunan manusia dan pendapatan per kapita. Namun demikian, perhatian khusus harus diberikan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, yang meskipun masuk kategori “sangat tinggi” dalam capaian, justru merefleksikan realisasi yang melebihi target negatif, sehingga memerlukan perbaikan program yang lebih terarah dan terukur.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%, masih berada di bawah target 6,50%, dengan capaian terhadap target sebesar 77,23%, yang dikategorikan dalam peringkat kinerja tinggi. Meskipun belum mencapai target, pertumbuhan ini tetap mencerminkan aktivitas ekonomi yang stabil.

2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita mencapai angka Rp 65.287.570, jauh melebihi target Rp 28.703.070, atau setara dengan capaian 227,46%, dan dikategorikan sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan produktivitas ekonomi dan pendapatan rata-rata masyarakat secara signifikan.



3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 7,87%, lebih tinggi dari target 7,50%, dengan capaian 104,93%, termasuk dalam kategori sangat tinggi. Kenaikan ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT mencapai 5,47%, melebihi target 5,05%, dengan capaian 108,32%, juga masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta sinkronisasi antara kebutuhan pasar kerja dan lulusan pendidikan.

5. Rasio Gini

Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan berada pada angka 0,2240, lebih tinggi dari target 0,1985, dengan capaian 112,85%, dikategorikan sangat tinggi. Kenaikan ketimpangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan merata, sehingga perlu ada kebijakan yang mempersempit jurang distribusi pendapatan.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mencapai 73,10, melebihi target 68,05, dengan capaian 107,42%, masuk kategori sangat tinggi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, mengalami kemajuan signifikan. Data capaian indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) belum tersedia. Namun kedepannya ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas karena indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ini penting untuk mengukur keberhasilan daerah dalam mendukung komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengendalian perubahan iklim. Sedangkan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) akan mencakup kualitas air, udara, dan tutupan lahan.

2.5.2. Capaian Indikator Kinerja Utama



Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran strategis yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. IKU disusun berdasarkan mandat dan fungsi utama pemerintah daerah, serta menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.62. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks Reformasi Birokrasi	69 (B)	46,31 (C)	67,12	Sedang
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,45	86,57	98,99	Sangat Tinggi
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,6	70,99	97,78	Sangat Tinggi
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	95	95	100	Sangat Tinggi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Tercapai	Sangat Tinggi
6	Angka Rata-rata Lama Sekolah jenjang Pendidikan	9,95	9,20	92,46	Sangat Tinggi
7	Indeks Resiko Bencana	140	149,84	107,02	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

Dari capaian indikator kinerja utama diatas menunjukkan bahwa 6 indikator kinerja dengan status sangat tinggi dan 1 indikator dengan status kinerja sedang. Indikator dengan kinerja sedang yaitu indeks reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas, sehingga Reformasi Birokrasi adalah



proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur.

2.5.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator *outcome* yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.63. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

No	IKK Outcome	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	Tingkat realisasi	Predikat capaian Kinerja	KET
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
	Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	98,52	98,52	100,00	ST	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94,40	94,60	100,21	ST	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	87,50	86,5	98,86	ST	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	96,20	87,00	90,44	ST	
	Kesehatan						
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	7,05	0,071	1,01	SR	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	IKK Outcome	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	Tingkat realisasi	Predikat capaian Kinerja	KET
2	Persentase RS RujukanTingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	0,02	0,01	50,00	SR	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	29,00	29,00	SR	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	25	25	SR	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	25	25	SR	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	20	20	SR	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	50	50	SR	
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	10,10	10,10	SR	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	27,80	27,80	SR	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	27,9	27,9	SR	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	71,6	71,6	S	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	90	90	T	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	48,6	48,6	SR	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	38,60	38,60	SR	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	83,00	-	-	N/A	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	IKK Outcome	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	Tingkat realisasi	Predikat capaian Kinerja	KET
2	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) 4.846 x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	%	83,00	-	-	N/A	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	43	-	-	N/A	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	25	-	-	N/A	
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	80	72	90	T	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	233	-	-	N/A	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	-	-	N/A	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	-	-	N/A	
	Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	64	64	R	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	0	0	SR	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	100	0	0	SR	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	100	100	100	ST	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	IKK Outcome	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	Tingkat realisasi	Predikat capaian Kinerja	KET
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0	0	0	SR	
	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	ST	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	95,00	95,00	ST	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	100	90	90,00	T	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	100	90	90,00	T	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	93	90	96,46	ST	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	65	65,00	R	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	30	35	116,67	ST	
	Sosial						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	30	20	67	R	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	96,01	96,01	ST	
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
	Perencanaan dan Keuangan						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	12	21,09	175,75	ST	
2	Rasio PAD	%	6,1	2,05	33,54	SR	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	IKK Outcome	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	Tingkat realisasi	Predikat capaian Kinerja	KET
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	level 3	Level 2	90	T	
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	level 3	Level 2	90	T	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	100	79	79,00	T	
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WDP	WDP	S	
	Pengadaan						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	1,00	0,00	0,00	SR	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	60,00	40,00	66,67	S	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	70,00	22,00	31,43	SR	
	Kepegawaian						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	95,0	8,79	9,25	SR	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	38,60	0,77	1,99	SR	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	70,00	0,24	0,34	SR	
	Manajemen Keuangan						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	100	94,64	94,64	ST	
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100	67	75	S	
3	Manajemen Aset	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	ST	
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	1,00	1,00	100	ST	
	Urusan Pilihan						
	Kelautan dan Perikanan						



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	IKK Outcome	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	Tingkat realisasi	Predikat capaian Kinerja	KET
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	NILAI	4383	1038,11	23,68	SR	
	Pariwisata						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-	0	-	N/A	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	50	25,45	50,90	SR	
3	Tingkat hunian akomodasi	%	50	16,38	32,76	SR	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rupiah	5.000.000	5.000.000	100	ST	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	5.000.000	5.500.000	110,00	ST	
	Pertanian						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5,5	4,2	76,36	T	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah	Jumlah kasus : 15	Jumlah kasus : 5	20	SR	
		%	persentasi penurunan 2,00	persentasi penurunan 70 %	70	S	
	Perdagangan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	2,00	1,34	67,00	S	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	77,00	4,06	5,27	SR	
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang danperlengkap annya (UTTP bertanda tera sah yang berlaku	%	4,00	4,80	120,00	ST	
	Perindustrian						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Jumlah	30	27	90	T	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	IKK Outcome	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	Tingkat realisasi	Predikat capaian Kinerja	KET
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	10	10	100	ST	
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	70	30	42,86	R	
	Tenaga Kerja						
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	50,00	0	0,00	SR	
2	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	65,20	0	0,00	SR	
3	Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	45,00	15,50	34,44	SR	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	1,00	0,01	1,00	SR	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,014	0	0,00	0	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0	0,72	-	N/A	
	Pangan						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	100	0%	0%	SR	
	Pertanahan						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	-	-	-	N/A	
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100%	100%	100%	ST	
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.		-	-	-	N/A	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	IKK Outcome	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	Tingkat realisasi	Predikat capaian Kinerja	KET
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	-	-	-	N/A	
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	-	-	-	N/A	
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	-	-	N/A	
	Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	73,12	69,00	94,37	ST	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	10,5	13,00	123,81	ST	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	11,11	0	0,00	SR	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Perekaman KTP elektronik	%	100	96	95,6	ST	
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60	20,75	34,58	SR	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99	92,23	93,16	ST	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah	25	6	24,00	SR	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	9,00	7,90	87,78	T	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	2,00	0,33	16,5	SR	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	3,00	3,13	104,33	ST	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	84,00	83,00	98,81	ST	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,00	10,00	100,00	ST	
	Perhubungan						
		%	0,000152	0,000149	86,21	T	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	IKK Outcome	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	Tingkat realisasi	Predikat capaian Kinerja	KET
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0,034 smp / jam	0,025 smp / jam	86,21	T	
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,69	0,67	97,10	ST	
	Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah	29	0,00	0,00	SR	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	90,00	0,00	0,00	SR	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	90,00	60	66,67	S	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	35	33	94	ST	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	35	35	100	ST	
	Penanaman Modal						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	100	106,71	106,71	ST	
	Kepemudaan dan Olahraga						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	100	60	59,51	R	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	75	73	97,84	ST	
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	1	0	0	SR	
	Persandian						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	5	0	0	SR	
	Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	26	26	100	ST	
	Perpustakaan						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	18,9	43	227,51	ST	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	IKK Outcome	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	Tingkat realisasi	Predikat capaian Kinerja	KET
	Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	12,00	51,75	431,25	ST	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	95,00	-	-	N/A	

Sumber : Laporan Evaluasi RKPd Kabupaten Padang Lawas Tahun 202

**2.5.4. Realisasi Program Terhadap Program Prioritas Kabupaten Padang Lawas Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024****Tabel 2.64. Realisasi Program Terhadap Program Prioritas Kabupaten Padang Lawas Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024**

No	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	Predikat capaian kinerja
		Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	CC	CC	ST
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai LAKIP dan Pembangunan Perangkat daerah	CC	CC	ST
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	WTP	WDP	T
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	Ada	ada	ST
		Bidang Tanah Yang Bersertifikat	100	100	ST
		Persentase Aset Yang Digunakan	NA	100	ST
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal/Khusus/, Kematangan SPIP, Tindaklanjut LHP,Nilai LAKIP	100	100	ST
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pelaporan LP2P/LHKPN/ LHKASN tepat waktu	100	85	S
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Antara RKPD dan RPJMD	99,05	71,46	S



KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN PADANG LAWASTAHUN ANGGARAN 2026

		Indeks kepuasan masyarakat	80 (Baik)	95 (Sangat Baik)	ST	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	7,12	9	ST	
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	ST	
		Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100	100	ST	
		Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	100	100	ST	
		Cakupan pelayanan nifas	100	94	ST	
		Cakupan Neonatus Lengkap	100	78	T	
		Cakupan kunjungan bayi	75,45	90,62	ST	
		Cakupan pelayanan anak balita	100	90	T	
			Cakupan Puskesmas	118,47	100	T
			Cakupan Pembantu Puskesmas	100	98,52	ST
	Persentase Rumah sakit dan Puskesmas yang terakreditasi		100	100	ST	
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan		100	100	ST	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Pasangan Berakte Nikah	36,71	52,20	ST	
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (jiwa)	281.236	166.804	R	



KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN PADANG LAWASTAHUN ANGGARAN 2026

		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (jiwa)	281.236	135.793	R
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	7,12	9	ST
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	ST
		Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100	100	ST
		Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	100	100	ST
		Cakupan pelayanan nifas	100	94	ST
		Cakupan Neonatus Lengkap	100	78	T
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan kunjungan bayi	75,45	90,62	ST
		Cakupan pelayanan anak balita	100	90	ST
		Cakupan Puskesmas	118,47	100	T
		Cakupan Pembantu Puskesmas	100	98,52	ST
		Persentase Rumah sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	100	100,00	ST
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100,00	ST
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	52,1	82	ST
	Persentase Anak usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	95	100	ST	



KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN PADANG LAWASTAHUN ANGGARAN 2026

		Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	WTP	WDP	T
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	WTP	WDP	T
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00	100	ST
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal/Khusus/, Kematangan SPIP, Tindaklanjut LHP, Nilai LAKIP	95,00	100	ST
No	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	Predikat capaian kinerja
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pelaporan LP2P/LHKPN/ LHKASN tepat waktu	100,00	85	T
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	NA	NA	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Antara RKPD dan RPJMD	99,05	71,46	S
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	WTP	WDP	T
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Online	100,00	100	ST
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 (Baik)	95 (Sangat Baik)	ST
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan	7,45	NA	



KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN PADANG LAWASTAHUN ANGGARAN 2026

	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	jumlah data center	1	1	T
		IPM	68,05	70,34	ST
		Indeks Pendidikan	70	68,61	ST
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	94,4	99	ST
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	87,5	110	ST
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	98,72	97,8	ST
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	90,00	95,66	ST
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Yang Berkualifikasi S1/DIV	3.365	3.673	ST
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	7,12	9	ST
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	ST
		Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100	100	ST
		Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	100	100	ST
		Cakupan pelayanan nifas	100	94	ST
		Cakupan Neonatus Lengkap	100	78	T
		Cakupan kunjungan bayi	75,45	90,62	ST



KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN PADANG LAWASTAHUN ANGGARAN 2026

		Cakupan pelayanan anak balita	100	90	T
		Cakupan Puskesmas	118,47	100	T
		Cakupan Pembantu Puskesmas	100	98,52	ST
		Persentase Rumah sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	100	100,00	ST
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100,00	ST
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	52,1	82	ST
		Persentase Anak usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	95	100	ST
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	7,12	9	ST
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	ST
		Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100	100	ST
		Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	100	100	ST
		Cakupan pelayanan nifas	100	94	ST
		Cakupan Neonatus Lengkap	100	78	T
		Cakupan kunjungan bayi	75,45	90,62	ST
		Cakupan pelayanan anak balita	100	90	T



KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN PADANG LAWASTAHUN ANGGARAN 2026

		Cakupan Puskesmas	118,47	100	T
		Cakupan Pembantu Puskesmas	100	98,52	ST
		Persentase Rumah sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	100	100,00	ST
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100,00	ST
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah (%)	45,00	55	ST
		Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR (%)	5,00	3,3	S
		Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta (%)	54,00	NA	
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,00	NA	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100,00	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	3,00	49,90	ST
		Persentase PMKS Yang Tertangani (%)	3,00	50,20	ST
		Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)	2,00	49,30	ST



KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN PADANG LAWASTAHUN ANGGARAN 2026

	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kontribusi Sektor Pertanian /Perkebunan Terhadap PDRB	38,50	30,05	T
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/Pembudidaya	4580.7		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (Kel)	260,00	367,00	ST
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pencapaian Skor Pola Pangan harapan (PPH)	76,50	86,00	ST
		Ketersediaan Bahan Pangan	250.144	162.533	R



KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN PADANG LAWASTAHUN ANGGARAN 2026

	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penguatan Cadangan Pangan (%)	42	0,00	SR
		Indeks Infrastruktur	100	73,57	T
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	66,3	ST
		Kondisi jalan mantap	59	33,40	R
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	452,64	330	T
		Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	3.6	NA	
		Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	27,00	25,6	ST
		Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	0.94	NA	
		Persentase rumah tangga bersanitasi	75,00	NA	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	22,00	20,5	ST
		Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	20,00	NA	
		Rasio rumah layak huni	66,00		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Rumah Layak Huni	66,00	18,44	SR
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	11,98	61,51	ST
		Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	212,00	100	R

**KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN PADANG LAWASTAHUN ANGGARAN 2026**

		Indeks kualitas Udara	72,00	93,81	ST
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	72,00	93,81	ST
		Indeks kualitas Air	77,00	51,67	S
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	77,00	51,67	S
		Persentase konsistensi Rencana Pembangunan dengan RTRW	100,00	NA	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	67,00	53,39	T
		Jumlah bidang keagamaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi	12,00	NA	
		Jumlah bidang Kebudayaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi	7,00	NA	
		Jumlah masyarakat yang berprestasi STQH tingkat Provinsi	12,00	NA	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penilaian wilayah kecamatan	100,00	100	ST
		Rasio produk hukum yang terharmonisasi	100,00	NA	
		Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan	100,00	100	ST



KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN PADANG LAWASTAHUN ANGGARAN 2026

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kasus Konflik SARA yang tertangani	100,00	NA	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kejadian terkait Konflik Sosial yang ditangani	100,00	NA	
		Jumlah masyarakat yang berprestasi di Bidang Seni Tari tingkat Provinsi	10,00	NA	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2,00	10	ST

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024



2.5.5. Realisasi Terhadap Program dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024. Sampai dengan Triwulan IV, capaian realisasi fisik dan keuangan menunjukkan kinerja pelaksanaan yang relatif baik, meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan administratif yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan di lapangan.

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja	
		Program	Anggaran
1	Pendidikan	66,92	99,10
2	Kesehatan	138,00	100,79
3	RSUD	89,54	90,13
4	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	75,12	90,28
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	70,22	126,58
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54,92	85,96
7	Satpol PP Dan Damkar	68,75	67,67
8	Dinas Sosial	67,43	85,47
9	Dinas Ketenagakerjaan	60,51	80,32
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	38,44	52,17
11	Dinas Ketahanan Pangan	114,86	82,45
12	Dinas Lingkungan Hidup	66,8	82,32
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	86,82	85,40
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	85,71	81,06
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	91,65	79,06
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	55,66	49,69



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja	
		Program	Anggaran
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72,68	80,17
18	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	69,80	81,13
19	Dinas Perpustakaan	57,20	102,73
20	Dinas Perikanan Dan Peternakan	78,71	72,39
21	Dinas Pertanian	31,85	71,84
22	Sekretariat Daerah	94,79	100,74
23	Sekretariat Dprd	91,37	92,66
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	66,91	55,92
25	Badan Pendapatan Daerah	91,59	75,33
26	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	77,03	110,75
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	64,02	55,62
28	Inspektorat Daerah	32,98	72,59
29	Kecamatan Aek Nabara Barumun	106,77	95,49
30	Kecamatan Barumun Selatan	87,87	90,26
31	Kecamatan Sihapas Barumun	101,98	80,15
32	Kecamatan Barumun Barat	108,35	72,16
33	Kecamatan Barumun Tengah	71,83	114,50
34	Kecamatan Hutaraja Tinggi	98,55	56,56
35	Kecamatan Sosa Timur	72,50	96,24
36	Kecamatan Sosa Julu	94,10	99,01
37	Kecamatan Ulu Sosa	95,69	120,39
38	Kecamatan Barumun Baru	95,77	118,89
39	Kecamatan Huristak	33,92	39,95
40	Kecamatan Ulu Barumun	53,21	90,43
41	Kecamatan Barumun	15,79	81,56
42	Kecamatan Sosa	99,36	80,81



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja	
		Program	Anggaran
43	Kecamatan Batang Lubu Sutam	100,46	144,49
44	Kecamatan Sosopan	65,74	105,83
45	Kecamatan Lubuk Barumun	98,05	46,19
46	Kesatuan Bangsa Dan Politik	16,53	64,20
RATA-RATA		75,58	84,95

2.5.6. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.65. Realisasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI					OPD PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
I	PENDIDIKAN								
A.	Pendidikan Dasar Dan Menengah								
1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 tahun	Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	95,31	95,39	96,44	96,67	98,40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Kemampuan Literasi SD/MI	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	43,84	45,19	46,54	52,47	53,32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	Kemampuan Numerasi SD/MI	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	21,03	26,91	32,79	47,54	51,09	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	Iklim Keamanan SD/MI	Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan	Nilai	67,03	68,40	69,77	70,61	73,92	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	Iklim Kebinekaan SD/MI	Indeks Iklim Kebinekaan di Satuan Pendidikan	Nilai	53,67	56,19	58,71	66,85	67,20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	Iklim Inklusivitas SD/MI	Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan	Nilai	48,11	50,83	53,55	56,37	57,41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	Kemampuan Literasi SMP/MTs	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	25,54	28,75	31,96	46,14	57,72	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI					OPD PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
8	Kemampuan Numerasi SMP/MTs	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	50,72	51,44	52,68	53,22	55,45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	Iklm Keamanan SMP/MTs	Indeks Iklm Keamanan di Satuan Pendidikan	Nilai	56,53	59,21	61,89	64,61	67,03	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	Iklm Kebinekaan SMP/MTs	Indeks Iklm Kebinekaan di Satuan Pendidikan	Nilai	46,88	52,20	57,52	64,16	67,29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11	Iklm Inklusivitas SMP/MTs	Indeks Iklm Inklusivitas di Satuan Pendidikan	Nilai	41,12	45,73	50,34	54,95	54,03	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
B Pendidikan Kesetaraan									
1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Kesetaraan	Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	15,26	15,38	15,62	15,76	21,16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
C Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	57,43	59,76	61,52	63,42	80,01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	8,25	8,72	10,84	12,22	15,87	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV	Persen	47,85	48,22	49,64	49,83	50,23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
II KESEHATAN									
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	54	51,33	51,33	61,1	66,9	DINAS KESEHATAN
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	38,2	44	44	62,6	63,2	DINAS KESEHATAN
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	52,2	51,2	51,2	66,4	63	DINAS KESEHATAN
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	40	46,3	46,3	45	66	DINAS KESEHATAN



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI					OPD PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	100	99,03	99,03	98	100	DINAS KESEHATAN
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	85	26,3	6,5	31,1	38	DINAS KESEHATAN
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	33	74	48	48	98	DINAS KESEHATAN
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	6,66	3,6	10,25	75,82	84	DINAS KESEHATAN
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	24	31,7	30	310	184	DINAS KESEHATAN
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	71,24	79	68,38	100,9	127	DINAS KESEHATAN
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	15,2	24,7	53,34	96,9	69,5	DINAS KESEHATAN
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	20,8	100	100	73,2	88,7	DINAS KESEHATAN
III	PEKERJAAN UMUM								
1	Penyediaan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	15	15,66	20,5	22	25	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
IV	PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	0	0	0	0	0	DINAS PERKIMHUB



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI					OPD PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persen	0	0	0	0	0	DINAS PERKIMHUB
V	TRANTIBUMLINMAS								
1	Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	SATPOL PP & DAMKAR
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	20	20	20	20	20	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	35	35	35	35	35	BPBD
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	75	75	75	75	75	BPBD
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	SATPOL PP & DAMKAR
VI	SOSIAL								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	0	0	0	29,5	14,2	DINAS SOSIAL
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	40	20	20	60	46	DINAS SOSIAL
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	87	100	100	98	44,5	DINAS SOSIAL
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	13,3	26,6	29,4	46	34	DINAS SOSIAL



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI					OPD PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	78,6	77,7	78,9	80,1	80,9	DINAS SOSIAL

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Permasalahan dan isu strategis daerah mengacu pada tantangan utama yang dihadapi suatu wilayah dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini bisa meliputi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur yang membutuhkan perhatian dan solusi terencana. Identifikasi isu strategis penting untuk menentukan prioritas kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Isu strategis daerah biasanya berkaitan dengan permasalahan yang berdampak luas dan berkelanjutan, seperti kemiskinan, pengangguran, degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, keterbatasan sumber daya, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam. Penanganan isu-isu ini memerlukan sinergi antar sektor dan pemangku kepentingan serta perencanaan yang adaptif untuk menghadapi dinamika perkembangan daerah. Adapun permasalahan pembangunan yang dihadapi yaitu :

1	Belum optimalnya penurunan kemiskinan	Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Kabupaten Padang Lawas. Meskipun data dari BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin menurun dari 8,37 persen pada tahun 2020 menjadi 7,87 persen pada tahun 2024, namun angka ini masih tergolong tinggi. Capaian pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 24,96 ribu orang yang masih miskin.
2	Belum optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan SDM yang dilaksanakan hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan manusia biasanya dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Padang Lawas meningkat cukup tinggi dari 70,08 poin pada tahun 2020 menjadi 73,10 poin pada tahun 2024. Jika ditelaah berdasarkan komponen penyusunnya, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Padang Lawas masih sebesar 9,63 tahun atau berada pada



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

		jenjang pendidikan SMA kelas 1. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kualifikasi sumber daya manusia secara rata-rata di Kabupaten Padang Lawas. Ketidakmampuan secara ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dapat menjadi penyebab dari masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Sementara dari sisi kesehatan yang diukur dari Usia Harapan Hidup (UHH), UHH mengalami peningkatan dari 70,98 tahun pada tahun 2020 menjadi 71,67 tahun pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, hal ini masih menunjukkan bahwa dari sisi pembangunan kesehatan masih belum optimal. Kurangnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan sarana-prasarana kesehatan yang kurang memadai dapat menjadi penyebab dari lambatnya peningkatan UHH
3	Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan sejak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Pada tahun 2023, Kabupaten Padang Lawas berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya sebesar 5,13 persen, namun pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan sebelumnya, yaitu sebesar 5,02 persen. Kurangnya produktivitas pada sektor-sektor unggulan dapat menjadi penyebabnya. Selain itu, rendahnya investasi terhadap teknologi dan keterampilan tenaga kerja dapat memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Rendahnya inovasi terhadap produk-produk yang dihasilkan dapat menjadi penyebab dari melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024.
4	Masih rendahnya kualitas infrastruktur	Pembangunan infrastruktur Kabupaten Padang Lawas masih menghadapi sejumlah masalah. Berdasarkan data, jalan dalam kondisi baik masih pada kisaran 17 persen selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024, jalan dalam kondisi baik sebesar 17,73 persen. Kemudian, saluran irigasi hanya mencapai sebesar 37,17 persen yang berada dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dan perawatan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Di samping itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum juga dapat menjadi penyebab kerusakan yang terjadi.
5	Degradasi Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup merupakan hal yang penting bagi masyarakat untuk bertempat tinggal pada suatu wilayah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 70,99 poin. Sementara, bila dilihat berdasarkan komponennya yang masih menjadi permasalahan adalah kualitas udara dan tutupan lahan, di mana masing-masing capaiannya sebesar 58,75 poin dan 52,28 poin. Hal ini menandakan bahwa kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat Kabupaten Padang Lawas masih dinilai kurang baik. Selain



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

		itu, tutupan lahan berarti terdapat permasalahan pada tutupan lahan daerah yang berpotensi menyebabkan erosi, banjir, dan penurunan produktivitas lahan pertanian.
6	Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publik. Berdasarkan data Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Padang Lawas mencapai nilai 58,54 poin pada tahun 2024. Meskipun telah terjadi peningkatan dari tahun 2020 sebesar 40,68 poin, hal ini masih menunjukkan beberapa kelemahan dari segi birokrasi pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan peningkatan dari 1,37 poin pada tahun 2020 menjadi 2,17 poin pada tahun 2024. Meskipun meningkat, hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya adaptasi digital pada sistem pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Hal ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya pengaplikasian sistem digital dalam pelayanan publik dan perawatan pada situs-situs resmi pemerintah

Berdasarkan hasil perumusan masalah maka isu strategis pembangunan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia merupakan modal dalam pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Padang Lawas secara umum masih berada pada tingkat SMP kelas 3. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah mengingat masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas dan pemerataan guru ke berbagai wilayah, serta peningkatan jaringan infrastruktur menuju sekolah. Dari sisi kesehatan, Kabupaten Padang Lawas masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan pembangunan fasilitas kesehatan di seluruh kecamatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan dokter dan tenaga kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatannya.

2. Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan serta sumber daya daerah secara berkelanjutan.

Kabupaten Padang Lawas memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang



dapat dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonominya. Mayoritas aktivitas perekonomian hingga saat ini masih didominasi sektor primer, terutama pertanian. Kabupaten Padang Lawas juga terdapat wilayah yang memiliki potensi pertambangan. Kabupaten Padang Lawas harus memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya melalui hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk yang bernilai tambah hingga pada akhirnya diharapkan dapat bersaing di pasar ekspor. Di samping itu, Kabupaten Padang Lawas juga memiliki potensi pada Sektor Pariwisata, di mana terdapat sebanyak 20 destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memperhatikan hal ini mengingat sektor pariwisata merupakan sektor pertumbuhan ekonomi baru yang dapat berperan sebagai katalis bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi wisatanya.

3. Peningkatan kualitas Infrastruktur yang resilien terhadap bencana.

Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk kepentingan publik. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas penting untuk memperlancar aktivitas masyarakat dan perekonomian. Kabupaten Padang Lawas masih menghadapi sejumlah isu yang perlu diperhatikan, seperti rendahnya kualitas jalan, jembatan yang rusak, dan saluran irigasi yang kurang baik. Ketersediaan jalan dan jembatan yang berkualitas penting bagi kelancaran aktivitas masyarakat dan transportasi barang antar daerah. Saluran irigasi yang baik juga berperan penting bagi peningkatan produktivitas pertanian. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan kualitas infrastruktur yang melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan saluran irigasi.

4. Pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Isu lingkungan hingga saat ini masih menjadi perhatian dari tingkat global hingga daerah. Lingkungan yang bersih dan aman memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk bertempat tinggal dan menjalankan aktivitasnya. Pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan akan memperhatikan kondisi lingkungan dan sumber daya alam sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak akan merusak lingkungan. Kabupaten Padang Lawas juga akan berupaya untuk menggali potensi PLT EBT (Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber listrik masyarakat dan non-domestik. Kabupaten Padang Lawas juga akan berupaya untuk meningkatkan pengelolaan persampahan daerahnya dengan membangun fasilitas pengolahan sampah daerah.

5. Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.



Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas harus diwujudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya melalui pengembangan sistem pemerintahan yang transparan berbasis teknologi dan program-program yang inovatif. Pemerintah juga akan meningkatkan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan sehingga menghasilkan SDM yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.7 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas untuk tahun 2026 mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024 serta kondisi perekonomian tahun 2024 dan awal tahun 2025. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Padang Lawas tahun 2026 memperhatikan pula kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Nasional dan Global.

2.7.1 Kondisi Ekonomi Global

Perekonomian global pada tahun 2025 masih berada dalam fase ketidakpastian dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung melambat. Berdasarkan proyeksi lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan berada pada kisaran 2,3% – 3,0%. Perlambatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingginya beban utang publik global yang mencapai rekor tertinggi, tekanan inflasi yang belum sepenuhnya mereda, serta kebijakan moneter yang relatif ketat di banyak negara.

Selain itu, meningkatnya proteksionisme perdagangan dan ketegangan geopolitik di berbagai kawasan dunia turut menambah risiko terhadap stabilitas perekonomian internasional. Dampaknya, perdagangan global mengalami tekanan, arus investasi lintas negara melambat, serta rantai pasok internasional menghadapi gangguan yang signifikan.

Ketidakpastian dunia pun akan semakin tinggi, yang tercermin dari lima karakteristik. Pertama ke depan kondisi dunia berada di level slower and divergent growth. Kondisi ini menandakan pertumbuhan dunia akan menurun pada 2026. "Pertumbuhan dunia akan menurun tahun 2026. Amerika membaik, Tiongkok dan Eropa akan melambat, India dan Indonesia masih cukup baik" mengatakan dunia dalam keadaan reemergence of inflation pressure atau penurunan inflasi dunia akan melambat. Bahkan pada 2026 inflasi ini berisiko naik, karena adanya gangguan rantai pasok dan perang dagang. Ketiga, higher US interest rate. penurunan Fed Fund Rate (FFR) akan lebih rendah, sedangkan US treasury akan naik tinggi ke 5 persen di 2026. Hal ini disebabkan karena membengkaknya defisit fiskal dan utang pemerintah Amerika. Keempat, indeks dolar AS akan menguat dari 101 ke



107. Kondisi ini disebut juga akan menekan nilai tukar mata uang dunia, termasuk rupiah. Sementara kelima, invest in America. Di mana saat ini jelasnya, preferensi yang berkembang di investor global adalah larinya investor ke Amerika. Hal tersebut karena tingginya suku bunga dan kuatnya dolar AS.

2.7.2 Kondisi Ekonomi Nasional

Pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 7-8% dapat dicapai pada tahun 2026. saat ini pemerintah perlu menjaga daya beli dalam rangka menjaga tingkat konsumsi, mengingat kondisi global masih dalam gejolak dan ketidakpastian. Di samping itu, penting untuk terus menyerap lebih banyak investasi baru kedepannya. untuk mendorong lebih banyak terciptanya lapangan kerja dan pada gilirannya mengurangi kemiskinan.

Di samping itu, beberapa langkah pemerintah lain adalah mendorong penambahan devisa hasil ekspor, dimana waktu pengkajiannya telah diperpanjang. Kemudian mendorong optimalisasi peran sejumlah sektor unggulan seperti mineral, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Karena kita sangat membutuhkan dolar ke depan dan itu hanya bisa kalau kita menghasilkan devisa. Dan salah satu quick-kill adalah pengembangan pariwisata.

Bank Dunia memperkirakan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran rata-rata 5,1% pada tahun ini hingga 2026, dengan risiko pelemahan seiring dengan lesunya kinerja perdagangan dan normalisasi permintaan di dalam negeri. Pertumbuhan konsumsi masyarakat akan sangat naik turun di tahun 2026 melihat kondisi inflasi di tahun 2026 masih sangat beragam.

2.7.3 Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Seiring dengan proses pemulihan perekonomian nasional, Tren pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut dan semakin menguat di tengah kondisi ketidakpastian global. Pulihnya mobilitas dan daya beli masyarakat yang terjaga menjadi pendorong aktivitas ekonomi. Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen. Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Jika dilihat atas dasar harga berlaku, sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 280.263,30 Milyar. Selain itu diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 215.493,94 Milyar dan Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 210.615,49 Milyar juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Adapun sektor yang paling rendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp. 1.001,63



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

Milyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.66
PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan
Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	219.415,68	247.947,51	280.263,30	148.721,97	153.237,64	158.952,63
B. Pertambangan dan Penggalian	11.584,90	12.280,21	13.308,37	7.253,99	7.509,74	7.812,53
C. Industri Pengolahan	182.735,66	193.742,57	210.615,49	99.869,07	103.289,41	108.089,21
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.061,12	1.097,83	1.125,19	826,87	844,81	867,32
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	897,66	935,12	1.001,63	567,20	583,49	598,49
F. Konstruksi	126.443,91	138.780,73	148.961,01	70.371,23	74.874,60	79.752,79
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	181.413,59	200.530,11	215.493,94	105.037,72	111.128,79	116.065,40
H. Transportasi dan Perhubungan	43.388,49	53.105,13	57.512,42	24.486,30	27.698,62	29.453,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19.505,88	22.159,77	25.330,31	12.751,77	14.056,57	15.741,20
J. Informasi dan Komunikasi	22.218,00	24.164,92	26.124,96	18.707,24	20.168,23	21.661,70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	28.358,82	30.279,69	31.626,43	16.628,86	17.543,53	18.222,68
L. Real Estate	46.639,19	48.951,79	52.204,45	24.802,62	25.593,70	26.977,20
M,N. Jasa Perusahaan	10.072,91	11.129,06	11.970,07	5.124,58	5.467,38	5.747,52
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	30.243,09	31.525,69	34.433,70	18.041,14	18.388,06	19.506,72
P. Jasa Pendidikan	16.880,47	18.414,73	19.784,20	12.016,96	12.903,71	13.634,23



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.040,94	9.871,93	10.658,57	5.338,02	5.681,82	5.972,61
R,S,T, U	Jasa Lainnya	5.292,80	6.078,62	6.505,72	2.983,21	3.265,84	3.479,39
	PDRB	955.193,0	1.050.995,4	1.146.919,7	573.528,7	602.235,9	632.534,7
		9	1	5	7	5	3

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2025

2.7.4 Kondisi Ekonomi Kabupaten Padang Lawas

Perekonomian Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 18.330,40 Milyar dan PDRB per kapita mencapai Rp 65,29 juta. Ekonomi Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 sebesar 5,02 persen.

Tahun 2024 konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan yang signifikan. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan penjagaan ketersediaan bahan pokok, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Kenaikan permintaan domestik dan eksternal, Percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun sebelumnya akan mendorong perbaikan investasi.

Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Jika dilihat kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB atas dasar harga berlaku, dimana sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 9.716,87 Milyar, sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.991,69 Milyar, sektor Konstruksi sebesar Rp. 2.597,25 Milyar, selain itu diikuti juga oleh sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 1.140,02 Milyar juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Adapun sektor yang paling rendah adalah sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang lainnya sebesar Rp. 0,15 Milyar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.67

**Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 – 2024**

No	Sektor	2022	2023	2024
		Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	7.338,87	8.290,90	9.716,87
2	Pertambangan & penggalian	71,98	77,03	80,66
3	Industri pengolahan	2.526,54	2.664,02	2.991,69
4	Pengadaan Listrik dan gas	26,30	28,26	30,91
5	Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	0,14	0,14	0,15
6	Konstruksi	2.191,99	2.436,43	2.597,25
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	949,29	1.022,23	1.140,02
8	Trasportasi dan pergudangan	165,34	200,98	231,54
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	133,28	148,48	165,34
10	Informasi dan komunikasi	86,30	93,37	99,37
11	Jasa keuangan dan asuransi	112,47	119,27	127,81
12	Real estate	502,62	536,43	582,52
13	Jasa perusahaan	7,27	8,08	8,75
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	353,85	369,19	411,03
15	Jasa Pendidikan	49,31	53,53	58,92
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	66,26	73,44	81,51
17	Jasa lainnya	4,95	5,47	6,05
PDRB Kabupaten Padang Lawas		14.586,76	16.127,08	18.330,40
PDRB Provinsi Sumatera Utara		955.193,09	1.051.000,00	1.146.919,75

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2025
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Pada Tabel 2.67 dapat dilihat bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 masih didominasi oleh lima sektor, yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor dan Real estate. Sedangkan sektor yang masih memberikan kontribusi rendah adalah Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Jasa lainnya dan Jasa Perusahaan.

Berdasarkan data nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2024 atas dasar harga konstan, sector yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 5.218,89 Milyar sehingga sangat masuk akal jika Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas memperhatikan



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

sektor ini. Selain itu sektor konstruksi sebesar Rp. 1.386,94 Milyar dan industri pengolahan sebesar Rp. 1.344,26 Milyar juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.68
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2022 - 2024
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas

No	Sektor	2022		2023		2024	
		Rp (Milyar)	% (Persen)	Rp (Milyar)	% (Persen)	Rp (Milyar)	% (Persen)
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	4.724,62	5,12	4.973,10	5,26	5.218,89	2,67
2	Pertambangan & penggalian	47,74	8,28	49,61	3,91	51,13	0,02
3	Industri pengolahan	1.241,14	3,74	1.283,51	3,41	1.344,26	0,66
4	Pengadaan Listrik dan gas	25,04	4,34	26,46	5,65	28,72	0,02
5	Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	0,13	3,02	0,12	-3,20	0,13	0,00
6	Konstruksi	1.247,95	4,12	1.329,71	6,55	1.386,94	0,62
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	565,42	4,35	592,33	4,76	630,29	0,41
8	Transportasi dan pergudangan	96,58	5,04	105,70	9,44	111,23	0,06
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	88,10	4,11	95,62	8,53	102,66	0,08
10	Informasi dan komunikasi	71,42	5,35	76,87	7,63	81,57	0,05
11	Jasa keuangan dan asuransi	66,53	5,03	70,13	5,41	74,14	0,04
12	Real estate	251,76	3,30	265,01	5,26	281,93	0,18
13	Jasa perusahaan	251,63	3,02	239,12	1,05	4,66	0,00
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	34,19	3,10	36,37	6,39	250,90	0,13
15	Jasa Pendidikan	43,90	5,50	46,65	6,27	38,86	0,03
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	2,71	4,30	2,89	6,60	50,30	0,04
17	Jasa lainnya	4.724,62	5,12	4.973,10	5,26	3,11	0,00
PDRB Kabupaten Padang Lawas		8.747,96	4,61	9.197,63	5,14	9.659,72	5,02
PDRB Provinsi Sumatera Utara		573.528,77	4,73	602.235,95	5,01	632.534,73	5,03

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2025
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2025



2.8 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 sebagai pelaksanaan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Padang Lawas. Diperlukan dukungan sumber pendanaan Non APBD Kabupaten Padang Lawas berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD Kabupaten juga melalui APBN; APBD Provinsi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang - undangan.

KUA merupakan salah satu bagian dari penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam APBD. Kebutuhan belanja pembangunan daerah dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan, yang dalam hal ini target kinerja pembangunan pada RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 mengacu terhadap target kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029, yang disertai dengan kebutuhan pendanaan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan APBD Tahun 2026. Untuk mensinkronkan antara kebutuhan dengan kapasitas keuangan daerah, perlu ditetapkan arah kebijakan keuangan daerah. Untuk mengukur keuangan daerah, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah serta proyeksi keuangan daerah, sehingga dapat ditetapkan rancangan struktur keuangan daerah. Dalam menganalisa penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Analisa Standar Biaya merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Ketepatan analisis standar biaya akan mempengaruhi dalam Penetapan proyeksi keuangan daerah.



Untuk meningkatkan kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah sistem untuk pengelolaan informasi tentang pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis elektronik. Proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah diwajibkan menggunakan SIPD.

Dalam penetapan arah kebijakan keuangan daerah dituangkan dalam struktur APBD Kabupaten Padang Lawas terdiri dari : (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dirumuskan berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa yang akan datang.

Penetapan arah kebijakan keuangan daerah, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional akan mewarnai arah kebijakan keuangan daerah pada RKPD maupun APBD Tahun 2026.

2.8.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek kinerja pelaksanaan APBD. Sebagai dasar Penetapan kebijakan keuangan tahun 2026, maka diukur kinerja keuangan masa lalu atau tahun sebelum tahun 2026, baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah



nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Selama ini dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas masih sangat bergantung terhadap bantuan keuangan pusat maupun provinsi dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah melalui pendapatan transfer.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam kurun waktu tahun 2022- 2024 kondisi keuangan daerah mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Dimana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas terbesar pada tahun 2023 sebesar Rp. 87.849.536.844,00 dan terendah pada tahun 2024 sebesar Rp. 44.351.945.284,92. Berikut disampaikan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2022-2024 pada tabel 3.4 berikut ini:



Tabel 2.69

Realisasi dan APBD Pendapatan Asli Daerah Padang Lawas Tahun 2022-2025

No	Uraian	Realisasi			APBD 2025
		2022	2023	2024	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.408.021.052,00	87.849.536.844,00	44.351.945.284,92	52.709.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	21.424.802.112,00	44.831.506.844,00	16.690.134.937,00	36.467.743.559,00
4.1.02	Retribusi Daerah	14.688.479.262,00	9.864.020.884,00	19.059.218.199,00	3.808.436.132,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.958.461.193,00	7.000.000.000,00	3.699.230.788,19	3.958.461.193,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.336.278.485,00	26.154.009.116,00	4.903.361.360,73	8.474.359.116,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 202



B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Dana perimbangan dari pusat merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer tersebut terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Secara umum dapat diartikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keseluruhan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Besarnya proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat dinamis, yang artinya besaran Dana Alokasi Umum (DAU) per daerah dan realisasi penyalurannya, akan mengikuti perkembangan Pendapatan Dalam Negeri neto. Pada saat Pendapatan Dalam Negeri neto naik, maka pagu Dana Alokasi Umum (DAU) nasional akan ikut naik sehingga alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada tiap daerah juga akan ikut meningkat dan begitu pula sebaliknya.

Di sisi lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik dialokasikan untuk daerah tertentu dalam membiayai kegiatan khusus di mana hal itu menjadi bagian dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik berdasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer dalam APBD Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022-2024, terlihat bahwa pendapatan transfer terus mengalami peningkatan dimana peningkatan tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.075.745.907.823,00 dan terendah pada tahun 2022 sebesar Rp. 972.619.873.646,00. Berikut disampaikan realisasi pendapatan transfer baik yang bersumber dari Pusat dan Provinsi sebagaimana tergambar dalam tabel 3.5 berikut ini:



Tabel 2.70

Realisasi dan APBD Pendapatan Transfer Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022-2025

No	Uraian	Realisasi			APBD 2025
		2022	2023	2024	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	972.619.873.646,00	1.043.330.209.232,00	1.075.745.907.823,00	1.063.587.521.426,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	923.813.984.840,00	990.420.464.734,00	1.036.179.654.915,00	988.308.401.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.805.888.806,00	52.909.744.498,00	39.566.252.908,00	75.279.120.426,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025



C. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 2.71
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022-2025

No	Uraian	Realisasi			APBD 2025
		2022	2023	2024	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,0	0,0	30.695.811.252,00	26.905.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,0	0,0	30.695.811.252,00	26.905.000.000,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewenangan daerah dalam mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan pilihan, Pendukung urusan pemerintahan, Penunjang urusan pemerintahan, Pengawasan urusan pemerintahan, kewilayahan dan Pemerintahan umum.

Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek yang berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Adapun besaran belanja daerah dari tahun 2022-2024 tertuang dalam tabel Berikut ini:

Tabel 2.72
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022-2025

Norek	Uraian	Realisasi			APBD 2025
		2022	2023	2024	
5	BELANJA DAERAH	1.053.281.447.741	1.074.389.967.119	1.069.411.610.259	1.169.978.932.221,00
5.1	BELANJA OPERASI	630.470.986.646	629.432.980.886	661.359.436.936	763.672.769.399,00
5.1.01	Belanja Pegawai	351.057.657.291	363.503.467.376	407.963.542.267	484.007.171.655,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.234.172.820	251.057.253.815	196.229.327.553	264.919.528.332,00



**KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN
PADANG LAWASTAHUN ANGGARAN
2026**

Norek	Uraian	Realisasi			APBD 2025
		2022	2023	2024	
5.1.05	Belanja Hibah	12.745.716.535	13.688.764.695	56.146.037.120	12.230.309.006,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.433.440.000	1.183.495.000	1.020.529.996	2.515.760.406,00
5.2	BELANJA MODAL	134.826.465.820	143.930.366.225	102.630.451.570	107.401.347.571,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.231.502.731	40.339.889.861	12.049.397.140	28.819.894.658,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.280.047.562	38.294.193.763	13.454.993.358	47.206.181.133,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.287.840.527	59.852.411.271	77.118.165.072	24.405.473.600,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.075.000	5.443.871.330	7.896.000	6.969.798.180,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.757.058.103	2.844.504.241	2.681.589.050	8.967.038.444,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.757.058.103	2.844.504.241	2.681.589.050	8.967.038.444,00
5.4	BELANJA TRANSFER	284.226.937.172	298.182.115.767	302.740.132.703	289.937.776.807
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	3.622.298.147	0,00	3.574.879.515,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	284.226.937.172	294.559.817.620	302.740.132.703	286.362.897.292,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pinjaman dari pemerintah pusat.

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan defisit riil yang dihitung berdasarkan data realisasi pendapatan, realisasi belanja serta realisasi pengeluaran pembiayaan pada masa sebelum tahun perencanaan. Selanjutnya analisis pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber penutup defisit riil tersebut berdasarkan komposisinya. Berikut ini adalah perkembangan penutup defisit riil anggaran daerah dalam kurun waktu 2022-2024 yang tergambar dalam tabel berikut:



**Tabel 2.73
Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2025**

No	Uraian	Realisasi			APBD 2025
		2022	2023	2024	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	34.145.151.037,36	8.891.597.995,45	32.127.944.856	26.777.410.795,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.145.151.037,36	8.891.597.995,45	32.127.944.856	26.777.410.795,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.145.151.037,36	8.891.597.995,45	32.127.944.856	26.777.410.795,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025

2.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Struktur Anggaran pada APBD Tahun 2026 sesuai yang tertuang pada Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 27 ayat 1 bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah; Belanja Daerah, dan; Pembiayaan Daerah.

1. Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2026

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berikut disampaikan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Padang Lawas pada tabel berikut:

**Tabel 2.78
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

Norek	Uraian	Proyeksi 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1.035.668.481.862,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.153.306.303,00
4.1.01	Pajak Daerah	37.637.420.659,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.053.784.132,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.958.461.193,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.503.640.319,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	950.610.175.559,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	924.744.217.000,00
	DBH Pusat	22.265.538.000,00
	DAK	172.286.353.000,00
	DAU	537.674.237.000,00



**KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN
PADANG LAWASTAHUN ANGGARAN
2026**

	Dana Desa	192.518.089.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.865.958.559,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.905.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.905.000.000,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025

2. Rencana Belanja Daerah Tahun 2026

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Padang Lawas. Berikut disampaikan belanja daerah Kabupaten Padang Lawas pada tabel berikut:

**Tabel 2.79
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

Norek	Uraian	Proyeksi 2026
5	BELANJA DAERAH	1,047,668,481,862.00
5.1	BELANJA OPERASI	733,368,117,721.00
5.1.01	Belanja Pegawai	477,311,364,175.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241,592,224,534.00
5.1.04	Belanja Subsidi	200,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	12,475,768,606.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,788,760,406.00
5.2	BELANJA MODAL	60,159,560,096.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,284,397,716.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11,530,000,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23,458,695,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,886,467,380.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,200,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,200,000,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	252,940,804,045.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4,428,737,545.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	248,512,066,500.00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025

3. Rencana Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Berikut disampaikan pembiayaan Kabupaten Padang Lawas pada tabel berikut:

**Tabel 2.80
Pembiayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

Norek	Uraian	Proyeksi 2026
6	PEMBIAYAAN DAERAH	12,000,000,000.00



**KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN
PADANG LAWASTAHUN ANGGARAN
2026**

6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12,000,000,000.00
6.1	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Pembiayaan Netto	12,000,000,000.00
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025

Tabel 2.81
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026

Norek	Uraian	Proyeksi 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1,035,668,481,862.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58,153,306,303.00
4.1.01	Pajak Daerah	37,637,420,659.00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.053.784.132,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.958.461.193,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.503.640.319,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	950,610,175,559.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	924,744,217,000.00
	DBH Pusat	22,265,538,000.00
	DAK	172,286,353,000.00
	DAU	537,674,237,000.00
	Dana Desa	192,518,089,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25,865,958,559.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26,905,000,000.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26,905,000,000.00
5	BELANJA DAERAH	1,047,668,481,862.00
5.1	BELANJA OPERASI	733,368,117,721.00
5.1.01	Belanja Pegawai	477,311,364,175.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241,592,224,534.00
5.1.04	Belanja Subsidi	200,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	12,475,768,606.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,788,760,406.00
5.2	BELANJA MODAL	60,159,560,096.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,284,397,716.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11,530,000,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23,458,695,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,886,467,380.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,200,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,200,000,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	252,940,804,045.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4,428,737,545.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	248,512,066,500.00
	Total Surplus/(Defisit)	-12,000,000,000.00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	12,000,000,000.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12,000,000,000.00
6.1	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Pembiayaan Netto	12,000,000,000.00
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RKP Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun ke dua dari RPJMN Tahun 2025-2029 dengan visi besar yang ingin dicapai yaitu **“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**. RPJMN menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan kemiskinan dan Sumber daya manusia Berkualitas dengan Pencapaian visi yang diwujudkan dengan 8 (delapan) Misi (Asta Cita) yaitu :

- Misi 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
- Misi 2 Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Misi 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Misi 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- Misi 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Misi 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- Misi 7 Memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan



penyelundupan.

Misi 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Dengan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) yaitu :

- a) Memberi makan bergizi gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak Balita.
- b) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.
- c) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
- d) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
- e) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
- f) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
- g) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- h) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Selain itu telah ditetapkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas yaitu :

- 1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
- 2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara
- 3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
- 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 5) Pemberantasan kemiskinan
- 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba
- 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat



- 8) Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
- 9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
- 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
- 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
- 13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
- 14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik- mandiri lainnya.
- 15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
- 16) Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
- 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Melalui Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 akan mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,6 - 6,2 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,06 - 5,59 %
3. Tingkat Kemiskinan 4,60 - 5,60 %
5. Rasio Gini (nilai) 0,284 - 0,290
6. Indeks Modal Manusia (nilai) 0,55
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK 1,00-2,77 %
8. PDRB per Kapita 83,2 - 85,7 Juta
9. Indek Kualitas Lingkungan Hidup 77,37 %



3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah RKPD tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dan mengacu pada RKP Tahun 2026. Merujuk pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, Visi yang ingin dicapai yaitu **“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”**.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Kolaborasi, bermakna Proses kerjasama untuk menelurkan gagasan atau ide dalam rangka menyelesaikan masalah secara bersama menuju visi bersama;

SUMUT, Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Berkah, bermakna Harapan agar pembangunan tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga membawa kebaikan dan kebermanfaatn bagi semua pihak;

Unggul, bermakna Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global;

Maju, bermakna Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan konektivitas antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, dan berkembangnya wilayah metropolitan;

Berkelanjutan, bermakna Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik.

Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan



yaitu:

- Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah
- Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
- Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan
- Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas maka ditetapkanlah 6 (enam) Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win), yaitu :

- 1) Penyediaan SDM Unggul yang Siap Bekerja
- 2) Peningkatan kualitas layanan, akses dan jaminan Kesehatan Gratis Bagi Seluruh Penduduk Sumatera Utara dalam rangka peningkatan Usia Harapan Hidup
- 3) Peningkatan Produktivitas Pangan dan Kesejahteraan Petani
- 4) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Responsif, Lincah dan Memahami Kebutuhan
- 5) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Terhubung dan Ramah Lingkungan
- 6) Meningkatkan Peran Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Untuk Menghasilkan Kemajuan Daerah

Dalam mewujudkan visi Sumatera Utara “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan” dan mendukung Program Prioritas Nasional untuk pencapaian sasaran utama Trisula Pembangunan maka sasaran utama pembangunan Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Sasaran Utama Pembangunan RPJMD Sumatera Utara Tahun 2026

Indikator Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,80-6,20
PDRB Per Kapita	Nilai (Rp. Juta)	73,57	87,6
Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,2	5,2
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	6,75-5,75
Gini Rasio	Poin	0,306	0,301-0,303
Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,53-0,55
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	N/A	4,97



Indikator Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Persen	73,96	77,36
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,14-5,47

Sumber : Rancangan RPJMD Sumatera Utara Tahun 2025-2029

3.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas

Tujuan pembangunan merupakan arah atau sasaran utama yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Tujuan pembangunan dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Tujuan yang telah dirumuskan akan dijabarkan kedalam sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka satu sampai lima tahun namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional maupun provinsi.

Perumusan tujuan dan sasaran mengacu pada visi dan misi dalam RPJMD. Sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029, Visi Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas adalah **“BERSAMA MEWUJUDKAN PADANG LAWAS MAJU”**.

Makna dari visi PADANG LAWAS yang MAJU adalah kondisi dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mampu menciptakan kehidupan yang sejahtera, damai, dan saling menghormati dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, serta kearifan lokal. Kata MAJU dijabarkan sebagai berikut :

MANDIRI, bermakna masyarakat Padang Lawas yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengelola sumber daya lokal dengan baik;

AMANAH, bermakna pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggungjawab, serta menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas sesuai amanat;

JAYA, bermakna menghadirkan kejayaan melalui pembangunan ekonomi yang kuat, pengelolaan potensi daerah yang optimal, dan pertumbuhan Badan Usaha Milik Daerah;

UNGGUL, bermakna menjadi daerah yang unggul dalam kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur yang merata dan berkeadilan.



Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui 10 (Sepuluh) misi pembangunan daerah yaitu :

1. Peningkatan kualitas mutu pendidikan dan layanan kesehatan

Membangun layanan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses masyarakat, kompetensi pendidik yang kuat, proses pembelajaran yang didukung oleh sarana dan prasarana modern, dan manajemen pendidikan yang berorientasi mutu. Membangun layanan kesehatan dengan fasilitas yang terjangkau, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, perluasan kepesertaan program jaminan kesehatan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, dan integrasi teknologi kesehatan guna mempermudah akses layanan.

2. Pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Mengembangkan infrastruktur berkelanjutan yang memadukan kebutuhan pembangunan dengan pelestarian lingkungan, berwawasan ekonomi jangka panjang, dan bermanfaat sosial, dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta mengutamakan penghematan dan efisiensi energi dalam setiap tahap perencanaannya.

3. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan mendorong terwujudnya masyarakat yang religius

Membangun masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, mendorong harmoni antar umat beragama yang dilandasi sikap toleransi dan saling menghargai, serta mengembangkan fungsi rumah ibadah dan lembaga keagamaan sebagai pusat pembinaan spiritual sekaligus wadah pemberdayaan sosial dan pendidikan bagi masyarakat

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa

Membangun pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas, mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah, pengembangan sumber daya manusia aparatur yang kompeten, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

5. Pembangunan sentra ekonomi rakyat melalui pengembangan UMKM

Membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis komunitas, memanfaatkan



potensi dan sumber daya lokal, dan beridentitas khas yang mengangkat keunikan daerah sebagai daya tarik dan keunggulan kompetitif.

6. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan

Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis, memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang, dan efisiensi sumber daya.

7. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara merata dan berkeadilan

Penyediaan akses jalan dan jembatan yang merata di seluruh wilayah, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara adil tanpa diskriminasi

8. Peningkatan produktivitas perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan

Penyediaan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur pendukung irigasi, jalan dan transportasi, serta penataan dan pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

9. Menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja

Meningkatkan kualitas pencari kerja, aksesibilitas dan pemerataan kesempatan kerja melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penguatan strategi pengurangan kemiskinan ekstrem.

10. Pengembangan destinasi wisata dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal

Mengangkat identitas budaya sebagai daya tarik utama, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama

Dari 10 misi yang telah ditentukan tersebut akan dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran yang ingin di raih. Tujuan dan sasaran ini akan berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan seluruh urusan pemerintahan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, guna mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2029, capaian keberhasilan setiap misi dapat dievaluasi melalui indikator kinerja sasaran yang disertai target pencapaian yang terukur. Rencana pencapaian sasaran untuk tahun 2026



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

dengan rincian target tahunan, seperti yang disajikan dalam Tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target RKPD 2026
1	Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat				
	1.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,87	14,28
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,63	9,70
	1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Literasi SD (Poin)	0,5682	64,15
			Literasi SMP (Poin)	0,4935	59,88
			Numerasi SD (Poin)	0,5342	61,59
			Numerasi SMP (Poin)	0,496	58,31
	1.1.2	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	22,53	26,75
	1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	N/A	72,77
	1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,67	72,33
	1.2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	65,94	73,77
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	84,12	88,40
			Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	156,53	109,00
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	N/A	13,93
2	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Jembatan secara Merata dan Berkeadilan				
	2.1	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan resilien terhadap bencana	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	70,47
	2.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	N/A	53,48
	2.1.2	Terwujudnya daerah yang tangguh bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)	153,00	152,50
	2.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	47,66	75,47
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	N/A	68,33
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%)	N/A	4,54
	2.1.4	Meningkatnya kualitas jembatan	Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	59,00	65,00
	2.1.5	Meningkatnya akses transportasi dari desa ke ibukota kabupaten	Rasio konektivitas (%)	19,06	20,00
3	Membangun Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan				



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target RKPD 2026
3.1		Tersedianya Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	70,47
3.1.1		Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	4,10	4,24
4	Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Religius dan Harmonis				
4.1		Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	N/A	70,24
4.1.1		Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	60,17	61,10
4.1.2		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	0,813	0,720
			Indeks Perlindungan Anak (Poin)	71,33	74,00
4.1.3		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	81,91
4.1.4		Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang harmoni	Indeks Harmoni Indonesia (Poin)	N/A	53,48
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa				
5.1		Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	58,54	62,00
5.1.1		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	4,10	4,24
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	N/A	96,36
5.1.2		Terwujudnya layanan publik berbasis digital	Indeks SPBE (Poin)	2,17	2,48
5.1.3		Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah (Poin)	15,00	40,00
5.1.4		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	70,00	73,00
5.1.5		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level)	2,00	3,00
5.1.6		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	71,89
5.1.7		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan (Level)	WDP	WTP
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	3,88	4,80
5.1.8		Meningkatnya peran BUMD	RoA BUMD (%)	N/A	0,72
6	Membangun Sentra Ekonomi Rakyat dengan Mengembangkan Koperasi dan UMKM				
6.1		Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,36-5,65
6.1.1		Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	N/A	1,50
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	N/A	1,20
6.1.2		Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	16,32092358	17,72-17,86
6.1.3		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa (%)	0,6217	53,48



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target RKPD 2026
7 Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan					
7.1	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam		Kontribusi Sektor Penggalian dan Pertambangan (%)	0,44	0,49
			Kontribusi Sub- Sektor Perkebunan (%)	41,61	40,78
7.1.1	Meningkatnya nilai tambah hilirisasi produk Perkebunan dan pertambangan		Nilai Tambah Sektor Penggalian dan Pertambangan (Rp Juta)	80.661,79	85.574,09
			Nilai Tambah Sub- Sektor Perkebunan (Rp Juta)	7.844.782,76	8.002.462,89
7.2	Meningkatnya pembangunan yang ramah lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,52	70,35
7.2.1	Meningkatnya pengelolaan persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Poin)	N/A	19,78
7.2.2	Menurunnya emisi gas rumah kaca		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton co2 eq)	N/A	1.148,70
7.2.3	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan		Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	N/A	6,23
8 Meningkatkan Produktivitas Perkebunan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan					
8.1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan (Rpjuta)	125,73	156,10
8.1.1	Meningkatnya kesejahteraan petani		Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Pertanian (%)	6,45	6,78
			Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Peternakan (%)	6,06	6,36
8.1.2	Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan		Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Perikanan (%)	5,59	5,88
8.1.3	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	76,75	77,20
9 Menciptakan Lapangan Kerja dan Pemerataan Kesempatan Kerja					
9.1	Menurunnya angka kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin (%)	7,87	7,72-7,61
9.1.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif		Persentase PPKS yang tertangani (%)	60,00	71,89
9.2	Meningkatnya lapangan kerja, produktivitas tenaga kerja, dan kewirausahaan		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,47	5,01
9.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta/kapita)	129,20	142,45
9.2.2	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi (%)	1,47	6,60
9.2.3	Meningkatnya minat pemuda untuk berwirausaha		Rasio Kewirausahaan (%)	5,99	6,16
10 Mengembangkan Destinasi Wisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal					
10.1	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata daerah		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	0,90	1,56
10.1.1	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	50,00	2,00
			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%)	N/A	20,60



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target RKPD 2026
		10.1.2 Terwujudnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	51,12	52,30

Tabel 3.3

**Penyelarasan Sasaran Utama/Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Padang Lawas, Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026**

No	RPJMN	Tahun 2026	Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2026	Kabupaten Padang Lawas	Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,6 -6,2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,80-6,20	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) %	5,36-5,65
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	83,2-85,7	PDRB per Kapita (Rp juta)	87,6	PDRB per Kapita (Rp juta)	75.024,37
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	Kontribusi PDRB Kab/kota (%)	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,60-5,60	Tingkat Kemiskinan (%)	6,75-5,75	Tingkat Kemiskinan (%)	7,72-7,61
5	Rasio Gini	0,284-0,290	Rasio Gini	0,301-0,303	Rasio Gini	0,2108
6	Indeks Modal Manusia	0,55	Indeks Modal Manusia	0,53-0,55	Indeks Pembangunan Manusia	74,30
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00-2,77	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	4,97	Penurunan Emisi GRK (ton Co2 eq)	1.148,70
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,36	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,35
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,06-5,59	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,14-5,47	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,01

Tabel 3.4

**Penyelarasan Target Indikator Utama Pembangunan
Kabupaten Padang Lawas dengan Provinsi Tahun 2026**

NO	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	2026	RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029	2026
	Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan	
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,93	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,33
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:	
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	133,00	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	109,00
	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20-19	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,93
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Penanganan Tuberkulosis dan penyakit menular lainnya:	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	2026	RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029	2026
	Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan	
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	91,43
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,70	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	
5	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:	
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	12,01-16,01 1,5-4,57	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	25,58-27,68 16,39-18,53
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	37,37-39,88 34,70-39,20	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	25,58-27,68 16,39-18,53
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,43-10,46	b) C) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,70
	d) Harapan Lama Sekolah	13,67-13,69	c) d) Harapan Lama Sekolah	14,28
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12-11,30	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	15,63
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	72,47	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	36,50
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,75-5,75	Tingkat Kemiskinan (%)	7,50-7,45
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	32,1	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan(%)	24,41
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	27,20	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	
11	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19,35-19,87	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	17,72-17,86



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	2026	RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029	2026
	Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan	
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	
12	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata :	
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,50	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,56
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang		Wisatawan Mancanegara (Jiwa)	
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,5		
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN	
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,51	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	
	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,74	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,80	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,20
	d. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)		Return on Asset (RoA) BUMD (%)	
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,14-5,47	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,01
	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	44,85		
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,33-62,22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	
17	Tingkat Penguasaan IPTEK			
	Disesuaikan dengan karakteristik daerah			
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,14	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	52,06
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	19,19	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,23	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	21,69
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	9,95	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,75	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,32
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,62-	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	2026	RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029	2026
	Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan	
		16,76		
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	
	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	76,02	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	75,47
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,56	c. Persentase Desa Mandiri (%)	0,66
24	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70,38	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	98,50
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
26	Indeks Pelayanan Publik	3,60	Indeks Pelayanan Publik	4,24
27	Indeks Integritas Nasional	67,46	Indeks Integritas Nasional	77,41
28	<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i> <i>Usulan Proksi:</i>		Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi:	
	a) <i>Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah</i>	71,43	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	
	b) <i>Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM</i>	62,50	b) <i>Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM</i>	71,89
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	59,38	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Poin)	
30	Indeks Demokrasi Indonesia	83,65- 86,89	Indeks Demokrasi Indonesia	82,30
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	1,42	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	
32	Tingkat Inflasi (%)	1,70-3,70	Tingkat Inflasi (%)	
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	30,06	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) ⁶	0,019
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13		
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.677.816,12		
	d. Total Kredit/PDRB (%)	27,15	d. Total Kredit/PDRB (%)	0,019



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	2026	RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029	2026
	Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan	
34	Inklusi Keuangan (%)	97,61	Rasio Sektor Jasa Keuangan terhadap PDRB (%)	
35	Dsisuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:		Disesuaikan dengan karakteristik daerah	
	Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (<i>Sister Province/ Sister City</i>)	20		
36	Disesuaikan dengan karakteristik daerah (<i>Asia Power Indeks - Military Capability</i>)		Disesuaikan dengan karakteristik daerah (<i>Asia Power Indeks - Military Capability</i>)	
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,98- 56,05	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,57	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,24
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	72,36	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61,1
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,389	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,720
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,567	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
42	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup	
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,37	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	71,38
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	11,25	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	68,33
	c. Pengelolaan Sampah	19,00	Pengelolaan Sampah	
	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	19,00	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	10,68
	-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	49,75	-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	35,61
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Ketahanan Energi, Air dan Pangan	
	a. Ketahanan Energi	5,85	Ketahanan Energi	
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	958,00	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	544,22
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	163,22		
	b. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	6,63	b. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	5,20
	c. Ketahanan Air		Ketahanan Air	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	2026	RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029	2026
	Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan	
	Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)		Kapasitas Air Baku (m3/kapita)	
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	43,96	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	68,33
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	155,6775	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	152,50
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Juta ton eq2)	
	a. Kumulatif	10,78	a. Kumulatif	
	b. Tahunan	20,63	b. Tahunan	22,97



3.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

3.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Adapun tema RKP Tahun 2026 yaitu **“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”**.

**Tabel 3.5
Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029**

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama
1	PN 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
2	PN2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema <i>Spend to Invest</i>
3		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah
4		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan
5		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan
6		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya
7		Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)
8		Pengembangan Pangan Hewani
9		Pengembangan Pangan lokal dan Nabati
10		Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan
11		Peningkatan Penyediaan Energi
12		Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan



No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama
		Energi
13		Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan
14		Konservasi Sumber Daya Air
15		Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir
16		Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS
17		Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa
18		Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital
19		Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya
20		Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan
21		Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik
22		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau
23		Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut
24		Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan
25		Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR
26		Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan hasil laut
27	PN3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya
28		Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital
29		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yogyakarta-Prambanan
30		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Trumoh
31		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
32		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
33		Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim



No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama
34		Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
35	PN4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan genberazi Z), dan penyandang disabilitas	Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
36		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas
37		Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak sekolah
38		Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
39		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
40		Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi
41		Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi
42		Penurunan Kematian Ibu dan Anak
43		Pencegahan dan Penurunan Stunting
44		Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
45		Penuntasan TBC
46		Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
47		Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi
48		Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis
49		Investasi pelayanan kesehatan primer
50		Pembangunan RS lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses
51		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
52		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya
53		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi
54		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
55	PN5. Melanjutkan hilirisasi dan	Pengembangan Hilirisasi Nikel



No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama
	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	
56		Pengembangan Hilirisasi Tembaga
57		Pengembangan Hilirisasi Bauksit
58		Pengembangan Hilirisasi Timah
59		Pengembangan Hilirisasi Kelapa sawit
60		Pengembangan Hilirisasi Kelapa
61		Pengembangan Hilirisasi Rumput laut
62		Pengembangan Industri Kimia
63		Pembangunan Industri Semikonduktor
64		Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
65		Penguatan Industri logam Dasar, Besi dan Baja
66		Pengembangan Industri Dirgantara
67		Pengembangan KEK Sei Mangkei
68		Pengembangan KIT Batang
69		Pengembangan KI Weda Bay
70	PN6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan
71		Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif
72		Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif
73		Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara
74		Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
75		Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa
76	PN7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
77		Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN
78		Transformasi Digital layanan Publik Prioritas
79		Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan
80		Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
81	PN8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya,	Penguatan karakter dan Jati Diri Bangsa



No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama
	serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
82		Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan kawasan Pemajuan Kebudayaan
83		Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut

3.2.2 Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2026

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Sumatera Utara Tahun 2026 berpedoman pada Visi Misi serta Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Gubernur Sumatera Utara periode Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah maka tema Pembangunan RKPD Tahun 2026 yaitu: “Merajut Kolaborasi Untuk Mewujudkan Sumut Berkah Dan Indonesia Maju” Dalam mewujudkan Visi Sumatera Utara 2025-2029 diwujudkan melalui 5 (lima) Misi (Pilar Pembangunan) yang merupakan **Prioritas Unggulan** Provinsi.

Misi 1 **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Membangun Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing berdasarkan ideologi Pancasila melalui penguatan peran pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan pengarusutamaan gender

Misi 2 **Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah**

Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja melalui peningkatan iptek, inovasi, pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global

Misi 3 **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama pemangku kepentingan dan pelayanan publik yang berintegritas, lincah, dinamis, responsif dan kolaboratif serta



menjunjung tinggi supremasi hukum

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan

Melanjutkan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan dalam mendukung prioritas pembangunan, investasi dan pengembangan potensi daerah untuk mewujudkan peningkatan produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, harmonis dengan lingkungan dan alam serta toleransi antar umat beragama dalam rangka menjaga nilai-nilai demokrasi, mendukung pemberantasan narkoba dan menurunkan angka kriminalitas

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, pemerintah daerah Sumatera Utara menuangkan ke dalam 17 (tujuh belas) prioritas pembangunan yaitu :

1. Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal.
2. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi.
3. Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu.
4. Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran
5. Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah.
6. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru.



7. Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal
8. Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)
9. Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi
10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
11. Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.
12. Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal.
13. Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing.
14. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana.
15. Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa.
16. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Susarana yang Harmonis, Toleran dan Rukun.
17. Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib

3.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026

Program prioritas adalah program utama yang dipilih sebagai fokus utama dalam suatu periode perencanaan untuk mencapai target pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan. Program ini diprioritaskan karena memiliki dampak strategis, mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional atau daerah, serta menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Penetapan program prioritas mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, urgensi, serta potensi hasil yang akan dicapai. Tahun 2026 ini Kabupaten Padang Lawas memiliki tema pembangunan ***"Merajut Kolaborasi untuk Mewujudkan Padang Lawas MAJU (Mandiri, Amanah, Jaya, Unggul)"***. Merujuk tema tersebut maka pembangunan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2026 difokuskan pada Pembangunan Dasar yakni : meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah unggulan untuk jenjang pendidikan SD dan SMP,



meningkatkan akses masyarakat terkategori miskin pada pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, menguatkan sistem pemerintahan berbasis digital, meningkatkan kualitas infrastruktur.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029, pemerintah daerah Padang Lawas menuangkan ke dalam 17 (Tujuh belas) prioritas pembangunan yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan
- 2) Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata
- 3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur
- 4) Peningkatan Ketahanan Daerah
- 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
- 6) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama
- 7) Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesenjangan Gender
- 8) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
- 9) Peningkatan Ekonomi Rakyat
- 10) Penggalan Potensi Sumber Daya Alam
- 11) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- 12) Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
- 13) Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan
- 14) Penurunan Kemiskinan
- 15) Peningkatan Kesempatan Kerja
- 16) Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya
- 17) Peningkatan Kemandirian Daerah

**Tabel 3.6
Penyelarasan program prioritas Kabupaten Padang Lawas
dengan Program Prioritas Nasional**

NO	Program Prioritas Nasional	NO	Program Prioritas Kabupaten Padang Lawas
1	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	12	Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
2	Penyempurnaan sistem penerimaan Negara	8	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
		17	Peningkatan Kemandirian Daerah
3	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	8	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	8	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
5	Pemberantasan kemiskinan	14	Penurunan Kemiskinan
6	Pencegahan dan pemberantasan narkoba		
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk	2	Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata



NO	Program Prioritas Nasional	NO	Program Prioritas Kabupaten Padang Lawas
	rakyat		
8	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi	1	Peningkatan Kualitas Pendidikan
9	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif		
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	7	Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender
11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	11	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
12	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	12	Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
		13	Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur
		12	Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.	3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur
		4	Peningkatan Ketahanan Daerah
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
		9	Peningkatan Ekonomi Rakyat
		14	Penurunan Kemiskinan
		15	Peningkatan Kesempatan Kerja
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	9	Peningkatan Ekonomi Rakyat
		10	Penggalian Potensi Sumber Daya Alam
		13	Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan
		15	Peningkatan Kesempatan Kerja
16	Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah	6	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama
17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	6	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama
		16	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya



Tabel 3.7

**Penyelarasan Program Prioritas Kabupaten Padang Lawas
dengan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara**

NO	Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara	NO	Program Prioritas Kabupaten Padang Lawas
1	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal.	1	Peningkatan Kualitas Pendidikan
		15	Peningkatan Kesempatan Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi.	7	Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender
3	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu.	2	Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata
4	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	8	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
		17	Peningkatan Kemandirian Daerah
5	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah.	10	Penggalian Potensi Sumber Daya Alam
6	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru.	12	Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
		13	Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan
7	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	9	Peningkatan Ekonomi Rakyat
		16	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya
8	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	9	Peningkatan Ekonomi Rakyat
9	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	14	Penurunan Kemiskinan
10	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
		8	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
11	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.	5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
		8	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
12	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal.	3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur
		4	Peningkatan Ketahanan Daerah
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
13	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing.	3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur
14	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana.	10	Penggalian Potensi Sumber Daya Alam
		11	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup



NO	Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara	NO	Program Prioritas Kabupaten Padang Lawas
15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa.		
16	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Susarana yang Harmonis, Toleran dan Rukun.	6	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama
		16	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya
17	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	6	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) adalah kegiatan prioritas yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, karena berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta pencapaian target pembangunan makro dan indikator kinerja utama daerah. Adapun kegiatan Strategis Daerah Kabupaten Padang Lawas dari setiap Program Prioritas yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

dengan Kegiatan strategis:

- a. Pembangunan sekolah rakyat tahun 2026;
- b. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah SD dan SMP sesuai standar pendidikan nasional;
- c. Pemenuhan distribusi guru dan peningkatan kualitas guru;

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata

dengan Kegiatan strategis:

- a. Penguatan program UHC;
- d. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan ke setiap Puskesmas;
- c. Gerakan masif untuk sosialisasi masyarakat hidup sehat

3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur

dengan Kegiatan strategis:

- a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
- b. Peningkatan akses rumah layak huni melalui bedah rumah;
- c. Peningkatan akses air minum aman;
- d. Peningkatan akses sanitasi aman;
- e. Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung (konektivitas) antar Desa dan antar Kecamatan.

4. Peningkatan Ketahanan Daerah

dengan Kegiatan strategis:

- a. Pemetaan desa rawan bencana;
- b. Pembentukan desa tangguh bencana dan budaya sadar bencana bagi masyarakat.



- 5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan**
dengan Kegiatan strategis:
 - a. Pengembangan Pusat Pemerintahan Terpadu

- 6. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama**
dengan Kegiatan strategis:
 - a. Optimalisasi peran FKUB dan para pemuka adat dalam menjaga kerukunan umat.

- 7. Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender**
dengan Kegiatan strategis:
 - a. Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan Perempuan dan anak;
 - b. Edukasi parenting sebelum pernikahan.

- 8. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah**
dengan Kegiatan strategis:
 - a. Peningkatan kualitas SDM ASN untuk penyelenggara pelayanan publik;
 - b. Optimalisasi kinerja sistem dan metode pelayanan publik (SOP yang transparan, pembuatan aplikasi online);
 - c. Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- 9. Peningkatan Ekonomi Rakyat**
dengan Kegiatan strategis:
 - a. Pembangunan Pusat Kuliner dan pusat UKM di Lapangan Merdeka
 - b. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan;
 - c. Pemetaan dan pengembangan produk-produk unggulan Daerah
 - d. Peningkatan kemandirian desa melalui BUMDes dan Koperasi Merah Putih

- 10. Penggalian Potensi Sumber Daya Alam**
dengan Kegiatan strategis:
 - a. Pengembangan tanaman hortikultura yang terintegrasi dan berkelanjutan

- 11. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**
dengan Kegiatan strategis:
 - a. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Pengolahan Sampah (Circular Economy);
 - b. Peningkatan layanan persampahan.

- 12. Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan**
dengan Kegiatan strategis:
 - a. Pemberian bantuan bibit unggul dan alat-alat mesin pertanian;
 - b. Pemberian bantuan benih unggul untuk budidaya perikanan;

- 13. Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan**
dengan Kegiatan strategis:
 - a. Penertiban administrasi perizinan perkebunan;
 - b. Penyediaan bantuan bibit perkebunan;



14. Program Penurunan Kemiskinan

dengan Kegiatan strategis:

- a. Pemetaan keluarga miskin/rentan menurut desa/kelurahan;
- b. Pemberian bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan keluarga miskin/rentan;
- c. Peningkatan jaminan sosial kepada keluarga miskin;

15. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

dengan Kegiatan strategis:

- a. Penyusunan potensi dan peluang investasi daerah (Buku Profil Investasi Daerah).

16. Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya

dengan Kegiatan strategis:

- a. Peningkatan daya tarik destinasi wisata melalui pengembangan situs dan cagar budaya;
- b. Pagelaran event budaya dengan kalender event.

17. Program Peningkatan Kemandirian Daerah

dengan Kegiatan strategis:

- a. Optimalisasi perangkat daerah untuk penerimaan daerah;
- b. Penentuan target pendapatan berdasarkan potensi melalui kajian sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain yang sah;
- c. Pemanfaatan aset-aset yang belum produktif;
- d. Pendirian dan pengembangan BUMD sebagai sumber PAD.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat, terukur, dan responsif terhadap dinamika pembangunan serta tantangan global dan nasional. Strategi pembangunan daerah dirancang untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Strategi mencakup rencana jangka menengah hingga panjang yang mendefinisikan prioritas, sasaran, serta pendekatan yang akan ditempuh untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang, sementara arah kebijakan adalah garis besar kebijakan yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta pengalokasian sumber daya. Adapun Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap sasaran daerah sebagaimana tercantum di Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dijabarkan sebagai berikut:



**Tabel. 3.8
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Padang Lawas
Pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029**

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan dan Layanan Kesehatan			
1.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing			
1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatkan partisipasi siswa pada sekolah		Percepatan wajib belajar 13 tahun Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat Peningkatan kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik serta kesejahteraannya Pengembangan kurikulum yang adaptif berbasis teknologi Penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi siswa
1.1.2	Meningkatnya literasi masyarakat	Meningkatkan minat baca masyarakat		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan Pengembangan perpustakaan digital Penyelenggaraan gerakan membaca masyarakat Peningkatan ketersediaan pojok baca Peningkatan peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung kebiasaan membaca sejak usia dini.
1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatkan daya saing atlet daerah dan prestasi olahrag		Pembinaan atlet berbasis talent scouting dan pelatihan berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur dan Akses Fasilitas Olahraga
1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat			
1.2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses layanan kesehatan		Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan Peningkatan akses layanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Daerah berstandar nasional Peningkatan akreditasi Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Peningkatan kualitas dokter dan tenaga kesehatan Pemerataan distribusi dokter dan tenaga kesehatan Percepatan Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat Peningkatan gerakan masyarakat untuk hidup sehat
2	Pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan			
2.1	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan resilien terhadap bencana			
2.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang adil dan merata		Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Peningkatan kualitas sistem drainase Penataan dan pembangunan pusat pemerintahan terpadu Pembangunan fasilitas publik (Alun-alun kota dan stadion)
2.1.2	Terwujudnya daerah yang	Meningkatkan		Peningkatan sarana prasarana penanggulangan



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		tangguh bencana	infrastruktur kebencanaan	bencana Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Peningkatan desa tangguh bencana
2.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Peningkatan kualitas kawasan permukiman Penurunan kawasan kumuh Peningkatan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) umum permukiman
2.14	Meningkatnya kualitas jembatan	Meningkatkan kualitas konstruksi jembatan	Meningkatkan kualitas konstruksi jembatan	Renovasi dan pembangunan jembatan baru sesuai kebutuhan dan standar keselamatan Pemeliharaan dan inspeksi rutin untuk menjaga kondisi jembatan Pembangunan dan peningkatan jembatan gantung bagi desa yang dilintasi perairan sungai
2.15	Meningkatnya akses transportasi dari desa ke ibukota kabupaten	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Percepatan pembangunan jembatan pada jalan penghubung antara desa dengan kecamatan Penerapan teknologi bahan dan konstruksi yang berkualitas tinggi untuk daya tahan jalan. Peningkatan pemeliharaan rutin dan preventif untuk memperpanjang umur jalan Peningkatan akses masyarakat terhadap jalan yang aman dan nyaman Percepatan pembangunan jalan untuk daerah terpencil dan tertinggal Peningkatan konektivitas transportasi antara desa dengan kecamatan
3	Membangun Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			
3.1	Tersedianya Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			
3.1.1	Meningkatnya pelayanan public	Membangun sarana dan prasarana pelayanan publik	Membangun sarana dan prasarana pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur pelayanan publik
4	Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Religius dan Harmonis			
4.1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib			
4.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Meningkatkan kualitas keluarga	Meningkatkan kualitas keluarga	Peningkatan pemberdayaan dalam mewujudkan keluarga sejahtera Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan edukasi nilai-nilai toleransi Pembangunan Islamic Center sebagai wujud peningkatan nilai-nilai religi
4.1.2	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Peningkatan akses perempuan dalam pendidikan dan kesehatan Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan anak Peningkatan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak
4.1.3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan keamanan lingkungan	Meningkatkan keamanan lingkungan	Peningkatan perlindungan dan rasa aman terhadap masyarakat Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
4.1.4	Terwujudnya kehidupan	Meningkatkan kohesi	Meningkatkan kohesi	Penguatan Pendidikan Karakter dan Kesadaran



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		bermasyarakat yang harmoni	sosial melalui pemberdayaan masyarakat	Multikultural Peningkatan mediasi dan penyelesaian konflik Pemberdayaan organisasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan
5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa				
5.1	Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel			
5.1.1	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik
5.1.2	Terwujudnya layanan publik berbasis digital	Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik		Peningkatan integrasi antar perangkat daerah melalui digitalisasi Peningkatan skill SDM ASN berbasis digital Peningkatan cyber security dalam situs dan aplikasi pemerintah
5.1.3	Meningkatnya tata kelola arsip	Meningkatkan kualitas kearsipan daerah		Penerapan digitalisasi dalam pengarsipan dokumen penting pemerintah Peningkatan tata kelola arsip pada setiap perangkat daerah
5.1.4	Meningkatnya profesionalitas ASN	Meningkatkan kualitas ASN yang profesional		Peningkatan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah Penerapan Sistem Merit
5.1.5	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan pengawasan pemerintahan		Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah Peningkatan manajemen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5.1.6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan perencanaan pembangunan yang sinergis		Peningkatan kualitas sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah Peningkatan sinergitas perencanaan antar perangkat daerah
5.1.7	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan sistem keuangan daerah		Pengoptimalisasian pengelolaan aset dan kekayaan daerah Penerapan sistem digitalisasi dalam penerimaan daerah
5.1.8	Meningkatnya peran BUMD	Meningkatkan kapasitas BUMD		Penreapan GCG dalam tata kelola BUMD Penerapan model bisnis yang adaptif dan responsif
6 Membangun sentra ekonomi rakyat dengan Mengembangkan Koperasi dan UMKM				
6.1	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah			
6.1.1	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Meningkatkan daya saing produk UMKM		Pengembangan kapasitas dan kualitas produk UMKM melalui pelatihan teknis, standarisasi, HaKI dan sertifikasi produk. Fasilitasi akses pasar dan pembiayaan bagi UMKM Peningkatan penggunaan teknologi digital dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran produk UMKM Peningkatan kolaborasi dan kemitraan dengan institusi keuangan, universitas dan swasta Revitalisasi pasar tradisional Sibuhuan Pengembangan kawasan pasar modern sebagai sentra ekonomi kreatif dan UMKM
6.1.2	Meningkatnya daya saing industri	Meningkatkan hilirisasi berbasis agroindustri		Penguatan integrasi antara sektor pertanian dengan industri pengolahan Penyediaan insentif dan kemudahan regulasi bagi pelaku usaha agroindustri Pengembangan infrastruktur dan teknologi pengolahan hasil pertanian yang ramah lingkungan
6.1.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pembangunan dan		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan kemandirian desa	perekonomian desa	<p>Pengembangan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang ekonomi di wilayah desa</p> <p>Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa</p> <p>Pengembangan BUMDes dan Koperasi untuk mendorong perekonomian desa</p> <p>Pengembangan potensi lokal desa melalui diversifikasi usaha dan inovasi berbasis kearifan lokal.</p> <p>Penguatan kelembagaan desa untuk meningkatkan tata kelola pembangunan dan pengelolaan ekonomi secara partisipatif dan berkelanjutan.</p>
7	Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan			
7.1	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam			
7.1.1	Meningkatnya nilai tambah hilirisasi produk Perkebunan dan pertambangan	Meningkatkan Kapasitas Pengolahan dan Diversifikasi Produk untuk Meningkatkan Nilai Tambah	<p>Peningkatan investasi pada sektor penggalian dan pertambangan</p> <p>Peningkatan R&D dalam pengolahan hasil tambang dan perkebunan</p> <p>Peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk pengolahan hasil tambang dan perkebunan</p>	
7.2	Meningkatnya pembangunan yang ramah lingkungan			
7.2.1	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan	<p>Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan lingkungan hidup</p> <p>Penguatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>Peningkatan sistem pengelolaan persampahan melalui pembangunan TPA</p>	
7.2.2	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Meningkatkan transisi energi baru terbarukan	<p>Pembangunan berbasis teknologi ramah lingkungan</p> <p>Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait emisi gas rumah kaca</p> <p>Pengembangan transportasi rendah emisi</p>	
7.2.3	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Transisi Energi Berkelanjutan melalui Pengembangan Energi Terbarukan	<p>Pengembangan infrastruktur Energi Baru Terbarukan</p> <p>Peningkatan akses rumah tangga terhadap EBT</p>	
8	Meningkatkan Produktivitas Perkebunan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan			
8.1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan			
8.1.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani	<p>Penyediaan bibit unggul, pupuk, dan teknologi tepat guna bagi petani.</p> <p>Peningkatan akses pembiayaan petani</p> <p>Penguatan kelembagaan petani dan pengembangan pasar produk pertanian.</p> <p>Pembangunan dan peningkatan irigasi, jalan perkebunan dan pertanian sebagai sarana transportasi angkutan produksi perkebunan dan pertanian</p> <p>Penataan dan pengembangan kawasan perkebunan dan pertanian</p> <p>Peningkatan kualitas produksi perkebunan dan pertanian serta modernisasi perkebunan dan pertanian</p>	
8.1.2	Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan	Peningkatan hasil budidaya dan pendapatan pembudidaya perikanan	<p>Penyediaan benih unggul dan teknologi budidaya yang efisien.</p> <p>Fasilitasi akses pembiayaan dan pelatihan bagi pembudidaya perikanan.</p> <p>Pengembangan jaringan pemasaran dan penguatan kelembagaan pembudidaya perikanan.</p>	
8.1.3	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Pengelolaan cadangan pangan dan peningkatan produksi	<p>Optimalisasi produksi pangan melalui penggunaan teknologi dan bibit unggul.</p> <p>Pengelolaan dan distribusi cadangan pangan</p>	



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pangan berkualitas	secara efisien. Peningkatan akses pasar dan stabilisasi harga pangan
9	Menciptakan Lapangan Kerja dan Pemerataan Kesempatan Kerja			
9.1	Menurunnya angka kemiskinan			
9.1.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Penguatan program sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkeadilan, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan dan marginal.		Pengembangan dan perluasan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pelatihan keterampilan dan akses permodalan bagi kelompok marginal.
9.2	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas tenaga kerja, dan kewirausahaan			
9.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, dan perluasan lapangan kerja.		Pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja. Fasilitasi penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor strategis dan padat karya. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Menjalin kemitraan dan meningkatkan peranan swasta dan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam Padang Lawas Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pembukaan lapangan kerja baru
9.2.2	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Penciptaan lingkungan usaha yang kondusif dan menarik bagi investor domestik maupun asing		Penyederhanaan regulasi dan perizinan Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi untuk sektor prioritas Penguatan transparansi dan kepastian hukum
9.2.3	Meningkatnya minat pemuda untuk berwirausaha	Meningkatkan Akses dan Dukungan terhadap Kewirausahaan bagi pemuda		Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Fasilitasi pendanaan dan akses kredit untuk pemula Pemberian insentif kepada pelaku usaha
10	Mengembangkan Destinasi Wisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal			
10.1	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata daerah			
10.1.1	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif		Peningkatan sarana dan prasarana sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Peningkatan promosi destinasi wisata dan produk kreatif di pasar domestik dan internasional. Peningkatan keterampilan SDM Pariwisata Fasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
10.1.2	Terwujudnya berkebudayaan maju	Penguatan pelestarian budaya dan adaptasi budaya		Perlindungan dan pelestarian warisan budaya serta nilai-nilai tradisional. Pengembangan nilai-nilai budaya dalam pendidikan Pelestarian budaya melalui pembangunan rumah adat Padang Lawas Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029

**Tabel 3.9.
Keselarasan dan dukungan Tematik Khusus**

NO	TEMATIK KHUSUS	RKPD KABUPATEN PADANG LAWAS			OPD PENANGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
1	Swasemba da Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pnyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	TEMATIK KHUSUS	RKPD KABUPATEN PADANG LAWAS			OPD PENAGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
2	program Makan Bergizi Gratis (MBG)				
3	Program 3 Juta Rumah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	TEMATIK KHUSUS	RKPD KABUPATEN PADANG LAWAS			OPD PENAGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
4	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5	Program Sekolah Rakyat				
6	Pengendalian Inflasi di daerah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
7	Pencegahan Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	TEMATIK KHUSUS	RKPD KABUPATEN PADANG LAWAS			OPD PENANGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
8	Kemiskinan Ekstrem	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DINAS KETENAGAKERJAAN
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	DINAS KETENAGAKERJAAN
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pameran Dagang Lokal	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			



Tabel 3.10

Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama dalam RKP dan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026

NO	RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	Program Daerah
1	Pembangunan pangan akuatik (<i>blue food</i>)	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2	Pembangunan pangan hewani	1. Program pengelolaan perikanan tangkap 2. Program pengelolaan perikanan budidaya 3. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan
3	Pembangunan pangan lokal dan nabati	1. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 2. Program pengawasan keamanan pangan
4	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
5	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	1. Program pengelolaan sumber daya air (SDA) 2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
6	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
7	Percepatan Pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Program pemasaran pariwisata 3. Pengembangan ekonomi kreatif 4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
8	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	1. Program perlindungan dan jaminan social 2. Program perlindungan khusus anak
9	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	1. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 2. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
10	Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kabupaten/ Kota dan Pengembangan Pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Program penataan bangunan gedung
11	Pengembangan KEK Sei Mangkei	Program penyelenggaraan jalan
12	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

3.2 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran merupakan rumusan aspirasi, permasalahan, serta kebutuhan masyarakat yang dihimpun dari hasil penjaringan aspirasi melalui musyawarah pembangunan (musrenbang), reses anggota DPRD, serta berbagai bentuk partisipasi publik lainnya. Pokok-pokok pikiran menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah karena mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan menjadi dasar dalam menyusun program serta kegiatan prioritas.

Pokok-pokok pikiran ini akan disinergikan dan diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja perangkat daerah, serta arah kebijakan nasional dan provinsi, guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Padang Lawas tahun 2026



merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Kabupaten Padang Lawas, yang dilakukan melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Kegiatan reses merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Padang Lawas lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah. Usulan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
1					
1	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Dek Penahan Tebing simargalunggung Desa Tanjung Baru	Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Dek Sawah Manggis	Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 0801 Pinarik 4 Ruangan	Desa Pinarik Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
4	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Rambin Desa Pinarik	Desa Pinarik Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
5	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Pinarik	Desa Pinarik Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
6	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jembatan Desa Pinarik	Desa Pinarik Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
7	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Dek Penahan Tebing Desa Pinarik	Desa Pinarik Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
8	LUAT HASIBUAN	Pembangunan jalan Penghubung Kec. Batang Lubu Sutam - Kec. Sosa Timur	Desa Pinarik Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
9	LUAT HASIBUAN	Rehabilitasi Jalan Padang Singobuk Desa Siadam	Desa Siadam Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
10	LUAT HASIBUAN	Rehabilitasi Mesjid Desa Siojo	Desa Siojo Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
11	LUAT HASIBUAN	Rehabilitasi Mesjid Desa Tangga Batu	Desa Tangga Batu Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
12	LUAT HASIBUAN	Rehabilitasi Mesjid Desa Pasar Sabtu Pinarik	Desa Pinarik Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
13	LUAT HASIBUAN	Rehab Mesjid Desa Tandolan	Desa Tandolan Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
14	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Paret Pasar sabtu Pinarik	Desa Pasar Sabtu Pinarik Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
15	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Dek Penahan Tebing Desa Hatongga	Desa Hatongga Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
16	LUAT HASIBUAN	Rehabilitasi Jalan Lintas Pinarik	Desa Pinarik Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
17	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Mondang	Desa Mondang Kecamatan Sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
18	LUAT HASIBUAN	Rehabilitasi Rambin Desa Siadam	Desa Siadam Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2.					
1	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Saluran Irigasi Saba Manggu	Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Jalan Hotmik Desa Sibontar	Desa Sibontar Kecamatan Barumun Barat, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Jalan Hotmik Desa Parannapa Dolok	Desa Parannapa Dolok Kecamatan Barumun Barat, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Ruang Kelas Baru MIN Desa Parannapa Jae	Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
5	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengadaan Alat-alat Pertanian AI Sintan Se Kecamatan Barumun Barat	Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat, Kab. Padang Lawas	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
6	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Jalan Usaha Tani Kebun Galanggang Kecamatan Barumun Barat	Desa Galanggang, Kab. Padang Lawas	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
7	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengadaan Kelompok Tani Hewan Ternak Lembu dan Kerbau 5 Kelompok.	Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
8	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengadaan Kelompok Tani Hewan Ternak 5 Kelompok	Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	



NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
9	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Rehabilitasi Bendungan irigasi Pertanian Desa Sidongdong - Desa Batu Sundung Kecamatan Barumun Barat.	Desa Sidongdong - Desa Batu Sundung Kecamatan Barumun Barat, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
10	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pemeliharaan Jalan Se Kecamatan Barumun Barat	Kecamatan Barumun Barat, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
11	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Lanjutan Hotmik Jalan Lintas Gading Desa Parannapa Dolok Kecamatan Barumun Barat.	Desa Gading-Desa Parannapa Dolok Kecamatan Barumun Barat, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3					
1	MUHAMMAD DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan pagar beton TPU desa Trans pir sosa IIIA dan IIIB	Desa Trans pir sosa IIIA dan IIIB kec. Hutaraja Tinggi, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
2	MUHAMMAD DAYAN HASIBUAN, SH	Pengerasan jalan desa Lubuk Bunut	Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	MUHAMMAD DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan drainase desa pasar ujung batu kecamatan Sosa	Desa pasar ujung batu kecamatan sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4	MUHAMMAD DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan drainase desa Sibodak sosa jae kecamatan Hutaraja tinggi	Desa Sibodak sosa jae kecamatan Hutaraja tinggi, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
5	MUHAMMAD DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih (sumur bor) desa Hutaraja lamo kecamatan sosa	Desa Hutaraja lamo kecamatan sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
6	MUHAMMAD DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih desa simarancar kecamatan sosa	Desa simarancar kecamatan sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
7	MUHAMMAD DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan beronjong/penahan tebing desa Lubuk bunut kecamatan Hutaraja tinggi	Desa Lubuk bunut kecamatan Hutaraja tinggi, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4					
1	ABUBOKAR HASIBUAN	Pembangunan dek penahan aliran sungai pisangkolot Desa Hutaraja Tinggi	Desa Hutaraja Tinggi, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	ABUBOKAR HASIBUAN	Rehabilitas Madrasah Desa Sungai Korang	Desa Sungai Korang, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3	ABUBOKAR HASIBUAN	Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru Madrasah Sungai Sotul Di Hutaraja Tinggi	Desa Sungai Sotul, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
4	ABUBOKAR HASIBUAN	Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru Di Yayasan Alkausar Hutaraja Tinggi	Hutaraja Tinggi, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
5	ABUBOKAR HASIBUAN	Lanjutan Hotmix Jalan Hutaraja Tinggi	Hutaraja Tinggi, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
6	ABUBOKAR HASIBUAN	Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Tani Desa Hutaraja Tinggi	Desa Hutaraja Tinggi, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
5					
1	ACHYAR HIDAYAT HASIBUAN	Pembangunan Hotmix jalan bersama Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa	Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	ACHYAR HIDAYAT HASIBUAN	Pembangunan Pagar Beton Tanah lapang Desa aek Tinga Kec. Sosa	Desa aek Tinga Kecamatan Sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
3	ACHYAR HIDAYAT HASIBUAN	Pembangunan Rigid Beton Jalan Mesjid Nurul Iman Desa aek Tinga Kec.Sosa	Desa aek Tinga Kecamatan Sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4	ACHYAR HIDAYAT HASIBUAN	Pembangunan Rigid Beton Jalan Mess GKPA Desa Hutaraja	Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa, Kab. Padang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	



NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
		Lamo Kec.Sosa	Lawas	TATA RUANG	
5	ACHYAR Hidayat HASIBUAN	Pembangunan Lanjutan TPT Pasar Lombang - Persawahan Desa Pasar Ujung Batu Kec.Sosa	Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
6	ACHYAR Hidayat HASIBUAN	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) Desa Pasar Ujung Batu Kec. Sosa	Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
7	ACHYAR Hidayat HASIBUAN	Pembangunan Rigid Beton Jalan Usaha Tani Lokasi Appang Rawang Desa Sibodak Sosa Jae Kec. Hutaraja Tinggi	Desa Sibodak Sosa jae Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
8	ACHYAR Hidayat HASIBUAN	Pembangunan Rigid Beton Jalan Usaha Tani Lokasi Sialang Munggu Desa Sibodak Sosa Jae Kec. Hutaraja Tinggi	Desa Sibodak Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
6					
1	AKHMAD HUSEIN	Peningkatan Jalan Desa Simangambat Kecamatan Sosa Timur	Desa Simangambat Kecamatan Sosa Timur, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	AKHMAD HUSEIN	PENINGKATAN JALAN DESA PIR TRANS SOSA1A MENUJU PIR TRANS SOSA TIMUR	DESA PIR TRANS SOSA 1A, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	AKHMAD HUSEIN	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DI DESA PIR TRANS SOSA1B KEC.SOSA TIMUR	DESA PIR TRANS SOSA1B, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4	AKHMAD HUSEIN	PEMBANGUNAN RKB BERTINGKAT PADA SMP NEGERI 1 SOSA TIMUR	PADANG LAWAS , Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
5	AKHMAD HUSEIN	PEMBANGUNAN JEMBATAN DI DESA PIR TRANS SOSA 1A KEC.SOSA TIMUR	DESA PIR TRANS SOSA 1A, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
6	AKHMAD HUSEIN	PEMBANGUNAN JALAN DARI RT12 MENUJU PASAR DESA PIR TRANS SOSA 1A KEC. SOSA TIMUR	DESA PIR TRANS SOSA 1A, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
7	AKHMAD HUSEIN	PEMBANGUNAN DRAINASE DI DESA PIR TRANS SOSA 1A KEC. SOSA TIMUR	DESA PIR TRANS SOSA 1A, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
8	AKHMAD HUSEIN	PEMBANGUNAN PAVING BLOK PADA MESJID AL-MUTTAKIN DESA PIR TRANS SOSA 1A KEC.SOSA TIMUR	DESA PIR TRANS SOSA 1A, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
9	AKHMAD HUSEIN	PEMBANGUNAN PAVING BLOK PADA MESJID PAPASO 2 KEC.SOSA TIMUR	DESA PAPASO 2, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
10	AKHMAD HUSEIN	PENINGKATAN JALAN KELILING SAROHA MENUJU PASAR SABTU KEC. BATANG LUBU SUTAM	BATANG LUBU SUTAM, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
7					
1	ARFAN HABIBI	DEK PENAHAN BANJIR SUNGAI GALANGGANG LINK 2 KEC. BARUMUN	LINK 2, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	ARFAN HABIBI	DEK PENAHAN BANJIR SUNGAI BATANG TARIS LINK 7 KEC. BARUMUN	LINK 7, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	ARFAN HABIBI	PEMBANGUNAN JEMBATAN MENUJU PEMAKAMAN LINK 4 PASAR SIBUHUAN KEC. BARUMUN	LINK 4, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4	ARFAN HABIBI	DEK PENAHAN TEBING PEMAKAMAN DI LINGKUNGAN 4 BANJAR KUBUR KEC.BARUMUN	LINK 4 , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
5	ARFAN HABIBI	PEMBANGUNAN PAGAR PEMAKAMAN LINK 6 PASAR SIBUHUAN	LINK 6, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
6	ARFAN HABIBI	PEMBANGUNAN BRONJONG PENAHAN BANJIR DI SUNGAI ALIMATTU DESA JANJI LOBI KEC. BARUMUN	DESA JANJI LOBI, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
7	ARFAN HABIBI	PEMBANGUNAN IRIGASI PERSAWAHAN DI DESA SABA TONGA KEC. BARUMUN	DESA SABA TONGA, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
8	ARFAN HABIBI	PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI AEK GODANG DESA JANJI LOBI KEC. BARUMUN	DESA JANJI LOBI, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
9	ARFAN HABIBI	PENINGKATAN JALAN MENUJU PEMAKAMAN IKPOS LINGKUNGAN 6 PASAR SIBUHUN KEC. BARUMUN	LINK 6, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
10	ARFAN HABIBI	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN HJ.SAMSU LINGKUNGAN 6 PASAR SIBUHUAN KEC.BARUMUN	LINK 6, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
8					
1	AULIA RAHMAN NASUTION	HOTMIK JALAN LINGKAR DESA SIALAMBUE KEC.BARUMUN	DESA SIALAMBUE, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	AULIA RAHMAN NASUTION	SUMUR BOR DESA SIDOMULIO KEC. BARUMUN SELATAN	DESA SIDOMULIO, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	AULIA RAHMAN NASUTION	JALAN TANI SABA JAE DESA HASAHATAN JAE KEC. BARUNUN BARU	DESA HASAHATAN JAE, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
4	AULIA RAHMAN NASUTION	DEK PENAHAN ANTISIPASI BANJIR DESA HANDIS JULU	DESA HANDIS JULU, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
5	AULIA RAHMAN NASUTION	NORMALISASI SUNGAI GANGGA DESA HANDIS JULU	DESA HANDIS JULU, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
9					
1	BASARUDDIN HASIBUAN, S.Sos	Jalan (hotmik) di Desa Huta Lombang, Kecamatan Lubuk Barumon	Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumon, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	BASARUDDIN HASIBUAN, S.Sos	Jembatan Sungai Lappayan Di Desa Huta Lombang, Kecamatan Lubuk Barumon	Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumon, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	BASARUDDIN HASIBUAN, S.Sos	Ruangan Kelas Sekolah MDTA AL Hikmah di Desa Huta Lombang, Kecamatan Lubuk Barumon	Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumon, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
4	BASARUDDIN HASIBUAN, S.Sos	Jalan (Hotmik) Desa Batang Bulu Tanggal Menuju Desa Bonal	Desa Batang Bulu Tanggal, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
5	BASARUDDIN HASIBUAN, S.Sos	Menara Mesjid Di Desa Sihiuk, Kecamatan Lubuk Barumon	Desa Sihiuk Kecamatan Lubuk Barumon, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
6	BASARUDDIN HASIBUAN, S.Sos	Ruangan Kelas Sekolah MTSS I'JAZUL QUR'AN di Desa Janji Lobi Lima, Kecamatan Lubuk Barumon	Desa Janji Lobi Lima Kecamatan Lubuk Barumon, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
10					
1	DONI ANDRIAN	REHAB GEDUNG TK PUTRI KEMBAR + MOBILLER	PASIR JULU KECAMATAN SOSA JULU, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	DONI ANDRIAN	TERNAK LEMBU KELOMPOK TANI "SUBUR TANI"	SIBORNA BUNUT KECAMATAN SOSA JULU, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
3	DONI ANDRIAN	TERNAK KAMBING KELOMPOK TANI "PUSPA KENCANA"	UJUNG BATU II KECAMATAN HUTA RAJA TINGGI, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
4	DONI ANDRIAN	TERNAK KAMBING KELOMPOK TANI "TANI JAYA"	UJUNG BATU V KECAMATAN HUTA RAJA TINGGI, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
5	DONI ANDRIAN	TERNAK KAMBING KELOMPOK TANI "SOSA SEJATI"	PIR TRANS SOSA II KECAMATAN HUTA RAJA TINGGI, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
6	DONI ANDRIAN	TERNAK KAMBING KELOMPOK TANI "SENTOSA SOSA BERSAMA"	PIR TRANS SOSA II KECAMATAN HUTA RAJA TINGGI, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
7	DONI ANDRIAN	TERNAK KAMBING KELOMPOK TANI "LANGSAM UTAMA"	PIR TRANS SOSA III A KECAMATAN HUTA RAJA TINGGI, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
8	DONI ANDRIAN	TERNAK KAMBING KELOMPOKTANI "KRISI AVANTI"	PIR TRANS SOSA II KECAMATAN HUTA RAJA TINGGI, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
9	DONI ANDRIAN	TERNAK KAMBING KELOMPOK TANI "ASASTA TANI"	PIR TRANS SOSA II, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
11					
1	FACHRUR RIZAL	Pembangunan Jembatan Desa Tobing Jae	Desa Tobing Jae, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	FACHRUR RIZAL	Pembangunan MCK Sekolah SDN. Tobing Jae	Desa Tobing Jae, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
3	FACHRUR RIZAL	Pembangunan Jalan/ Peningkatan Jalan Desa Gala Bonang Aer Gala	Desa Gala Bonang, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
4	FACHRUR RIZAL	Rehab Jembatan Aek Bayuon Tanjung Morang	Desa Aek Bayuon, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
5	FACHRUR RIZAL	Pengadaan Ternak Lembu Desa Tobing jae	Desa Tobing Jae, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
6	FACHRUR RIZAL	Peningkatan Jalan Tobing jae	Desa Tobing Jae, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
7	FACHRUR RIZAL	Rehab Masjid Desa Gunung Baringin	Desa Gunung Baringin, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
8	FACHRUR RIZAL	Pembangunan Irigasi Saba Lombang Desa Padang Hasior Dolok	Desa Padang Hasior Dolok, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
9	FACHRUR RIZAL	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sihaborgoan Dalan	Sihaborgoan Dalan, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
10	FACHRUR RIZAL	Pengadaan ternak kelompok tani Mamopar Desa Siolip	Desa Siolip, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
12					
1	GONTAR HALOMOAN HARAHAHAP, S.T	Pembangunan jembatan	Desa Sibatu Loting, Kecamatan Barumun tengah, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	GONTAR HALOMOAN HARAHAHAP, S.T	Pembangunan Pagar Masjid	Desa Sibatu Loting, Kecamatan Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
3	GONTAR HALOMOAN HARAHAHAP, S.T	Pembangunan jalan Sibatu Loting-Sisalean	Desa Sibatu loting, Kecamatan Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
4	GONTAR HALOMOAN HARAHAHAP, S.T	Ruang kelas baru (RKB) Yayasan Al-Amran Imanul Hamidiyah	Desa Sisalean, Kecamatan Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
5	GONTAR HALOMOAN HARAHAHAP, S.T	Pembangunan jalan Desa Sihaborgoan Dalan Purba Dolok	Dusun Purba Dolok Desa Sibatu Loting, Kecamatan Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
6	GONTAR HALOMOAN HARAHAHAP, S.T	Pembangunan Majelis Ta'lim Abi Ummi	Desa Sisalean, Kecamatan Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
7	GONTAR HALOMOAN HARAHAHAP, S.T	Pengadaan Perontok Padi	Desa Sisalean Kecamatan Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
8	GONTAR HALOMOAN HARAHAHAP, S.T	Pengadaan hand traktor	Desa Sibatu Loting, kecamatan Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
13					
1	H. FERYANSAH HASIBUAN	Pembuatan Jalan Rabat Beton Desa Pagaran Bira Julu Kecamatan Sosopan	Desa Pagaran Bira Julu Kecamatan Sosopan , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	H. FERYANSAH HASIBUAN	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Selatan	Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Selatan , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	H. FERYANSAH HASIBUAN	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan	Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4	H. FERYANSAH HASIBUAN	Bantuan Meja dan Kursi di Tsanawiyah Swasta Darul Islah Desa Pagaran Bira Julu	Desa Pagaran Bira Julu Kecamatan Sosopan , Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
5	H. FERYANSAH HASIBUAN	Pembangunan Saluran Irigasi di Desa Pagaran Bira Julu Kecamatan Sosopan	Desa Pagaran Bira Julu Kecamatan Sosopan, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
14					
1	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc. M.E.Sy	Pembangunan Jembatan (lanjutan)	Desa Sibual-buali kecamatan Ulu Barumon, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc. M.E.Sy	Pembangunan Jalan usaha tani	Desa Sibual - Buali Kec. Ulu Barumon, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc. M.E.Sy	Pembangunan Jalan usaha tani	Desa Tanjung Kec. Ulu Barumon, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc. M.E.Sy	Pembangunan RKB Yayasan Riadussolihin	Lingkungan VI IKPOS Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
5	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc. M.E.Sy	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Simanuldang Jae Kec. Ulu Barumon, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
15					
1	HASAN BASRI NST	Pembangunan Jembatan menuju desa sayur matua,dan desa sigiring-giring kecamatan barumon	Desa sayur matua dan desa Sigiring-giring kecamatan barumon, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	HASAN BASRI NST	Pembangunan jembatan menuju pemukiman dalam desa Lorong I (satu) kecamatan barumon	Desa Lorong I (satu) kecamatan barumon, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	HASAN BASRI NST	Pembangunan Bendungan aek Lakka Desa janji lobi Kecamatan barumon	Desa Janji Lobi Kecamatan Barumon, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4	HASAN BASRI NST	Pembangunan penahan banjir Lorong II (dua) Desa janji Lobi Kecamatan barumon	Desa janji lobi Kecamatan barumon, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
5	HASAN BASRI NST	Pembangunan pagar beton TPU Desa janji Lobi Kecamatan barumun	Desa janji Lobi Kecamatan Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
6	HASAN BASRI NST	Pembangunan Pengerasan Jalan Desa janji Lobi Kecamatan Barumun	Desa Janji Lobi Kecamatan Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
7	HASAN BASRI NST	Pembangunan Pelebaran Jalan menuju Desa janji Lobi Kecamatan barumun	Desa janji Lobi Kecamatan Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
8	HASAN BASRI NST	Pembangunan Bronjong Di aek sioping Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun	Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
9	HASAN BASRI NST	Pembangunan Hotmix Jalan keliling Desa janji Lobi Kecamatan barumun	Desa Janji Lobi Kecamatan barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
10	HASAN BASRI NST	pembangunan paving blok masjid desa janji lobi	desa janjilobi kecamatan barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
11	HASAN BASRI NST	pengadaan lampu jalan desa janji lobi	desa janji lobi kecamatan barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
16					
1	HENDRA KUSNANDA SIREGAR	Pembangunan Drainase Desa Batang Bulu Lama Tanjung Purba Tua	Batang Bulu Lama, Kecamatan Barumun Selatan, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM	
2	HENDRA KUSNANDA SIREGAR	Rehab Mushollah Pondok Pesantren Syekh Abdullah Sibual-Buali Desa Sibuhuan Julu	Desa Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
3	HENDRA KUSNANDA SIREGAR	Pembangunan Lanjutan Pagar Pondok Pesantren Syekh Hasbullah Sibual-Buali	Desa Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
4	HENDRA KUSNANDA SIREGAR	Pembangunan Lanjutan Masjid Sayur Matinggi Desa Batang Bulu Baru	Desa Batang Bulu Baru Kecamatan Barumun Selatan, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
5	HENDRA KUSNANDA SIREGAR	Pembangunan Pagar TPU Desa Batang Bulu Lama	Desa Batang Bulu Lama Kecamatan Barumun Selatan, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
6	HENDRA KUSNANDA SIREGAR	Tembok Penahan Tanah Desa Gunung Barani	Desa Gunung Barani Kecamatan Barumun Selatan, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
7	HENDRA KUSNANDA SIREGAR	Rabat Beton	Desa Hapung Kecamatan Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
8	HENDRA KUSNANDA SIREGAR	Peningkatan Jalan Rabat Beton	Linkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
9	HENDRA KUSNANDA SIREGAR	Pembangunan Jembatan Bondar Godang Menuju Harang	Desa Batang Bulu Baru Kecamatan Barumun Selatan, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
10	HENDRA KUSNANDA SIREGAR	Pengadaan Bibit Sapi 40 Ekor di Desa Batang Bulu Baru, Batang Bulu Lama, Tanjung Purba Tua, dan Gunung Intan	Desa Batang Bulu Baru Kecamatan Barumun Selatan, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
11	HENDRA KUSNANDA SIREGAR	Penahan Bronjong Aek Kasani	Desa Banua Tonga Kecamatan Barumun Selatan, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
17					
1	HIMPUN DAULAY	Rabat beton panjang 500 M	Ujung batu, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	HIMPUN DAULAY	Rabat beton panjang 500 M	Desa mondang, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
3	HIMPUN DAULAY	Rabat beton 150 M	Desa Janji raja, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4	HIMPUN DAULAY	Rabat beton panjang 200M	Tanjung botung, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
5	HIMPUN DAULAY	Rabat beton 300M	Pasir julu, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
6	HIMPUN DAULAY	Rabat beton 150M	Tanjung bale, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
7	HIMPUN DAULAY	Pembangunan masjid	Ujung batu, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1.000.000.000.000
8	HIMPUN DAULAY	Pembangunan masjid	Desa mondang, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
9	HIMPUN DAULAY	Pembangunan masjid	Pasir julu, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
18					
1	IBNU KOTOB, SE	DRAINASE DESA UJUNG BATU 1 KECAMATAN HURAGI	Padang lawas, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	IBNU KOTOB, SE	LANTAI JEMBATAN DESA UJUNG BATU 2 KECAMATAN HURAGI	PADANG LAWAS, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	IBNU KOTOB, SE	PENGERASAN JALAN /RABAT BETON DESA UJUNG BATU 3 KECAMATAN HURAGI	PADANG LAWAS, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
4	IBNU KOTOB, SE	DRAINASE DESA UJUNG BATU 4 KECAMATAN HURAGI	P\PADANG LAWAS, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
5	IBNU KOTOB, SE	DRAINASE DESA UJUNG BATU 5 KECAMATAN HURAGI	PADANG LAWAS, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
6	IBNU KOTOB, SE	MCK DAN SUMUR BOR SD NEGERI UJUNG BATU 1 KECAMATAN HURAGI	PADANG LAWAS, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
7	IBNU KOTOB, SE	RABAT BETON DESA ALIAGA KECAMATAN HURAGI	PADANG LAWAS, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
8	IBNU KOTOB, SE	LANTAI PAVING BLOK TRANSPIR 3B	TRANSPIR 3B, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
9	IBNU KOTOB, SE	PENGERASAN / PENYERTUAN JALAN DESA UJUNG BATU 6 KEC. HURAGI	PADANG LAWAS, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
10	IBNU KOTOB, SE	PENGERASAN/PEYER TUAN JALAN DI DESA UJUNG BATU 1 KEC. HURAGI	DESA UJUNG BATU 1, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
19					
1	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Peningkatan Jalan Desa Huta Bargot, Aek Nabara Barumun menjadi Hotmik	Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Lanjutan Hotmik Desa Padang Garugur Jae menuju Desa Tanjung Rokan Kecamatan Aek Nabara Barumun	Desa Padang Garugur Jae Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
20					
1	LUKMAN DAULAY	Pembangunan Jalan Hotmig	Desa Parantonga Kecamatan Aek Nabara, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	LUKMAN DAULAY	Pengadaan Mesin Jetor Untuk Pertanian	Desa Tolang Kecamatan Aek Nabara Barumun,	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN	



NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
			Kab. Padang Lawas	PANGAN	
3	LUKMAN DAULAY	Mmbutuhkan Pembangunan Waduk Persawahan	Desa Tolang Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4	LUKMAN DAULAY	Pembangunan Bronjong	Desa Paran Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
5	LUKMAN DAULAY	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Desa Parantonga Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
21					
1	MHD. YUSUF, SE	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Hapung Kec. Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	MHD. YUSUF, SE	Pembangunan Jalan Tanjakan, Rabat Beton	Desa Hapung Kec. Ulu Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	MHD. YUSUF, SE	Pembangunan MCK Mesjid Miftahul Jannah	Desa Hapung Kec Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
4	MHD. YUSUF, SE	Pembangunn Jalan	Desa Hapung Kecamatan Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
5	MHD. YUSUF, SE	Pembangunan Jembatan Aek Sosa	Desa Hapung Kecamatan Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
6	MHD. YUSUF, SE	Pembangunan penahan tanah jalan	Desa Hapung Kecamatan Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
22					
1	MUHAMMAD RAJAB SIREGAR, SE	Pembangunan menara masjid	Desa parau sorat, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN	



NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
				DAN PERHUBUNGAN	
2	MUHAMMAD RAJAB SIREGAR, SE	Pembangunan pagar pendidikan di sd	Desa parau sorat, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3	MUHAMMAD RAJAB SIREGAR, SE	Pembangunan rumah masyarakat yang tidak layak huni untuk 15 unit rumah	Parau sorat dan beberapa lokasi desa lainnya, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
23					
1	RAHMAT SU'AIDI MARBUN, S.Pd. I	Pembangunan Hotmix Jalan Teratai Banjar Kuliling	Banjar Kuliling, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	RAHMAT SU'AIDI MARBUN, S.Pd. I	Lanjutan Jalan Kepemakaman Umum Lingkungan V	Lingkungan V, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	RAHMAT SU'AIDI MARBUN, S.Pd. I	Lanjutan Pembangunan Masjid Nurul Qolbiyah Lingkungan V	Lingkungan V, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
4	RAHMAT SU'AIDI MARBUN, S.Pd. I	Pembangunan Rambin Desa Siundol Julu Kecamatan Sosapan	Desa Siundol Julu, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
5	RAHMAT SU'AIDI MARBUN, S.Pd. I	Pembangunan Hotmix Jalan masuk Pondok Pesantren Darul Adalah Lubuk Barumun	Desa Surodingin, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
6	RAHMAT SU'AIDI MARBUN, S.Pd. I	Lanjutan Pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darul Adalah Lubuk Barumun	Desa Surodingin, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
7	RAHMAT SU'AIDI MARBUN, S.Pd. I	Pembangunan Kamar Mandi Pondok Pesantren Darul Adalah Lubuk Barumun	Desa Surodingin, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	



NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
24					
1	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pengadaan Ternak Kerbau Jantan	Desa Pasar Latong , Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
2	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pengadaan Ternak Kerbau Betina	Desa Pasar Latong, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pengadaan Ternak Sapi Jantan 5 Ekor dan Pengadaan Ternak Sapi Betina 15 Ekor	Desa Pasar Latong, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
4	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Ruang Kelas Baru TK/PAUD Sutan Sinaloan Lubis Bertingkat	Desa Pasar Latong, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
5	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Lanjutan Menara Masjid Al-Mardiyah Pasar Latong	Desa Pasar Latong, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
25					
1	RAJA PARLINDUNGA N NST, ST	Normalisasi Aek Bulu Sonik untuk mengantisipasi past banjir Desa Bulu Sonik Kec. Barumun	Desa Bulu Sonik Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	RAJA PARLINDUNGA N NST, ST	PeningkatanJalan Desa Bulu Sonik	Desa Bulu Sonik, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	RAJA PARLINDUNGA N NST, ST	Pembangunan Bronjong Jembatan Aek Bulu Sonik Desa Bulu Sonik Kec. Barumun	Desa Bulu Sonik Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4	RAJA PARLINDUNGA N NST, ST	Pembangunan Tebing Penahan tanah Desa Pagaran Baringin	Desa Pagaran Baringin Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
5	RAJA PARLINDUNGA N NST, ST	Peningkatan Jalan Desa Arse Simatorkis	Desa Arse Simatorkis Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
6	RAJA PARLINDUNGA N NST, ST	Peningkatan jalan Desa menuju sialang batu Desa Hapung Kec. Ulu Sosa	Desa Hapung Kec. Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
7	RAJA PARLINDUNGA N NST, ST	Lanjutan peningkatan jalan Desa Bangun Raya Kec. Barumun	Desa Bangun Raya Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
8	RAJA PARLINDUNGA N NST, ST	Peningkatan jalan Desa Paran Batu Kec. Ulu Barumun	Desa Paran Batu Kec. Ulu Barumun , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
9	RAJA PARLINDUNGA N NST, ST	Pengerasan jalan Desa Hapung Kec. Ulu Sosa	Desa Hapung Kec. Ulu Sosa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
26					
1	RIZALDI KURNIA SALEH NASUTION	Pengaspalan Hotmik Penghujung Desa Sigalampung - Siabu	Desa Siabu, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	RIZALDI KURNIA SALEH NASUTION	Pengadaan RKB (Ruang Kelas Baru)	Siabu, Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3	RIZALDI KURNIA SALEH NASUTION	Pembangunan Pavingblok Masjid Al-Ikhlas	Desa Sigalampung, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
4	RIZALDI KURNIA SALEH NASUTION	Pembangunan Dek Penahan Tebing Antisipasi Sungai Sosa	Desa Sigalampung, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
27					
1	ROMI PARMONANGA N NASUTION,SH	Sambungan Dek Telaga Aek Paringgonan	Desa Paringgonan, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	ROMI PARMONANGA N NASUTION,SH	Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dari tapian Nauli	Desa Tapian Nauli, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	ROMI PARMONANGA N NASUTION,SH	Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Desa Pagaranbira	Desa Pagaranbira, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
4	ROMI PARMONANGA N NASUTION,SH	Pengadaan Ternak Lembu 10 Ekor pada kelompok Tani Desa Paringgonan	Desa Paringgonan, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
5	ROMI PARMONANGA N NASUTION,SH	Pengadaan Ternak Lembu 10 Ekor Pada Kelompok Tani Desa Pagaranbira	Desa Pagaranbira, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
6	ROMI PARMONANGA N NASUTION,SH	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Paringgonan Julu	Desa Paringgonan Julu, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
7	ROMI PARMONANGA N NASUTION,SH	Pembangunan rapat beton jalan usaha tani	Desa Siraisan, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
28					
1	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembukaan jalan ke kebun masyarakat wilayah pilar dan lappisi desa Limbong dan siolip kecamatan barumun baru	Desa Limbong dan Siolip, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
2	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Peningkatan jalan lingkaran luar desa hasahatan jae menuju jalinsum	Desa Hasahatan Jae, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Lanjutan pembangunan Drainase desa Hasahatan Jae	Desa Hasahatan Jae, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Rehabilitasi irigasi Aek congkeh lorong satu desa hasahatan jae kecamatan barumun baru	Desa Hasahatan Jae, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
5	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	peningkatan jalan lingkaran berupa hotmix desa hasahatan jae	Desa Hasahatan Jae, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
6	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	pembukaan jalan lingkaran dari desa tanjung baringin sampai simpang siborong;borong dan desa siolip kecamatan barumun baru	desa tanjung baringin sampai simpang siborong;borong dan desa siolip kecamatan barumun baru, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
7	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	pembangunan jembatan diatas sungai barumun	Desa Saba Rimba, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
8	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	pembukaan jalan dari desa hasahatan jae menuju kecamatan barumun baru	desa hasahatan jae kabaupaten padang lawas, Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
9	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	peningkatan jalan simpang sigorbus julu menuju titi gantung sabahotang	desa sigorbus julu, Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
10	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	pembuatan pagar TPU desa Tanjung baringin simarulak	desa tanjung baringin simarulak, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
11	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	peningkatan jalan dari desa handis julu menuju desa binabo julu	desa handis julu, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
12	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	rehab berat ruang kelas di SMPN 2 Barumun	desa hasahatan julu, Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
13	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	lanjutan irigasi saba tonga dan saba jae desa hasahatan jae	desa hasahatan jae, Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
14	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	lanjutan pembangunan drainase lorong dua desa hasahatan jae	desa hasahatan jae, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
15	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	percepatan pemasukan saluran air PAM ke desa Siolip	desa Siolip, Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
16	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	pemanfaatan sumber air panas di desa paringgonan dengan cara pembuatan air PAM ke rumah warga	desa Paringgonan, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
17	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	pembangunan jalan dari ujung saba jae tembus ke desa handis julu dan desa purbatua	desa hasahatan jae, Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
18	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	pembangunan jalan pertanian di desa limbong	Desa Limbong, Kab. Padang Lawa, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
19	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	pipalsasi air minum ke desa Hasahatan Jae	desa Hasahatan Jae, Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
20	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	pembangunan gorong-gorong dan jembatan kecil sepanjang jalan dari desa hutarimbaru menuju desa sidomulio	desa Hutarimbaru, Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
21	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	perbaikan gorong-gorong yang berada di depan rumah Dahlan desa Sabarimba	desa Sabarimba, Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
22	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembangunan Gorong-gorong di desa Sayurmatua	desa Sayurmatua, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
23	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	pengaspalan jalan penghubung antara desa Hutarimbaru dengan desa sayurmatua	desa sayurmatua, Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
24	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	pembangunan bronjong penahan banjir desa tanjung botung	des tanjung botung, Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
25	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	pembangunan pagar TPU desa Hutarimbaru	Desa Hutarimbaru, Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
26	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	penambahan tiang listrik di wilaah sabarimba baru dan desa sabarimba	Desa Sabarimba, Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	



NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	
29					
1	UBUDIYA HUSEIN AL'AMIN SIREGAR	Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Desa Gunung Manaon	Desa Gunung Manaon, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
2	UBUDIYA HUSEIN AL'AMIN SIREGAR	Pengadaan Ternak sapi Kelompok Tani sahata Desa Padang Hasior	Desa Padang Hasior, Kab. Padang Lawas	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3	UBUDIYA HUSEIN AL'AMIN SIREGAR	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bahal Batu	Desa Bahal Batu, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4	UBUDIYA HUSEIN AL'AMIN SIREGAR	Pengadaan Alat Mesin Pertanian Desa Silenjeng	Desa Silenjeng, Kab. Padang Lawas	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
5	UBUDIYA HUSEIN AL'AMIN SIREGAR	Pembangunan paret Desa Pasar Huristak	Desa Pasar Huristak, Kab. Padang Lawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
6	UBUDIYA HUSEIN AL'AMIN SIREGAR	Renovasi Masjid Desa Aek Tunjang	Desa Aek Tunjang, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
7	UBUDIYA HUSEIN AL'AMIN SIREGAR	Pembangunan Masjid Desa Jorang Balanga	Desa Jorang Balanga, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
8	UBUDIYA HUSEIN AL'AMIN SIREGAR	Pengadaan Alat Pertanian Desa Sibatu Loting	Desa Sibatu Loting, Kab. Padang Lawas	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
9	UBUDIYA HUSEIN AL'AMIN SIREGAR	Renovasi Masjid Desa Pangirkiran Dolok	Desa Pangirkiran Dolok, Kab. Padang Lawas	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	

Sumber: Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Padang Lawas tahun 2025



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kondisi Ekonomi Nasional

Pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 7-8% dapat dicapai pada tahun 2026. Saat ini pemerintah perlu menjaga daya beli dalam rangka menjaga tingkat konsumsi, mengingat kondisi global masih dalam gejolak dan ketidakpastian. Di samping itu, penting untuk terus menyerap lebih banyak investasi baru kedepannya. Untuk mendorong lebih banyak terciptanya lapangan kerja dan pada gilirannya mengurangi kemiskinan.

Di samping itu, beberapa langkah pemerintah lain adalah mendorong penambahan devisa hasil ekspor, dimana waktu pengkajiannya telah diperpanjang. Kemudian mendorong optimalisasi peran sejumlah sektor unggulan seperti mineral, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Karena kita sangat membutuhkan dolar ke depan dan itu hanya bisa kalau kita menghasilkan devisa. Dan salah satu quick-kill adalah pengembangan pariwisata.

Bank Dunia memperkirakan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran rata-rata 5,1% pada tahun ini hingga 2026, dengan risiko pelemahan seiring dengan lesunya kinerja perdagangan dan normalisasi permintaan di dalam negeri. Pertumbuhan konsumsi masyarakat akan sangat naik turun di tahun 2026 melihat kondisi inflasi di tahun 2026 masih sangat beragam.

4.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Seiring dengan proses pemulihan perekonomian nasional, Tren pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut dan semakin menguat di tengah kondisi ketidakpastian global. Pulihnya mobilitas dan daya beli masyarakat yang terjaga menjadi pendorong aktivitas ekonomi. Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen. Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Jika dilihat atas dasar harga berlaku, sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 280.263,30 Milyar. Selain itu diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 215.493,94 Milyar dan Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 210.615,49 Milyar juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Adapun sektor yang paling rendah adalah sektor Pengadaan Air,



Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp. 1.001,63 Milyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan
Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	219.415,68	247.947,51	280.263,30	148.721,97	153.237,64	158.952,63
B.	Pertambangan dan Penggalian	11.584,90	12.280,21	13.308,37	7.253,99	7.509,74	7.812,53
C.	Industri Pengolahan	182.735,66	193.742,57	210.615,49	99.869,07	103.289,41	108.089,21
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.061,12	1.097,83	1.125,19	826,87	844,81	867,32
E.	Pengadaan Air, Penge-lolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	897,66	935,12	1.001,63	567,20	583,49	598,49
F.	Konstruksi	126.443,91	138.780,73	148.961,01	70.371,23	74.874,60	79.752,79
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	181.413,59	200.530,11	215.493,94	105.037,72	111.128,79	116.065,40
H.	Transportasi dan Pengu-dangan	43.388,49	53.105,13	57.512,42	24.486,30	27.698,62	29.453,12
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19.505,88	22.159,77	25.330,31	12.751,77	14.056,57	15.741,20
J.	Informasi dan Komunikasi	22.218,00	24.164,92	26.124,96	18.707,24	20.168,23	21.661,70
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	28.358,82	30.279,69	31.626,43	16.628,86	17.543,53	18.222,68
L.	Real Estate	46.639,19	48.951,79	52.204,45	24.802,62	25.593,70	26.977,20
M,N.	Jasa Perusahaan	10.072,91	11.129,06	11.970,07	5.124,58	5.467,38	5.747,52
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	30.243,09	31.525,69	34.433,70	18.041,14	18.388,06	19.506,72
P.	Jasa Pendidikan	16.880,47	18.414,73	19.784,20	12.016,96	12.903,71	13.634,23
Q.	Jasa Kesehatan dan	9.040,94	9.871,93	10.658,57	5.338,02	5.681,82	5.972,61



Lapangan Usaha		Harga			Harga Konstan 2010		
		Berlaku					
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Kegiatan Sosial						
R,S,T, U	Jasa Lainnya	5.292,80	6.078,62	6.505,72	2.983,21	3.265,84	3.479,39
	PDRB	955.193,0	1.050.995,4	1.146.919,7	573.528,7	602.235,9	632.534,7
		9	1	5	7	5	3

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2025

4.2.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Padang Lawas

Perekonomian Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 18.330,40 Milyar dan PDRB per kapita mencapai Rp 65,29 juta. Ekonomi Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 sebesar 5,02 persen.

Tahun 2024 konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan yang signifikan. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan penjagaan ketersediaan bahan pokok, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Kenaikan permintaan domestik dan eksternal, Percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun sebelumnya akan mendorong perbaikan investasi.

Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Jika dilihat kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB atas dasar harga berlaku, dimana sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 9.716,87 Milyar, sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.991,69 Milyar, sektor Konstruksi sebesar Rp. 2.597,25 Milyar, selain itu diikuti juga oleh sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 1.140,02 Milyar juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Adapun sektor yang paling rendah adalah sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang lainnya sebesar Rp. 0,15 Milyar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 4.2
Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 – 2024

No	Sektor	2022	2023	2024
		Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	7.338,87	8.290,90	9.716,87
2	Pertambangan & penggalian	71,98	77,03	80,66
3	Industri pengolahan	2.526,54	2.664,02	2.991,69
4	Pengadaan Listrik dan gas	26,30	28,26	30,91
5	Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	0,14	0,14	0,15
6	Konstruksi	2.191,99	2.436,43	2.597,25
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	949,29	1.022,23	1.140,02
8	Trasportasi dan pergudangan	165,34	200,98	231,54
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	133,28	148,48	165,34
10	Informasi dan komunikasi	86,30	93,37	99,37
11	Jasa keuangan dan asuransi	112,47	119,27	127,81
12	Real estate	502,62	536,43	582,52
13	Jasa perusahaan	7,27	8,08	8,75
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	353,85	369,19	411,03
15	Jasa pendidikan	49,31	53,53	58,92
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	66,26	73,44	81,51
17	Jasa lainnya	4,95	5,47	6,05
PDRB Kabupaten Padang Lawas		14.586,76	16.127,08	18.330,40
PDRB Provinsi Sumatera Utara		955.193,09	1.051.000,00	1.146.919,75

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2025
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 masih didominasi oleh lima sektor, yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri



Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor dan Real estate. Sedangkan sektor yang masih memberikan kontribusi rendah adalah Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Jasa lainnya dan Jasa Perusahaan.

Berdasarkan data nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2024 atas dasar harga konstan, sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 5.218,89 Milyar sehingga sangat masuk akal jika Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas memperhatikan sektor ini. Selain itu sektor konstruksi sebesar Rp. 1.386,94 Milyar dan industri pengolahan sebesar Rp. 1.344,26 Milyar juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2022 - 2024
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas

No	Sektor	2022		2023		2024	
		Rp (Milyar)	% (Persen)	Rp (Milyar)	% (Persen)	Rp (Milyar)	% (Persen)
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	4.724,62	5,12	4.973,10	5,26	5.218,89	2,67
2	Pertambangan & penggalian	47,74	8,28	49,61	3,91	51,13	0,02
3	Industri pengolahan	1.241,14	3,74	1.283,51	3,41	1.344,26	0,66
4	Pengadaan Listrik dan gas	25,04	4,34	26,46	5,65	28,72	0,02
5	Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	0,13	3,02	0,12	-3,20	0,13	0,00
6	Konstruksi	1.247,95	4,12	1.329,71	6,55	1.386,94	0,62
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	565,42	4,35	592,33	4,76	630,29	0,41
8	Trasportasi dan pergudangan	96,58	5,04	105,70	9,44	111,23	0,06
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	88,10	4,11	95,62	8,53	102,66	0,08
10	Informasi dan komunikasi	71,42	5,35	76,87	7,63	81,57	0,05
11	Jasa keuangan dan asuransi	66,53	5,03	70,13	5,41	74,14	0,04
12	Real estate	251,76	3,30	265,01	5,26	281,93	0,18
13	Jasa perusahaan	251,63	3,02	239,12	1,05	4,66	0,00



No	Sektor	2022		2023		2024	
		Rp (Milyar)	% (Persen)	Rp (Milyar)	% (Persen)	Rp (Milyar)	% (Persen)
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	34,19	3,10	36,37	6,39	250,90	0,13
15	Jasa pendidikan	43,90	5,50	46,65	6,27	38,86	0,03
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2,71	4,30	2,89	6,60	50,30	0,04
17	Jasa lainnya	4.724,62	5,12	4.973,10	5,26	3,11	0,00
PDRB Kabupaten Padang Lawas		8.747,96	4,61	9.197,63	5,14	9.659,72	5,02
PDRB Provinsi Sumatera Utara		573.528,77	4,73	602.235,95	5,01	632.534,73	5,03

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2025
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2025

4.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 sebagai pelaksanaan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Padang Lawas. Diperlukan dukungan sumber pendanaan Non APBD Kabupaten Padang Lawas berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD Kabupaten juga melalui APBN; APBD Provinsi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang - undangan.

KUA merupakan salah satu bagian penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam APBD. Kebutuhan belanja pembangunan daerah dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan, yang dalam hal ini target kinerja



pembangunan pada RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 mengacu terhadap target kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029, yang disertai dengan kebutuhan pendanaan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan APBD Tahun 2026. Untuk mensinkronkan antara kebutuhan dengan kapasitas keuangan daerah, perlu ditetapkan arah kebijakan keuangan daerah. Untuk mengukur keuangan daerah, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah serta proyeksi keuangan daerah, sehingga dapat ditetapkan rancangan struktur keuangan daerah. Dalam menganalisa penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Analisa Standar Biaya merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Ketepatan analisis standar biaya akan mempengaruhi dalam Penetapan proyeksi keuangan daerah.

Untuk meningkatkan kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah sistem untuk pengelolaan informasi tentang pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis elektronik. Proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah diwajibkan menggunakan SIPD.

Dalam penetapan arah kebijakan keuangan daerah dituangkan dalam struktur APBD Kabupaten Padang Lawas terdiri dari : (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dirumuskan berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa yang akan datang.

Penetapan arah kebijakan keuangan daerah, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024



Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional akan mewarnai arah kebijakan keuangan daerah pada RKPD maupun APBD Tahun 2026.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 sebagai pelaksanaan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Padang Lawas. Diperlukan dukungan sumber pendanaan Non APBD Kabupaten Padang Lawas berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD Kabupaten juga melalui APBN; APBD Provinsi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang - undangan.

KUA merupakan salah satu bagian dari penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam APBD. Kebutuhan belanja pembangunan daerah dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan, yang dalam hal ini target kinerja pembangunan pada RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 mengacu terhadap target kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten padang Lawas Tahun 2025-2029, yang disertai dengan kebutuhan pendanaan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan APBD Tahun



2026. Untuk mensinkronkan antara kebutuhan dengan kapasitas keuangan daerah, perlu ditetapkan arah kebijakan keuangan daerah. Untuk mengukur keuangan daerah, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah serta proyeksi keuangan daerah, sehingga dapat ditetapkan rancangan struktur keuangan daerah. Dalam menganalisa penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Analisa Standar Biaya merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Ketepatan analisis standar biaya akan mempengaruhi dalam Penetapan proyeksi keuangan daerah.

Untuk meningkatkan kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah sistem untuk pengelolaan informasi tentang pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis elektronik. Proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah diwajibkan menggunakan SIPD.

Dalam penetapan arah kebijakan keuangan daerah dituangkan dalam struktur APBD Kabupaten Padang Lawas terdiri dari : (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dirumuskan berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa yang akan datang.

Penetapan arah kebijakan keuangan daerah, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Terbitnya



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional akan mewarnai arah kebijakan keuangan daerah pada RKPD maupun APBD Tahun 2026.

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek kinerja pelaksanaan APBD. Sebagai dasar Penetapan kebijakan keuangan tahun 2026, maka diukur kinerja keuangan masa lalu atau tahun sebelum tahun 2026, baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

4.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Selama ini dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas masih sangat bergantung terhadap bantuan keuangan pusat maupun provinsi dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah melalui pendapatan transfer.

4.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam kurun waktu tahun 2022-2024 kondisi keuangan daerah mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Dimana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas terbesar pada tahun 2023 sebesar Rp. 87.849.536.844,00 dan terendah pada tahun 2024 sebesar Rp. 44.351.945.284,92. Berikut disampaikan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2022-2024 pada tabel 3.4 berikut ini:



Tabel 4.4

Realisasi dan APBD Pendapatan Asli Daerah Padang Lawas Tahun 2022-2025

No	Uraian	Realisasi			APBD 2025
		2022	2023	2024	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.408.021.052,00	87.849.536.844,00	44.351.945.284,92	52.709.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	21.424.802.112,00	44.831.506.844,00	16.690.134.937,00	36.467.743.559,00
4.1.02	Retribusi Daerah	14.688.479.262,00	9.864.020.884,00	19.059.218.199,00	3.808.436.132,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.958.461.193,00	7.000.000.000,00	3.699.230.788,19	3.958.461.193,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.336.278.485,00	26.154.009.116,00	4.903.361.360,73	8.474.359.116,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025



4.3.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Dana perimbangan dari pusat merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer tersebut terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Secara umum dapat diartikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keseluruhan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Besarnya proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat dinamis, yang artinya besaran Dana Alokasi Umum (DAU) per daerah dan realisasi penyalurannya, akan mengikuti perkembangan Pendapatan Dalam Negeri neto. Pada saat Pendapatan Dalam Negeri neto naik, maka pagu Dana Alokasi Umum (DAU) nasional akan ikut naik sehingga alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada tiap daerah juga akan ikut meningkat dan begitu pula sebaliknya.

Di sisi lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik dialokasikan untuk daerah tertentu dalam membiayai kegiatan khusus di mana hal itu menjadi bagian dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik berdasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer dalam APBD Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022-2024, terlihat bahwa pendapatan transfer terus



mengalami peningkatan dimana peningkatan tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.075.745.907.823,00 dan terendah pada tahun 2022 sebesar Rp. 972.619.873.646,00. Berikut disampaikan realisasi pendapatan transfer baik yang bersumber dari Pusat dan Provinsi sebagaimana tergambar dalam tabel 3.5 berikut ini:



Tabel 4.5

Realisasi dan APBD Pendapatan Transfer Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022-2025

No	Uraian	Realisasi			APBD 2025
		2022	2023	2024	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	972.619.873.646,00	1.043.330.209.232,00	1.075.745.907.823,00	1.063.587.521.426,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	923.813.984.840,00	990.420.464.734,00	1.036.179.654.915,00	988.308.401.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.805.888.806,00	52.909.744.498,00	39.566.252.908,00	75.279.120.426,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025



4.3.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Tabel 4.6
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022-2025**

No	Uraian	Realisasi			APBD 2025
		2022	2023	2024	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,0	0,0	30.695.811.252,00	26.905.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,0	0,0	30.695.811.252,00	26.905.000.000,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025

3.2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Struktur Anggaran pada APBD Tahun 2026 sesuai yang tertuang pada Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 27 ayat 1 bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah; Belanja Daerah, dan; Pembiayaan Daerah.

4.5 Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2026

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang



melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berikut disampaikan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Padang Lawas pada tabel berikut:

**Tabel 4.7
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

Norek	Uraian	Proyeksi 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1.035.668.481.862,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58,153,306,303,00
4.1.01	Pajak Daerah	37,637,420,659,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.053.784.132,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.958.461.193,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.503.640.319,06
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	950.610.175.559,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	924.744.217.000,00
	DBH Pusat	22.265.538.000,00
	DAK	172.286.353.000,00
	DAU	537.674.237.000,00
	Dana Desa	192.518.089.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.865.958.559,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.905.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.905.000.000,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025

Rencana besaran pagu pada perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 4.8
Rencana Pagu Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	PAGU
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	326,342,914,358.00
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	130,510,318,526.00
3	1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	56,312,077,098.00
4	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	46,908,261,789.00
5	1.04.2.15.1.03.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	8,437,746,397.00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	PAGU
6	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4,104,802,283.00
7	1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,356,012,086.00
8	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	4,819,779,188.00
9	2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN	2,391,882,098.00
10	2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	6,310,075,414.00
11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6,755,870,308.00
12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,651,890,386.00
13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	3,798,692,363.00
14	2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10,023,815,198.00
15	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,161,333,005.00
16	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3,593,329,900.00
17	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2,203,340,242.00
18	2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3,447,297,355.00
19	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2,398,948,173.00
20	3.25.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3,704,499,861.00
21	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	31,516,609,242.00
22	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN	38,170,348,042.00
23	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	5,948,636,916.00
24	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	293,625,237,756.00
25	5.03.5.04.0.00.03.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4,396,929,261.00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	PAGU
26	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS	8,578,698,017.00
27	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BARUMUN	2,380,698,986.00
28	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN LUBUK BARUMUN	2,103,685,759.00
29	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN HURISTAK	1. 383,601,825.00
30	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BARUMUN SELATAN	1,040,546,493.00
31	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM	1,999,027,969.00
32	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI	2,445,104,033.00
33	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN	1,614,031,233.00
34	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SOSA	2,112,407,982.00
35	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN BARUMUN TENGAH	2,008,707,097.00
36	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN	1,523,501,427.00
37	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN ULU BARUMUN	1.447.929.903,00
38	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN SOSOPAN	1,485,738,657.00
39	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BARUMUN BARU	1,375,305,356.00
40	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN BARUMUN BARAT	1,315,535,940.00
41	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN SOSA JULU	1,418,975,537.00
42	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN ULU SOSA	1,339,840,208.00
43	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN SOSA TIMUR	1,664,048,588.00
44	8.01.2.19.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,540,449,607.00
TOTAL			1.047.668.481.862,00



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewenangan daerah dalam mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan pilihan, Pendukung urusan pemerintahan, Penunjang urusan pemerintahan, Pengawasan urusan pemerintahan, kewilayahan dan Pemerintahan umum.

Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek yang berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Adapun besaran belanja daerah dari tahun 2022-2024 tertuang dalam tabel Berikut ini:

Tabel 5.1

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022-2025

Norek	Uraian	Realisasi			APBD 2025
		2022	2023	2024	
5	BELANJA DAERAH	1.053.281.447.741	1.074.389.967.119	1.069.411.610.259	1.169.978.932.221,00
5.1	BELANJA OPERASI	630.470.986.646	629.432.980.886	661.359.436.936	763.672.769.399,00
5.1.01	Belanja Pegawai	351.057.657.291	363.503.467.376	407.963.542.267	484.007.171.655,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.234.172.820	251.057.253.815	196.229.327.553	264.919.528.332,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.745.716.535	13.688.764.695	56.146.037.120	12.230.309.006,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.433.440.000	1.183.495.000	1.020.529.996	2.515.760.406,00
5.2	BELANJA MODAL	134.826.465.820	143.930.366.225	102.630.451.570	107.401.347.571,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.231.502.731	40.339.889.861	12.049.397.140	28.819.894.658,00
5.2.03	Belanja Modal	56.280.047.562	38.294.193.763	13.454.993.358	47.206.181.133,00



Norek	Uraian	Realisasi			APBD 2025
		2022	2023	2024	
	Gedung dan Bangunan				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.287.840.527	59.852.411.271	77.118.165.072	24.405.473.600,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.075.000	5.443.871.330	7.896.000	6.969.798.180,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.757.058.103	2.844.504.241	2.681.589.050	8.967.038.444,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.757.058.103	2.844.504.241	2.681.589.050	8.967.038.444,00
5.4	BELANJA TRANSFER	284.226.937.172	298.182.115.767	302.740.132.703	289.937.776.807
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	3.622.298.147	0,00	3.574.879.515,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	284.226.937.172	294.559.817.620	302.740.132.703	286.362.897.292,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025

5.2 Rencana Belanja Daerah Tahun 2026

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Padang Lawas. Berikut disampaikan belanja daerah Kabupaten Padang Lawas pada tabel berikut:

Tabel 5.2

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026

Norek	Uraian	Proyeksi 2026
5	BELANJA DAERAH	1,047,668,481,862.00
5.1	BELANJA OPERASI	733,368,117,721.00
5.1.01	Belanja Pegawai	477,311,364,175.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241,592,224,534.00
5.1.04	Belanja Subsidi	200,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	12,475,768,606.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,788,760,406.00
5.2	BELANJA MODAL	60,159,560,096.00



5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,284,397,716.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11,530,000,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23,458,695,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,886,467,380.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,200,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,200,000,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	252,940,804,045.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4,428,737,545.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	248,512,066,500.00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan daerah memuat penjabaran rencana kerja pembangunan daerah beserta kebutuhan pendanaannya yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan. Penyusunan rencana kerja dan pendanaan daerah dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan.

Program prioritas pembangunan ini diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan. Kerangka pendanaan daerah diarahkan untuk menjamin pelaksanaan program prioritas daerah secara efektif dan efisien, dengan tetap menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesinambungan fiskal. Perencanaan anggaran juga diupayakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan sinergi antara perencanaan kerja dan pendanaan yang terukur, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang



telah ditetapkan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

5.3. Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2026

Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten. Penyajian Rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Perangkat Daerah yang digunakan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana besaran pagu pada perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 5.3
Rencana Pagu Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	PAGU
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	326,342,914,358.00
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	130,510,318,526.00
3	1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	56,312,077,098.00
4	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	46,908,261,789.00
5	1.04.2.15.1.03.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	8,437,746,397.00
6	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4,104,802,283.00
7	1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,356,012,086.00
8	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	4,819,779,188.00
9	2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN	2,391,882,098.00
10	2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	6,310,075,414.00
11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6,755,870,308.00
12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,651,890,386.00
13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	3,798,692,363.00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	PAGU
14	2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10,023,815,198.00
15	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,161,333,005.00
16	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3,593,329,900.00
17	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2,203,340,242.00
18	2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3,447,297,355.00
19	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2,398,948,173.00
20	3.25.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3,704,499,861.00
21	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	31,516,609,242.00
22	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN	38,170,348,042.00
23	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	5,948,636,916.00
24	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	293,625,237,756.00
25	5.03.5.04.0.00.03.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4,396,929,261.00
26	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS	8,578,698,017.00
27	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BARUMUN	2,380,698,986.00
28	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN LUBUK BARUMUN	2,103,685,759.00
29	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN HURISTAK	1.383,601,825.00
30	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BARUMUN SELATAN	1,040,546,493.00
31	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM	1,999,027,969.00
32	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI	2,445,104,033.00
33	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN	1,614,031,233.00
34	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SOSA	2,112,407,982.00
35	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN BARUMUN TENGAH	2,008,707,097.00
36	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN	1,523,501,427.00
37	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN ULU BARUMUN	1,447,929,903.00
38	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN SOSOPAN	1,485,738,657.00
39	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BARUMUN BARU	1,375,305,356.00
40	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN BARUMUN BARAT	1,315,535,940.00
41	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN SOSA JULU	1,418,975,537.00
42	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN ULU SOSA	1,339,840,208.00
43	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN SOSA TIMUR	1,664,048,588.00
44	8.01.2.19.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,540,449,607.00
TOTAL			1.047.668.481.862,00

Rencana belanja untuk tahun 2026 yaitu Rp. 1.047.968.481.862,00. Sedangkan



untuk rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ini. Rencana program prioritas disusun ditujukan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan yang ada di provinsi maupun program prioritas nasional. Dengan rencana program prioritas ini maka pemerintah daerah tidak menjalankan terlalu banyak program yang tersebar, tetapi fokus pada kegiatan yang benar-benar strategis dan berdampak besar bagi masyarakat. Menyelaraskan arah pembangunan dengan nasional dan provinsi sehingga akan pembangunan daerah akan mendukung tercapainya sasaran nasional dan provinsi.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah menyusun Program prioritas daerah, penyesuaian dengan program prioritas Provinsi dan Nasional. Untuk Program, kegiatan dan sub kegiatan terkait hal di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 5. 4
Prioritas Kabupaten, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

No	Prioritas Kabupaten Padang Lawas	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
1.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (1Ruang)	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (5Unit)	1.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Mebel Sekolah (8 Ruang)	480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru (4 Ruang)	1.280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (15 Ruang)	2.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (2 Ruang)	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (2 Ruang)	340.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru (3 Ruang)	1.005.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (1 Ruang)	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru (2 Ruang)	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	68.046.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (1 Perpustakaan)	105.593.000,00



No	Prioritas Kabupaten Padang Lawas	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (150 orang)	133.856.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (5 Lokus)	109.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.675.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	530.949.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.071.867.501,00	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.413.935.800,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	907.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	245.461.200,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	938.849.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Kabupaten Padang Lawas	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	979.289.950,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.738.894.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	314.801.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	608.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	188.100.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.195.261.101,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Puskesmas	4.228.010.400,00	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.600.691.900,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Layanan Imunisasi	854.850.000,00	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	18.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	913.390.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Kabupaten Padang Lawas	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	949.227.469,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.223.580.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.040.734.899,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (1 Dokumen)	7.885.608.060,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.074.503.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (14 unit/Rumah)	451.001.900,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	465.978.900,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN



No	Prioritas Kabupaten Padang Lawas	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	670.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	17.488.695.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Pemeliharaan Rutin Jalan	850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Pembangunan Jembatan	2.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	Peningkatan Ketahanan Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	22.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	46.514.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.133.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Kabupaten Padang Lawas	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	84.277.650,00	DINAS SOSIAL
5.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	69.919.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	66.980.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68.566.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Kabupaten Padang Lawas	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
7.	Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	214.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	20.017.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (10 Lem,baga)	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	201.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal (17 Laporan)	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	57.255.900,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Kabupaten Padang Lawas	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	123.911.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	32.541.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.905.199.950,00	INSPEKTORAT DAERAH
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.265.846.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
				Reviu Laporan Kinerja	627.371.950,00	INSPEKTORAT DAERAH
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	85.206.450,00	INSPEKTORAT DAERAH
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.318.572.262,00	INSPEKTORAT DAERAH
				Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	227.868.800,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	13.297.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	141.737.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Kabupaten Padang Lawas	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
						INOVASI DAERAH
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	161.204.650,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	82.401.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	140.001.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	201.883.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	267.690.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	165.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	182.413.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembinaan Disiplin ASN	50.054.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Kabupaten Padang Lawas	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (10 Laporan)	342.533.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
9.	Peningkatan Ekonomi Rakyat	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	92.510.887,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	109.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	152.695.280,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	49.998.100,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.001.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Kabupaten Padang Lawas	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Pembangunan Kawasan Pusat Kuliner)	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	49.999.950,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
10.	Pengalihan Potensi Sumber Daya Alam	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	578.737.750,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
11.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (1 Dokumen)	239.866.450,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	48.828.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Kabupaten Padang Lawas	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
			Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (55 Orang)	99.903.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.317.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.835.580.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.	Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	578.737.750,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	24.439.300,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.150.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
13.	Penataan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	79.999.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Kabupaten Padang Lawas	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	72.250.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	99.989.650,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
14.	Penurunan Kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.721.499.900,00	DINAS SOSIAL
15.	Peningkatan Kesempatan Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	316.890.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	60.224.600,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16.	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	146.928.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



No	Prioritas Kabupaten Padang Lawas	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
			Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	184.456.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
17.	Peningkatan Kemandirian Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	37.602.900,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	223.510.450,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penagihan Pajak Daerah	176.946.500,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	262.668.100,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	227.817.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Tabel 5.5
Dukungan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Anggaran
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
PN 1	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan Paskibraka	213.834.284,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	97.885.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PN 2	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	27.750.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	109.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	152.695.280,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	24.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Keci	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	92.510.887,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	13.800.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	99.989.650,00
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		578.737.750,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		24.439.300,00



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	72.250.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.001.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	239.866.450,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PN 3	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan mengembankan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	85.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	39.999.950,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	49.999.950,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	406.971.850,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	25.999.950,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	140.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	19.900.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.143.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Rekonstruksi Jalan	17.488.695.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Rekonstruksi Jalan	49.374.939.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	214.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Pembangunan Jembatan	2.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Pemeliharaan Rutin Jalan	850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	229.374.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	140.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
PN 4	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
	teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas			Pengadaan Mebel Sekolah	480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	48.906.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	258.995.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	33.136.518.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	142.049.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	763.246.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	173.683.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.223.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	235.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	340.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	133.460.406,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	315.401.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.162.452.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40.127.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	275.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	93.539.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	41.316.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.005.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	156.853.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.186.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	37.075.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	128.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.460.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	26.528.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	41.326.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.524.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	23.964.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	70.001.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	21.246.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	762.855.376,00	DINAS SOSIAL



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab	
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD		
			Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.721.499.900,00	DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.675.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	530.949.000,00	DINAS KESEHATAN	
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	176.493.000,00	DINAS KESEHATAN	
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.071.867.501,00	DINAS KESEHATAN	
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	244.841.200,00	DINAS KESEHATAN	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.413.935.800,00	DINAS KESEHATAN
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	907.500.000,00	DINAS KESEHATAN
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	245.461.200,00	DINAS KESEHATAN



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	938.849.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	51.300.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	524.267.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	979.289.950,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	45.996.800,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.738.894.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	314.801.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	291.314.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	362.680.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	608.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	188.100.000,00	DINAS KESEHATAN



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.195.261.101,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	113.345.000,00	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Puskesmas	4.228.010.400,00	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.600.691.900,00	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	22.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	323.199.000,00	DINAS KESEHATAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	45.200.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	361.850.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	248.700.000,00	DINAS KESEHATAN



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pengelolaan Layanan Imunisasi	854.850.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	158.299.550,00	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	108.369.800,00	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.074.503.000,00	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	88.055.000,00	DINAS KESEHATAN
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	254.383.000,00	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	35.295.650,00	DINAS KESEHATAN
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	196.752.000,00	DINAS KESEHATAN



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab	
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	RSUD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	161.496.200,00	RSUD
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	RSUD
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.001.000,00	RSUD
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.440.000,00	RSUD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.933.000,00	RSUD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	714.979.632,00			RSUD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	270.815.600,00	RSUD
			Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	18.000.000.000,00	RSUD
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	913.390.000,00	RSUD	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	949.227.469,00	RSUD	



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	RSUD
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	500.000.000,00	RSUD
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.223.580.000,00	RSUD
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.040.734.899,00	RSUD
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	20.017.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.017.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.349.050,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab	
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD		
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	201.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.182.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.753.764.208,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.817.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.458.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.003.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Fasilitas Kunjungan Tamu	6.005.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.280.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.602.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.722.712.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.820.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.180.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	214.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	225.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	228.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	934.252.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	38.567.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,	2.178.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
		KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Baduta/Balita)		
PN 5	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri					
PN 6	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	316.890.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	60.224.600,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	21.186.600,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	44.162.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	98.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	40.060.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
				Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	110.333.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	188.200,00	DINAS SOSIAL
PN 7	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	13.297.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	141.737.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	161.204.650,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab	
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD		
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	82.401.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	783.701.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.663.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	26.636.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	17.545.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.447.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	28.668.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.462.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.441.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.750.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	19.587.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26.001.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.497.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	17.170.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.252.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	28.462.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	15.796.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.952.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	27.703.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	26.680.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	24.934.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	98.748.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	144.285.300,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	86.160.250,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	220.173.400,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	200.350.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	101.770.300,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	15.450.300,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	24.925.600,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	57.899.700,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24.666.250,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	65.472.950,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	153.132.800,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	251.012.066.500,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.388.737.545,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	25.326.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	26.679.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pengamanan Barang Milik Daerah	145.860.400,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	54.112.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	64.607.200,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	37.602.900,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	223.510.450,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	41.250.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penagihan Pajak Daerah	176.946.500,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	52.997.800,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	9.964.850,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	54.220.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	15.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	166.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	35.008.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	42.647.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Pengelolaan Promosi ASN	267.690.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab	
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD		
			Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	165.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	182.413.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	28.971.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	14.610.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Pembinaan Disiplin ASN	50.054.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	342.533.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	56.137.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	50.229.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	795.688.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.189.277.550,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.214.782.850,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	764.560.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	115.580.150,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Fasilitasi Bantuan Hukum	400.323.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	123.568.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	567.176.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PN 8	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	69.919.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	97.885.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44.559.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6.099.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	76.185.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.965.871.238,00	RSUD
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7.885.608.060,00	RSUD
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	78.223.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	146.928.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	184.456.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Cagar Budaya	57.583.050,00



Tabel 5.6

Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Dalam Mendukung Asta Cita

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	133.460.406,00
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	93.539.600,00
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, Kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.195.261.101,00
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.100.000.000,00
					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	361.850.000,00
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	670.000.000,00
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	451.001.900,00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	46.514.400,00
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	90.000.000,00
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	316.890.000,00
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	21.186.600,00
7	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	20.017.600,00
					Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.017.600,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	201.700.000,00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

8	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.835.580.000,00
9	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.016.047.836,0
10	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Pelayanan Informasi Publik	4.498.000,00
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	40.080.000,00
11	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	39.999.950,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	49.999.950,00
12	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Pengawasan Penanaman Modal	79.999.900,00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

13	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	408.245.600,00
14	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	3.423.800,00
15	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	78.223.400,00
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	15.000.000,00
	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Pengembangan Cagar Budaya	57.583.050,00
16	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	68.046.000,00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00
18	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	578.737.750,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	150.000.000,00
					Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	72.250.000,00
19	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.800.000,00

Tabel 5.7
Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Dalam Mendukung Prioritas Provinsi



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
1	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (10 Orang)	142.049.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (7 Ruang)	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (538 Peserta Didik)	235.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (21 Unit)	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (8 Ruang)	1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru (10 Ruang)	1.280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (20 Ruang)	2.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (50 Peserta Didik)	48.906.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Mebel Sekolah (1 Paket)	480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (1 Dokumen)	93.539.600,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (1 Komunitas)	41.316.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (13 Unit)	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (14 Ruang)	340.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026			OPD Penanggung Jawab	
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran RKPD
				Pembangunan Ruang Kelas Baru (8 Ruang)	1.005.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (33 Orang)	32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (150 Satuan Pendidikan)	156.853.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (1 Komunitas)	9.460.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru (1 Ruang)	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik (100 Peserta Didik)	26.528.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota (42 Lembaga)	20.017.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (50 Orang)	20.017.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (10 Lembaga)	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (10 Lembaga)	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (13 Organisasi)	925.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	2.330.044.006,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (50 Orang)	1.721.499.900,00	DINAS SOSIAL
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (12 Orang)	762.855.376,00	DINAS SOSIAL
3	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.675.000.000,00	DINAS KESEHATAN



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
	Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	530.949.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	176.493.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.071.867.501,00	DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.413.935.800,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	907.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	245.461.200,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	938.849.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	524.267.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	979.289.950,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	45.996.800,00	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.738.894.000,00	DINAS KESEHATAN	



No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026			OPD Penanggung Jawab	
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran RKPD
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	314.801.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	291.314.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	362.680.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	608.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	188.100.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.195.261.101,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Puskesmas	4.228.010.400,00	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.600.691.900,00	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	22.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	323.199.000,00	DINAS KESEHATAN



No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026			OPD Penanggung Jawab	
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran RKPD
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	361.850.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	248.700.000,00	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Layanan Imunisasi	854.850.000,00	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (1 Unit)	913.390.000,00	RSUD
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	949.227.469,00	RSUD
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi (1 Unit)	500.000.000,00	RSUD
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	RSUD
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.223.580.000,00	RSUD
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.040.734.899,00	RSUD
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (1 Dok)	7.885.608.060,00
4	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (20 Orang)	316.890.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja (14 Orang)	60.224.600,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (50 Orang)	1.721.499.900,00	DINAS SOSIAL
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	762.855.376,00	DINAS SOSIAL
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (1 Laporan)	26.636.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (2 Laporan)	28.668.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.462.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kestabilan Fiskal Daerah.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	144.285.300,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	86.160.250,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026			OPD Penanggung Jawab	
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran RKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	220.173.400,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	200.350.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	101.770.300,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	57.899.700,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	65.472.950,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	153.132.800,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	26.679.000,00	BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (3 Dok)	161.204.650,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD			
		PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (2 Laporan)	82.401.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (2 Dokumen)	783.701.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (1 Laporan)	15.750.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (1 Laporan)	20.497.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (10 Laporan)	1.905.199.950,00	INSPEKTORAT DAERAH		
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (10 Laporan)	1.265.846.900,00	INSPEKTORAT DAERAH		
		6	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (1 Dokumen)	239.866.450,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup (1 Kegiatan Orang)	48.828.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
			Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (55 Orang/ kali Keluarga)	99.903.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (500 Ekor)	13.800.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (3 Unit)	109.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	27.750.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (2 Kelompok)	152.695.280,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (1 Laporan)	27.150.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN



No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (1 Laporan)	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (1 Laporan)	50.001.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal (20 Pelaku Usaha)	135.800.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (20 UMKM)	19.900.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (10 UMKM)	500.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
9	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
10	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (1 Dokumen)	57.255.900,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (1 Laporan)	123.911.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (1 Dokumen)	32.541.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
11	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (8 Komunitas)	145.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Pelayanan Informasi Publik (3 Permohonan)	4.498.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik (3 Media)	40.080.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Relasi Media	37.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (100 Laporan)	7.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (100 Layanan)	7.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan (1 Laporan)	24.934.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
12	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	229.374.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Rekonstruksi Jalan (11 KM)	17.488.695.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Pemeliharaan Rutin Jembatan (3 Jembatan)	550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Pembangunan Jembatan (600 M)	2.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				Pemeliharaan Rutin Jalan (6 KM)	850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (6,5 KM)	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (3 Laporan)	28.462.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (1 Laporan)	27.703.800,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
14	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (4 Kawasan)	1.133.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	46.514.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (1 Dokumen)	239.866.450,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup (1 Kegiatan Orang)	48.828.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (55 Orang/Kali Keluarga)	99.903.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan (1000 Orang)	84.277.650,00	DINAS SOSIAL
15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (1 Dokumen)	98.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	44.162.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	40.060.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
				Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	110.333.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (50 Lembaga)	746.860.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
16	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (KOMINDA 1 Dokumen)	69.919.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	97.885.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2026				OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	
				Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (TIM TERPADU 50 Orang)		
17	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (10 Dokumen)	66.980.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (5 Dokumen)	68.566.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	52.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.628.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	51.690.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Tabel 5.8
Dukungan Program Daerah terhadap 6 (enam) PHTC Provinsi Sumatera Utara pelaksanaan Tahun 2026



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS
			UTAMA	PENDUKUNG	
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2026	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1. Dinas Sosial (Pembinaan kepada 2. Dinsos kab/kota untuk melakuan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya), 3. Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Provsu) 3. Diskominfo (Publikasi Kegiatan),	- Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 sebesar 77,5%, tahun 2027 sebesar 75%, tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%. - Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya - Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/ Kota)
4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	2026	Pembangunan integrasi portal aplikasi 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi . 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Dinas Kominfo	DPMPTSP Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Bapenda Disperindag ESDM BPSDM Biro Adpem BUMD: PDAM, Bank Sumut	1. Penyiapan kebijakan/regulasi di tingkat Provinsi/Pemda Kabupaten/Kota. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota. 4. Penentuan lokasi 1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/ Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	2026	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2.Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyediaan dokumen lingkungan/ AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan	1. Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas. 2. Dukungan penyediaan lahan pada rencana pelebaran yang tidak



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS
			UTAMA	PENDUKUNG	
		<p>Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan</p> <p>Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan</p> <p>Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan</p> <p>Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat</p> <p>4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Simalungun, Kab. Samosir</p> <p>Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan</p> <p>Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal</p> <p>Kawasan Konservasi/Rawan Bencana: Kab. Langkat</p> <p>target: jalan 202,84 km jembatan 202,90 m.</p>		monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi	sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah	2026	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survei Lokasi di setiap Kabupaten/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI, Bank Sumut dan lain lain) 	Dinas PKP	Dinas PUPR terkait dukungan terkait Tata Ruang, Jalan, dan Keciaptakarya (sanitasi dan air minum), BPBD koordinasi terhadap Rehab rumah akibat bencana Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan	<p>Bupati/Wali Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = <i>by name by address</i>) 2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS
			UTAMA	PENDUKUNG	
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN - Pembangunan Fisik setiap tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan <p>•Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Toba, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara</p>		evaluasi Biro Pemotda (memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah Daerah) Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum memiliki rumah Dinas Kominfo untuk publikasi Media	3. SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada kabupaten/Kota 4. Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di kab/kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal. Pemerintah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan. Badan Kepegawaian dan BP Tapera: Penyediaan data ASN yang belum memiliki rumah



6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	2026	- Pembentukan kelembagaan <i>Prestice</i> , Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi <i>Prestice</i> di 25 kabupaten (Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Padang Lawas	Biro Hukum	Dinas PMD Capil (memberikan data/pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi) Diskominfo (Publikasi),	1. Replikasi Kegiatan <i>Prestice</i> pada tingkat Kabupaten/Kota 2. Edukasi dan Sosialisasi <i>Prestice</i> di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa. 3. Pendampingan dari bagian hukum kabupaten/kota dari kasus tidak pidana ringan yang ditangani oleh PRESTICE
---	------	---	------------	---	--

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba) - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			

**Tabel 5.9
Dukungan Kab/Kota Terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD)**



RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS
			UTAMA	PENDUKUNG	
6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	2026	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026 • Provinsi Sumatera Utara	Dispora	Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar Sumut untuk cabang sepak bola dan voli - Melaksanakan <i>side event</i> pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	2026	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang	Dispora	Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	NPC Kabupaten/Kota dan Dispora Kabupaten/Kota memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di Kabupaten/Kota
8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (Sumut e-Health Integration system)	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web, Server dan Publikasi Kegiatan)	-Penyediaan data kepesertaan JKN Kabupaten/Kota -Sosialisasi dan edukasi platform kepada faskes tingkat Kabupaten /Kota
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	2026	- Pemenuhan Dokter Spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 •Sisa Pemenuhan 4 Dokter	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian kab/kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) Biro Pemkotda (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM)	-Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah - Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Spesialis Dasar + 3 Penunjang (4 RSUD di 4 Kabupaten) DTPK Kepulauan Nias RSUD Pratama Lologolu Soguna Bazato (3 Orang) Nias Barat, Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar + 3 Penunjang (4 RSUD di 4 Kabupaten), RSUD Lausimomo UPT Dinkes Kabupaten Mandailing Natal, RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, RSUD Pintu Padang Kabupaten Tapanuli Selatan, RSUD Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, RSUD Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan. Lanjutan Sasaran 2025 : 21 Peserta		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	<ul style="list-style-type: none">- Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan- Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD- Surat Penugasan & Dukungan Legal Formal- penyediaan Akomodasi dokter residen
12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2026	Konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)	Disperindag ESDM	<ul style="list-style-type: none">• Dinas TPH : Data pangan strategis dan penyediaan stok• Dinas Perhubungan : Transportasi logistik	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara



		Lokasi: Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Utara (akses terbatas), Nias Barat (isolasi logistik), Humbahas (wilayah dataran tinggi), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Dairi (wilayah perbatasan), Kab. Batu Bara (wilayah pesisir), Toba (hinterland), Samosir (wilayah tertutup), Labuhanbatu Selatan (kemiskinan tinggi), Nias Selatan (akses sulit), Padang Lawas (rawan logistik), Padang Lawas Utara (wilayah sulit distribusi), Tapanuli Tengah (akses dan harga tinggi), Langkat (distribusi padat dan IHK)		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial : Data P3KE <i>by name by address</i> (untuk menentukan titik titik PMB dilakukan) • Dinas Koperasi & UMKM : Pe libatan UMKM dan Koperasi da lam penyediaan stok • Biro Perekonomian : pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi • Dinas Kominfo : Publikasi Pelaksanaan • Bappelitbang: Monitoring, Pe ngendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan 	<p>kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin; 2. Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok; 3. Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; 4. kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok 5. Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; 6. Monitoring dan evaluasi
13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2026	Perluasan kepesertaan pekerja re ntan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema pengangga ran 20% Provinsi dan 80% kab/ko ta -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas M asyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2	Disnaker	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTK S (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan. • Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS. • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil • Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas • Menyediakan data kependud ukan yang valid (NIK, KK, KT P) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. • Melakukan verifikasi dan sink ronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. • Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS. • Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang 	<p>Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target <i>Universal C overage Jamsostek</i> (UCJ) sebes ar 60% sesuai RPJMD 2025-2029 2. Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan 3. Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen kab/kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrem desil 1 dan 2



				belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.	
--	--	--	--	--	--

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS
			UTAMA	PENDUKUNG	



				<ul style="list-style-type: none">• BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja.• Jaminan Kematian (JKm): S santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal.• Jaminan Hari Tua (JHT): Tab ungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun.• Jaminan Pensiun (JP): Pengh asilan berkala untuk pekerja se telah pensiun.• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK.• Kominfo: Publikasi Kegiatan	
--	--	--	--	--	--

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS
			UTAMA	PENDUKUNG	



<p>14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi</p>	<p>2026</p>	<p>Penyusunan dokumen <i>appraisal</i>/penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi</p>		<p>PUPR (Dokumen appraisal, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)</p>	<p>- kab/kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja - Kabupaten/Kota bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.</p>
<p>18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi</p>	<p>2026</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah • Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang 	<p>BKAD</p>	<p>Bapenda Provsu : Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemanfaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu : Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan Diskominfo : Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi OPD Pengguna BMD : Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD</p>	<p>Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)</p>
<p>23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)</p>	<p>2026</p>	<p>Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara</p>	<p>Disperindag ESDM</p>	<p>TPH : Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS . • Bappelitbang : Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan</p>	<p>Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025-2030: 1. Data Kelompok Tani (CPCL) 2. data penentuan lokasi 3. pengadaan lahan 4. Data produksi pertanian; kondisi air 5. Data readiness criteria</p>



<p>27. Fasilitas Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani</p>	<p>2026</p>	<p>Mulai pelaksanaan Temu Pembinaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta</p>	<p>Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.</p>	<p>a) Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan. b) Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi. c) Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebaran informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian. e) Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdes dukcapil memastikan</p>	<p>Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok</p>
		<p>monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. • 33 Kabupaten/Kota</p>			



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS
			UTAMA	PENDUKUNG	
				agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani. f) Diskominfo (Publikasi)	
34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	2026	Desain dan pengembangan platform e-commerce; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan <i>platform</i> logistik & <i>payment gateway</i> . Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT	Diskop UMKM	KOMINFO : Publikasi Media DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan UMKM binaan kab/kota - Kurasi Produk UMKM - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri - <i>Capacity Building</i>



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

<p>35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs</p>	<p>2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi <i>Business Registration System Policy TPB/SDGs</i> 2. Diseminasi Skema BRS TPB/S DGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum) 3. Menyusun Laporan Monev TPB /SGDs Tahun 2025 4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs 5. <i>Launching</i> Aplikasi e-Monev 6. Pelaksanaan skema <i>Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs</i> 7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 8. Penyusunan Rancang Bangun 	<p>Bappelitbang</p>	<p>Seluruh Perangkat Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SD Gs kab/kota se-Sumut tahun 202 5-2030 2. Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berk elanjutan/SDGs : identifikasi UM KM/IMK serta pelaku usaha 3. Dukungan pelaksanaan <i>North Sumatera SDGs Action Awards</i> 4. Dukungan proses penginputan E- Monev Kabupaten/Kota 5. Peningkatan Kapasitas untuk i mplementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
		<p>aplikasi e-Monev SDGs (INOVAS I)</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review (VLR)</i> Kabupaten /Kota 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026 11. Sosialisasi <i>North Sumatra SD Gs Action Award 2027</i> (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev) 			
<p>36. Kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis</p>	<p>2026</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara 	<p>Inspektorat</p>	<p>Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis</p>	<p>Inspektorat kab/kota : Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota</p>



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2026	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs 	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait
46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	2026	Penyusunan dokumen DPPT dan pembebasan lahan	DLHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Pem Otda - SK Penlok 2. BPN - Sertifikat Lahan 3. Diskominfo - Publikasi Media 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan terhadap pengadaan lahan 2. Penetapan Taman Kehati pada RTRW kab/kota
48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES	2026	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDe sma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan 		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola BUMDES/Masyarakat Desa).	<ul style="list-style-type: none"> - Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES. - Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital.
		•Tapteng, Tapanuli Utara, Nias, Si malungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang			- Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi.
		Lawas Utara, Padang Lawas, Labura, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Karo, Toba, Labusel, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu (20 Kabupaten/Kota)			
49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2026	<ul style="list-style-type: none"> -Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -<i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 <p>33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara</p>	Biro Kesra	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)	-



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

- a) Penerimaan Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) Pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan; dan / atau
- g) sisa dana Kebijakan Umum APBD TA. 2026 akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut



belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah.

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas Kebijakan Umum APBD TA. 2026 penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah),

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c) kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun



terakhir;

- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan.

Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas



nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Berikut disampaikan pembiayaan Kabupaten Padang Lawas pada tabel berikut:

**Tabel 6.1
Pembiayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

Norek	Uraian	Proyeksi 2026
6	PEMBIAYAAN DAERAH	12,000,000,000.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12,000,000,000.00
6.1	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Pembiayaan Netto	12,00,000,000.00



	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00
--	--	------

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025

**Tabel 6.2
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

Norek	Uraian	Proyeksi 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1,035,668,481,862.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58,153,306,303.00
4.1.01	Pajak Daerah	37,637,420,659.00
4.1.02	Retribusi Daerah	4,053,784,132.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,958,461,193.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12,503,640,319.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	950,610,175,559.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	924,744,217,000.00
	DBH Pusat	22,265,538,000.00
	DAK	172,286,353,000.00
	DAU	537,674,237,000.00
	Dana Desa	192,518,089,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25,865,958,559.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26,905,000,000.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26,905,000,000.00
5	BELANJA DAERAH	1,047,668,481,862.00
5.1	BELANJA OPERASI	733,368,117,721.00
5.1.01	Belanja Pegawai	477,311,364,175.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241,592,224,534.00
5.1.04	Belanja Subsidi	200,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	12,475,768,606.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,788,760,406.00
5.2	BELANJA MODAL	60,159.560.096.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,284,397,716.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11,530,000,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23,458,695,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,886,467,380.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,200,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,200,000,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	252,940,804,045.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4,428,737,545.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	248,512,066,500.00
	Total Surplus/(Defisit)	-12,000,000,000.00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	12,000,000,000.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12,000,000,000.00
6.1	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Pembiayaan Netto	12,000,000,000.00
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2025



Rencana besaran pagu pada perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 6.3
Rencana Pagu Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	PAGU
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	326,342,914,358.00
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	130,510,318,526.00
3	1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	56,312,077,098.00
4	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	46,908,261,789.00
5	1.04.2.15.1.03.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	8,437,746,397.00
6	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4,104,802,283.00
7	1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,356,012,086.00
8	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	4,819,779,188.00
9	2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN	2,391,882,098.00
10	2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	6,310,075,414.00
11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6,755,870,308.00
12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,651,890,386.00
13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	3,798,692,363.00
14	2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10,023,815,198.00
15	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,161,333,005.00
16	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3,593,329,900.00
17	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2,203,340,242.00
18	2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3,447,297,355.00
19	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2,398,948,173.00
20	3.25.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3,704,499,861.00
21	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	31,516,609,242.00
22	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN	38,170,348,042.00
23	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	5,948,636,916.00
24	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	293,625,237,756.00
25	5.03.5.04.0.00.03.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4,396,929,261.00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	PAGU
26	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS	8,578,698,017.00
27	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BARUMUN	2,380,698,986.00
28	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN LUBUK BARUMUN	2,103,685,759.00
29	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN HURISTAK	1.383,601,825.00
30	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BARUMUN SELATAN	1,040,546,493.00
31	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM	1,999,027,969.00
32	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI	2,445,104,033.00
33	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN	1,614,031,233.00
34	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SOSA	2,112,407,982.00
35	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN BARUMUN TENGAH	2,008,707,097.00
36	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN	1,523,501,427.00
37	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN ULU BARUMUN	1,447,929,903,00
38	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN SOSOPAN	1,485,738,657.00
39	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BARUMUN BARU	1,375,305,356.00
40	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN BARUMUN BARAT	1,315,535,940.00
41	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN SOSA JULU	1,418,975,537.00
42	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN ULU SOSA	1,339,840,208.00
43	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN SOSA TIMUR	1,664,048,588.00
44	8.01.2.19.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,540,449,607.00
TOTAL			1.047.668.481.862,00



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Indikator kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah meliputi Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama atau disingkat IKU dan Indikator Kinerja Kunci atau disingkat IKK. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, adapun IKK adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah. Indikator Kinerja Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

7.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Padang Lawas

Indikator Kinerja Makro merupakan ukuran kunci dalam menilai capaian pembangunan daerah secara menyeluruh. Indikator ini mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi hasil (*outcome*) dari seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya. Indikator Makro digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan serta sebagai dasar perumusan strategi dan program prioritas ke depan. Pemerintah daerah harus terus melakukan penguatan data, monitoring, serta integrasi lintas sektor agar capaian indikator makro benar-benar mencerminkan kondisi riil dan arah pembangunan yang diinginkan.

Melalui pencapaian indikator kinerja makro yang positif dan berkelanjutan, diharapkan pembangunan daerah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat ketahanan sosial ekonomi dalam jangka panjang.



**Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,02	5,36-5,65
2	PDRB per Kapita	Juta	65.287,57	75.024,37
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,87	7,65-7,56
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,47	5,01
5	Rasio Gini	Poin	0,2240	0,2108
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,10	74,30
7	Intensitas Emisi GRK	Ton Co2Eq	n/a	1.148,70
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	67,52	70,35

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029

7.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas

Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan dan ditetapkan dari pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta program unggulan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran. Adapun target Indikator Kinerja utama Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	Target RKPD 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,10	74,30
2	Indeks Infrastruktur (Poin)	n/a	70,47



3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	n/a	70,24
4	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	4,10	4,24
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,36-5,65
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,87	7,72-7,61
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,52	70,35
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,47	5,01

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029

7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi dasar untuk mengevaluasi sejauh mana capaian pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam mendukung tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026. Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

**Tabel 7.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
I	Aspek Geografi dan Demografi		
1	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	76,75	77,20
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	5,53	5,20
3	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/kapita)	N/A	544,22
4	Porsi EBT dalam bauran energi (%)	N/A	6,23
5	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	N/A	0,85
6	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%)	N/A	4,54
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,52	70,35
8	Penurunan Emisi GRK (Ton Co ₂ Eq)	N/A	1.148,70
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	N/A	68,33
10	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Poin)	N/A	19,78



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	15,90	35,61
12	Indeks Risiko Bencana (Poin)	153,00	152,50
13	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,96	1,85
II Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,36-5,65
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,87	7,72-7,61
3	PDRB Per Kapita (Rp ribu)	65.287,57	75.024,37
4	Gini Ratio (Poin)	0,2240	0,2108
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,47	5,01
6	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,10	74,30
7	Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,67	72,33
8	Prevalensi stunting (%)	N/A	13,93
9	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	65,94	73,77
10	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	84,12	88,40
11	Indeks Pendidikan	16,60	18,46
12	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	9,63	9,70
13	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,87	14,28
14	Literasi SD (Poin)	56,82	64,15
15	Literasi SMP (Poin)	49,35	59,88
16	Numerasi SD (Poin)	53,42	61,59
17	Numerasi SMP (Poin)	49,60	58,31
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	22,53	26,75
19	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	83,10	85,98
20	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	30,34	24,41
21	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	N/A	70,24
22	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	51,12	52,30
23	Indeks Perlindungan Anak (Poin)	71,33	74,00
24	Indeks Perlindungan Khusus Anak (Poin)	71,33	74,00
25	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	60,17	61,10
26	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	87,01	88,18
27	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	54,35	55,78
28	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	0,813	0,720
29	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	N/A	56,87
III Aspek Daya Saing Daerah			
1	Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk)	54,40	54,18
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	16,32	17,72-17,86



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (%)	0,90	1,56
4	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	0,70	0,90
5	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (ADHB)	0,015	0,019
6	Total Kredit/PDRB ADHB (%)	0,065	0,075
7	Rasio Kewirausahaan (%)	5,99	6,16
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	77,52	78,34
9	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	20,98	23,19
10	Indeks Ekonomi Hijau (Poin)	N/A	52,06
11	Indeks Ekonomi Biru (Poin)	N/A	30,45
12	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	40,18	53,33
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	23,96	23,32
14	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	47,66	49,99
15	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	70,47
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	N/A	53,48
17	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (%)	47,66	75,47
18	Indeks Desa (%)	0,6217	53,48
19	Persentase Desa Mandiri (%)	0,33	0,66
20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,091	0,123
21	Inflasi [Kota Padang Sidempuan] (%)	2,46	Mengacu Kota Padangsidempuan
IV Aspek Pelayanan Umum			
A Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif			
1	Indeks Reformasi Hukum (Poin)	97,14	98,50
2	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	58,54	62,00
3	Indeks SPBE (Poin)	2,17	2,48
4	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	4,10	4,24
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	96,36
6	Indeks Integritas Nasional (Poin)	76,14	77,41
B Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial			
1	Persentase Penegakan Perda (%)	95,00	100,00
2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	81,91
3	Indeks Harmoni Indonesia	N/A	53,48
C Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan			
1	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,06	3,35

7.4. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja utama yang digunakan untuk



menilai pencapaian sasaran strategis dari suatu organisasi, khususnya instansi pemerintah. IKK biasanya bersifat *strategis, spesifik, dan berdampak besar*, serta menjadi acuan utama dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan pada perangkat daerah.

**Tabel 7.4
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
A	Pendidikan		
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	55,00	62,25
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	104,24	100,00
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	104,36	100,00
4	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	42,00	53,45
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,62	98,41
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	85,53	90,10
7	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,28	15,63
8	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	N/A	36,50
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,62	99,73
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	85,53	88,35
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A	89,40	97,82
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs/ Paket B	86,13	92,53
13	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (PAUD)	97,00	97,65
14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100,00	100,00
15	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,00	99,00
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	78,01	98,00
17	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,25	0,10
18	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,29	0,20
19	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	93,00	94,10
20	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (%)	54	72
21	Proporsi Murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	99	99
22	Rasio guru/murid sekolah SD/MI	724	724
23	Rasio guru/murid sekolah SMP/MTs	847	847
24	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI	73	50
25	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	85	94



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
SMP/MTS			
26	Ruang kelas SD/MI kondisi baik (%)	80,70	83,55
27	Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik (%)	65,00	70,00
28	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	40,00	60,00
29	Indeks pemerataan guru	30,00	45,00
30	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan	80,00	90,00
31	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	80,00	90,00
32	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	70,00	80,00
B Kesehatan			
1	Angka Kematian Neonatal (Per 1.000 KH)	8,27	6,70
2	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)	9,17	7,43
3	Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH)	9,62	7,79
4	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	156,53	109,00
5	Balita Gizi Kurang (%)	2,30	1,86
6	Balita Gizi Buruk (%)	0,60	0,49
7	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	50,00	60,00
8	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	80,00	87,00
9	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	40,00	55,00
10	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	70,00	80,00
C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (%)	17,73	19,20
2	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	59,00	65,00
3	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	47,00	53,00
4	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%)	43,00	48,00
5	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	N/A	55,00
6	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	N/A	45,00
7	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah	N/A	62,00
8	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	N/A	10,00
9	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan	0,00	0,00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
	Aman)		
10	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	43,00	48,00
11	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	0,00	0,00
12	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	N/A	45,00
13	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	0,00	0,00
14	Tingkat Kemantapan Jalan	41,14	47,00
15	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	0,00	0,00
16	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	80,00	90,00
D Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase Rumah Layak Huni (%)	67,00	75,00
2	Luasan Kawasan Kumuh (%)	30,33	28,00
3	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	N/A	80,00
4	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	N/A	75,00
5	Persentase Luas Kawasan Kumuh+I38	N/A	53,00
6	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	N/A	44,00
E Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	100	100
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100
3	Cakupan Pelayanan Kebakaran (%)	80	85,00
4	Tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran (menit)	> 15	> 15
5	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	N/A	100,00
6	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	N/A	51,50
7	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	N/A	62,00
8	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	45,00
9	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	N/A	60,00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
10	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	N/A	57,00
11	Persentase Penanganan Pasca Bencana	N/A	85,00
12	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	N/A	74,00
13	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	N/A	57,00
F Sosial			
1	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	1,00	3,48
2	Persentase PPKS yang Tertangani (%)	60,00	71,89
3	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	N/A	90,00
4	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	N/A	82,00
5	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	N/A	50,00
6	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	N/A	64,00
7	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	N/A	75,00
8	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	N/A	54,00
9	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	N/A	58,50
10	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	N/A	62,70
11	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya	N/A	68,50
12	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya	N/A	54,00
13	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	N/A	68,00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
14	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	N/A	57,50
15	Indeks Peranan Sosial	N/A	57,00
16	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhannya	N/A	59,85
17	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	N/A	45,15
18	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	N/A	46,20
19	Indeks Kebutuhan Dasar	N/A	31,50
20	Indeks Keberdayaan Ekonomi	N/A	36,75
21	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	N/A	52,50
22	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	N/A	81,60
23	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	N/A	71,40
24	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	N/A	76,50
G Tenaga Kerja			
1	Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 (%)	9,91	9,93
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan (%)	0,59	0,63
3	Dokumen Rencana Tenaga Kerja	N/A	1,00
4	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	N/A	51,50
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	59,00	80,00
6	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	N/A	25,00
H Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	TPAK Perempuan (%)	65,86	67,50
2	Kasus KDRT (Kasus)	2	1
3	Status Kabupaten Layak Anak (Kategori)	N/A	Pratama
4	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	N/A	0,90
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	65,86	67,50
6	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	N/A	77,00
7	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang		



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
	Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	N/A	45,00
8	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	N/A	55,00
9	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	N/A	69,11
10	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	100,00
11	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	71,33	74,00
I Pangan			
1	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	88,60	89,20
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	60,00	66,04
3	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	60,00	66,04
4	Skor Pola Pangan Harapan	88,60	89,20
5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	N/A	27,00
6	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	N/A	73,50
J Lingkungan Hidup			
1	Indeks Kualitas Air (Poin)	50,00	56,00
2	Indeks Kualitas Udara (Poin)	91,02	91,44
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)	54,12	56,00
4	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	N/A	85,00
5	Persentase RTH	N/A	46,35
6	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	N/A	0,00
7	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	N/A	80,00
8	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	0,00
9	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	75,00
10	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	N/A	73,50
11	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	N/A	100,00
12	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	N/A	70,00
K Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	98,83	99,17
2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	92,18	94,00
3	Rasio pasangan berakte nikah (%)	56,04	58,00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	N/A	76,22
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	N/A	56,93
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	N/A	59,00
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	N/A	41,40
L PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Desa Mandiri	1	5
2	Desa Maju	10	32
3	Desa Berkembang	213	173
4	Desa Tertinggal	77	79
5	Desa Sangat Tertinggal	2	14
6	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	62,70
7	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	N/A	57,48
8	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	N/A	52,25
9	Persentase Fasilitas Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	N/A	47,03
M PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Total Fertility Rate (Anak Per Wanita)	3,02	2,95
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Anak Per 1.000 Wanita)	28,50	27,00
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	41,10	45,00
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	21,30	20,00
5	Rasio Akseptor KB (%)	82,00	84,00
6	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	N/A	65,00
N PERHUBUNGAN			
1	Rasio Konektivitas (%)	19,06	20,00
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	62,00	65,00
O KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	92,00	72,77
2	Persentase rumah tangga dengan akses internet (%)	80,00	81,91
3	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	N/A	63,00
P KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	N/A	1,50



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
2	Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian (%)	N/A	2,50
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	N/A	1,20
4	Persentase Koperasi Aktif (%)	26,50	32,75
5	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	N/A	72,45
6	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	N/A	67,28
7	Persentase Koperasi yang Berkualitas	N/A	25,00
8	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	N/A	10,50
9	Pertumbuhan Wirausaha	N/A	18,00
10	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	N/A	0,70
Q Penanaman Modal			
1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi (%)	1,47	6,60
2	Realisasi PMDN/PMA (Rp Miliar)	7.582,94	906,73
3	Jumlah Investor PMDN/PMA (Perusahaan)	25,00	30,00
4	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (%)	1,47	-
5	Realisasi Total terhadap Target Investasi	N/A	77,25
6	Persentase Peningkatan Investor	N/A	4,28
7	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	N/A	53,50
8	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha	N/A	81,60
9	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	N/A	88,00
R Kepemudaan dan Olahraga			
1	Persentase Wirausaha Muda (%)	70,00	74,26
2	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	N/A	72,77
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	23,00	25
4	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	25	25
5	Jumlah prestasi olahraga	12	6
6	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	N/A	45,00
S Statistik			
1	Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	1,60	2,30
2	Buku Kabupaten dalam Angka	Ada	Ada
3	Buku PDRB dalam Angka	Ada	Ada
T Persandian			
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	N/A	24,02



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
	Perangkat Daerah (%)		
U	Kebudayaan		
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Kegiatan)	10	10
2	Benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan (Objek)	26	26
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Objek)	20	20
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Objek)	26	26
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	N/A	52,50
6	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	N/A	73,50
7	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	N/A	78,75
V	Perpustakaan		
1	Indeks Minat Baca (Poin)	50,26	51,89
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (Orang)	495	1.500
3	Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	10,20	4,00
4	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	N/A	83,20
W	Kearsipan		
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Poin)	15,00	40,00
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	45,00	19,00
3	Tingkat Ketersediaan Arsip	N/A	69,01
4	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	N/A	56,65
5	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	N/A	20,60
X	Pariwisata		
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.250	2.550
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	50,00	2,00
3	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	N/A	82,40
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual	N/A	5,35
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	N/A	21,00
Y	Kelautan dan Perikanan		



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
1	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	0,23	0,22
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	4.142,88	4.100,00
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	146,79	150,40
4	Terlaksananya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	25,00	25,00
5	Angka Konsumsi Ikan	29,58	29,90
Z Pertanian			
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	4,38	4,30
2	Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	41,61	40,78
3	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%)	1,88	1,84
4	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan (Rp Juta/kapita)	125,73	156,10
5	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	N/A	2,30
6	Peningkatan Produksi Hortikultura	N/A	0,99
7	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	N/A	0,60
8	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	N/A	73,50
9	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	N/A	52,50
10	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV	N/A	45,15
11	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	N/A	68,25
12	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	N/A	57,75
13	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	N/A	42,00
AA Perdagangan			
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	6,13	6,20
2	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	66,67	77,78
3	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	N/A	21,00
4	Nilai Ekspor Barang	N/A	1,35
5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	N/A	100,00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
6	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	50,00	65,00
AB Perindustrian			
1	Proporsi jumlah IKM (%)	90,00	100,00
2	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A	83,43
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	N/A	36,05
AC Perencanaan Pembangunan			
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	71,89
2	Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada
3	Dokumen RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada
4	Dokumen RKPD yang Ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada
5	Dokumen RTRW yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada
6	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	N/A	100,00
7	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	N/A	100,00
8	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A	100,00
9	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	N/A	100,00
10	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	N/A	100,00
AD Keuangan			
1	Opini BPK atas Pelaporan Keuangan (Level)	WDP	WTP
2	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	3,88	4,80
3	RoA BUMD (%)	N/A	0,72
4	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	N/A	10,00
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	N/A	10,00
6	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	N/A	30,00
7	Persentase Penurunan SILPA	N/A	15,00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
8	Persentase laporan keuangan tepat waktu	N/A	100,00
9	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	N/A	100,00
10	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	N/A	74,16
11	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	N/A	78,28
AE Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan			
1	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	70,00	73,00
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	8,00	8,00
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	8,00	8,00
4	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	N/A	100,00
5	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	72,45
6	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	N/A	76,59
7	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	N/A	77,63
8	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	N/A	83,20
9	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	N/A	80,85
10	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	N/A	68,25
11	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	N/A	73,50
AF Penelitian dan Pengembangan			
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	N/A	31,78
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	N/A	40,95
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	N/A	22,37
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	N/A	17,23
5	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	N/A	100,00
6	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang	N/A	100,00



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
	Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	N/A	100,00
8	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah	N/A	100,00
9	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	N/A	100,00
10	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	N/A	100,00
11	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	N/A	100,00
12	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	N/A	100,00
AG Pengawasan			
1	Indeks Persepsi Korupsi	74,00	80
2	Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B (%)	95,00	100
3	Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	85	85
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level)	2	3
5	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Level)	2	3
6	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	85,00	85,00
7	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,00	3,00
8	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2,00	3,00
AH Sekretariat Daerah			
1	Nilai Evaluasi SAKIP (Poin)	CC	B
2	Efektivitas Kerjasama Daerah	N/A	80,34
3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	N/A	85,00
4	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	N/A	77,25
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	N/A	78,80
AI Pemerintahan Umum			
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan	N/A	42,00



No	Indikator	Baseline 2024	TARGET RKPD 2026
	Karakter Kebangsaan		
2	Persentase Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	N/A	55,65
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	N/A	46,20
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	N/A	90,00
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	N/A	100,00

7.5. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak-hak dasar masyarakat. Pelayanan dasar tersebut mencakup enam urusan wajib pelayanan dasar, yaitu: **pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta sosial**. Proyeksi capaian indikator SPM dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan keterpenuhan target layanan dasar secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

**Tabel 7.5.
Proyeksi Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	KONDISI 2024	TARGET 2026
I	PENDIDIKAN				
A	Pendidikan Dasar dan Menengah				
1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 tahun	Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,4	99,02
2	Kemampuan Literasi SD/MI	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	53,32	58,32
3	Kemampuan Numerasi SD/MI	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan)	Nilai	51,09	56,89
4	Iklim Keamanan SD/M	Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan	Nilai	73,92	75,72
5	Iklim Kebinekaan	Indeks Iklim Kebinekaan di	Nilai	67,20	69,20



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	KONDISI 2024	TARGET 2026
	SD/MI	Satuan Pendidikan			
6	Iklm Inklusivitas SD/MI	Indeks Iklm Inklusivitas di Satuan Pendidikan	Nilai	57,41	62,41
7	Kemampuan Literasi SMP/MTs	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	57,72	59,92
8	Kemampuan Numerasi SMP/MTs	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	55,45	58,45
9	Iklm Keamanan SMP/MTs	Indeks Iklm Keamanan di Satuan Pendidikan	Nilai	67,03	70,03
10	Iklm Kebinekaan SMP/MTs	Indeks Iklm Kebinekaan di Satuan Pendidikan	Nilai	67,29	69,29
11	Iklm Inklusivitas SMP/MTs	Indeks Iklm Inklusivitas di Satuan Pendidikan	Nilai	54,03	58,83
B	Pendidikan Kesetaraan				
1	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	21,16	29,36
C	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	80,01	85,94
2	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	15,87	20,08
3	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV	Persen	50,23	51,76
II	KESEHATAN				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	66,9	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	63,2	100
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	63	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	66	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasa	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	100	100



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	KONDISI 2024	TARGET 2026
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	38	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	98	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	84	100
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	184	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	127	100
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara dterduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	69,5	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(Human Immunodeficien cy Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	88,7	100
III	PEKERJAAN UMUM				
1	Penyediaan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	25	31
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Persen	0	0,5
IV	PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	0	40
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	0	40
V	TRANTIBUMLINMAS				



**KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	KONDISI 2024	TARGET 2026
1	Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota	Persen	80	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	20	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	75	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	Persen	80	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	80	100
VI	SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	14,2	45
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	46	66
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	44,5	69
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	34	69
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	80,9	100



BAB VIII

PENUTUP

KUA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2026 merupakan Kebijakan umum APBD Kabupaten Padang Lawas yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang tersedia untuk periode satu tahun.

Penyusunan dokumen KUA ini telah melalui seluruh tahapan secara sistematis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dasar yang ditempuh dalam merampungkan dokumen KUA ini yaitu melalui dokumen RKPD Tahun 2026 Kabupaten Padang Lawas. Hasil penyusunan KUA Kabupaten Padang Lawas merupakan panduan untuk penyusunan PPAS tahun 2026.

BUPATI PADANG LAWAS



PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN

RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2026

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.153.306.303,00	
4.1.01	Pajak Daerah	37.637.420.659,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.053.784.132,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.958.461.193,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.503.640.319,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	950.610.175.559,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	924.744.217.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.865.958.559,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.905.000.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.905.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.035.668.481.862,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.000.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.000.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.000.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.047.668.481.862,00	

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
DATA LAPORAN KOSONG					

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	[DIKUNCI]	Meningkatkan Kualitas SDM					

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				

					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.063.671.800,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				

					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				

					DINAS KESEHATAN	418.996.350,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				

					DINAS KESEHATAN	0,00	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				

					DINAS KESEHATAN	0,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				

					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	100.000.000,00	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	140.000.000,00		
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					

					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	451.001.900,00		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					

					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20.017.600,00		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					

					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.349.050,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.317.600.000,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	0,00		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	144.076.400,00		
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	269.242.293.468,00		
					INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS	297.000.000,00		

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.487.500,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2613 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.242.293.468,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.902.550,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.575.900,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.588.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.756.500,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.655.300,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.714.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.125.350,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	40 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.384.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.571.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.999.584,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	101 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.182.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.747.400,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.536.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.13 Penataan Organisasi			1.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	480.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	46 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	48.906.300,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	230 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.995.100,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	192 Satuan Pendidikan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	192 Satuan Pendidikan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.136.518.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	192 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.500.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	142.049.100,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	7 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	763.246.900,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.683.600,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.223.250,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.280.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	192 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	192 Satuan Pendidikan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	538 Peserta Didik	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	210 Peserta Didik	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.460.406,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	315.401.900,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	33 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	33 Satuan Pendidikan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.162.452.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.127.050,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.539.600,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.316.600,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	33 Satuan Pendidikan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.005.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	10 Buku	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	150 Satuan Pendidikan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.853.100,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	200 Satuan Pendidikan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.186.640.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	4 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.075.800,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	9.460.400,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta didik	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	26.528.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	5 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	68 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	41.326.100,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2 Satuan Pendidikan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.524.990.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.015.300,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.950.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	200 Peserta Didik	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.246.150,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM													
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	150 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN													
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.223.400,00	0,00	0,00	
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.928.500,00	0,00	0,00	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.456.200,00	0,00	0,00	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA													
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.583.050,00	0,00	0,00	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.816.300,00	324.065.500,00	356.472.050,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	820 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.599.410.702,00	70.183.483.099,00	77.201.831.408,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.578.000,00	237.205.760,00	260.926.336,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.000.000,00	57.481.985,00	63.230.183,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	21.994.500,00	24.193.500,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	120.981.300,00	133.079.430,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.646.000,00	333.993.000,00	367.392.300,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000,00	18.000,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.419.000,00	18.067.500,00	19.874.250,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	396.953.672,00	153.494.228,00	168.843.650,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.690.000,00	64.350.000,00	70.785.000,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.675.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	530.949.000,00	268.221.360,00	295.043.496,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	266 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.493.000,00	194.142.300,00	213.556.530,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.071.867.501,00	7.823.241.800,00	8.605.565.980,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.841.200,00	186.278.180,00	204.905.998,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6959 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.413.935.800,00	2.262.364.500,00	2.488.600.950,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6936 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	907.500.000,00	986.700.000,00	1.085.370.000,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6754 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	54.999.703,00	60.499.673,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26107 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.461.200,00	253.000.000,00	278.300.000,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56800 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	938.849.000,00	861.960.000,00	948.156.000,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	179551 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	109.999.967,00	120.999.964,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20325 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.300.000,00	44.880.000,00	49.368.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37414 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2816 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	407 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	524.267.000,00	583.200.000,00	641.520.000,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4073 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	979.289.950,00	473.220.000,00	520.542.000,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11122 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.996.800,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.738.894.000,00	4.189.782.520,00	4.608.760.772,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.801.000,00	346.281.100,00	380.909.210,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.314.000,00	320.445.400,00	438.848.850,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	362.680.000,00	398.953.500,00	438.848.850,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	608.500.000,00	669.350.000,00	736.285.000,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.100.000,00	206.900.000,00	227.601.000,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.195.261.101,00	1.319.218.999,00	1.451.140.898,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.100.000.000,00	19.843.749.333,00	21.828.124.266,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	18 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.345.000,00	124.679.500,00	137.147.450,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.228.010.400,00	8.796.421.480,00	9.676.063.628,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.691.900,00	1.662.623.545,00	1.828.885.899,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	17 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	533.390.000,00	586.729.000,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	33.000.000,00	36.300.000,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	838 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	393 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	17 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.199.000,00	355.518.900,00	391.070.790,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	29 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.850.000,00	398.035.000,00	437.838.500,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.700.000,00	273.570.000,00	30.092.900,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	854.850.000,00	940.335.000,00	1.034.368.500,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	277 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.299.550,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.369.800,00	173.799.780,00	191.179.798,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.074.503.000,00	1.181.953.000,00	1.300.148.300,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN													
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.055.000,00	96.860.000,00	106.546.000,00	
				1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.383.000,00	279.821.300,00	307.803.430,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.295.650,00	43.999.010,00	48.398.911,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.752.000,00	216.427.200,00	238.069.920,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang menerima gaji	100 persen											
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	19.965.871.238,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	161.496.200,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	150.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	50.001.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	101.440.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	199.933.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	35.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	714.979.632,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	270.815.600,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	18.000.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan penyediaan layanan kesehatan sesuai standar	100 persen											
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	913.390.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	1.063.088.969,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	2.836.138.500,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	500.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	7 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	1.223.580.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	2.040.734.899,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	7.885.608.060,00	0,00	0,00	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, BulusoniK	7.206.250,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, BulusoniK	31.925.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, BulusoniK	8.179.200,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, BulusoniK	42.709.600,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.03.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Berita Acara	Kab. Padang Lawas, Barumon, BulusoniK	79.980.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumon, BulusoniK	4.482.495.583,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, BulusoniK	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, BulusoniK	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, BulusoniK	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, BulusoniK	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, BulusoniK	36.399.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	5.017.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	20.226.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	13.041.950,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	216.982.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	3.003.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	286.995.964,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	378.995.950,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	33.470.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	247.280.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	215.977.750,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	35.860.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	0,00	0,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)													
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	3,5 KM	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	450.000.000,00	2.425,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	11 KM	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	0,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	6,5 KM	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	400.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.03.02.2.02.0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	7 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	203.710.500,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.03.02.2.02.0054 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 UNIT	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	0,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	0,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	162.294.992,00	0,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	70 SR	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	670.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE													
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3 Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	0,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG													
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	5 Bangunan Gedung	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	970.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	13.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	6 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	750.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	12 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	334.532.750,00	0,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	6 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	1.143.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	6 KM	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	850.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.03.10.2.01.0052 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	13 KM	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	216.752.900,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	2 KM	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	11 KM	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	17.488.695.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.03.10.2.01.0060 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	7 KM	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	214.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	550.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	600 Meter	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	2.800.000.000,00	0,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	463.530.600,00	0,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	0,00	0,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Tahun Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	12.948.600,00	20.000.000,00	25.000.000,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Tahun Liter/Detik	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	135.941.200,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1 Tahun M ³ /Hari	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	319.938.800,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	2.671.477.161,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	106.116.500,00	65.000.000,00	70.000.000,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	101.140.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	11.695.800,00	15.000.000,00	20.000.000,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Tahun Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	231.204.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	6.513.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	72.180.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	571.288.000,00	850.000.000,00	900.000.000,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	236.173.600,00	130.000.000,00	135.000.000,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	19.080.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Tahun Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	0,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Tahun Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH													
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	451.001.900,00	0,00	0,00	
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Tahun Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Tahun Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	3.021.047.836,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Tahun Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.971.800.383,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.100.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.006.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.956.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.440.000,00	0,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.980.000,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.566.800,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	0 laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.628.000,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.690.000,00	0,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN													
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.571.135.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.568.794.436,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	26.000.000,00	28.000.000,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.509.100,00	2.000.000,00	2.500.000,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.728.300,00	92.000.000,00	95.000.000,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.939.350,00	13.000.000,00	14.000.000,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.100.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	450.000.000,00	46.000.000,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	320.000.000,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	27.000.000,00	29.000.000,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.547.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.429.500,00	90.000.000,00	92.000.000,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	14 Kawasan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	40 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.514.400,00	20.000.000,00	25.000.000,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	4 Kawasan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.083.750.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	600 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.000.000,00	100.000.000,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1200 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	1.982.864.062,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	219.094.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	287.000.000,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL													
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	542.855.376,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	1.603.499.900,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1000 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	100.000.000,00	869.841.000,00	869.841.000,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1000 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1000 Usulan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	188.200,00	19.056.500,00	19.056.500,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.06.05.2.02.0010 Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	30 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	30.000.000,00	50.000.000,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	84.277.650,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	4.553.150,00	15.000.000,00	20.000.000,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	1.586.038.970,00	1.649.038.000,00	1.850.000.000,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	4.689.900,00	5.000.000,00	6.000.000,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	2.444.900,00	15.000.000,00	20.000.000,00	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	41.080.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	6.286.900,00	10.000.000,00	20.000.000,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	50.250.300,00	55.000.000,00	57.000.000,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.089.100,00	7.000.000,00	10.000.000,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	22.720.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	16.970.050,00	35.000.000,00	45.000.000,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	11.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	122.365.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	36.236.500,00	30.000.000,00	50.000.000,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	870 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	11.310.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	19.724.128,00	32.000.000,00	42.000.000,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	44.632.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	10.190.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	316.890.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	14 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	60.224.600,00	100.000.000,00	200.000.000,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	3 Perusahaan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	21.186.600,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	0,00	0,00	0,00	
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN													
				2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	4 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	185.000.000,00	190.000.000,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.995.000,00	41.995.000,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	3 laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	81.000.000,00	82.000.000,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.001.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.000.000,00	32.000.000,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14,5 Ton	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	250.955.000,00	251.955.000,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			2.09.03.2.04.0005 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	17 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	194.000.000,00	195.000.000,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN													
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.600.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	171 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	4.499.691.544,00	12.953.045.697,00	13.053.045.697,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	47.361.000,00	40.695.000,00	40.698.000,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	10.500.000,00	13.600.000,00	13.700.000,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	11.512.000,00	17.984.300,00	17.988.300,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	220.848.000,00	400.177.000,00	400.277.000,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	0,00	1.296.000,00	1.396.000,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	45.806.400,00	36.696.000,00	36.796.000,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	571.584.720,00	925.478.000,00	935.478.000,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	84.631.000,00	108.755.450,00	109.755.450,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	557.539.750,00	100.000.000,00	110.000.000,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	15 Ton	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	150.000.000,00	50.567.500,00	51.567.500,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	870.000.000,00	875.000.000,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	30.000.000,00	28.500.000,00	29.500.000,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.548.333.128,00	1.709.050.338,00	1.809.050.338,00	
				2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.648.900,00	51.953.900,00	61.953.900,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.175.500,00	0,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.855.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.963.850,00	0,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.286.000,00	161.986.000,00	161.986.000,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.698.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.674.680,00	13.134.000,00	13.134.000,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.539.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.076.400,00	0,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	19.850.000,00	0,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.866.450,00	3.821.375.200,00	3.831.375.200,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 kegiatan Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.828.900,00	630.886.500,00	640.886.500,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	55 orang / kali Keluarga	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.903.000,00	27.928.000,00	37.928.000,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	12 Kelompok	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.991.000,00	41.200.000,00	51.200.000,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	2.317.600.000,00	0,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	10000 Ton	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.835.580.000,00	0,00	0,00	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	2.458.760.436,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	205.680.200,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	14.930.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	59.971.650,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	211.607.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	4.992.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	71.040.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	382.552.400,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	66.896.700,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	7.200.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	0,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	100 Layanan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	7.200.000,00	55.000.000,00	100.000.000,00	
				2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN													
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	20.633.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	140.427.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	12.389.300,00	0,00	0,00	
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.085.606.863,00	1.650.000.000,00	1.675.000.000,00	
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.13.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	4.027.400,00	8.000.000,00	10.000.000,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	24.532.300,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	29.255.300,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	15.080.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	10.000.500,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	10.008.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	153.985.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	8.021.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	45.719.600,00	48.000.000,00	48.000.000,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	313.800.000,00	422.160.000,00	422.160.000,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	52.170.000,00	87.590.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA													
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.162.500,00	0,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	82.120.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	40.060.700,00	270.000.000,00	275.000.000,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	110.333.800,00	130.000.000,00	130.000.000,00	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMAS YARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	746.860.100,00	0,00	0,00	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,05 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	1,5 Persen	2.08.02.2.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	42 Lembaga	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.017.600,00	20.017.600,00	0,00	
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47 Persen	2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.017.600,00	20.017.600,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	5 Lembaga	2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	10 Lembaga	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1,45 Persen											
				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	10 Lembaga	2.08.04.2.02.0008 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 Persen	2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	50 Kegiatan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.349.050,00	18.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 Persen	2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.700.000,00	201.700,00	0,00	
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	20.182.500,00	45.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	3.753.764.208,00	3.662.445.784,00	0,00	
				2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	2.14.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	22.817.100,00	40.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	9.458.900,00	15.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	12.003.000,00	12.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	2.14.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	6.005.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	112.347.000,00	120.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	35.602.240,00	35.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	1.722.712.000,00	1.728.483.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	52.820.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	7.180.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE)	85 Persen	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.711.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE)	85 Persen	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.800.000,00	209.400.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE)	85 Persen	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/m CPR)	81 Persen											
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	985 Poktan	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	631.800.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	985 Poktan	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	17 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.300.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	985 Poktan	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	125.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	985 Poktan	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	85 Persen	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	608 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.000.000,00	2.293.330.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE)	85 Persen	2.14.03.2.02.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	165.940.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32 Persen	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.300.000,00	22.500.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32 Persen	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2687 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	934.252.000,00	1.768.389.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32 Persen	2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	25.187.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32 Persen	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.750.000,00	0,00	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBP yang efektif	985 Poktan	2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	94 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	517.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	985 Poktan	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	70 Kampung	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	388.500.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	10 Persen											
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	985 Poktan	2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 Laporan / Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	115.200.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	985 Poktan	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	130.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25 Stakeholder	2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	972.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25 Stakeholder	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.178.000.000,00	1.166.400.000,00	0,00	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	2.278.900,00	4.950.000,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.076.439.605,00	2.598.469.457,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.301.300,00	4.950.000,00	0,00	
				2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.525.000,00	0,00	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	19 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.123.700,00	5.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.537.800,00	49.500.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.696.000,00	38.500.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.603.300,00	39.600.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.000,00	52.800.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1213 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.819.000,00	467.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000,00	5.280.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.168.000,00	66.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.394.000,00	540.751.200,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.180.000,00	67.870.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.050.000,00	16.500.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	8 Komunitas	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.460.000,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	3 Permohonan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.498.000,00	96.305.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.080.000,00	63.800.000,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA													
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	16 Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.077.100,00	1.337.419.050,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.281.300,00	70.000.000,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL													
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.322.200,00	40.000.000,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI													
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	2 Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.423.800,00	25.000.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	1.651.736.946,00	2.171.870.902,00	2.192.464.447,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	3.657.400,00	4.500.000,00	5.500.000,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	60.000.000,00	70.000.000,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	10.100.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	14.260.750,00	23.000.000,00	25.000.000,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	83.923.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	1.300.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	14.449.104,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	256.331.000,00	305.000.000,00	320.000.000,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	49.020.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	4.880.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	120.000.000,00	150.000.000,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI													
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	304 Unit Usaha	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	0 Unit Usaha	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN													
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	10 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	85.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	17 Kelompok Masyarakat	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	39.999.950,00	60.000.000,00	80.000.000,00	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	30 Unit Usaha	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	49.999.950,00	60.000.000,00	80.000.000,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	10 Unit Usaha	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN													
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	406.971.850,00	400.000.000,00	450.000.000,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	30.000.000,00	50.000.000,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	25.999.950,00	50.000.000,00	75.000.000,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	140.000.000,00	250.000.000,00	280.000.000,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR													
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	20 Pelaku Usaha	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	135.800.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI													
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	19.900.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	500.000.000,00	550.000.000,00	600.000.000,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	1.411.858.504,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	5.503.900,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	46.726.100,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	10.085.600,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	30.261.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	21.020.150,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	174.880.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	4.000.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	53.954.248,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	93.671.840,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	69.734.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	31.670.000,00	0,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL													
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL													
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	29.975.000,00	0,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL													
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	90.000.000,00	0,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL													
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	79.999.900,00	0,00	0,00	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	1.513.473.651,00	1.525.337.970,00	0,00	
				2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.19.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	17 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	0,00	17.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	0,00	3.210.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	0,00	45.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	31.533.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	208.824.000,00	296.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	1.500.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	30.000.000,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.02.2.01 Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	12 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.19.02.2.01 Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	0,00	109.799.000,00	0,00	
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	13 Organisasi	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	925.000.000,00	1.395.000.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN													
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	257.642.304,00	548.757.056,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	0,00	108.494.250,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	25 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	0,00	226.065.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	15 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	0,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	5 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	408.245.600,00	102.175.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	84.111.800,00	188.148.000,00	0,00	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pe meliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	50.000.000,00	345.500.000,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	0,00	244.100.000,00	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	0,00	109.733.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			3.26.05.2.01.0005 Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	0,00	280.193.227,00	0,00	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 tahun Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	1.331.351.443,00	1.501.951.200,00	1.652.146.320,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	4.809.400,00	5.441.370,00	6.430.710,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	57.134.000,00	63.882.280,00	70.270.508,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	25.703.168,00	12.754.979,00	14.030.476,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	6.750.000,00	3.458.400,00	3.804.240,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	34.737.850,00	44.000.000,00	48.400.000,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	8.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	86.429.000,00	100.412.400,00	110.453.640,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	4.992.000,00	5.491.200,00	6.040.320,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	116.460.112,00	128.106.123,00	140.916.735,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	196.166.000,00	187.110.000,00	205.821.000,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	59.981.400,00	65.459.790,00	72.005.769,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN													
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1 Perpustakaan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	0 Perpustakaan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	0 Layanan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1 Perpustakaan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	68.046.000,00	74.850.000,00	82.335.060,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.01.0014 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	0 Eksemplar	[object Object]	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	20 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	21.998.900,00	24.198.790,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	0 Eksemplar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0 Eksemplar	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	0 Perpustakaan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	0 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	97.043.000,00	116.152.300,00	232.304.600,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0 Perpustakaan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	150 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	133.856.000,00	147.241.600,00	294.483.200,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	5 Lokus	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	109.500.000,00	120.450.000,00	132.495.000,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO													
				2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	0 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	0 Eksemplar	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	0 Eksemplar	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	0 Eksemplar	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	250 Berkas	[object Object]	41.671.000,00	55.738.100,00	61.311.910,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	250 Berkas	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	6.417.800,00	14.058.220,00	15.336.240,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	22.549.780,00	24.804.758,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	6 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	67.394.250,00	74.133.675,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.01.0005 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	0 Lembaga	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.01.0006 Penyusunan Database Arsiparis	Jumlah arsiparis	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.01.0007 Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya	0 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.01.0008 Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	0 Lembaga	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.01.0009 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.01.0010 Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	27 Instansi	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	9.900.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00	
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	0 Arsip	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.02.0003 Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	0 Naskah	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	0 Arsip	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.02.0005 Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	0 Pengguna	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP													
				2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	0 Berkas	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0 Arsip	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Daftar	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Arsip	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			2.24.03.2.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	0 Arsip	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	0 Arsip	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	0 Arsip	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	0 Arsip	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			2.24.03.2.05.0002 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	0 Arsip	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	0 Arsip	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP													
				2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			2.24.04.2.01.0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	0 SOP	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			2.24.04.2.01.0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0 Arsip	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	13.931.200,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	5.238.900,00	6.500.000,00	7.000.000,00	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	2.605.421.094,00	2.500.000.000,00	2.550.000.000,00	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	5.091.150,00	7.000.000,00	10.000.000,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	4.023.200,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	41.034.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	8.909.950,00	15.000.000,00	15.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	142.312.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	0,00	8.000.000,00	10.000.000,00	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	2.340.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	39.126.800,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	155.998.300,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	27.550.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	9.940.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
				3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3 Unit	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	109.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	139.745.780,00	75.000.000,00	80.000.000,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	2 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.150.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													
				3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	92.510.887,00	60.000.000,00	70.000.000,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	0,00	170.000.000,00	175.000.000,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			3.27.02.2.01.0017 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	2500 Anakan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.539.200,00	200.000.000,00	300.000.000,00	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	500 Ekor	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	13.800.000,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	24.439.300,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	100 Ha	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.250.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.000.000,00	450.000.000,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	27.150.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	5 Unit Usaha	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.998.100,00	200.000.000,00	300.000.000,00	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH														
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.120.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.241.700,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.694.300,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.967.300,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.631.309.972,00	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.518.600,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.802.700,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.932.200,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.517.100,00	75.000.000,00	75.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.084.100,00	160.000.000,00	160.000.000,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.749.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.460.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.236.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.100.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	454.615.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.750.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.085.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.810.200,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.061.800.712,00	750.000.000,00	750.000.000,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.500.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.701.644.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	768.142.400,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.179.400,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.512.200,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	177.260.508,00	220.000.000,00	220.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	96.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	400.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	570.084.600,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	392.829.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	10 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	321.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	57.255.900,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	123.911.200,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	32.541.400,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	88.296.100,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	36.675.100,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	56.137.400,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	1.550.229.800,00	150.000.000,00	150.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	795.688.600,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	3.189.277.550,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	1.214.782.850,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	8 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	764.560.800,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	115.580.150,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	400.323.200,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	123.568.600,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah			4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	567.176.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah			4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.817.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.713.100,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	21.455.700,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	6.237.600,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	15.806.700,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	63.349.600,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	376.098.100,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	275.515.300,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
4.02 SEKRETARIAT DPRD														
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	2.538.447.034,00	2.538.236.784,00	2.538.236.784,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	114.900.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12000 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	3.444.720.250,00	1.750.519.100,00	1.750.519.100,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	150.000.000,00	120.000.000,00	140.000.000,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon, Pasar Sibuhuan	29.577.600,00	30.000.000,00	33.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	235.893.800,00	225.000.000,00	225.000.000,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	700.550.000,00	640.000.000,00	640.000.000,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	210.369.950,00	145.000.000,00	145.000.000,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	120.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	1.501.743.000,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	83.161.400,00	86.637.058,00	86.637.058,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	101.562.712,00	102.000.000,00	102.000.000,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	2.053.048.500,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	845.785.200,00	836.000.000,00	836.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	93.620.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	14.236.918.546,00	15.316.000.000,00	15.316.000.000,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	240.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1500 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	5.100.278.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	247.025.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD													
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	95.034.500,00	97.000.000,00	98.000.000,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	95.183.000,00	97.000.000,00	98.000.000,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	93.626.400,00	73.000.000,00	74.000.000,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	30 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	900.000.000,00	320.000.000,00	340.000.000,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	1.398.150,00	360.000.000,00	370.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	250 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	50.625.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	30 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	4.886.880.000,00	2.468.000.000,00	2.468.000.000,00	
5.01 PERENCANAAN														
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.162.400,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	2.344.630.554,00	3.466.293.000,00	5.026.124.850,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	9.930.500,00	31.000.000,00	35.000.000,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	32.970.000,00	105.690.000,00	105.690.000,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	39.697.400,00	94.000.000,00	95.000.000,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	30.001.550,00	93.000.000,00	95.000.000,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	7.250.000,00	24.500.000,00	26.500.000,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	439.808.000,00	800.000.000,00	810.000.000,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusoni	54.000.000,00	57.000.000,00	59.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	14.294.100,00	41.000.000,00	42.000.000,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	138.570.112,00	180.000.000,00	190.000.000,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	783.000.000,00	888.000.000,00	888.000.000,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	283.521.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	71.002.500,00	110.000.000,00	110.000.000,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	35.055.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH													
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	13.297.050,00	50.000.000,00	75.000.000,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	141.737.700,00	300.000.000,00	325.000.000,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	194.205.650,00	760.000.000,00	785.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	82.401.900,00	175.000.000,00	185.000.000,00	
				5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	675.701.800,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	20.663.050,00	55.000.000,00	68.750.000,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	26.636.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	17.545.500,00	60.000.000,00	72.000.000,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	31.447.850,00	60.000.000,00	75.000.000,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	28.668.100,00	120.000.000,00	147.233.000,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	40.459.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	25.441.450,00	46.000.000,00	69.000.000,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	15.750.400,00	70.385.000,00	94.000.000,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	19.587.700,00	150.000.000,00	170.000.000,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	26.001.900,00	73.000.000,00	75.000.000,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	20.497.500,00	89.000.000,00	90.000.000,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	17.170.450,00	49.000.000,00	59.000.000,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah			5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	10.252.300,00	56.000.000,00	66.000.000,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah			5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	28.462.600,00	132.000.000,00	152.000.000,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah			5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusonik	15.796.300,00	48.000.000,00	68.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	21.952.900,00	58.000.000,00	68.000.000,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	27.703.800,00	91.500.000,00	95.500.000,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	26.680.100,00	75.000.000,00	95.000.000,00	
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH													
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	24.934.100,00	100.000.000,00	120.000.000,00	
	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH													
				5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			5.05.03.2.01.0006 Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Bulusoni	98.748.300,00	0,00	0,00	
5.02 KEUANGAN														
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumon, Semua Kel/Desa	49.560.300,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	24.066.900,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 % Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	28.198.578.029,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	11.275.500,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	135 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	140.400.000,00	140.400.000,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 % Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 % Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	26.677.200,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 % Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	75.285.500,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 % Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	59.977.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 % Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	73.251.900,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	368.881.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 % Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	3.400.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	231.004.800,00	231.004.800,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 % Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	285.336.432,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	2.388.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 % Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	10.250.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 % Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	60.150.000,00	0,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	144.285.300,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	86.160.250,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	220.173.400,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	200.350.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	101.770.300,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	15.450.300,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	24.925.600,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	57.899.700,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	24.666.250,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	65.472.950,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	153.132.800,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	251.212.066.500,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	4.428.737.545,00	0,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH													
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	25.326.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	26.679.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	145.860.400,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	54.112.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	64.607.200,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 % Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	37.602.900,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	223.510.450,00	547.989.312,00	547.989.312,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	41.250.000,00	79.052.480,00	79.052.480,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100 % Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	176.946.500,00	233.916.176,00	233.916.176,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	52.997.800,00	273.174.304,00	273.174.304,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100 % Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	9.964.850,00	109.768.672,00	109.768.672,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN													
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.405.600,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.482.800.161,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.671.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.704.650,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.984.600,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.414.700,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2500 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.075.000,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.015.700,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	38 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.302.000,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.997.000,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.720.000,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.805.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.590.000,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.030.000,00	0,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH													
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3264 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.220.150,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	300 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.200.000,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	162 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.008.000,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	162 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.647.450,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	162 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.240.000,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.500.000,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	100 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.413.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			5.03.02.2.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	100 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.971.000,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	43 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.610.800,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.054.500,00	0,00	0,00	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	342.533.550,00	0,00	0,00	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH														
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.443.141.557,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.153.650,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.791.200,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.018.200,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.146.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.719.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.188.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.300.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.999.760,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.500.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.500.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.500.000,00	0,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN													
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.451.031.950,00	0,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	893.235.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	565.348.650,00	0,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.206.450,00	0,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI													
				6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	776.048.900,00	0,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5 perangkat daerah	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.868.800,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN													
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	5.638.400,00	16.500.000,00	17.450.000,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	1.400.847.636,00	1.547.600.000,00	1.765.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	3.320.200,00	12.450.000,00	13.500.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	34.500.000,00	36.500.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	60.500.000,00	65.400.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	23.250.000,00	25.400.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	119.209.000,00	146.000.000,00	156.000.000,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	9.450.000,00	29.500.000,00	31.500.000,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	7.627.000,00	23.450.000,00	24.500.000,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	120.086.750,00	135.000.000,00	146.000.000,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	11.620.000,00	35.450.000,00	44.500.000,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	675.200.000,00	750.000.000,00	845.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Pasar Latong	52.523.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Pasar Latong	1.822.545.759,00	1.739.720.285,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Pasar Latong	0,00	16.875.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Pasar Latong	22.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Pasar Latong	113.479.200,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Pasar Latong	15.336.800,00	11.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Pasar Latong	77.801.000,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak	1.073.576.025,00	1.150.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak	21.850.000,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak	60.240.500,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak	14.700.000,00	7.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak	8.636.600,00	8.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak	79.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Huristak, Semua Kel/Desa	95.647.500,00	85.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak	29.951.200,00	35.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	752.406.643,00	737.256.062,00	737.256.062,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	24.200.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	5.773.700,00	5.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	30.570.600,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	36.281.500,00	9.069.500,00	9.069.500,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	5.005.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	2.052.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	82.140.000,00	145.200.000,00	145.200.000,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	64.476.700,00	83.373.950,00	83.373.950,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	20.140.350,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Berita Acara	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	1.719.004.269,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	1.385.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Pinarik	10.874.700,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	2.107.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	18.198.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Pinarik	12.700.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Pinarik	325.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Pinarik	15.180.500,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Pinarik	80.026.000,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Pinarik	2.796.000,00	0,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Pinarik	27.822.000,00	0,00	0,00	
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	68.609.000,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	2.117.508.253,00	2.100.000.000,00	2.150.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	3.948.500,00	5.500.000,00	6.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	0,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	10.205.800,00	9.000.000,00	9.500.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	26.000.000,00	26.500.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	5.100.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	3.000.480,00	4.000.000,00	5.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	13.551.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	127.596.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	28.700.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	9.809.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00	
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	87.685.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumon, Semua Kel/Desa	1.274.262.903,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumon, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumon, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumon, Semua Kel/Desa	9.540.280,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	264 Laporan	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumon, Semua Kel/Desa	138.824.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumon, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumon, Semua Kel/Desa	77.254.050,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10 Laporan	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumon, Semua Kel/Desa	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumon, Semua Kel/Desa	61.350.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumon, Semua Kel/Desa	5.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Berita Acara	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	7.080.000,00	5.600.000,00	6.590.000,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.756.252.032,00	1.800.000.000,00	1.820.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	20.425.600,00	14.500.000,00	15.430.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	9.489.950,00	9.500.000,00	10.500.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	2.050.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	25.350.000,00	36.750.000,00	41.500.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	23.254.400,00	20.450.000,00	21.340.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 TA Laporan	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	160.966.000,00	213.600.000,00	213.600.000,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	7.450.000,00	19.800.000,00	21.450.000,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	21.140.000,00	35.000.000,00	40.500.000,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	10 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	78.950.000,00	65.000.000,00	75.600.000,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumon Tengah, Pasar Binanga	1.735.709.609,00	1.739.207.116,00	1.739.207.116,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon Tengah, Pasar Binanga	19.225.200,00	30.000.000,00	35.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumon Tengah, Pasar Binanga	10.356.000,00	17.500.000,00	20.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumon Tengah, Pasar Binanga	7.650.000,00	27.500.000,00	30.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga	16.796.588,00	19.000.000,00	20.000.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga	73.026.000,00	96.000.000,00	115.200.000,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga	26.500.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga	29.920.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga	89.523.700,00	170.000.000,00	180.000.000,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	4.805.700,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	1.242.414.209,00	1.200.000.000,00	1.300.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	7.486.400,00	8.000.000,00	9.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	9.100.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	7.750.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	15.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	3.900.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	11.415.218,00	9.000.000,00	11.000.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	7.297.900,00	40.000.000,00	50.000.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	95.000.000,00	110.000.000,00	115.000.000,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	15.700.500,00	23.000.000,00	25.000.000,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Semua Kel/Desa	17.915.600,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	13.632.500,00	16.000.000,00	20.000.000,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	72.083.400,00	120.000.000,00	150.000.000,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.140.448.301,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.695.700,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	10.599.100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	8.298.900,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	3.600.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	1.001.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	5.003.752,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	18.582.500,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	159.482.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	58.865.600,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.927.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Orang	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.274.300,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.151.750,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH														
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.748.000,00	8.700.000,00	8.900.000,00	
7.01 KECAMATAN														
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.214.350,00	6.000.000,00	7.000.000,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.171.835.257,00	1.130.000.000,00	1.140.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.130.500,00	3.500.000,00	4.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.930.900,00	7.500.000,00	7.800.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	7.100.000,00	7.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.750.000,00	7.100.000,00	7.300.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.650.000,00	8.500.000,00	8.800.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.520.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.912.000,00	150.000.000,00	180.000.000,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.100.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	
				7.01.01.2.13 Penataan Organisasi			7.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.459.700,00	120.000.000,00	130.000.000,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.250,00	15.000.000,00	17.000.000,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	85.000.000,00	95.000.000,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.075.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.162.700,00	8.000.000,00	10.000.000,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	9.600.000,00	10.080.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	242 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	919.866.893,00	1.011.853.582,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	968.800,00	1.021.335,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	19.135.300,00	20.092.065,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	970.000,00	1.018.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	5.588.100,00	5.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	15.000.000,00	16.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	114 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	5.850.000,00	58.688.070,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	44.924.687,00	47.170.922,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	1.300.000,00	1.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	4.903.026,00	5.393.329,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	109.705.100,00	120.705.640,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Semua Kel/Desa	3.450.000,00	3.850.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 TA Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Semua Kel/Desa	21.631.100,00	23.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Semua Kel/Desa	18.253.800,00	22.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 TA Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Semua Kel/Desa	16.073.000,00	24.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Semua Kel/Desa	149.999.950,00	165.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Semua Kel/Desa	28.085.600,00	31.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	5.157.400,00	6.000.000,00	6.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	982.826.090,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa	1.494.100,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	4.125.600,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa	3.213.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa	11.432.900,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa	2.998.400,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	4.394.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	5.965.500,00	12.500.000,00	12.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	208 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa	132.710.000,00	200.510.000,00	200.510.000,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa	9.860.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	113.861.950,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa	4.025.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa	16.472.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco	1.067.265.537,00	1.067.265.537,00	2.134.531.074,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco	12.494.600,00	10.000.300,00	20.000.600,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	30.870.000,00	11.305.500,00	22.611.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	18.821.800,00	18.153.400,00	36.306.800,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	40.692.400,00	19.021.000,00	38.042.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco	6.840.000,00	5.019.800,00	10.039.600,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	121.710.000,00	120.000.000,00	240.000.000,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	12.781.200,00	9.000.000,00	18.000.000,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	70.000.000,00	70.000.000,00	140.000.000,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa	808.900,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa	1.056.700.458,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket Paket	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa	4.550.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa	1.000.400,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa	6.248.100,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun Paket	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa	4.253.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Tahun Dokumen	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa	1.544.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun Laporan	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 orang/hari Laporan	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Tahun Unit	Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa	9.332.800,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa	5.494.200,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Lembar Laporan	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa	780.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun Laporan	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa	1.216.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun Laporan	Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa	83.965.100,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun Unit	Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa	5.494.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa	10.421.550,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Tahun Laporan	Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa	37.947.100,00	0,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 kegiatan Orang	Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa	22.858.200,00	0,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 kegiatan Orang	Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa	77.725.400,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	1.375.430.838,00	1.430.000.000,00	1.540.000.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	2.405.200,00	2.500.000,00	3.200.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	8.400.000,00	12.000.000,00	13.500.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	7.775.000,00	5.670.000,00	6.500.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	5.800.000,00	5.450.000,00	6.540.000,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	13.400.000,00	12.500.000,00	13.650.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	6.007.800,00	7.500.000,00	8.350.000,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	97.368.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	126.961.750,00	65.000.000,00	69.450.000,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	20.500.000,00	20.000.000,00	25.340.000,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.02.2.01 Penyelesaian, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	ORMAS,PAS KIB,BL NGRA Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	2.330.044.006,00	3.651.917.059,00	4.199.704.618,00	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	1.303.923.677,00	1.372.437.130,00	1.578.302.700,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	6.570.200,00	11.500.000,00	13.225.000,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	14.322.100,00	60.780.145,00	69.897.167,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	13.158.650,00	18.568.590,00	21.353.879,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	172.712.000,00	310.500.000,00	357.075.000,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	13.624.700,00	40.275.300,00	46.316.595,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	14.290.640,00	21.035.800,00	24.191.170,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	10.680.000,00	14.616.500,00	16.808.975,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TKS 13 orang/Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	161.482.000,00	0,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BBM&PAJAK 2 Unit	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	24.000.000,00	29.888.500,00	34.371.775,00	
	8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan													
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	32 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	213.834.284,00	0,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik													
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	MONEV PARPOL 1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	3.600.000,00	8.165.000,00	9.389.750,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN													
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	MONEV ORMAS 1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	4.200.000,00	5.807.385,00	6.678.493,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	KOMINDA 1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	54.800.350,00	105.885.503,00	121.768.328,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	TIM TERPADU 50 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	75.626.400,00	136.935.503,00	157.475.828,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	PUSKOMIN 5 Orang	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	41.295.300,00	51.243.195,00	82.551.049,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	MONEV UNJUK RASA 1 Laporan	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	6.099.800,00	11.500.000,00	13.225.000,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	FORKOPIM DA 30 ORG/1 Dokumen	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	76.185.500,00	67.157.125,00	77.230.694,00	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	325.780.723.208,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	325.780.723.208,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	55.525.704.656,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	40.478.122.250,00	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	250.000.000,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.200.000.000,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	480.000.000,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	48.906.300,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	258.995.100,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	33.136.518.000,00	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.500.000,00	
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	142.049.100,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	763.246.900,00	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	173.683.600,00	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.223.250,00	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.280.000.000,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.400.000.000,00	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	235.000.000,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.591.497.556,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	120.000.000,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	340.000.000,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	133.460.406,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	315.401.900,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	32.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.162.452.000,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	33.000.000,00	
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40.127.050,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	275.200.000,00	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	93.539.600,00	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	41.316.600,00	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.005.000.000,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.344.557.300,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	200.000.000,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	156.853.100,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.186.640.000,00	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	37.075.800,00	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	128.000.000,00	
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.460.400,00	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.000.000,00	
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	26.528.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.111.527.550,00	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	41.326.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.524.990.000,00	
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	24.015.300,00	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.950.000,00	
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	480.000.000,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	21.246.150,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	270.255.018.552,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.487.500,00	
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.487.500,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	269.267.196.018,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	269.242.293.468,00	
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24.902.550,00	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.575.900,00	
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24.575.900,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	633.794.150,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.588.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.756.500,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.655.300,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.714.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.125.350,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.384.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.571.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.681.584,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.999.584,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.182.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.283.400,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.747.400,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.536.000,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	186.822.395.624,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	130.510.318.526,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	63.884.816.202,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.699.150.701,00	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.675.000.000,00	
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	530.949.000,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	176.493.000,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.071.867.501,00	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	244.841.200,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.077.295.701,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.413.935.800,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	907.500.000,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.500.000,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	245.461.200,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	938.849.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	51.300.000,00	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.500.000,00	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100.500.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	524.267.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	979.289.950,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	45.996.800,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.738.894.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	314.801.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	291.314.000,00	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	362.680.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	608.500.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	188.100.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.195.261.101,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.100.000.000,00	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	113.345.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.228.010.400,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.600.691.900,00	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	24.000.000,00	
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	22.500.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.500.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	15.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	323.199.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	45.200.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	361.850.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	248.700.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	854.850.000,00	
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	158.299.550,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	108.369.800,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	108.369.800,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.074.503.000,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.074.503.000,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.074.503.000,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	342.438.000,00	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	88.055.000,00	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	88.055.000,00	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	254.383.000,00	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	254.383.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	232.047.650,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.295.650,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	35.295.650,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.752.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	196.752.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.976.513.674,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	249.816.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	249.816.300,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.599.410.702,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.599.410.702,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.224.000,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.578.000,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.000.000,00	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000,00	
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.000.000,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.646.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.372.672,00	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.419.000,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.953.672,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.690.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.690.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	56.312.077.098,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	16.462.540.428,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.576.932.368,00	
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	913.390.000,00	
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.063.088.969,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.836.138.500,00	
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	500.000.000,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.223.580.000,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.040.734.899,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.885.608.060,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7.885.608.060,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.849.536.670,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.965.871.238,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.965.871.238,00	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000,00	
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	662.870.200,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	161.496.200,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.001.000,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.440.000,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.933.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.979.632,00	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	714.979.632,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.815.600,00	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	270.815.600,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	18.000.000.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	18.000.000.000,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	47.377.090.389,00	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	46.908.261.789,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.053.710.500,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	450.000.000,00	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	603.710.500,00	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000,00	
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	203.710.500,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	832.294.992,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	832.294.992,00	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	162.294.992,00	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	670.000.000,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	15.054.532.750,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	15.054.532.750,00	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	970.000.000,00	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13.000.000.000,00	
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	750.000.000,00	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	334.532.750,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	23.262.447.900,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	23.262.447.900,00	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.143.000.000,00	
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	850.000.000,00	
1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	216.752.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	17.488.695.000,00	
1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	214.000.000,00	
1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	550.000.000,00	
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	2.800.000.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	463.530.600,00	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	463.530.600,00	
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	463.530.600,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.241.745.047,00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.000.050,00	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.206.250,00	
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	31.925.000,00	
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.179.200,00	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.709.600,00	
1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.980.000,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.482.495.583,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.482.495.583,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.666.750,00	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.399.800,00	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.017.000,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.226.000,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.041.950,00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.982.000,00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.000.000,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.994.914,00	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.003.000,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	286.995.964,00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	378.995.950,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.587.750,00	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.470.000,00	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.280.000,00	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	215.977.750,00	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.860.000,00	
1.04.2.15.1.03.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	468.828.600,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	135.941.200,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	135.941.200,00	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	135.941.200,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	319.938.800,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	319.938.800,00	
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	319.938.800,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.039.816.661,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.684.425.761,00	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.948.600,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.917.869.961,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	140.000.000,00	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	140.000.000,00	
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	140.000.000,00	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	651.001.900,00	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	651.001.900,00	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	451.001.900,00	
1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	200.000.000,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.039.816.661,00	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.684.425.761,00	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.671.477.161,00	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.156.300,00	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.116.500,00	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.140.000,00	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	11.695.800,00	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.204.000,00	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	649.981.000,00	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.513.000,00	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.180.000,00	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	571.288.000,00	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.253.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236.173.600,00	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.080.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.460.814.369,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4.104.802.283,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	310.364.800,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	228.046.800,00	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	66.980.000,00	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	63.566.800,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	45.000.000,00	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	52.500.000,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	82.318.000,00	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.628.000,00	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	51.690.000,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.571.135.100,00	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.571.135.100,00	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.571.135.100,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.223.302.383,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.971.800.383,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.971.800.383,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.106.000,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.100.000,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.006.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.956.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.956.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.440.000,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.440.000,00	
1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.356.012.086,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.152.764.400,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.152.764.400,00	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	22.500.000,00	
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	46.514.400,00	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.083.750.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.203.247.686,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.568.794.436,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.568.794.436,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000,00	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55.000.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	497.276.750,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.509.100,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.728.300,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.939.350,00	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.100.000,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.747.000,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.200.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.547.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.429.500,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.429.500,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.819.779.188,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	4.819.779.188,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.146.355.276,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.146.355.276,00	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	542.855.376,00	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.603.499.900,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100.188.200,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.188.200,00	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	188.200,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	84.277.650,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	84.277.650,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	84.277.650,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.488.958.062,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.982.864.062,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.982.864.062,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.094.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.094.000,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.000.000,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	287.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.391.882.098,00	
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN	2.391.882.098,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	316.890.000,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	316.890.000,00	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	316.890.000,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	60.224.600,00	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	60.224.600,00	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	60.224.600,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	21.186.600,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.186.600,00	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	21.186.600,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.993.580.898,00	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.553.150,00	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.553.150,00	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.590.728.870,00	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.586.038.970,00	
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.689.900,00	
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.444.900,00	
2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.444.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.080.000,00	
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.080.000,00	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.681.350,00	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.286.900,00	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.250.300,00	
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.089.100,00	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.720.000,00	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.970.050,00	
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000,00	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.365.000,00	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.236.500,00	
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.236.500,00	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.034.128,00	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.310.000,00	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.724.128,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.822.000,00	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.632.000,00	
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.190.000,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	407.084.250,00	
2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	407.084.250,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	190.035.200,00	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.017.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	20.017.600,00	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.017.600,00	
2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.017.600,00	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	217.049.050,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15.349.050,00	
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.349.050,00	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	201.700.000,00	
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	201.700.000,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	80.601.000,00	
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	80.601.000,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	50.001.000,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	50.001.000,00	
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.001.000,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	30.600.000,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	30.600.000,00	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	30.600.000,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6.755.870.308,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.755.870.308,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	239.866.450,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	239.866.450,00	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	239.866.450,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	148.731.900,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	148.731.900,00	
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	48.828.900,00	
2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	99.903.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.288.171.000,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	4.288.171.000,00	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	134.991.000,00	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.317.600.000,00	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.835.580.000,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.079.100.958,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.548.333.128,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.548.333.128,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.929.250,00	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.648.900,00	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.175.500,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.855.000,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.963.850,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.286.000,00	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.698.500,00	
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.698.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.213.680,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.674.680,00	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.539.000,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.926.400,00	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.076.400,00	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.850.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.651.890.386,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.651.890.386,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	7.200.000,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7.200.000,00	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7.200.000,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	7.200.000,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	7.200.000,00	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	7.200.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	161.060.000,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	20.633.000,00	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20.633.000,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	140.427.000,00	
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	140.427.000,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.476.430.386,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.458.760.436,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.458.760.436,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.188.850,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.680.200,00	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.930.000,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.971.650,00	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.607.000,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458.584.400,00	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.992.000,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.040.000,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	382.552.400,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.896.700,00	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.896.700,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.798.692.363,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	3.798.692.363,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	276.677.000,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	276.677.000,00	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	44.162.500,00	
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	82.120.000,00	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	40.060.700,00	
2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	110.333.800,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	746.860.100,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	746.860.100,00	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	746.860.100,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.775.155.263,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.389.300,00	
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.389.300,00	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.096.166.863,00	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.085.606.863,00	
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.560.000,00	
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.027.400,00	
2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.027.400,00	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.861.100,00	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.532.300,00	
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.255.300,00	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.080.000,00	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.500,00	
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.008.000,00	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.985.000,00	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.540.600,00	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.021.000,00	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.719.600,00	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	313.800.000,00	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.170.000,00	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.170.000,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.616.730.948,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.616.730.948,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	214.800.000,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	214.800.000,00	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	214.800.000,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.469.039.000,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	257.300.000,00	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	225.000.000,00	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	32.300.000,00	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	228.000.000,00	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	228.000.000,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	983.739.000,00	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	934.252.000,00	
2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	25.187.000,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.178.000.000,00	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.178.000.000,00	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.178.000.000,00	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.754.891.948,00	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.182.500,00	
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.182.500,00	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.753.764.208,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.753.764.208,00	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.631.000,00	
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.817.100,00	
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.458.900,00	
2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.003.000,00	
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.005.000,00	
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.347.000,00	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.758.314.240,00	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.602.240,00	
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.722.712.000,00	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.820.000,00	
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.180.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.051.047.836,00	
1.04.2.15.1.03.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3.051.047.836,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.051.047.836,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.021.047.836,00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.021.047.836,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.144.587.005,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.144.587.005,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	190.038.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	190.038.000,00	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	25.000.000,00	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	120.460.000,00	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	4.498.000,00	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	40.080.000,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	122.358.400,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	122.358.400,00	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	8.077.100,00	
2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	114.281.300,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.832.190.605,00	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.278.900,00	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.278.900,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.078.740.905,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.076.439.605,00	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.301.300,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.778.800,00	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.123.700,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.537.800,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.696.000,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.603.300,00	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.999.000,00	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.819.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.162.000,00	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600.000,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.168.000,00	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	297.394.000,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.230.000,00	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.180.000,00	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.050.000,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.364.658.100,00	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.364.658.100,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100.000.000,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000,00	
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100.000.000,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	85.000.000,00	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	85.000.000,00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	39.999.950,00	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.999.950,00	
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	39.999.950,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	49.999.950,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	49.999.950,00	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	49.999.950,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.089.658.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.651.736.946,00	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.651.736.946,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.941.150,00	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.657.400,00	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.100.000,00	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.260.750,00	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.923.000,00	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.080.104,00	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.449.104,00	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	256.331.000,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.900.000,00	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.020.000,00	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.880.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.203.340.242,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.203.340.242,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	50.000.000,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	29.975.000,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.975.000,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	29.975.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	90.000.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	90.000.000,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	90.000.000,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	79.999.900,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	79.999.900,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	79.999.900,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.953.365.342,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.411.858.504,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.411.858.504,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.476.750,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.503.900,00	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.726.100,00	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.085.600,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.261.000,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.020.150,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.880.000,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.626.088,00	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.954.248,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.671.840,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.404.000,00	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.734.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.670.000,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.727.341.361,00	
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3.397.297.355,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	925.000.000,00	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	925.000.000,00	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	925.000.000,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	749.999.704,00	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	257.642.304,00	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	257.642.304,00	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	408.245.600,00	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	408.245.600,00	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	84.111.800,00	
2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	84.111.800,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.722.297.651,00	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.513.473.651,00	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.513.473.651,00	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.824.000,00	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208.824.000,00	
8.01.2.19.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.330.044.006,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.330.044.006,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.330.044.006,00	
2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	2.330.044.006,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	13.322.200,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.322.200,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	13.322.200,00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	13.322.200,00	
2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	13.322.200,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	3.423.800,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.423.800,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.423.800,00	
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	3.423.800,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	562.191.150,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	562.191.150,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	504.608.100,00	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	93.223.400,00	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	78.223.400,00	
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	15.000.000,00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	331.384.700,00	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	146.928.500,00	
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	184.456.200,00	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	80.000.000,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	57.583.050,00	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	57.583.050,00	
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	57.583.050,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.340.959.373,00	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.340.959.373,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	408.445.000,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.046.000,00	
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	68.046.000,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	340.399.000,00	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	97.043.000,00	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	133.856.000,00	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	109.500.000,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.932.514.373,00	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.331.351.443,00	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.331.351.443,00	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.563.418,00	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.809.400,00	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.134.000,00	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.703.168,00	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.750.000,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.737.850,00	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000,00	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.429.000,00	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.618.112,00	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.992.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.460.112,00	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.166.000,00	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.981.400,00	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.981.400,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	57.988.800,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	57.988.800,00	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	57.988.800,00	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	41.671.000,00	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	6.417.800,00	
2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	9.900.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.441.323.261,00	
3.25.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3.441.323.261,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	130.000.000,00	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	130.000.000,00	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	21.000.000,00	
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	109.000.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	157.895.780,00	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	139.745.780,00	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	139.745.780,00	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	18.150.000,00	
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	18.150.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	92.510.887,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	92.510.887,00	
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	92.510.887,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.060.916.594,00	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.170.100,00	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.931.200,00	
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.238.900,00	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.610.512.244,00	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.605.421.094,00	
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.091.150,00	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.279.150,00	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.023.200,00	
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.034.000,00	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.909.950,00	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.312.000,00	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.465.100,00	
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.340.000,00	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.126.800,00	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.998.300,00	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.490.000,00	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.550.000,00	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.940.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	50.000.000,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	50.000.000,00	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6.492.651.014,00	
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	6.229.474.414,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	557.539.750,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	557.539.750,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	557.539.750,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	150.000.000,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	150.000.000,00	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	150.000.000,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	30.000.000,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	30.000.000,00	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	30.000.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.491.934.664,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.499.691.544,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.499.691.544,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.221.000,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.361.000,00	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.500.000,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.512.000,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.848.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.391.120,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.806.400,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	571.584.720,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.631.000,00	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.631.000,00	
3.25.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	263.176.600,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	89.339.200,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	75.539.200,00	
3.27.02.2.01.0017	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	75.539.200,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	13.800.000,00	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	13.800.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	96.689.300,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	96.689.300,00	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	24.439.300,00	
3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	72.250.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	77.148.100,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	27.150.000,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.150.000,00	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	49.998.100,00	
3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	49.998.100,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.228.671.800,00	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.228.671.800,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	406.971.850,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	406.971.850,00	
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	406.971.850,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	165.999.950,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	165.999.950,00	
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	25.999.950,00	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	140.000.000,00	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	135.800.000,00	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.800.000,00	
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	135.800.000,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	519.900.000,00	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	519.900.000,00	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	19.900.000,00	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	31.516.609.242,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	31.516.609.242,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.777.324.950,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	2.402.055.800,00	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	56.137.400,00	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.550.229.800,00	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	795.688.600,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.168.621.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.189.277.550,00	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.214.782.850,00	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	764.560.800,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	639.471.950,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	115.580.150,00	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	400.323.200,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	123.568.600,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	567.176.000,00	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	567.176.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.134.993.100,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	397.985.800,00	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	227.817.000,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	148.713.100,00	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	21.455.700,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	85.393.900,00	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	6.237.600,00	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15.806.700,00	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	63.349.600,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	651.613.400,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	376.098.100,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	275.515.300,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.604.291.192,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.023.800,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.120.500,00	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33.241.700,00	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.694.300,00	
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.967.300,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.723.563.472,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.631.309.972,00	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.518.600,00	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	37.802.700,00	
4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14.932.200,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.694.761.200,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.517.100,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.084.100,00	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.749.000,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	435.460.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	276.236.000,00	
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000,00	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	251.100.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	454.615.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.395.810.200,00	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.750.000.000,00	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.085.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	560.810.200,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.020.444.712,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.500.000,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.061.800.712,00	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.500.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.701.644.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.304.834.000,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	768.142.400,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.179.400,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	226.512.200,00	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.000.000,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	673.260.508,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	177.260.508,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	96.000.000,00	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.283.913.600,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	570.084.600,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	392.829.000,00	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	321.000.000,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	213.708.500,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	57.255.900,00	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	123.911.200,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	32.541.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	124.971.200,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	88.296.100,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	36.675.100,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	38.170.348.042,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN	38.170.348.042,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.122.747.050,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	283.843.900,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	95.034.500,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	95.183.000,00	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	93.626.400,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	901.398.150,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	900.000.000,00	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.398.150,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.937.505.000,00	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	50.625.000,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	4.886.880.000,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.047.600.992,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.538.447.034,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.538.447.034,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.709.620.250,00	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	114.900.000,00	
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.444.720.250,00	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.798.134.350,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.577.600,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.893.800,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	700.550.000,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	210.369.950,00	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120.000.000,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.501.743.000,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.161.400,00	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.161.400,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.154.611.212,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.562.712,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.053.048.500,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939.405.200,00	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	845.785.200,00	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.620.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.476.918.546,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.236.918.546,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	240.000.000,00	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	5.347.303.000,00	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5.100.278.000,00	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	247.025.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01	PERENCANAAN	5.824.954.516,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	5.824.954.516,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.107.344.100,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	349.240.400,00	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	13.297.050,00	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	141.737.700,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	194.205.650,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	82.401.900,00	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	82.401.900,00	
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	675.701.800,00	
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	675.701.800,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	420.717.300,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	165.419.900,00	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.663.050,00	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	26.636.000,00	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	17.545.500,00	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.447.850,00	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	28.668.100,00	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	40.459.400,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	124.449.400,00	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.441.450,00	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.750.400,00	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	19.587.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26.001.900,00	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.497.500,00	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	17.170.450,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	130.848.000,00	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.252.300,00	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	28.462.600,00	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	15.796.300,00	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.952.900,00	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	27.703.800,00	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	26.680.100,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.296.893.116,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.162.400,00	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.162.400,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.344.630.554,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.344.630.554,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	559.657.450,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.930.500,00	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.970.000,00	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.697.400,00	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.001.550,00	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.250.000,00	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	439.808.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.000.000,00	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.000.000,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.864.212,00	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.294.100,00	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.570.112,00	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	783.000.000,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.578.500,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	283.521.000,00	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.002.500,00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.055.000,00	
5.02	KEUANGAN	293.625.237.756,00	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	293.625.237.756,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	257.735.090.895,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	650.968.950,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	144.285.300,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	86.160.250,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	220.173.400,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	200.350.000,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	200.045.900,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	101.770.300,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	15.450.300,00	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24.925.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	57.899.700,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	243.272.000,00	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24.666.250,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	65.472.950,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	153.132.800,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	256.640.804.045,00	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	251.212.066.500,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000,00	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.428.737.545,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	316.584.600,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	316.584.600,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	25.326.000,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	26.679.000,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	145.860.400,00	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	54.112.000,00	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	64.607.200,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	542.272.500,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	542.272.500,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	37.602.900,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	223.510.450,00	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	41.250.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	176.946.500,00	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	52.997.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	9.964.850,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.031.289.761,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.627.200,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.560.300,00	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.066.900,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.209.853.529,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.198.578.029,00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.275.500,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	604.072.600,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.677.200,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.285.500,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.977.000,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.251.900,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.881.000,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.400.000.000,00	
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.400.000.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.673.336.432,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.336.432,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.388.000.000,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.400.000,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.250.000,00	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.150.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.03	KEPEGAWAIAN	4.054.395.711,00	
5.03.5.04.0.00.03.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.054.395.711,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	956.880.300,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	220.435.150,00	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	54.220.150,00	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	15.000,00	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	166.200.000,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	294.895.450,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	35.008.000,00	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	42.647.450,00	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	217.240.000,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	347.913.400,00	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	165.500.000,00	
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	182.413.400,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	93.636.300,00	
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	28.971.000,00	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	14.610.800,00	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	50.054.500,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.097.515.411,00	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.405.600,00	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.405.600,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.506.175.811,00	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.482.800.161,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.671.000,00	
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.704.650,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.792.000,00	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.984.600,00	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.414.700,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.075.000,00	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.015.700,00	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.302.000,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.522.000,00	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.997.000,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.720.000,00	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.805.000,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.620.000,00	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.590.000,00	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.030.000,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	342.533.550,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	342.533.550,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	342.533.550,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	342.533.550,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	123.682.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	123.682.400,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	24.934.100,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	24.934.100,00	
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	24.934.100,00	
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	98.748.300,00	
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	98.748.300,00	
5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	98.748.300,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	8.586.446.017,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS	8.578.698.017,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.994.822.150,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.994.822.150,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.451.031.950,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	893.235.100,00	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	565.348.650,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	85.206.450,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.003.917.700,00	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	776.048.900,00	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	776.048.900,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	227.868.800,00	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	227.868.800,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.579.958.167,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.443.141.557,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.443.141.557,00	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.153.650,00	
6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30.153.650,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	550.863.200,00	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.791.200,00	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.018.200,00	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.146.800,00	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	232.719.000,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	129.188.000,00	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.299.760,00	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.300.000,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.999.760,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.500.000,00	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.500.000,00	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.500.000,00	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.500.000,00	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN SOSOPAN	7.748.000,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.180.000,00	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.748.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	28.650.938.993,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BARUMUN	2.380.698.986,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	127.713.750,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.627.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.627.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	120.086.750,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120.086.750,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	686.820.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.620.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.620.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	675.200.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	675.200.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.566.165.236,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.638.400,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.638.400,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.400.847.636,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.400.847.636,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.020.200,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.320.200,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.500.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.209.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.209.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.450.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.450.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN LUBUK BARUMUN	2.103.685.759,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.801.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	77.801.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	77.801.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.025.884.759,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.523.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.523.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.822.545.759,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.822.545.759,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.479.200,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.479.200,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.336.800,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.336.800,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN HURISTAK	1.383.601.825,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95.647.500,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95.647.500,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95.647.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.951.200,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	29.951.200,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.951.200,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.258.003.125,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.073.576.025,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.073.576.025,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.790.500,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.850.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.240.500,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.700.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.636.600,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.636.600,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BARUMUN SELATAN	1.040.546.493,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	64.476.700,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	64.476.700,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	64.476.700,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.140.350,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.140.350,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.140.350,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	955.929.443,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	752.406.643,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	752.406.643,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.200.000,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.200.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.625.800,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.773.700,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.570.600,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.281.500,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	5.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.500.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.197.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.005.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.052.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.140.000,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM	1.999.027.969,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.796.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.796.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.796.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	96.431.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	96.431.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.822.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	68.609.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.899.800.969,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	
7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.719.004.269,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.719.004.269,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.367.200,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.385.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.874.700,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.107.500,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.898.000,00	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.198.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.700.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.531.500,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	325.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.180.500,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.026.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN	1.614.031.233,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.254.050,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	77.254.050,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	77.254.050,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61.350.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	61.350.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	61.350.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.600.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.600.000,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.600.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.469.827.183,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.274.262.903,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.274.262.903,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.200.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.200.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.364.280,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.540.280,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.824.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SOSA	2.112.407.982,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.090.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.140.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.140.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	78.950.000,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	78.950.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.012.317.982,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.080.000,00	
7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.080.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.756.252.032,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.756.252.032,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.315.550,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.425.600,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.489.950,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.050.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.350.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.220.400,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.254.400,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.966.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.450.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.450.000,00	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN BARUMUN TENGAH	2.008.707.097,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.500.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.500.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	119.443.700,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	119.443.700,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.920.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	89.523.700,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.862.763.397,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.735.709.609,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.735.709.609,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.231.200,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.225.200,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.356.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.650.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.822.588,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.796.588,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.026.000,00	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN	1.523.501.427,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.915.600,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.915.600,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.915.600,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.632.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.632.500,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.632.500,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	72.083.400,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72.083.400,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72.083.400,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.419.869.927,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.805.700,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.805.700,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.242.414.209,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.242.414.209,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.336.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.486.400,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.100.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.750.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.613.118,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.415.218,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.297.900,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.700.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.700.500,00	
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN ULU BARUMUN	1.447.929.903,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66.792.600,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	58.865.600,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	58.865.600,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.927.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.927.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.426.050,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.426.050,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.274.300,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.151.750,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.348.711.253,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.140.448.301,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.140.448.301,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.193.700,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.695.700,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.599.100,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.298.900,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.600.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.069.252,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.001.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.003.752,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.582.500,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.482.000,00	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN SOSOPAN	1.477.990.657,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.250,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.250,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.000.250,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.075.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.075.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.075.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.162.700,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.162.700,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.162.700,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.442.500.707,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.214.350,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.214.350,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.171.835.257,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.171.835.257,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.711.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.130.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.930.900,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.250.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.650.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.180.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.520.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.912.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.100.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.100.000,00	
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	105.459.700,00	
7.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	105.459.700,00	
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BARUMUN BARU	1.375.305.356,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.631.100,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.631.100,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.631.100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.253.800,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.253.800,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.253.800,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	166.072.950,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	166.072.950,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.073.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	149.999.950,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.085.600,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.085.600,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28.085.600,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.141.261.906,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.600.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.600.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	919.866.893,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	919.866.893,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.662.200,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	968.800,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.135.300,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	970.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	5.588.100,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.774.687,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	5.850.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.924.687,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.908.126,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.903.026,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.705.100,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.450.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000,00	
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN BARUMUN BARAT	1.315.535.940,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	113.861.950,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	113.861.950,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	113.861.950,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.025.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.025.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.025.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.472.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.472.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.472.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.181.176.990,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.157.400,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.157.400,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	982.826.090,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	982.826.090,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.832.700,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.494.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.125.600,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.213.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.432.900,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	11.432.900,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.067.900,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.998.400,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.394.000,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.965.500,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.710.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.860.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.860.000,00	
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN SOSA JULU	1.418.975.537,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	70.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.000.000,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.318.975.537,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.067.265.537,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.067.265.537,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.864.600,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.494.600,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.870.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.500.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.821.800,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	18.821.800,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.242.400,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.692.400,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.840.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.710.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.781.200,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.781.200,00	
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN ULU SOSA	1.339.840.208,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.368.650,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.421.550,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.421.550,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	37.947.100,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	37.947.100,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.583.600,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.583.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22.858.200,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	77.725.400,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.190.887.958,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	808.900,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	808.900,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.056.700.458,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.056.700.458,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.550.000,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.550.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.546.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.400,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.248.100,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.253.500,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.544.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.500.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.827.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	9.332.800,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.494.200,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.961.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	780.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.216.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.965.100,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.494.500,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.494.500,00	
7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN SOSA TIMUR	1.664.048.588,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	126.961.750,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	126.961.750,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	126.961.750,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.500.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.500.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.500.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.516.586.838,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.375.430.838,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.375.430.838,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.780.200,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.405.200,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.400.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.775.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.800.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.375.800,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.007.800,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.368.000,00	
7.01.7.01.0.00.06.0000	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI	2.445.104.033,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.700.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.700.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.700.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	97.494.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	97.494.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.809.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	87.685.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.318.910.033,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.117.508.253,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.117.508.253,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.154.300,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.948.500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.205.800,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.247.480,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.480,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.551.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.596.000,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.210.405.601,00	
8.01.2.19.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.210.405.601,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	213.834.284,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	213.834.284,00	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	213.834.284,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.600.000,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3.600.000,00	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.600.000,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.200.000,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.200.000,00	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.200.000,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	254.007.350,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	254.007.350,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	54.800.350,00	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	75.626.400,00	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	41.295.300,00	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6.099.800,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	76.185.500,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.734.763.967,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.303.923.677,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.303.923.677,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.762.950,00	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.570.200,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.322.100,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.158.650,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.712.000,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.077.340,00	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.624.700,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.290.640,00	
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.680.000,00	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.482.000,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.000.000,00	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.000.000,00	

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	477.311.364.175,00
	Belanja Barang dan Jasa	241.592.224.534,00
	Belanja Bunga	0,00
	Belanja Subsidi	200.000.000,00
	Belanja Hibah	12.475.768.606,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.788.760.406,00
	Belanja Imbalan	0,00
2	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.284.397.716,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.530.000.000,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.458.695.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.886.467.380,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	1.200.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	
	Belanja Bagi Hasil	4.428.737.545,00
	Belanja Bantuan Keuangan	248.512.066.500,00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.000.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.000.000.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	12.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
	Pembiayaan Netto	12.000.000.000,00	